



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggung jawaban organisasi setiap Instansi Pemerintah mulai dari tingkat Eselon II ke atas secara berjenjang yang memiliki dan mengelola anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Dalam penyajian Akuntabilitas Kinerja pada Bab ini, antara lain akan menguraikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana target kinerja yang diperjanjikan, tingkat Capaian Kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja yang digunakan, sehingga benar-benar dapat dilihat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam wujud kinerja selama kurun waktu tahun 2012.

Selanjutnya dalam kerangka uraian Akuntabilitas Kinerja, pada Bab ini seyogianya diawali dengan uraian tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan seterusnya. Kemudian juga akan diperlihatkan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja

utama (IKU) yang dirumuskan dengan tetap mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, maka dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, bahwa dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dengan pelaksanaan program/ kegiatan utama dan pokok yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang secara sistematis didasarkan pada data kinerja dari masing-masing SKPD, Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2013, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013.

Kemudian pada akhir tahun 2013, data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikonfirmasi kembali kepada Tim Penyusun LAKIP atau kepada PNS yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan LAKIP di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, guna memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, untuk selanjutnya disajikan dalam LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ini.

2. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2013. Kemudian Pengukuran Kinerja tersebut difokuskan terhadap **Sasaran Strategis** yang dirumuskan dan diformulasikan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, yaitu diformulasikan ke dalam 4 (empat) Sasaran Strategis.

Adapun sasaran strategis dimaksud antara lain terdiri-dari :

1. Meningkatnya Pembangunan di Sumatera Utara dengan Prinsip Dasar Pembangunan dalam Kerangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka terwujudnya Rakyat Tidak Bodoh, Tidak Lapar, Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
3. Meningkatnya infrastruktur Sosial dan Ekonomi
4. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan

Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang, dengan melakukan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dan selanjutnya dikalikan 100 % untuk memperoleh Tingkat Capaian Kinerja.

Maka dengan demikian untuk pengukuran kinerja tersebut, digunakan rumus/formulasi sebagaimana tertera dibawah ini, yaitu :

$$CK = \frac{RK}{TK} \times 100 \%$$

Keterangan :

CK = Capaian Kinerja
RK = Realisasi Kinerja
Tk = Target Kinerja

3. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja, akan memperlihatkan tingkat kegagalan dan keberhasilan atas Pencapaian terhadap 4 (empat) **Sasaran Strategis** Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2013, sehingga menjadi tolok ukur untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Rincian tentang hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 terhadap pencapaian Sasaran Strategis tersebut adalah sebagaimana diuraikan sebagaimana terlampir pada Lampiran LAKIP Tahun 2013 ini.

B. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Pada Sub bab ini, akan diuraikan pencapaian dari masing-masing sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tingkat pencapaian kinerja dari

masing-masing sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikaator Kinerja yang digunakan beserta target kinerja yang diperjanjikan namun terlebih dahulu dilakukan pengkategorian/ pemeringkatan Capaian Kinerja, yaitu dengan menggunakan Metode **SKALA LINKERT**, yaitu :

Tabel 26
Pengkategorian/ Pemeringkatan
Tingkat Capaian Kinerja

No.	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI
(1)	(2)	(3)
1.	0 - 30 %	TIDAK BAIK
2.	> 30 - 50 %	KURANG BAIK
3.	> 50 - 65 %	CUKUP BAIK
4.	> 65 - 75 %	BAIK
5.	> 75 - 85 %	SANGAT BAIK
6.	> 85 - 100%	MEMUASKAN

Oleh sebab itu, agar uraian evaluasi dan analisis ini lebih sistematis maka akan dijelaskan per Sasaran Strategis dan secara umum dapat dikemukakan bahwa dilihat dari Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur Pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana target kinerja yang diperjanjikan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 dapat terlaksana dengan baik.



Sasaran Strategis-1 :

Meningkatnya Pembangunan di Sumatera Utara dengan Prinsip Dasar Pembangunan dalam Kerangka Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam rangka terwujudnya Rakyat Tidak Bodoh, Tidak Lapar, Tidak Sakit dan Rakyat Punya Masa Depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tingkat Pencapaian atau keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab terdahulu. Adapaun tingkat pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis ini dapat dijelaskan pada Tabel di berikut ini :

Tabel 27. Capaian Sasaran Strategis 1

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat, yang dipengaruhi oleh indikator berikut :			
	a. Meningkatnya APK SD + MI	112,59 %	106,26 %	94,37
	c. Meningkatnya APM SD + MI	92,66 %	93,26 %	100,64
	d. Meningkatnya APK SMP+ MTs	105,01 %	88,55 %	84,32
	e. Meningkatnya APM SMP+ MTs	97,52 %	70,51 %	72,30
	f. Meningkatnya APK SMA+ MA + SMK	89,99 %	80,58 %	89,54
	g. APM SMA	74,57 %	60,02 %	80,48
	h. Persentase guru TK/SLB berkualifikasi S1/ D4	20,11 %	17 %	84,53
	i. Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/ D4	75,29 %	54,25 %	2,86

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	j. Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/ D4	82,12 %	81 %	98,63
	k. Persentase guru SMA berkualifikasi S1/ D4	93,31 %	92 %	98,59
	l. APK perguruan tinggi usia 19-23 tahun	29,10 %	25 %	85,91
	m. Jumlah perpustakaan dan kearsipan yang dibina dilingkungan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	105 unit	5 unit	4,76
	n. Peningkatan minat baca masyarakat di perkotaan maupun pedesaan	10 %	10 %	100
	o. Persentase penambahan Pos Perpustakaan keliling dan perpustakaan layanan terpadu perpustakaan sekolah	47,42 %	47,42 %	100
	p. Persentase penambahan buku	10 %	10 %	100
	q. Frekwensi pelaksanaan penyuluhan dan promosi terhadap minat baca kepada masyarakat di perkotaan dan pedesaan	12 kali	8 kali	66,87
2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang dipengaruhi oleh indikator berikut :			
	a. Menurunnya Angka Kematian Bayi per Angka Kelahiran Hidup (KLH)	23/ 1000	23/ 1000	100
	b. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	275/100	275/100	100
	c. Persentase Prevalensi Gizi Buruk dan berkurang	20 %	22 %	110
	d. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) 71,2 Tahun	72 Tahun	71,6 Tahun	99,44
3	Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat, dipengaruhi oleh indikator berikut :			
	a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial	96,78 %	96,78 %	100
	b. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah	21,93 %	21,93 %	100
	c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial dalam Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Utara Masalah Kesejahteraan	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	100

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
4	Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan, yang dipengaruhi oleh indikator berikut :			
	a. <i>Persentase Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Per Tahun</i>	25 %	25 %	100
	b. <i>Persentase Pembangunan Sarana Pengairan Pertanian dan Irigasi Desa, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Tata Air Mikro (TAM)</i>	20 %	20 %	100
	c. <i>Persentase Peningkatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian</i>	50 %	50 %	100
	d. <i>Persentase Tingkat Pembangunan Jalan Usaha Tani dan lain-lain</i>	20 %	20 %	100
	e. <i>Persentase Penyerapan Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya</i>	40 %	40 %	100
	f. <i>Persentase Produk Pertanian Yang Memiliki Daya Saing Ekspor dan Berkualitas</i>	30 %	30 %	100
	g. <i>Frekuensi Penyuluhan Kepada Petani dan Kelompok Tani</i>	10 kali	10 kali	100
	h. <i>Luas jaringan irigasi yang terpelihara melalui kegiatan O&P (Operasi dan Pemeliharaan) irigasi.</i>	73.318 ha	73.318 ha	100
	i. <i>Luas jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi (Luas jaringan irigasi yang diperbaiki / ditingkatkan</i>	5.040 ha	5.040 ha	100
	j. <i>Luas jaringan rawa yang terpelihara melalui kegiatan O&P (Operasi dan Pemeliharaan) rawa</i>	55.232 ha	55.232 ha	100
	k. <i>Luas jaringan rawa yang diperbaiki / ditingkatkan</i>	1.320 ha	1.320 ha	100
	l. <i>Peningkatan kapasitas dan fungsi penyediaan air baku melalui rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan waduk / embung / situ-situ.</i>	100 %	100 %	100
	m. <i>Persentase tingkat dukungan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan sumber daya air.</i>	100 %	100 %	100
	n. <i>Frekwensi pelaksanaan rapat / pertemuan dalam rangka pengelolaan sumber daya air dengan instansi terkait</i>	6 kali	6 kali	100
	o. <i>Persentase antisipasi terhadap konflik pemakaian sumber air</i>	100 %	100 %	100

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	p. <i>Persentase tingkat pemeliharaan infrastruktur SDA</i>	100 %	100 %	100
	q. <i>Jumlah infrastruktur pengendali SDA yang berfungsi dengan baik.</i>	42 orang	42 orang	100
	r. <i>Persentase peningkatan jumlah kebutuhan infrastruktur pengendalian daya rusak air per tahun</i>	100 %	100 %	100
	s. <i>Meningkatnya penggunaan benih unggul tanaman dan sarana produksi bermutu</i>	100 %	100 %	100
	t. <i>Meningkatnya kegiatan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang berwawasan lingkungan</i>	100 %	100 %	100
	u. <i>Meningkatnya pemanfaatan dan penerapan IPTEK dan sarana prasarana dalam pengolahan hasil perkebunan</i>	100 %	100 %	100
	v. <i>Jumlah SDM penyuluh yang berkualitas dan handal</i>	3,082 orang	3,082 orang	100
	w. <i>Persentase bahan materi penyuluhan</i>	100 %	100 %	100
	x. <i>Jumlah sarana dan prasarana yang tersalurkan</i>	21 Unit, 320 Buku	21 Unit, 320 Buku	100
	y. <i>Persentase terbentuknya Poktan, Gapoktan, KTNA, HNSI</i>	0,3 %	0,3 %	100
5	Peningkatan Swasembada pangan, dipengaruhi oleh indikator berikut :			
	1. <i>Persentase peningkatan ketersediaan pangan pokok :</i>	100 %	100 %	100
	1. <i>Beras</i>	2.170.314 Ton	2.170.314 Ton	100
	2. <i>Jagung</i>	1.494.050 Ton	1.494.050 Ton	100
	3. <i>Kedele</i>	13,533 Ton	13,533 Ton	100
	4. <i>Ubikayu (Ton)</i>	1.417.388	1.417.388	100
	5. <i>Kacang Tanah</i>	22,40 Ton	22,40 Ton	100
	6. <i>Cabe Merah</i>	116,50 Ton	116,50 Ton	100
	7. <i>Daging Sapi</i>	16,64 Ton	16,64 Ton	100
	8. <i>Telur</i>	152,01 Ton	152,01 Ton	100
	9. <i>Ikan</i>	143,45 Ton	143,45 Ton	100
	10. <i>Minyak Goreng</i>	2.377.030 Ton	2.377.030 Ton	100
	11. <i>Gula Pasir</i>	75,204 Ton	75,204 Ton	100

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	2. Jumlah Kelembagaan Pangan yang mendukung ketersediaan Cadangan Pangan Masyarakat di setiap Kab/Kota di Sumatera Utara	222 Unit, Kelompok	222 Unit, Kelompok	100
	-Lumbung Pangan	136 Unit	136 Unit	100
	-Gapoktan (Gapoktan)	86 Kelompok	86	100
	3. Persentase stabilitas harga bahan pokok sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Refrensi Daerah	100 %	100 %	100
	- Jagung	1,600 Rp/ Kg	1,600 Rp/	100
	- Beras	5,060 Rp/ Kg	5,060 Rp/	100
6.	Peningkatan populasi dan produksi ternak			
	a. Persentase pertumbuhan populasi sapi potong rata-rata per tahun	2,70 %	2,70 %	100
	b. Persentase pertumbuhan populasi ternak kerbau rata-rata per tahun	0,32 %	0,32 %	100
	c. Persentase pertumbuhan populasi sapi perah rata-rata per tahun	9,69 %	9,69 %	100
	d. Persentase pertumbuhan populasi ternak kambing rata-rata per tahun	4,36 %	4,36 %	100
	e. Persentase pertumbuhan populasi ternak domba rata-rata per tahun	5,54 %	5,54 %	100
	f. Persentase pertumbuhan populasi ternak babi rata-rata per tahun	1,15 %	1,15 %	100
	g. Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam buras rata-rata per tahun	3,25 %	3,25 %	100
	h. Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam ras petelur rata-rata per tahun	2,22 %	2,22 %	100
	i. Persentase pertumbuhan populasi ternak ayam ras pedaging rata-rata per tahun	2,91 %	2,91 %	100
	j. Persentase pertumbuhan populasi ternak itik rata-rata per tahun	3,71 %	3,71 %	100
	k. Persentase pertumbuhan produksi telur rata-rata ton per tahun	4,42 %	4,42 %	100
	l. Persentase pertumbuhan produksi susu rata-rata liter per tahun	15,56 %	15,56 %	100
	m. Persentase pertumbuhan produksi daging rata-rata ton per tahun	4,10 %	4,10 %	100
	n. Persentase peningkatan konsumsi telur rata-rata kg per tahun	4,02 %	4,02 %	100
	o. Persentase peningkatan konsumsi susu rata-rata liter per tahun	4,07 %	4,07 %	100
	p. Persentase peningkatan konsumsi daging rata-rata kg per tahun	4,13 %	4,13 %	100

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
7.	Peningkatan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan peningkatan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan, yang dipengaruhi oleh indikator kinerja berikut			
	a. <i>Persentase peningkatan produksi perikanan.</i>	6,5 %	6,5 %	100
	b. <i>Persentase peningkatan ekspor perikanan</i>	10 %	10 %	100
	c. <i>Persentase penyerapan tenaga kerja</i>	6,5 %	6,5 %	100
8.	Peningkatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan			
	a. <i>Jumlah Industri Kecil Menengah yang produhnya siap dipasarkan dalam dan luar</i>	1 KUB 12 IKM	1 KUB 12 IKM	100
	b. <i>Jumlah Komoditi yang diekspor dari sektor IKM</i>	10 Komoditi	10 Komoditi	100
	c. <i>Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang sudah SNI</i>	23 %	23 %	100
9.	Pembangunan di sektor pariwisata			
	a. <i>Persentase Pembinaan Pengelolaan Usaha Pariwisata pada Kab /Kota di Sumatera Utara</i>	100 %	100 %	100
	b. <i>Persentase Pelatihan dan Standarisasi Sumber Daya Manusia Pariwisata Sumatera</i>	100 %	100 %	100
	c. <i>Persentase Koordinasi Lintas Sektoral</i>	100 %	100 %	100
	d. <i>Persentase Partisipasi Pelaksanaan Event-event Promosi Pariwisata Sumatera Utara baik Dalam maupun Luar Negeri.</i>	100 %	100 %	100
	e. <i>Persentase Masyarakat pada Obyek Wisata Sumatera Utara akan Sadar Wisata/Sapta Pesona.</i>	100 %	100 %	100
	f. <i>Persentase Pagelaran Seni Sastra, Seni Musik, Seni Theater dan Seni Tari.</i>	100 %	100 %	100
10.	Peningkatan pemanfaatan hutan dengan mengutamakan keselamatan lingkungan dan kelestarian hutan			
	a. <i>Tingkat Perlindungan hutan dan konservasi hutan, untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah</i>	5 %	5 %	100
	b. <i>Penghijauan hutan mangrove yang berada di pesisir pantai barat dan pantai timur</i>	45,000 batang	45,000 batang	100

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	<i>c. Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan sasaran utama memfasilitasi pengembalian fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penyediaan bibit jenis tanaman hutan dan MPTS dalam rangka rehabilitasi lahan 	2,500 batang	2,500 batang	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi lahan 	10 jenis	10 jenis	100
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kelompok swadaya masyarakat/pecinta alam yang difasilitasi 	1,100 Orang	1,100 Orang	100
	<i>d. Frekwensi koordinasi pembangunan di bidang kehutanan lintas kabupaten/ kota</i>	13 kali	13 kali	100
	<i>e. Persentase tingkat rehabilitasi dan konservasi atas kerusakan kawasan dan lahan (Pantai Timur, Danau Toba, TNGL)</i>	100 %	100 %	100
	<i>f. Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup</i>	100 %	100 %	100
	<i>g. Jumlah kabupaten/kota yang meraih adipura, Penghargaan Menuju Indonesia Hijau</i>	20 kab/kota	20 kab/kota	100
	<i>h. Frekuensi kegiatan publikasi lingkungan hidup melalui kegiatan lomba pendidikan lingkungan hidup</i>	12 kali	12 kali	100
11	Peningkatan kehidupan beragama dalam harmoni keberagaman umat beragama			
	<i>Persentase kehidupan beragama yang diwujudkan melalui peningkatan keimanan dan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.</i>	100 %	67 %.	67

Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini, sebagaimana pada Tabel 27 di atas dapat dikemukakan bahwa Target Kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah diukur dari masing-masing Indikator Kinerja, dimana dari 11 Indikator Kinerja secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja yang diperoleh pada besaran 100 %.

Sehingga tingkat dengan demikian dapat diambil secara garis besar, bahwa Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis ini berada pada kategori **MEMUASKAN**. Meskipun pada Indikator Kinerja “**Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/ D4**”, Capaian Kinerja hanya mencapai 2,86 % dan pada Indikator Kinerja “**Jumlah perpustakaan dan kearsipan yang dibina dilingkungan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara**”, Capaian Kinerja 4,76 %. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan adanya kebijakan efisiensi anggaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, yang pada gilirannya berdampak kepada Alokasi Anggaran pada Program/kegiatan untuk kedua Indikator Kinerja tersebut.

Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis-1, diperoleh dari pelaksanaan Program/kegiatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yang akan diuraikan sebagai berikut :

➤ **BIDANG PENDIDIKAN**



Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 di bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

a. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) :

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2012 sebesar 33,87 % menjadi 33,87 % tahun 2013.
- 2) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat pada tahun 2012 dicapai 104,56 % menjadi 106,26 % pada tahun 2013.
- 3) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/ sederajat pada tahun 2012 dicapai 89,02 % menjadi 88,55 % pada tahun 2013.
- 4) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada tahun 2012 dicapai 79,69 % menjadi 80,58 % pada tahun 2013.
- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar tahun 2012 dicapai 91,46 % menjadi 93,26 % Tahun 2013.
- 6) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2012 dicapai 67,96 % menjadi 70,51 % Tahun 2013.
- 7) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun 2012 dicapai 57,83 % menjadi 60,02 % Tahun 2013.

b. Jumlah siswa pada jenjang TK/ KB/ Penitipan Anak pada tahun 2012 sebanyak 271.971 orang dan menjadi 467.295 orang pada tahun 2013 dengan rincian :

- 1) Taman Kanak – Kanak (TK) = 240.472 orang
- 2) Kelompok bermain (KB) = 224.193 orang
- 3) Tempat Penitipan Anak (TPA) = 2.630 orang

c. Perkembangan angka kelulusan

- 1) Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2012 adalah sebanyak 278.219 siswa dan menjadi 286.681 siswa pada tahun 2013.
- 2) Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2012 adalah sebanyak 242.182 siswa dan menjadi 282.212 siswa pada tahun 2013.
- 3) Angka kelulusan SMA/MA pada tahun 2012 adalah sebanyak 120.090 siswa dan menjadi 117.254 siswa pada tahun 2013.

d. Perkembangan angka melanjutkan sekolah :

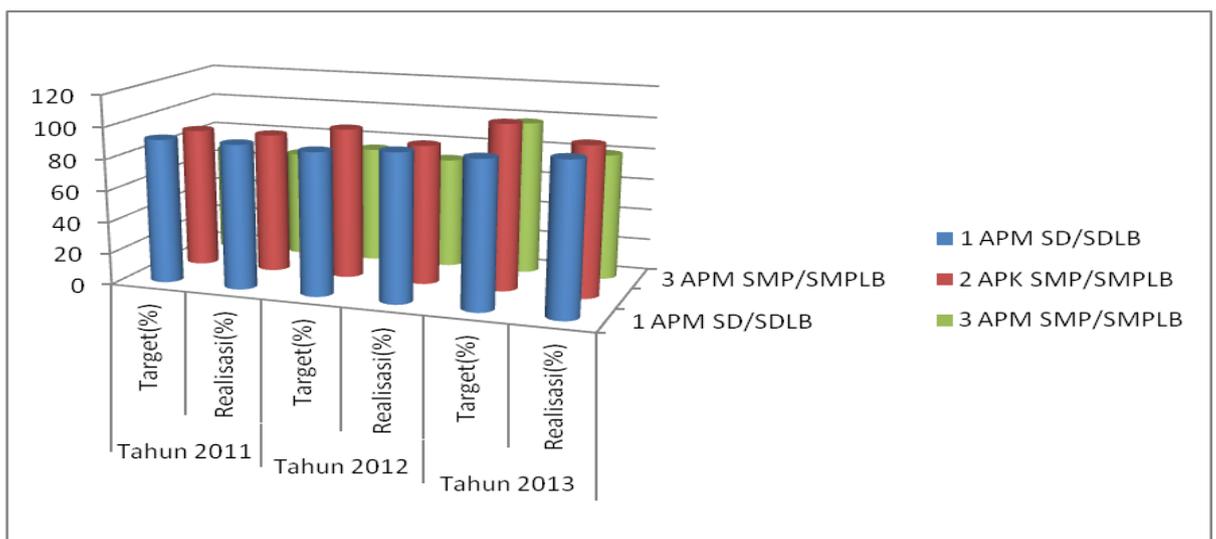
- 1) Jumlah melanjutkan SD/MI pada tahun 2012 adalah sebanyak 215.553 orang dan menjadi 269.604 orang pada tahun 2013.
- 2) Jumlah melanjutkan SMP/MTs pada tahun 2012 adalah sebanyak 278.219 orang dan menjadi 197.126 orang pada tahun 2013.

- e. Jumlah guru yang berijazah kualifikasi dan kompetensi S1/D4** pada tahun 2012 sebanyak 93.900 guru dan tahun 2013 sebanyak 116.884 guru.
- f. Perkembangan pencapaian program wajib belajar 12 tahun**, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera melalui Dinas Pendidikan belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Wajib Belajar 12 Tahun, mengingat saat ini peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU). Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai langkah awal dalam rangka implementasi Wajib Belajar 12 Tahun, dimana PMU bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
- g. Pelaksanaan pendidikan standar internasional** pada TA. 2011/2012 sebanyak 114 siswa dan TA. 2012/2013 sebanyak 120 siswa sehingga jumlah siswa pada 2012 sebanyak 234 orang dan tahun 2013 sebanyak 348 siswa (SMK BI yang baru dibuka pada tahun ajaran 2011/2012).
- h. Angka melek huruf 15 tahun keatas** pada tahun 2012 adalah 97,65% orang dan menjadi 97,51% orang pada tahun 2013.

i. Penyandang Ketunaan

- 1) Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SD/MI tahun 2012 adalah 1.664 orang menjadi 3.457 orang pada tahun 2013.
- 2) Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMP/MTs tahun 2012 adalah 411 orang menjadi 303 orang pada tahun 2013.
- 3) Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/ SMK/MA tahun 2012 adalah 36 orang menjadi 176 orang pada tahun 2013.

Grafik 1.
Peningkatan APM, APK pada jenjang pendidikan



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara

PROGRAM / KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun, Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Workshop pengelola perpustakaan SD.
- 2) Seleksi calon peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD tingkat provinsi.
- 3) Pembinaan dan pembekalan peserta Olimpiade Olahraga Dan Seni (O2SN) tingkat nasional jenjang SD.
- 4) Lomba seni siswa SD tingkat provinsi.
- 5) Lomba olahraga siswa SD tingkat provinsi.
- 6) Pengadaan alat multimedia interaktif pengenalan budaya nusantara tingkat SD.
- 7) Pembinaan dan pembekalan peserta Olimpiade Olahraga Dan Seni (O2SN) tingkat nasional jenjang SMP.
- 8) Seleksi calon peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMP tingkat provinsi.
- 9) Pengadaan multimedia pembelajaran sejarah indonesia bagi sekolah tingkat SMP.
- 10) Lomba seni siswa SMP tingkat provinsi.
- 11) Lomba olahraga siswa SMP tingkat provinsi.



- 12) Pembinaan dan pembekalan siswa calon peserta Olimpiade Sains Nasional SDLB dan SMPLB.
- 13) Pengadaan alat peraga IPA dan elektronika untuk sekolah jenjang SMP.
- 14) Pengadaan sarana dan prasarana SLB.
- 15) Pengadaan buku panduan pendidik berbasis IT jenjang SD.
- 16) Pengadaan buku panduan pendidik berbasis IT jenjang SMP.
- 17) Pengadaan sistem manajemen sekolah berbasis IT tingkat SMP.
- 18) Pengadaan alat peraga dan analisa laboratorium fisika berbasis sistem digital tingkat SMP.
- 19) Pengadaan alat laboratorium fisika jenjang SMP.
- 20) Pengadaan alat peraga *Multimedia Virtual 3D Realty* untuk mata pelajaran fisika jenjang SMP.
- 21) Pengadaan *Portable Digital Evaluation* (PDE) untuk sekolah SMP.
- 22) Pengadaan alat laboratorium IPA/Sains SMP berbasis komputer.
- 23) Workshop penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa jenjang SD dan SMP.
- 24) Workshop tim pengembang kurikulum jenjang SD.
- 25) Workshop tim pengembang kurikulum jenjang SMP.

26) Penyelenggaraan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2. Program Pendidikan Menengah, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan dan pembekalan siswa calon peserta OSN tingkat nasional jenjang SMA.
- 2) Lomba seni siswa SMA tingkat provinsi.
- 3) Pengadaan alat laboratorium kimia jenjang SMA.
- 4) Pengadaan peralatan olahraga.
- 5) Penyediaan laboratorium multistudy bagi sekolah tingkat SMA.
- 6) Pengadaan alat peraga MIPA dan elektronika untuk jenjang SMA.
- 7) Pengadaan alat edukatif - interaktif geografi untuk tingkat SMA.
- 8) Penyediaan alat peraga jelajah 3D berbasis TIK untuk pembelajaran biologi jenjang SMA.
- 9) Seleksi Olimpiade Sains Provinsi (OSP).
- 10) Pengadaan alat *Microscope Digital*.
- 11) Pengadaan sarana laboratorium bahasa *Multi Education* berbasis *SMS Gateway* jenjang SMA.
- 12) Pengadaan alat peraga IPA SMA berbasis komputer.
- 13) Pengadaan sistem *Paralel Class Interaktif* berbasis multimedia untuk sekolah tingkat SMA.

3. Program Pendidikan Non Formal, program ini memuat kegiatan :

- 1). Peringatan Hari Aksara Internasional.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemilihan guru berprestasi kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan pemberian penghargaan bagi guru SLB berdedikasi tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) mata pelajaran matematika dan fisika pada jenjang pendidikan menengah tingkat Provinsi Sumatera Utara.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program ini memuat

kegiatan :

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Pembinaan teknis penyusunan laporan/perencanaan Dinas Pendidikan.
- 3) Penunjang kelancaran kegiatan panitia barang/jasa tahun anggaran 2013.
- 4) Pengelolaan Jardiknas Sumatera Utara.
- 5) Penyusunan perencanaan dan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat nasional tahun 2013.

Permasalahan yang dihadapi :

Kegiatan penunjang kelancaran kegiatan panitia barang/jasa tahun anggaran 2013 tidak terlaksana karena menindaklanjuti evaluasi Inspektorat bahwa kegiatan ini seharusnya berada pada program peningkatan sarana dan prasarana.

Solusi :

Untuk tahun berikutnya akan dilakukan sesuai dengan prosedur.

6. Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program ini memuat

kegiatan :

- 1) Sosialisasi kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan Program Dana APBD bidang pendidikan menengah kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pengadaan alat/praktek mekanik otomotif SMK.
- 3) Penyelenggaraan SMKN binaan Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Revitalisasi SMK di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mengkei (MP3EI).
- 5) Diklat manajemen bengkel bangunan.
- 6) Diklat manajemen bengkel elektronika.
- 7) Diklat manajemen bengkel teknik mesin.
- 8) Peningkatan manajemen bengkel otomotif.
- 9) Pemeliharaan rutin alat peraga teknik otomotif.
- 10) Pengembangan pelayanan dan informasi UPTD-PPT Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk website berbasis data.

- 11) Pembentukan profil UPTD-PPT Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk visual.
- 12) Pengadaan laboratorium multimedia komunikasi terpadu berbasis IT pada sekolah tingkat SMK.
- 13) Pengadaan sistem manajemen sekolah berbasis IT tingkat SMK.
- 14) Pengadaan laboratorium komputer grafis animasi untuk SMK.
- 15) Pengadaan laboratorium radio untuk SMK jurusan elektronika.
- 16) Pengadaan alat praktek dan pengajaran mekatronika SMK jurusan mesin/mekatronika berbasis IT.
- 17) Pengadaan Sarana Laboratorium Bahasa Education Berbasis SMS Gateway Jenjang SMK.

Permasalahan :

Kegiatan pembentukan profil UPTD-PPT Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk visual tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.

Solusi :

Untuk tahun berikutnya akan lebih ditingkatkan manajemen waktu pelaksanaannya.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi,

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penerbitan jurnal ilmiah perguruan tinggi.
- 2) Workshop metode penelitian dan penulisan artikel ilmiah bagi dosen perguruan tinggi.

➤ BIDANG PERPUSTAKAAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA

Dalam upaya pelaksanaan tugas yang mencerminkan perbaikan kinerja, dilakukan berbagai kegiatan baik didukung anggaran maupun membangun partisipasi para *stakeholder*. Disamping itu, telah dilakukan perbaikan dan penambahan sarana/prasarana perpustakaan termasuk kemudahan yang diberikan kepada para pemustaka seperti Sistem Penelusuran Informasi Bahan Pustaka (INLIS Lite), peminjaman buku, pembuatan kartu anggota dan pemanfaatan internet secara gratis, serta dilakukannya pembaharuan Standard Operasional Prosedur (SOP).

Pengembangan perpustakaan harus mengikuti perkembangan Teknologi Informasi. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi akan melakukan langkah – langkah kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Peningkatan minat baca bagi masyarakat, khususnya pemula dilakukan melalui mobil perpustakaan keliling dan layanan terpadu perpustakaan sekolah, serta mengundang sekolah – sekolah untuk berwisata baca ke kantor Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Langkah –langkah kreatif yang dilakukan ke depan adalah penambahan jenis koleksi/ bahan pustaka yang diminati pemustaka dan

kampanye/promosi minat baca termasuk memfasilitasi para pemustaka menggunakan perpustakaan serba gratis.

Tabel 28.
Capaian Kinerja Perpustakaan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013
a	Pertambahan koleksi buku di perpustakaan daerah	679.289 eks	699.204eks
b	Peningkatan pengunjung ke perpustakaan daerah	594.443 orang	99.771 orang
c	Peningkatan minat baca terhadap koleksi buku di perpustakaan daerah	131.500 orang	199.542 orang
d	Peningkatan koleksi judul buku di perpustakaan daerah	84.419 judul	88.694 judul
e	Ketersediaan e-book di perpustakaan daerah	900 keping	1.650 keping

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu

Kinerja yang dicapai didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2013. Adapun Program dan Kegiatan tersebut, yaitu :

A. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan, program ini memuat kegiatan :

- 1) Akuisisi koleksi langka deposit daerah Sumatera Utara.
- 2) Pengumpulan koleksi deposit daerah Sumatera Utara.
- 3) Alih bentuk koleksi deposit Sumatera Utara.
- 4) Penerbitan bibliografi daerah Sumatera Utara.
- 5) Lomba penulisan cerita rakyat Sumatera Utara.
- 6) Penerbitan majalah perpustakaan dan arsip Sumatera Utara.

- 7) Penerbitan buku hasil karya pengarang Sumatera Utara.
- 8) Penambahan koleksi layanan anak.
- 9) Penambahan koleksi layanan remaja.
- 10) Penambahan koleksi layanan dewasa.
- 11) Penambahan koleksi layanan referensi.
- 12) Penambahan koleksi layanan keagamaan.
- 13) Pengadaan koleksi Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS).
- 14) Pengadaan koleksi perpustakaan keliling.
- 15) Penerbitan daftar katalog induk daerah Sumatera Utara.
- 16) Lomba pustakawan teladan Sumatera Utara.
- 17) Lomba perpustakaan SLTA terbaik Sumatera Utara.
- 18) Lomba perpustakaan SLTP terbaik Sumatera Utara.
- 19) Lomba perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta terbaik Sumatera Utara.
- 20) Lomba perpustakaan khusus terbaik Sumatera Utara
- 21) Lomba taman bacaan terbaik Sumatera Utara
- 22) Desiminasi minat baca terbaik Sumatera Utara
- 23) Pemasarakatan informasi Jabatan Fungsional Pustakawan
- 24) Observasi perpustakaan dan kearsipan ke luar negeri.
- 25) Penataan sistem informasi dan pangkalan data literatur.
- 26) Promosi perpustakaan.
- 27) Fumigasi bahan pustaka.

- 28) Layanan terpadu perpustakaan sekolah.
- 29) Pelayanan perpustakaan keliling.
- 30) Peningkatan pelayanan informasi melalui perpustakaan digital.
- 31) Peningkatan layanan perpustakaan diluar jam dinas / lembur.
- 32) Shelving buku sesuai klasifikasi.
- 33) Pameran pembangunan pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).
- 34) Rapat Koordinasi Perpustakaan se Sumatera Utara.
- 35) Gerakan Masyarakat Minat Baca di Sumatera Utara.
- 36) Pembinaan SDM perpustakaan sekolah Sumatera Utara
- 37) Pembinaan SDM perpustakaan khusus Sumatera Utara.
- 38) Pertemuan ikatan pustakawan indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- 39) Lomba perpustakaan SD terbaik Sumatera Utara.
- 40) Lomba perpustakaan desa/kelurahan terbaik Sumatera Utara.
- 41) Lomba perpustakaan umum kecamatan terbaik Sumatera Utara.
- 42) Lomba perpustakaan umum kabupaten/kota terbaik Sumatera Utara.
- 43) Lomba perpustakaan rumah ibadah terbaik Sumatera Utara.
- 44) Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang kepustakawan.
- 45) Surveillance dan maintenance ISO 9001 : 2008.
- 46) Reprografi koleksi Sumatera Utara.
- 47) Penerbitan/peluncuran buku muatan lokal.

- 48) Preservasi/pemeliharaan bahan pustaka.
- 49) Pengembangan sistem informasi koleksi deposit daerah Sumatera Utara.
- 50) Rapat koordinasi realisasi Undang-Undang Deposit No. 4 tahun 1990.
- 51) Layanan keanggotaan perpustakaan elektronik.
- 52) Penambahan Koleksi Layanan Anak, Remaja, Dewasa, Referensi, Keagamaan, Pengadaan Koleksi Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) dan Koleksi Perpustakaan Keliling,
- 53) Pelayanan Perpustakaan Keliling-
- 54) Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah target kegiatan 46 Pos Layanan.
- 55) Promosi Perpustakaan melalui siaran radio, target kegiatan 3 bulan penyiaran via stasiun radio
- 56) Gelar buku, budaya dan teknologi
- 57) Pameran Pembangunan pada Pekan Raya Sumatera Utara
- 58) Pameran se-Indonesia (Indonesia Library Expo)
- 59) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca di Sumatera Utara
- 60) Pengembangan Minat Baca Sumatera Utara
- 61) Rapat Koordinasi Perpustakaan se-Sumatera Utara
- 62) Rapat Koordinasi Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan Kearsipan Kab/Kota

63) Lomba Perpustakaan yaitu lomba perpustakaan Desa/Kelurahan, Lomba Perpustakaan SD/MI, SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi, Khusus, Kecamatan, TBM/Perpustakaan Masyarakat, Rumah Ibadah, dan Perpustakaan Kab/Kota.

➤ **BIDANG KESEHATAN**

Sasaran utama yang ingin dicapai oleh Pemerinth Provinsi Sumatera Utara dibidang kesehatan adalah dengan melalui pelaksanaan kegiatan/program kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, melalui pencapaian target sasaran utama di tahun 2013 yaitu menurunkan :

1. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar **22 per 1.000 kelahiran hidup**;
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar **275 per 100.000 kelahiran hidup**;
3. Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu **20%** dan meningkatkan
4. Meningkatkan Umur Harapan Hidup penduduk mencapai **72 tahun**.

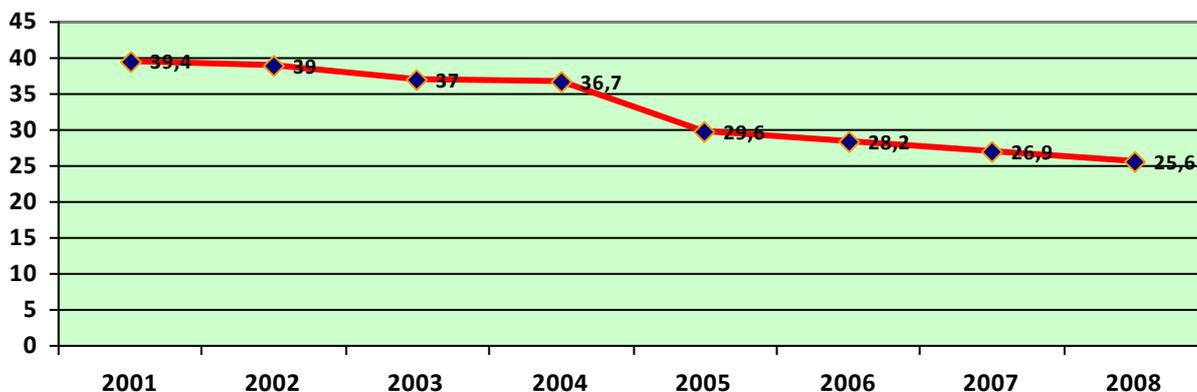
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

Berdasarkan data BPS, AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2001, AKB adalah sebesar 39,4 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 mampu diturunkan menjadi



25,6 per 1.000 kelahiran hidup, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2
Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant
Mortality Rate (IMR) Tahun 2001 – 2008.



Sumber: SUDA, BPS Provinsi Sumatera Utara (2001 – 2010)

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk 2010, diketahui bahwa AKB Sumatera Utara adalah 25,7 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dilihat trend trend AKB kurun waktu 2001-2010, dimana diperhitungkan terjadi penurunan sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2012 yaitu 22,96 dan tahun 2013 yaitu 21,59 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan mempergunakan perhitungan ini

maka kesimpulan sementara bahwa target akhir tahun Renstra yaitu sasaran utama AKB tahun 2013 yaitu menurunnya AKB menjadi 22 per 1.000 kelahiran hidup **telah mampu dicapai**.

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

Tinggi rendahnya AKI merefleksikan status kesehatan/gizi ibu selama hamil serta nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu negara. Berdasarkan Survei AKI dan AKB di Provinsi Sumatera, diperhitungkan AKI pada tahun 2010 yaitu 268/100.000 kelahiran hidup. Masih mempergunakan angka tahun 2010, maka kesimpulan sementara bahwa target akhir tahun Renstra yaitu sasaran utama AKI tahun 2013 yaitu menurunnya AKI menjadi 285 per 100.000 kelahiran hidup **telah mampu dicapai**.

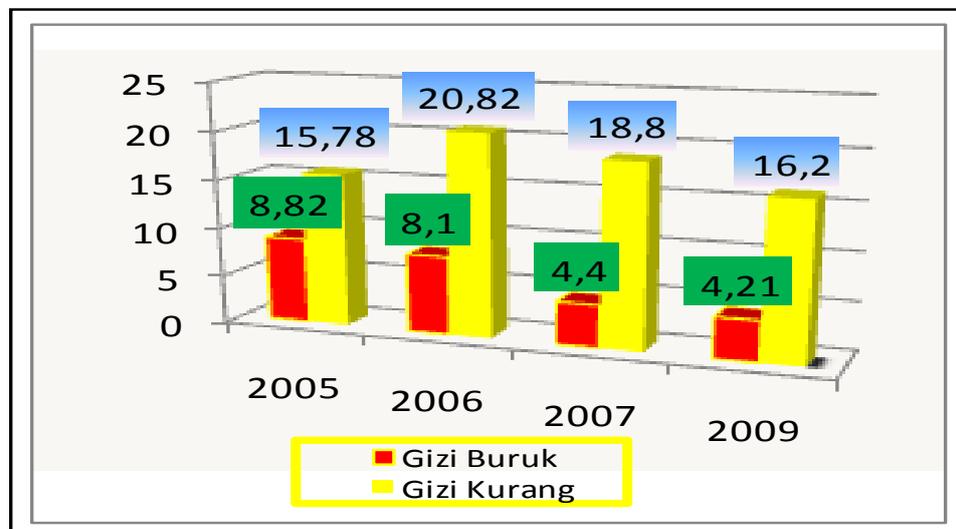
PREVALENSI GIZI KURANG DAN GIZI BURUK

Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang sempat mengalami peningkatan pada tahun 2006, yang mencapai angka hampir 30%. Peningkatan ini cukup drastis bila dibandingkan dengan angka tahun 2005 yaitu 26,6%.

Status gizi balita di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan sejak tahun 2007, dimana hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan FKM USU pada tahun 2007 dan 2009 menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun yaitu dari

23,2% (18,8% gizi kurang dan 4,4% gizi buruk) menjadi 20,41% (gizi kurang yaitu 16,2% dan gizi buruk 4,21%).

Grafik 3
Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang
Tahun 2005-2009



Sumber : Survey PSG 2005-2009

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Kemenkes tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang yaitu sekitar 22%, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan hasil rikesdas tahun 2010 yaitu 21,4%, dan tahun 2007 yaitu 22,7%. Dengan melihat trend pencapaian kurun waktu lima tahun tersebut (2007-2013) maka diperhitungkan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita di Sumatera Utara tidak mampu diturunkan menjadi 20% pada tahun 2013. Dengan demikian sasaran utama target akhir tahun Renstra yaitu prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita yaitu 20% pada tahun 2013 **tidak tercapai.**

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH)

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 29
Pencapaian UHH Tahun 2004-2010

TAHUN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
UHH	67,3 tahun	68,7 tahun	68,9 tahun	69,1 tahun	69,2 tahun	69,35 tahun	70,9 tahun

Sumber : SUDA; BPS 2005-2010, SP 2010 BPS 2011.

Berdasarkan data BPS, UHH penduduk Sumatera Utara meningkat dari 67,3 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010). Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2004-2010, dimana terjadi peningkatan umur penduduk sebesar 0,6 tahun setiap tahunnya, maka diperkirakan UHH Sumatera Utara mencapai 71 tahun pada tahun 2012 dan 71,6 pada tahun 2013. Dengan demikian sasaran utama UHH pada akhir tahun Renstra yaitu 72 tahun pada 2012 **belum mampu dicapai**.

Pencapaian Kinerja dibidang Kesehatan ini, pada prinsipnya diperoleh dari pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun Anggaran 2013. Adapun Program/Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Obat untuk Buffer Stok Provinsi

- 2) Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Perbekalan Obat Kabupaten/Kota
- 3) Pertemuan Perencanaan Terpadu Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 5) Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- 6) Pembinaan Sarana Kosmetika di Kabupaten/Kota
- 7) Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Kota Medan
- 8) Sosialisasi Peraturan Binwasdal dan Perizinan di Bidang Kefarmasian dan Alkes
- 9) Peningkatan Kemampuan SDM dalam Inspeksi Sarana Prodis Alkes PKRT, Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Biaya Operasional Pusat Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO), sehingga sampai akhir tahun anggaran, realisasi fisik Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah 91,8% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 6.422.891.948,- atau 86,20%.

2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

Capaian Indikator Kinerja pada Program ini, adalah sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 30
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2013

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Tercapainya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	90%	84,9%	94,3
2	Tercapainya cakupan pelayanan : - antenatal (K4), - cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap) - cakupan kunjungan bayi	89% 92,5% 93%	83,35% 84,51% 87,11%	93,7 91,4 93,7
3	Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan PONEC	60%	84%	140
4	Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja	35%	27,4%	78,29
5	Terbentuk minimal 2 puskesmas santun usila di Kab/Kota	66 Puskesmas	69 Puskesmas	104,5
6	Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	65%	53%	81,54
7	Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas	290 Puskesmas	314 Puskesmas	113,64
8	Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar	22 Puskesmas	25 Puskesmas	109
9	Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008	21 Puskesmas	16 Puskesmas	76,2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
10	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK	38 Puskesmas	42 Puskesmas	110,53
11	Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina	50%	57,14%	114,28
12	Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja	20 Kab/Kota	13 Kab/kota	65
13	Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga	33 Kab/Kota	5 Kab/Kota	15,15
14	Persentase pesantren yang memiliki poskestren	40%	35,3%	88,25

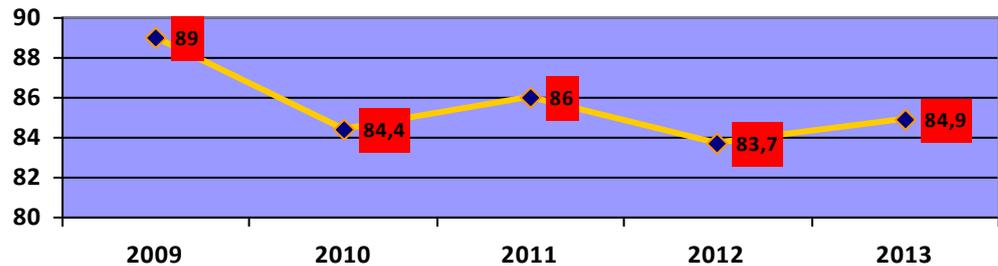
Penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator serta analisa kecenderungan pencapaian sejak tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2009-2013 menunjukkan trend fluktuatif. Cakupan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terjadi pada tahun 2009 dengan capaian 89%.

Pada tahun 2010-2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hanya pada tahun 2011 mencoba meningkat namun hanya pada angka 86% dan pada tahun 2013 berakhir pada angka 84,9%.

Grafik 4
Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan
tahun 2009-2013



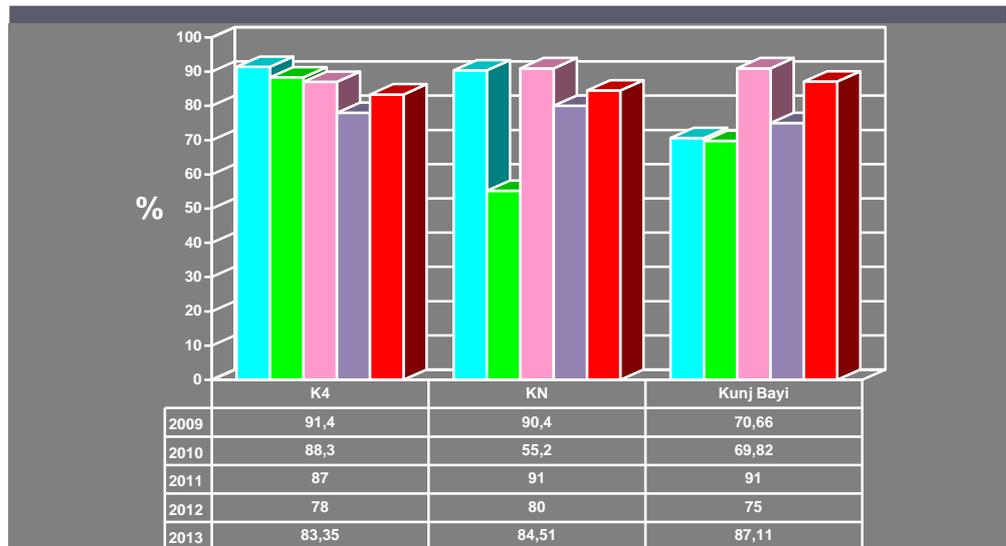
Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara

2. Cakupan Pelayanan Antenatal Care (K4), Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Cakupan Kunjungan Bayi.

Dibandingkan tahun 2012, pencapaian cakupan antenatal care 4 kali ibu (K4), KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami peningkatan pada tahun 2013, dan berada di atas angka 80%. Perkembangan persentase antenatal care (K4), KN lengkap dan Kunjungan bayi seperti yang tergambar pada grafik 4 berikut ini.

Dibandingkan tahun 2011, pencapaian cakupan antenatal care 4 kali ibu (K4), KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami penurunan pada tahun 2012. Penurunan tertinggi terjadi pada indikator kunjungan bayi dimana turun hampir 20%, perkembangan persentase antenatal care (K4), KN lengkap dan Kunjungan bayi seperti yang tergambar pada grafik 5 berikut ini.

Grafik 5
Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2009 – 2013



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara Tahun 2014

Selama kurun waktu 2009-2013, cakupan K4 ibu hamil tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu berada diatas angka 90%. Sejak tahun 2010 terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 2012 yaitu 78% dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 83%, masih dibawah pencapaian tahun 2009 dan belum mampu mencapai target akhir Renstra yaitu 89% pada tahun 2013.

Cakupan KN lengkap selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan kecendrungan fluktuatif. Capaian tertinggi cakupan KN lengkap terjadi pada tahun 2011 yaitu 91% setelah sempat terjun bebas di tahun 2010 yaitu 55,2% dari sebelumnya yaitu 90,4% pada tahun 2009. Pada tahun 2012 cakupan KN lengkap turun menjadi 80% dan berakhir pada angka 84,51% pada tahun

2013. Sama halnya dengan cakupan antenatal K4, pencapaian KN lengkap belum mampu mencapai target akhir Renstra yaitu 92,5% pada tahun 2013.

Dilain pihak indikator kunjungan bayi, yang pada tahun 2009 memperoleh capaian terendah dari 3 indikator tersebut yaitu sekitar 71%, mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2011 menjadi 91% namun ditahun 2012 turun secara tajam menjadi 75% pada tahun 2012 dan akhirnya berada diangka 87% pada tahun 2013. Sama halnya dengan cakupan antenal care K4 dan KN lengkap, cakupan kunjungan bayi juga belum mampu mencapai target akhir tahun perencanaan strategis.

Pada tahun 2013, dari 313.724 sasaran ibu hamil, yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4) adalah sebanyak 261.501 ibu hamil (83,35%). Untuk pelayanan neonatal, dari 284.524 sasaran bayi sebanyak 240.450 bayi (84,51%) mendapatkan pelayanan neonatal lengkap (KN3) dan melakukan kunjungan bayi yaitu yang mendapatkan pemeriksaan minimal 4x selama setahun adalah sebanyak 247.836 bayi (87,11%). Dan dari 284.524 bayi yang lahir hidup terdapat sebanyak 573 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) atau 0,23%. Jumlah kasus BBLR menunjukkan trend penurunan dimana pada tahun 2010 tercatat sebanyak 773 bayi, tahun 2011 yaitu 743 dan tahun 2012 yaitu 733 bayi.

3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

Pada tahun 2013, dari 163 puskesmas rawat inap yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdapat 137 puskesmas yang menyelenggarakan PONED atau 84%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 94 puskesmas PONED dan tahun 2011 yaitu 98 puskesmas PONED.

Penurunan jumlah puskesmas PONED yang terjadi di tahun 2012 akibat pindahnya tenaga dokter dan perawat yang telah dilatih, hal ini terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Samosir, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Binjai, masing-masing berkurang 1 unit Puskesmas PONED.

Dari 33 kab/kota, hanya 1 daerah yang belum memiliki puskesmas PONED yaitu Kota Tebing Tinggi. Kabupaten Pakpak Bharat, Padang Lawas, Nias Barat, Nias Utara yang pada tahun 2012 belum memiliki puskesmas PONED telah memilikinya di tahun 2013. Penyebaran puskesmas PONED per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31
Jumlah Puskesmas PONED berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS RAWAT INAP	JML PUSKESMAS PONED
1	NIAS	4	3
2	MANDAILING NATAL	3	5
3	TAPANULI SELATAN	4	4
4	TAPANULI TENGAH	6	4
5	TAPANULI UTARA	6	6
6	TOBA SAMOSIR	2	2
7	LABUHAN BATU	5	7
8	ASAHAN	10	6
9	SIMALUNGUN	9	6
10	DAIRI	5	5
11	KARO	6	5
12	DELI SERDANG	17	10
13	LANGKAT	10	8
14	NIAS SELATAN	5	3
15	HUMBANG HASUNDUTAN	3	3
16	PAKPAK BHARAT	2	4
17	SAMOSIR	5	4
18	SERDANG BEDAGAI	5	4
19	BATUBARA	4	4
20	PADANG LAWAS	4	4
21	PADANG LAWAS UTARA	3	4
22	LABUHAN BATU SELATAN	9	5
23	LABUHAN BATU UTARA	7	4
24	NIAS UTARA	5	4
25	NIAS BARAT	3	1
26	SIBOLGA	1	2
27	TANJUNGBALAI	1	1
28	PEMATANG SIANTAR	0	2
29	TEBING TINGGI	0	0
30	MEDAN	13	13
31	BINJAI	2	1
32	PADANGSIDIMPUAN	2	1
33	GUNUNG SITOLI	2	2
JUMLAH		163	137

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara 2014.

Dengan bertambahnya jumlah puskesmas PONED menjadi 137 unit (84%) maka target akhir tahun Renstra yaitu 60% puskesmas menyelenggarakan PONED telah tercapai.

4. Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja (PKPR)

Pada tahun 2013 tidak ada peningkatan jumlah puskesmas PKPR, sama seperti pencapaian tahun 2012, dari 569 puskesmas di Sumatera Utara terdapat 156 puskesmas PKPR (27,4%) yang tersebar di 23 Kab/Kota.

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yaitu 129 puskesmas dari 545 puskesmas yang ada (23,7%).

Kabupaten/Kota yang belum memiliki puskesmas PKPR yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Labuhan Batu Utara dan Gunung Sitoli.

Penyebaran Puskesmas PKPR per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 32
Jumlah Puskesmas PKPR berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO	KAB/KOTA	JML PUSKESMAS	JML PUSKESMAS PKPR
1	NIAS	9	-
2	MANDAILING NATAL	26	1
3	TAPANULI SELATAN	16	4
4	TAPANULI TENGAH	23	4
5	TAPANULI UTARA	19	4
6	TOBA SAMOSIR	19	12
7	LABUHAN BATU	13	4
8	ASAHAN	22	18
9	SIMALUNGUN	34	4
10	DAIRI	18	4
11	KARO	19	4
12	DELI SERDANG	34	14
13	LANGKAT	30	4
14	NIAS SELATAN	36	-
15	HUMBANG HASUNDUTAN	12	-
16	PAKPAK BHARAT	8	-
17	SAMOSIR	12	-
18	SERDANG BEDAGAI	20	4
19	BATUBARA	14	4
20	PADANG LAWAS	14	-
21	PADANG LAWAS UTARA	17	4
22	LABUHAN BATU SELATAN	17	4
23	LABUHAN BATU UTARA	17	-
24	NIAS UTARA	11	-
25	NIAS BARAT	8	-
26	SIBOLGA	4	4
27	TANJUNGBALAI	8	4
28	PEMATANG SIANTAR	19	4
29	TEBING TINGGI	9	4
30	MEDAN	39	39
31	BINJAI	8	4
32	PADANGSIDIMPUAN	9	4
33	GUNUNG SITOLI	6	-
JUMLAH		570	156

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2014

5. Terbentuk minimal 2 Puskesmas Santun Usila di Kab/Kota

Sampai tahun 2013, sudah terbentuk 69 puskesmas usila di 30 kabupaten/kota. Pencapaian ini sudah mampu mencapai target akhir tahun Renstra yang ditetapkan yaitu 66 puskesmas. Perkembangan jumlah puskesmas usila di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 33
Jumlah Puskesmas Usila berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010- 2013

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS LANSIA			
		2010	2011	2012	2013
1	MANDAILING NATAL	-	2	-	1
2	TAPANULI SELATAN	-	2	-	-
3	TAPANULI TENGAH	-	2	1	-
4	TAPANULI UTARA	-	2	-	-
5	TOBA SAMOSIR	-	2	-	1
6	LABUHAN BATU	-	2	-	-
7	SIMALUNGUN	-	2	-	-
8	DELI SERDANG	2	-	-	1
9	HUMBANG HASUNDUTAN	-	2	-	-
10	PAKPAK BHARAT	-	2	-	-
11	SAMOSIR	-	2	-	-
12	SERDANG BEDAGAI	-	1	-	1
13	BATUBARA	-	1	-	1
14	PADANG LAWAS UTARA	-	2	-	-
15	LABUHAN BATU UTARA	-	2	-	-
16	NIAS UTARA	-	2	-	-
17	NIAS BARAT	-	2	-	-
18	SIBOLGA	-	2	1	-
19	TANJUNGBALAI	-	2	1	-
20	PEMATANG SIANTAR	-	2	-	1
21	TEBING TINGGI	-	2	-	-
22	MEDAN	2	-	-	-
23	BINJAI	-	1	1	-
24	PADANGSIDIMPUAN	-	2	-	1
25	GUNUNG SITOLI	-	2	-	-
26	NIAS SELATAN	-	-	5	-
27	PADANG LAWAS	-	-	1	-
28	KARO	-	-	2	-
29	NIAS	-	-	-	2
30	ASAHAN	-	-	-	1
JUMLAH		4	43	12	10

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

6. Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dibagi dengan

sasaran (total) penduduk usia lanjut di wilayah tersebut.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usila di Sumatera Utara tercatat sebanyak 814.785 jiwa. Dari total penduduk lansia tersebut sebanyak 435.506 orang atau 53% mendapatkan pelayanan kesehatan lansia setiap bulannya. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012 yaitu 55, dan lebih tinggi dari capaian tahun 2011 yaitu 49%. Dengan pencapaian 53% pada tahun 2013 maka target akhir tahun Renstra yaitu 65% belum tercapai.

7. Terselenggaranya pelayanan gawat terpadu darurat di puskesmas

Sampai akhir tahun 2013, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) sebanyak 314 puskesmas yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 puskesmas terbentuk pada tahun tahun 2009, 58 puskesmas tahun 2010, 66 puskesmas pada tahun 2011, 56 puskesmas pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 terbentuk 78 puskesmas.

Adapun penyebaran puskesmas SPGDT di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Jumlah Puskesmas SPGDT berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS SPGDT				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	NIAS	2	2	2	2	
2	MANDAILING NATAL	2	2	2	5	2
3	TAPANULI SELATAN	2	2	2	-	2
4	TAPANULI TENGAH	2	2	2	8	2
5	TAPANULI UTARA	2	2	2	-	3
6	TOBA SAMOSIR	2	2	2	-	2
7	LABUHAN BATU	2	2	2	-	2
8	ASAHAN	2	2	2	-	3
9	SIMALUNGUN	2	2	2	-	3
10	DAIRI	2	2	2	5	3
11	KARO	2	2	2	-	2
12	DELI SERDANG	2	2	2	-	3
13	LANGKAT	2	2	2	-	3
14	NIAS SELATAN	2	2	2	2	3
15	HUMBANG HASUNDUTAN	2	2	2	-	3
16	PAKPAK BHARAT	2	2	2	4	3
17	SAMOSIR	2	2	2	5	2
18	SERDANG BEDAGAI	2	2	2	3	2
19	BATUBARA	2	2	2	-	2
20	PADANG LAWAS	2	2	2	-	3
21	PADANG LAWAS UTARA	2	2	2	-	2
22	LABUHAN BATU SELATAN	-	2	2	-	2
23	LABUHAN BATU UTARA	-	2	2	-	3
24	NIAS UTARA	-	2	2	5	3
25	NIAS BARAT	-	2	2	3	2
26	SIBOLGA	2	2	2	3	2
27	TANJUNGBALAI	2	-	2	3	3
28	PEMATANG SIANTAR	2	2	2	-	3
29	TEBING TINGGI	2	-	2	2	3
30	MEDAN	2	2	2	-	2
31	BINJAI	2	-	2	-	2
32	PADANGSIDIMPUAN	2	2	2	3	1
33	GUNUNG SITOLI	-	-	2	3	2
JUMLAH		56	58	66	56	78

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu.

Dengan penambahan 78 puskesmas SPGDT pada tahun 2013, maka target akhir tahun Renstra yaitu terbentuknya 290 puskesmas SPGDT pada tahun 2013 tercapai bahkan diatas target yang ditetapkan.

8. Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar (SPMD)

Sampai dengan tahun 2013, jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik sebanyak 25 puskesmas, dengan perincian 2 puskesmas terbentuk pada tahun 2009, 2 puskesmas pada tahun 2010, 5 puskesmas terbentuk pada tahun 2011, 6 puskesmas pada tahun 2012, dan 10 puskesmas pada tahun 2013 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan SPMD
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013

TAHUN	PUSKESMAS	JENIS PELAYANAN
2009	1. Pusk Glugur Darat Kota Medan 2. Pusk. Perbaungan Kab. Sergei	Pelayanan Akupuntur Pelayanan Plus
2010	1. Pusk. Padang Bulan Kota Medan 2. Pusk. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan	Klinik VCT Pelayanan PKPR
2011	1. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang (Klinik Metadon) 2. Pusk. Rantau-prapat Kota Kab. Lab Batu (Pusk. Usila) 3. Pusk. Medan Deli Kota Medan 4. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. 5. Pusk. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	Pelayanan Perkotaan Pelayanan Perkotaan Pelayanan Kes. Kerja Pelayanan Prima Pelayanan Prima
2012	1. Pusk. Sadabuan Kota Padang Sidempuan 2. Pusk. Gunung Tua Kab. Paluta 3. Pusk. Sidodadi Kab. Asahan 4. Pusk. Simarpinggan Kab. Tapanuli Selatan 5. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang 6. Pusk. Panyabungan Jae Kab. Madina	Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas

TAHUN	PUSKESMAS	JENIS PELAYANAN
2013	1. Pusk. Pokenjilor P. Sidempuan 2. Pusk Pijorkoling P. Sidempuan 3. Pusk. Pandan Kab. Tap Tengah 4. Pusk. Siabu Kab. Madina 5. Pusk. Pintu Padang Kab. T. Selatan 6. Pusk. Sitio-tio Kab. Samosir 7. Pusk. Sei Rampah Kab. Sergei 8. Pusk. Teladan Kota Medan 9. Pusk. Kartini Kota P. Siantar 10. Pusk. Binjai Kota Binjai	Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Dokter Teladan Dokter Teladan Dokter Teladan

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2010-2014.

Dari tabel terlihat pada tahun 2013, bila diperinci menurut kab/kota maka jumlah yang telah menerapkan SPMD yaitu di Kota Medan sebanyak 4 puskesmas, Kabupaten Deli Serdang 4 puskesmas, Kota Padang Sidempuan sebanyak 4 puskesmas, Kabupaten Serdang Bedagai yaitu 3 puskesmas, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal masing-masing sebanyak 2 puskesmas, Kabupaten Labuhan Batu, Padang Lawas Utara (Paluta), Asahan, Tapanuli Tengah, Samosir, Kota Medan dan Binjai masing-masing 1 puskesmas.

9. Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas), diupayakan melalui penerapan ISO 9001-2008. Sampai dengan akhir 2013, jumlah puskesmas dengan pelayanan ISO 9001-2008 berjumlah 16 puskesmas, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2012. Perkembangan jumlah puskesmas dengan pelayanan ISO 9001-2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Puskesmas dengan sertifikat ISO 9001:2008
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2012

TAHUN	PUSKESMAS	KAB/KOTA
2010	1. Puskesmas Glugur Darat	Medan
	2. Puskesmas Pantai Cermin	Serdang Bedagai
	3. Puskesmas Satria	Tebing Tinggi
	4. Puskesmas Sidodadi	Asahan
	5. Puskesmas Sambas	Sibolga
	6. Puskesmas Panyabungan Jae	Madina.
2011	7. Puskesmas Tanjung Morawa	Deli Serdang
	8. Puskesmas Sadabuan	Padang Sidempuan
	9. Puskesmas Kota Rantau Prapat	Labuhan Batu
	10. Puskesmas Stabat	Langkat
	11. Puskesmas Rambung	Binjai
2012	12. Puskesmas Pintu Padang	Tapanuli Selatan
	13. Puskesmas Siborong-borong	Tapanuli Utara
	14. Puskesmas Ksatria	Pematang Siantar
	15. Puskesmas Datuk Bandar	Tanjung Balai
	16. Puskesmas Sumbul	Dairi

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2010- 2012.

10. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK

Sampai dengan akhir tahun 2013, terdapat 42 puskesmas DTPK di Sumatera Utara dengan perincian pada tahun 2009 terbentuk 30 puskesmas DTPK di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, tahun 2010 bertambah 3 puskesmas, tahun 2011 bertambah 4 (empat) puskesmas dan tahun 2012 bertambah 5 puskesmas. Pada tahun 2013 tidak ada terbentuk puskesmas DTPK. Jumlah puskesmas DTPK sampai akhir 2013 telah mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 42 puskesmas. Perkembangan jumlah puskesmas DTPK di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2013, adalah:

Tabel 37
Puskesmas DTPK di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009- 2012

TAHUN	PUSKESMAS	KAB/KOTA
2009	1. Kuta Buluh	Dairi
	2. Sopobutar	Dairi
	3. Tiga Baru	Dairi
	4. Parongil	Dairi
	5. Sigalingging	Dairi
	6. Maduamas	Tapanuli Tengah
	7. Sirandorong	Tapanuli Tengah
	8. Andam Dewi	Tapanuli Tengah
	9. Barus Utara	Tapanuli Tengah
	10. Siantar Ca	Tapanuli Tengah
	11. Sipea-pea	Tapanuli Tengah
	12. Barus	Tapanuli Tengah
	13. Sibande	Pakpak Bharat

TAHUN	PUSKESMAS	KAB/KOTA
	14. Salak	Pakpak Bharat
	15. Singgabur	Pakpak Bharat
	16. Kecupak	Pakpak Bharat
	17. Pagindar	Pakpak Bharat
	18. Onan Runggu	Samosir
	19. Sirait	Samosir
	20. Ronggur ni Huta	Samosir
	21. Ambarita	Samosir
	22. Harian	Samosir
	23. Teluk Dalam	Nias Selatan
	24. Lagundri	Nias Selatan
	25. Lahusa	Nias Selatan
	26. Hiliduho	Nias
	27. Botombawo	Nias
	28. Botomuzi	Nias
	29. Hiliweto Gido	Nias
	30. Idano Gawo	Nias
2010	1. Puskesmas Mogang	Samosir
	2. Puskesmas Limbong	Samosir
	3. Puskesmas Sitio-tio	Samosir
2011	1. Puskesmas Lawindra	Nias Selatan
	2. Puskesmas Pulo Tello	Nias Selatan
	3. Puskesmas Sibabangun	Tapanuli Tengah
	4. Puskesmas Sipispis	Serdang Bedagai
2012	1. Puskesmas Hilianumbasela	Nias Selatan
	2. Puskesmas Gunung Sitember	Dairi
	3. Puskesmas Sibagindar	Pakpak Bharat
	4. Puskesmas Tanjung Beringin	Serdang Bedagai
	5. Puskesmas Sipea-pea	Serdang Bedagai

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu 2010-2013

11. Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina

Seperti halnya pada tahun 2012, maka pada tahun 2013 dari 44 puskesmas yang melaksanakan pengobatan tradisional yang dibina sebanyak 24 puskesmas atau 57,14% yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 22 puskesmas pengobatan battra yang dibina. Penyebaran puskesmas dengan pengobatan tradisional di 21 Kabupaten/Kota dan yang dibina dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 38
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengobatan Tradisional dan Yang Dibina Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO	KAB/ KOTA	JML PUSK DGN BATRA	JUMLAH YANG DIBINA	KET PUSKESMAS
1	TAPANULI SELATAN	2	-	-
2	TAPANULI UTARA	2	-	-
3	TOBA SAMOSIR	2	-	-
NO	KAB/KOTA	JML PUSK DGN BATRA	JUMLAH YANG DIBINA	KET PUSKESMAS
4	LABUHAN BATU	2	-	-
5	ASAHAN	2	2	Pusk. Sidodadi, Pusk. Mutiara
6	SIMALUNGUN	2	-	-
7	DAIRI	2	2	Pusk. G. Sitember. Pusk. Tj. Lingga
8	KARO	2	2	Pusk. Kopperi, Pusk. Kabanjahe
9	DELI SERDANG	2	2	Pusk. Pancur Batu, Pusk. Tj. Morawa, Pusk. Galang, Pusk. Batang Beruh

NO	KAB/KOTA	JML PUSK DGN BATRA	JUMLAH YANG DIBINA	KET PUSKESMAS
10	LANGKAT	2	2	Pusk. Stabat, Pusk. Karang Rejo
11	HUMBANG HASUNDUTAN	2	-	-
12	PAKPAK BHARAT	2	-	-
13	SAMOSIR	2	-	-
14	SERDANG BEDAGAI	2	2	Pusk. Desa Pon, Pusk. Sialang Buah
15	BATUBARA	2	2	Pusk. Lab Ruku, Pusk. Kedai Sianam
16	TANJUNGBALAI	2	-	-
17	PEMATANG SIANTAR	2	2	Pusk. Martoba, Pusk. Mutiara
18	TEBING TINGGI	2	2	Pusk. Pasar Gambir, Pusk. Satria
19	MEDAN	2	2	Pusk. Padang Bulan, Pusk. Petisah
20	BINJAI	2	2	Pusk. Tanah Tinggi, Pusk. Binjai Estate
21	PADANGSIDIMPUAN	2	-	-
JUMLAH		42	22	-

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu.

12. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja

Pelayanan Kesehatan Kerja sasarannya adalah kepada kabupaten/kota yang memiliki industri besar, kecil maupun menengah. Sampai dengan akhir tahun 2013, kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja berjumlah 13 kabupaten/kota, sama dengan pencapaian tahun 2012.

Pada tahun 2010, terdapat 4 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar dan Medan. Pada tahun 2011, kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kerja bertambah sebanyak 4 kab/kota, yaitu Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan dan Sibolga. Pada tahun 2012, bertambah 5 Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Asahan; sehingga jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sebanyak 13 Kab/Kota ataupun 39,39%. Dengan pencapaian ini maka target akhir tahun Renstra belum mampu yaitu 20 Kab/Kota tahun 2013.

13. Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga

Sampai dengan akhir tahun 2013, hanya terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki 3 puskesmas dengan pelayanan kesehatan olah raga, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 39
Puskesmas Olahraga di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013

KAB/KOTA	PUSKESMAS
1. MEDAN	- Pusk. Belawan - Pusk. Kampung Baru - Pusk. Medan Area
2. SERDANG BEDAGAI	- Pusk. Pegajahan - Pusk. Dolok Masihul - Pusk. Sei Rampah
3. DELI SERDANG	- Pusk. Bandar Khalipah - Pusk. Tanjung Morawa - Pusk. Lubuk Pakam
4. LABUHAN BATU UTARA	- Pusk. Aek Kanopan - Pusk. Aek Korsik - Pusk. Kota Baru
5. PEMATANG SIANTAR	- Pusk. Parsoburan - Pusk. Raya - Pusk. Ksatria

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu.

Dengan pencapaian ini, maka target akhir Renstra yaitu 33 Kab/kota yang memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga tidak tercapai.

14. Persentase pesantren yang memiliki poskestren

Seperti halnya pada tahun 2012, persentase pesantren yang memiliki poskestren tidak mengalami perubahan pada tahun 2013. Di Sumatera Utara terdapat 150 pesantren yang tersebar di 25 kab/kota dan pesantren yang memiliki poskestren sebanyak 53 pesantren atau 35,3%.

Distribusi pesantren dan yang memiliki poskestren dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 40
Jumlah Pesantren memiliki Poskestren berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO	KAB/KOTA	JML PESANTREN	MEMILIKI POSKESTREN
1	NIAS	0	-
2	MANDAILING NATAL	22	-
3	TAPANULI SELATAN	15	8
4	TAPANULI TENGAH	6	-
5	TAPANULI UTARA	0	-
6	TOBA SAMOSIR	0	-
7	LABUHAN BATU	9	7
8	ASAHAN	6	3
9	SIMALUNGUN	5	-
10	DAIRI	1	1
11	KARO	2	2
12	DELI SERDANG	13	3
13	LANGKAT	19	6
14	NIAS SELATAN	0	-
15	HUMBANG HASUNDUTAN	1	1
16	PAKPAK BHARAT	0	-
17	SAMOSIR	0	-
18	SERDANG BEDAGAI	4	1
19	BATUBARA	4	2
20	PADANG LAWAS	15	7
21	PADANG LAWAS UTARA	6	-
22	LABUHAN BATU SELATAN	8	2
23	LABUHAN BATU UTARA	3	-
24	NIAS UTARA	0	-
25	NIAS BARAT	0	-
26	SIBOLGA	0	-
27	TANJUNGBALAI	1	1
28	PEMATANG SIANTAR	1	1
29	TEBING TINGGI	1	1
30	MEDAN	11	6
31	BINJAI	2	1
32	PADANGSIDIMPUAN	8	-
33	GUNUNG SITOLI	2	-
JUMLAH		150	53

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

1. Supervisi Fasilitatif ke Kabupaten/Kota.
2. Pencetakan Kartu Ibu, Kartu Bayi & Register Kohort
3. Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
4. Workshop Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)
5. Penetapan Audit Maternal Perinatal (AMP)
6. Peningkatan Pelayanan Ambulans/Staylapmer
7. Peningkatan Pelayanan Ambulans
8. Pemantapan Manajemen Puskesmas
9. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan Pengolahan Data SP2TP
10. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam rangka Memperoleh ISO 9001 : 2008
11. Pertemuan Penerapan Perkesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
12. Advokasi Program Puskesmas Santun Lansia di Kabupaten/Kota
13. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olah Raga Tingkat Provinsi

2. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Capaian Indikator Kinerja pada Program ini, adalah sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 41
Indikator Kinerja, Sasaran, Capaian dan Persen Capaian
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2013

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	65%	55%	84,61
2	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	50%	38%	76
3	Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga	100%	49,17%	49,17
4	Persentase desa siaga aktif	35%	21,35%	61
5	Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan	30%	22,5%	75

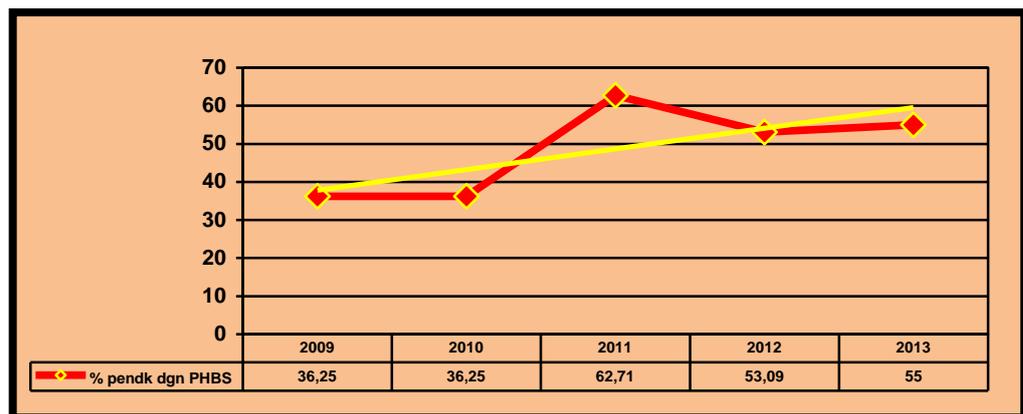
Dari persen capaian terlihat, bahwa dari 5 indikator kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, tidak ada yang berkategori baik, dua indikator (60%) yaitu indikator ke-1,2 dan ke-5 berkategori KURANG, dan 2 indikator (40%) yaitu indikator ke-3 dan 4 berkategori SANGAT KURANG. Rendahnya pencapaian indikator Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat perlu menjadi perhatian dan prioritas pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Renstra 2013-2018. Penjelasan tentang

pencapaian masing-masing indikator kinerja serta analisa kecendrungan pencapaian sejak tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. **Persentase penduduk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**

Penghitungan persentase rumah tangga ber-PHBS dilaksanakan melalui survey PHBS Rumah Tangga. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2007, persentase penduduk yang ber-PHBS di Sumatera Utara adalah 36,5%. Akibat tidak adanya survey yang berkaitan dengan penduduk ber-PHBS setelah tahun 2007, maka angka 36,5% digunakan setiap tahun sampai dengan tahun 2010.

Grafik 6
Persentase Penduduk Melaksanakan PHBS
Tahun 2009 – 2013



Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

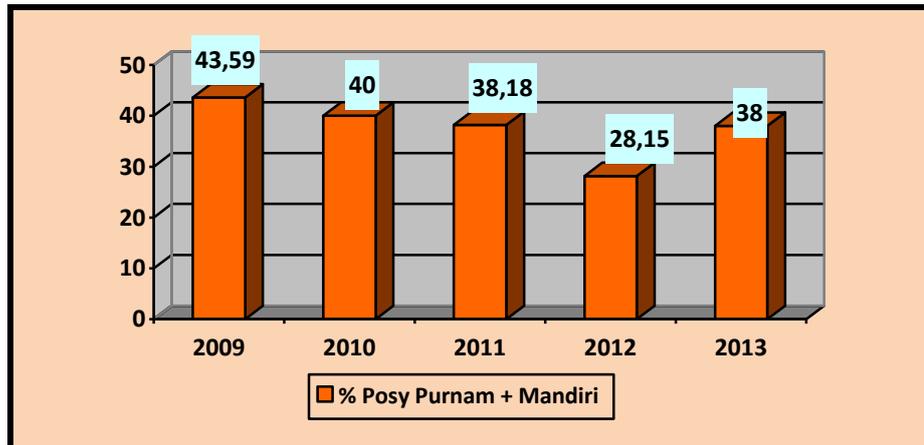
Pada tahun 2013, dilaporkan bahwa dari 823.000 rumah tangga yang dipantau ditemukan 452.650 RT (55%) yang ber-PHBS. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun

2012 yaitu 53,09%; namun lebih rendah dari pencapaian tahun 2011 yaitu 62,71%. Dengan pencapaian 55% pada tahun 2013, maka target akhir tahun Renstra yaitu 65% belum mampu dicapai.

2. *Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri*

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dilihat dari persentase posyandu Purnama dan Mandiri. Persentase posyandu purnama dan mandiri menunjukkan kecenderungan penurunan kurun waktu 2009-2013 menunjukkan kecenderungan penurunan. Persentase posyandu purnama dan mandiri tertinggi dicapai pada tahun 2009 mencapai hampir 54%, dan mengalami penurunan setiap tahun sampai tahun 2012 mencapai 28%. Pada tahun 2013, dari 15.670 posyandu yang ada, terdapat 5.954 unit posyandu purnama dan mandiri, sehingga pencapaian persentase posyandu purnama dan mandiri hanya 38%. Walaupun mengalami peningkatan di tahun 2013, namun dengan angka ini belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 50% tahun 2013. Perkembangan persentase posyandu purnama dan mandiri terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 7
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 – 2013



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara

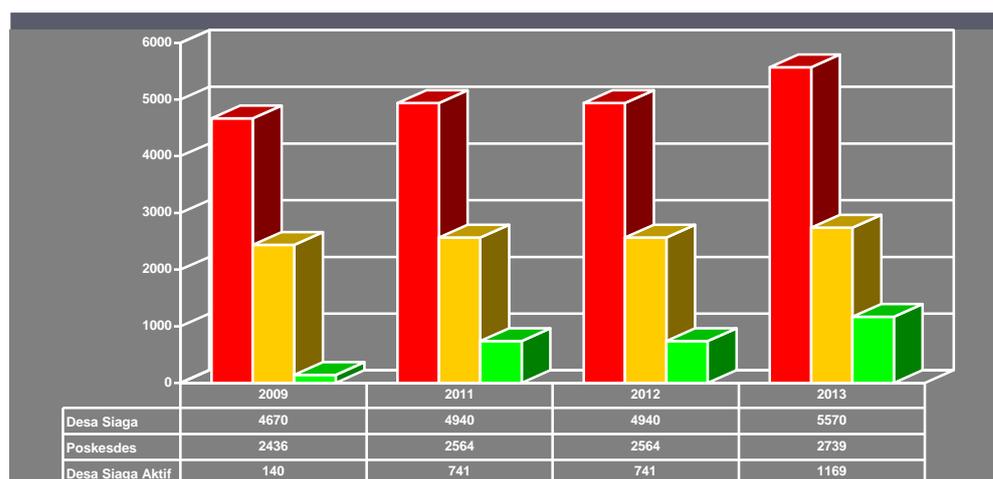
3. Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga.

Jumlah Desa Siaga, poskesdes dan Desa Siaga Aktif mengalami peningkatan kurun waktu 2009-2013. Namun penambahan Desa Siaga tidak diikuti dengan pembangunan poskesdes, sehingga jumlah Desa Siaga yang ada lebih banyak dari jumlah poskesdes. Pada tahun 2009-2010, Desa Siaga bertambah sebanyak 280 unit namun poskesdes hanya bertambah 122 unit. Pada tahun 2011-2012, Desa Siaga bertambah 270 unit namun penambahan poskesdes hanya 128 unit.

Pada tahun 2013, jumlah desa siaga bertambah menjadi 730 unit, namun poskesdes hanya meningkat 155 unit. Kesenjangan dalam pembentukan Desa Siaga dan pembangunan poskesdes menyebabkan persentase Desa Siaga dengan poskesdes

menurun menjadi 49,17% pada tahun 2013, dari sebelumnya tahun 2011 yaitu 52% dan tahun 2010 yaitu 55%. Di lain pihak, persentase Desa Siaga aktif meningkat secara tajam, yaitu dari 15% pada tahun 2011 menjadi 21,35% pada tahun 2013.

Grafik 8
Jumlah Desa Siaga, Poskesdes dan Desa Siaga Aktif
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013



Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

4. **Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan**

Di Sumatera Utara terdapat 9.632 unit SD/MI, dari jumlah tersebut yang melaksanakan Promosi Kesehatan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebanyak 2.167 SD/MI atau 22,50%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012, yaitu 1.908 SD/MI atau 20%.

Distribusi SD/MI yang mempromosikan kesehatan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 42
Jumlah SD/MI dan yang mempromosikan Kesehatan
berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO	KAB/KOTA	JML SD/MI	MEMPROMOSIKAN KES
1	NIAS	143	29
2	MANDAILING NATAL	403	81
3	TAPANULI SELATAN	288	58
4	TAPANULI TENGAH	332	66
5	TAPANULI UTARA	353	73
6	TOBA SAMOSIR	223	54
7	LABUHAN BATU	303	71
8	ASAHAN	481	109
9	SIMALUNGUN	924	185
10	DAIRI	265	51
11	KARO	291	58
12	DELI SERDANG	803	182
13	LANGKAT	694	153
14	NIAS SELATAN	312	63
15	HUMBANG HASUNDUTAN	222	44
16	PAKPAK BHARAT	71	14
17	SAMOSIR	203	41
18	SERDANG BEDAGAI	433	89
19	BATUBARA	301	67
20	PADANG LAWAS	182	36
21	PADANG LAWAS UTARA	223	45
22	LABUHAN BATU SELATAN	202	40
23	LABUHAN BATU UTARA	31	9
24	NIAS UTARA	153	31
25	NIAS BARAT	105	21
26	SIBOLGA	67	27
27	TANJUNGBALAI	104	26
28	PEMATANG SIANTAR	172	49
29	TEBING TINGGI	104	33
30	MEDAN	856	215
31	BINJAI	168	47
32	PADANGSIDIMPUAN	107	30
33	GUNUNG SITOLI	113	70
JUMLAH		9632	2167

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

1. Pembinaan/Bimbingan Teknis Program Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Pendidikan Kesehatan melalui Peringatan Hari-Hari Besar Kesehatan

3. Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik
4. Pekan Raya Sumatera Utara
5. Pertemuan Capacity Building bagi Petugas Promosi Kesehatan Kabupaten/Kota
6. Pemutaran Film dan Ceramah Kesehatan di Kabupaten/Kota
7. Pertemuan Peningkatan Kinerja UKS
8. Pembinaan Program Desa Siaga dan konsultasi ke Pusat

3. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Tabel 43
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tahun 2013

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Persentase gizi buruk yang ditangani	100%	100%	100
2	Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	55%	37%	67,3
3	Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium	90%	96%	106,7
4	Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A	83%	78%	94
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe	80%	64%	80
6	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	100%	100%	100
7	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	80%	80%	100
8	Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI (Makanan Pendamping– Air Susu Ibu) untuk bencana	100%	100%	100
9	Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	55%	20,20	36,73

1. *Persentase gizi buruk yang ditangani*

Pada tahun 2013, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 1.133 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 746 kasus dan tahun 2011 yaitu 375 kasus.

Distribusi kasus balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani per kab/kota seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 44
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani
Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2013

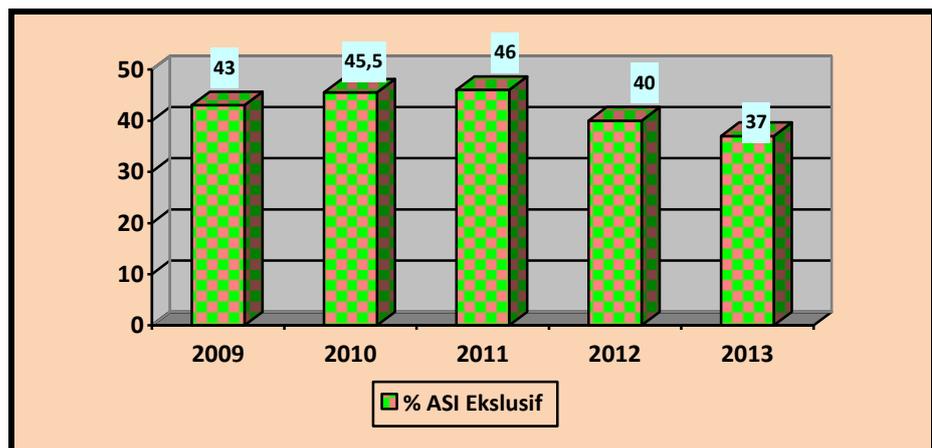
NO	KAB/KOTA	BALITA GIZI BURUK		
		2011	2012	2013
1	NIAS	-	8	18
2	MANDAILING NATAL	15	62	9
3	TAPANULI SELATAN	15	41	3
4	TAPANULI TENGAH	12	13	14
5	TAPANULI UTARA	7	13	37
6	TOBA SAMOSIR	12	12	5
7	LABUHAN BATU	10	3	8
8	ASAHAN	20	45	127
9	SIMALUNGUN	25	23	27
10	DAIRI	20	110	60
11	KARO	15	35	11
12	DELI SERDANG	4	5	7
13	LANGKAT	27	19	149
14	NIAS SELATAN	10	2	0
15	HUMBANG HASUNDUTAN	8	13	9
16	PAKPAK BHARAT	4	3	18
17	SAMOSIR	7	3	10
18	SERDANG BEDAGAI	12	12	45
19	BATUBARA	18	14	79
20	PADANG LAWAS	11	38	2
21	PADANG LAWAS UTARA	6	9	21
22	LABUHAN BATU SELATAN	10	21	24
23	LABUHAN BATU UTARA	13	10	13

NO	KAB/KOTA	BALITA GIZI BURUK		
		2011	2012	2013
24	NIAS UTARA	6	14	12
25	NIAS BARAT	5	20	6
26	SIBOLGA	12	21	6
27	TANJUNGBALAI	13	1	27
28	PEMATANG SIANTAR	5	7	14
29	TEBING TINGGI	4	6	14
30	MEDAN	25	143	265
31	BINJAI	12	12	37
32	PADANGSIDIMPUAN	5	3	8
33	GUNUNG SITOLI	9	5	48
JUMLAH		375	746	1.133

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

2. Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif

Grafik 9
Persentase Bayi 0-6 bulan Mendapatkan ASI
Eksklusif
Tahun 2009 – 2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kurun waktu 2009-2013, bahkan pencapaian tahun 2013 adalah capaian terendah selama kurun waktu 5 tahun. Dari 103.577 bayi usia 0-5 bulan yang terdata

hanya 38.593 bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif (35%). Dengan pencapaian ini, maka program perbaikan gizi masyarakat belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yang ditetapkan yaitu 55% pada tahun 2013.

3. Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium

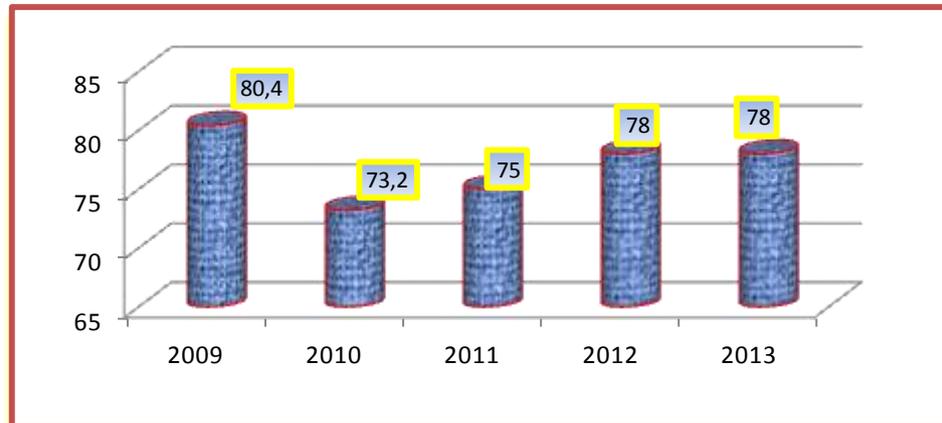
Konsumsi garam mengandung cukup Iodium merupakan upaya prevalensi *penderita GAKY*. Berdasarkan hasil Ridesdas (2007) diketahui bahwa hampir 90% rumah tangga (RT) telah mengkonsumsi garam yang mengandung cukup Iodium. Pada tahun 2013 dilaksanakan survey konsumsi garam yodium pada RT, dimana dari 252.458 sampel garam yang diambil ditemukan 242.412 sampel adalah garam beriodium (96%). Dengan demikian pencapaian tahun 2013 telah mampu mencapai target akhir tahun Rentsra yang ditetapkan yaitu 90%.

4. Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A

Cakupan pemberian vitamin A kurun waktu 2009-2013 menunjukkan kecendrungan penurunan, bahkan pada tahun 2010 menurun sangat tajam sekitar 7% dibandingkan tahun 2009 yaitu 80,4%, dan pencapaian tahun 2010 merupakan pencapaian terendah dalam kurun waktu 5 tahun. Walaupun sejak tahun 2011 menunjukkan peningkatan dan berakhir pada angka 78% pada tahun 2013, namun masih dibawah target nasional yaitu 80% dan

dibawah target Renstra Dinkes Provsu yang ditetapkan yaitu 83% pada tahun 2013.

Grafik 10
Trend Cakupan Pemberian Vitamin A
Tahun 2009 – 2014



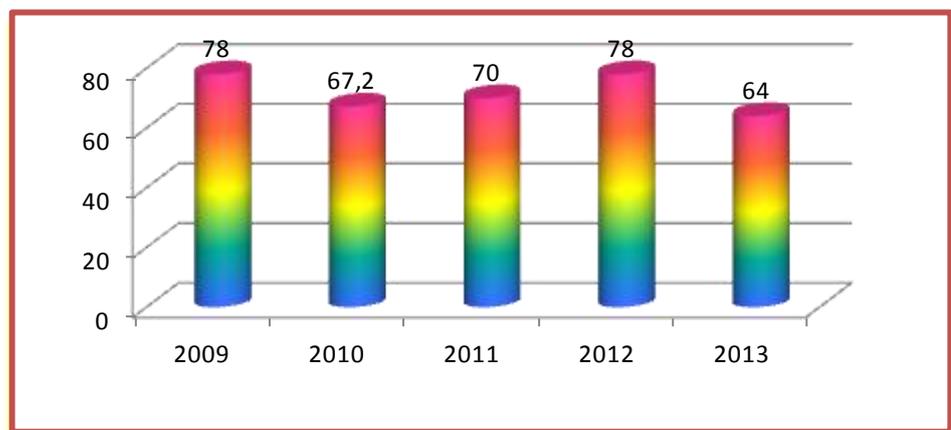
Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Masih rendahnya cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita, menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pemberian kapsul vitamin A pada balita, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya kunjungan balita ke puskesmas maupun pos-pos pelayanan kesehatan. Karena pada umumnya, bayi (0-12 bulan) lebih banyak mengunjungi pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi lengkap, penimbangan dan pemberian kapsul vitamin A. Setelah mendapatkan imunisasi lengkap, umumnya kunjungan anak balita ke pelayanan kesehatan akan berkurang secara drastis.

5. *Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe*

Cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet zat besi juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan sejak tahun 2009. Pencapaian tahun 2013 merupakan pencapaian terendah kurun waktu lima tahun dan juga penurunan yang paling besar mencapai 14% dibandingkan tahun 2012.

Grafik 11
Cakupan Pemberian Fe 90 Tablet Tahun 2009 – 2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

6. *Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi*

Dengan angka pencapaian 64%, maka indikator ini pun belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 80% pada tahun 2013. Surveilans gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi buruk dan indikator pembinaan gizi masyarakat agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif, efisien dan

tepat waktu melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan dan tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi. Surveilans gizi akan meningkatkan efektivitas program dengan mempertajam upaya penanggulangan masalah gizi secara tepat waktu, tempat, sasaran dan jenis tindakannya. Sejak tahun 2009, seluruh Kab/Kota telah melaksanakan surveilans gizi atau 100%.

7. *Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)*

Indikator ini menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tinggi rendahnya hasil capaian indikator ini tergantung pada partisipasi masyarakat. Jika hasil capaian rendah, artinya partisipasi masyarakat yang rendah terhadap kegiatan posyandu.

Dari jumlah balita sebesar 1.150.462 orang yang ditimbang adalah 948.796 orang (80%) pada tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2012 yaitu 65% dan tahun 2011 yaitu 72%. Walaupun mengalami peningkatan namun indikator ini belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yang ditetapkan yaitu 100%.

8. *Persentase penyediaan buffer stock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana*

Penyediaan buffer stock MP-ASI adalah ditujukan untuk mengantisipasi situasi darurat akibat bencana, KLB gizi dan situasi sulit lainnya. Pada tahun 2013, capaian dari indikator ini adalah 100% dengan target program 100% pada tahun yang sama.

9. *Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)*

Kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jika sudah terlalu lama maka akan terjadi Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan kejadian KEK pada ibu hamil merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan, karena sangat mempengaruhi kehidupan janin dalam bayi kandungan dan juga sang ibu. Pada tahun 2013 terdapat 14.289 bumil yang mengalami KEK. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan PMT dengan masa pemberian 60 hari adalah sebanyak 2.880 bumil (20,20%). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yaitu 9,5% dan tahun 2010 yaitu 8,1%. Walaupun mengalami peningkatan, pencapaian tahun 2013 belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 50%.

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

1. Pertemuan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi/Gizi Buruk

2. Penyediaan Bufferstock MP-ASI dan Monitoring MP-ASI
3. Pengadaan PMT Ibu Hamil

4. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

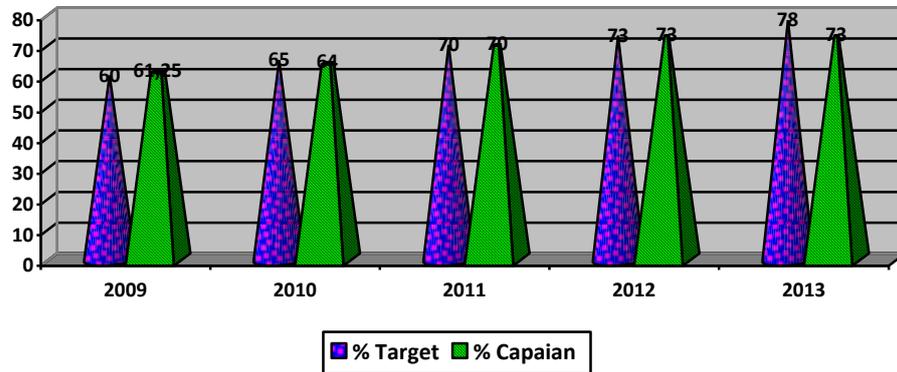
Tabel 45
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Lingkungan Sehat Tahun 2013

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	78%	73%	93,59
2	Persentase keluarga menggunakan air bersih	75%	61%	81,33
3	Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan	70%	59%	84,28
4	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	73%	73%	100
5	Persentase Kab/Kota Sehat	30%	30%	100
6	Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi	45%	51,7%	114,89
7	Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis	80%	43%	53,75
8	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan	100%	100%	100

1. *Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan*

Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2009, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 12
Persen Target dan Capaian Keluarga menghuni Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Selama Kurun waktu Tahun 2009-2013, persentase keluarga yang menghuni rumah memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2013, dari 4.047.558 unit rumah yang ada di Sumatera Utara sebanyak 1.460.183 unit (36%) mendapatkan pemeriksaan dan yang memenuhi syarat kesehatan adalah 1.072.700 unit (73,46%).

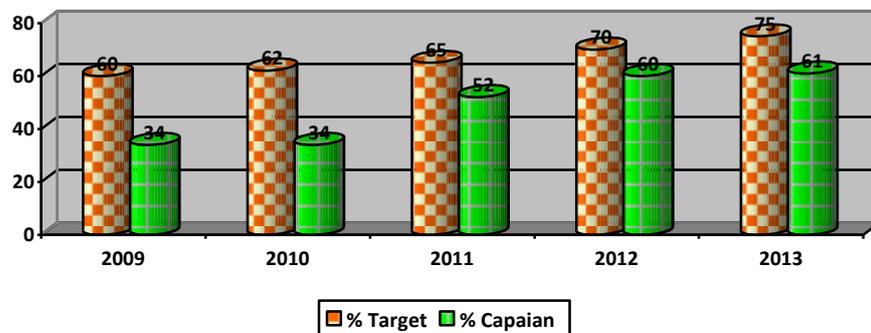
Secara persentase, pencapaian tahun 2013 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2012, namun dari jumlah rumah yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan menunjukkan penurunan.

Pada tahun 2012, dari 3.110.203 unit rumah sebanyak 1.492.891 unit (47,99%) mendapatkan pemeriksaan dan yang memenuhi syarat kesehatan adalah 1.089.810 unit (73%). Dengan pencapaian 73,46% maka target akhir tahun Renstra yaitu 78% tidak tercapai pada tahun 2013.

2. *Persentase keluarga menggunakan air bersih*

Persentase keluarga menggunakan air bersih mengalami peningkatan sejak tahun 2011. Pada tahun 2013 meningkat hanya 1% dari tahun 2012 dan meningkat 8% dari tahun 2011. Pada tahun 2013, dari 3.173.274 keluarga yang ada di Sumatera Utara, yang memiliki sarana air bersih sebanyak 1.935.697 keluarga (61%). Dengan pencapaian ini, maka target akhir tahun Renstra yaitu 75% belum mampu dicapai, seperti lebih jelas tergambar pada grafik berikut:

Grafik 13
Persen Target dan Capaian Keluarga Menggunakan Air Bersih
Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009-2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

3. *Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan*

Berbeda halnya dengan ke-2 indikator Program Lingkungan Sehat yang sebelumnya, pencapaian persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan telah mampu mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2013, dari 1.666.131 rumah tangga yang diperiksa jambannya terdapat 985.309 rumah tangga yang memiliki jamban memenuhi syarat kesehatan (59,13%). Persentase ini mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu 66%, tahun 2011 yaitu 61%, dan tahun 2010 sebesar 60%.

Pencapaian tahun 2013 belum mampu mencapai target akhir Renstra yang ditetapkan yaitu 70%.

4. *Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan*

Pencapaian persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan mengalami peningkatan sejak tahun 2010, yaitu 47% (2010), 63% (2011), 70,30% (2012) dan tahun 2013 (70,94%). Pada tahun 2013, dari 18.409 unit TTU yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 13.059 unit atau 70,94%.

5. *Persentase Kab/Kota Sehat*

Seperti halnya pencapaian pada tahun 2012, dari 33 kab/kota yang ada di Sumatera Utara, masih 10 Kab/Kota yang telah melaksanakan sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat, sehingga persentase Kab/Kota Sehat adalah sebesar 30% sampai tahun 2013. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2011 yaitu 24,3% dan tahun 2010 yaitu 15%. Pada tahun 2010, Kabupaten/Kota yang termasuk Kabupaten/Kota Sehat adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar dan Kota Medan. Pada tahun 2011, kabupaten/Kota Sehat bertambah 2 (dua) yaitu Kota Tebing Tinggi dan Binjai, dan pada tahun 2012 bertambah 2 Kabupaten/Kota sehat yaitu Kota Tanjung Balai dan Kab. Simalungun. Pada tahun 2013 tidak ada penambahan daerah, namun terdapat 3 kabupaten/kota yang pelaksanaan kegiatan kabupaten/kota sehat didukung oleh APBD yaitu Kota Pematang Siantar, Binjai dan Pematang Siantar.

6. *Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi*

Sampai dengan akhir tahun 2013, dari 569 puskesmas yang ada, yang memiliki klinik sanitasi yang aktif yaitu 294 puskesmas atau 53,16%. Pencapaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pencapaian tahun 2012 yaitu 41,75%, tahun 2011 yaitu 38,71% dan tahun 2010 yaitu sebesar 30%.

Dengan pencapaian 53,16% pada tahun 2013 maka target akhir tahun Renstra yaitu 45% telah tercapai.

7. *Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis*

Pada tahun 2013, dari 65 sampel air minum dan bersih yang diperiksa, sebanyak 28 sampel atau 43% yang memenuhi syarat bakteriologis. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan persentase pada tahun 2012 yaitu 45%, tahun 2011 yaitu 43% dan tahun 2010 yaitu 20%.

Dengan penurunan ini, maka target akhir tahun Renstra yang ditetapkan yaitu 80% belum mampu dicapai.

8. *Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan*

Pencapaian persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Program Penyehatan Lingkungan sejak tahun 2010 telah mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%. Hasil capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Program Penyehatan Lingkungan.

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
3. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasa Danau Toba

4. Pilot Project Pembentukan Kota Sehat
5. Pengawasan Kualitas Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Tabel 46
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Tahun 2013

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Angka Case Detection Rate Penyakit TB	85%	79,6%	93,65
2	Angka keberhasilan pengobatan TB	96%	93,9%	97,81
3	Case Fatality Rate (CFR) diare pada saat KLB	1,2%	1,56%	76,92
4	ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART	60%	76%	126,67
5	Prevalensi Kasus HIV penduduk	0,05%	0,06%	120
6	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk	<5/100.000 pddk	1,4/100.000 pddk	100
7	Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk	<0,6/100.000 pddk	0,06/100.000 pddk	100
8	Cakupan Penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita	80%	15,70%	19,6
9	Prevalensi kecacangan pada anak sekolah	10%	30,8%	32,46
10	Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk (API)	1/1.000 Pddk	1,02/1.000 Pddk	107,84
11	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	50/100.000 pddk	20/100.000 pddk	40
12	Kasus suspek flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standard	100%	100%	100
13	Persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antraks, leptopirosis) yang ditangani sesuai standard	90%	89%	98,89

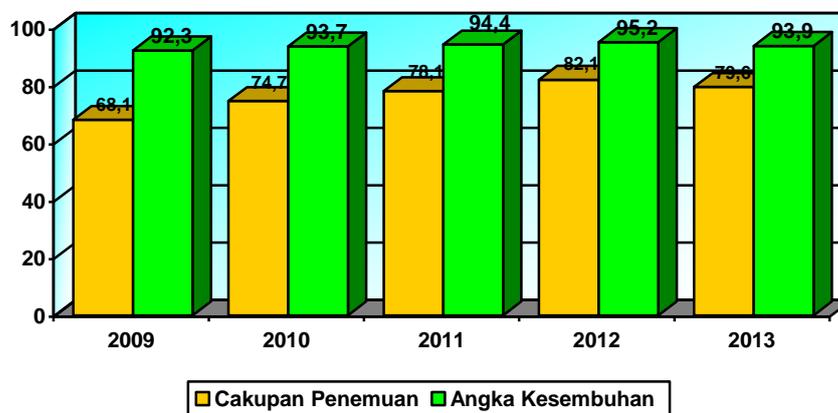
NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	% CAPAIAN
14	Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis	65%	85%	130,77
15	Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor	50%	21,21%	42,42
16	Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta	5%	15,7%	31,85
17	Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit	80%	78,43%	98,04
18	Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB	90%	100%	111
19	Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk	>2/100.000 pddk	2,04/100.000 pddk	100
20	Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji	<2,1/1.000 Pddk	1,84/1.000 Pddk	72,41
21	Persentase desa yang mencapai <i>Universal Child Immunization</i> (UCI).	82%	73,8%	90
22	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	85%	81,11%	95,4
23	Persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap	90%	97,3%	108,11
24	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular	90%	90,9%	100
25	Persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans kesehatan matra	50%	75,76%	151.52
26	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana	90%	100%	111,11

1. Angka Case Detection Rate (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan TB

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 14

Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009–2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Pada tahun 2013, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 16.917 kasus atau 79,6% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.664 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 70%, namun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 yaitu 82,1%.

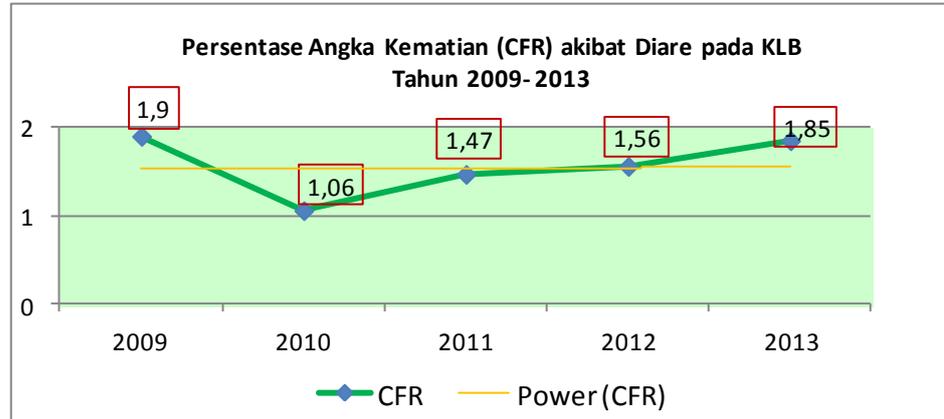
Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2012, namun tahun 2013 terjadi penurunan hal ini terjadi karena Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli tidak melaporkan kasus TB selama tahun 2013. Sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2009 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.

2. *Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa)*

KLB diare merupakan salah satu KLB yang setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera dan pada tahun 2013 telah terjadi KLB diare di 3 Kab/Kota, yaitu di Kota Gunung Sitoli dengan jumlah penderita 2 orang dan pasien meninggal. Di Kabupaten Asahan, jumlah penderita sebanyak 20 orang dan 1 orang meninggal, di Kabupaten Batubara jumlah penderita 14 orang dan tidak ada kasus kematian. Dengan demikian CFR Diare pada saat KLB di perhitungkan sebesar 1,85 %, dan peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 1,56%. Angka kematian (CFR) akibat diare pada saat KLB menunjukkan kecenderungan meningkat. Ini

menunjukkan bahwa tingkat penemuan dan tata laksana penderita diare pada saat KLB sudah baik tetapi harus tetap ditingkatkan.

Grafik 15

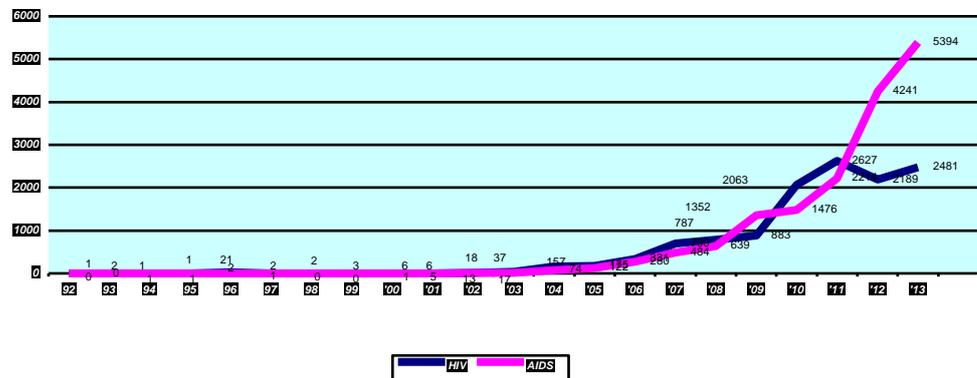


Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

3. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 15
Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 1992 - 2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan HIV/AIDS meningkat begitu tajam. Pada tahun 2013, jumlah kasus HIV/AIDS meningkat tajam dari 6.430 kasus pada tahun 2012 menjadi 7.875 kasus

dengan perincian kasus HIV sebanyak 2.481 kasus, dan kasus AIDS 5.394 kasus. Dari 7.875 penderita HIV/AIDS tahun 2013, yang memenuhi syarat untuk pengobatan ARV adalah 5.394 penderita dan yang mendapatkan ARV sebanyak 4.099 penderita atau 76%. Persentase ini tidak berbeda dengan pencapaian tahun 2012 yaitu 76%, namun meningkat bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 yaitu 73,2% dan tahun 2010 yaitu 67,48%. Walaupun penemuan kasus HIV/AIDS meningkat namun belum maksimal, berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Kemenkes RI, pada tahun 2011 diperkirakan ada 11.836 penderita HIV/AIDS di Sumatera Utara dan sampai tahun 2013 jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan baru mencapai 7.875 orang atau 46,14%.

4. Prevalensi Kasus HIV Penduduk

Dengan jumlah penderita HIV/AIDS sampai tahun 2012 yaitu 7.875 orang, maka diperhitungkan prevalensi HIV/AIDS penduduk yaitu pada tahun 2013 adalah 0,06%; angka ini mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2012 yaitu 0,049%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 0,05% maka hasil capaian telah melampaui target yang ditetapkan. Dari peningkatan prevalensi HIV/AIDS tersebut, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Oleh karena Kementerian Kesehatan pada tahun 2011 telah mengestimasi bahwa di Sumatera Utara terdapat 17.070 penderita HIV/AIDS, sehingga meningkatnya prevalensi ini menunjukkan keberhasilan di dalam mencover penderita HIV/AIDS, untuk mencegah penularan/penyebaran HIV/AIDS dan pasien bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih cepat.
- 2) Cepatnya peningkatan prevalensi HIV/AIDS ini menunjukkan perlunya tindak upaya yang lebih konkrit untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Mengingat kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan hanya di permukaan saja, namun sebenarnya telah banyak penderita HIV/AIDS, namun tidak ditemukan; karena belum terdeteksi atau karena penderita tidak/belum mengetahui dia menderita HIV/AIDS. Untuk itu kedepan sangat dibutuhkan ketersediaan dan peningkatan mutu pelayanan VCT, CST, IMS, PITC dan PMTCT di seluruh Kab/Kota.

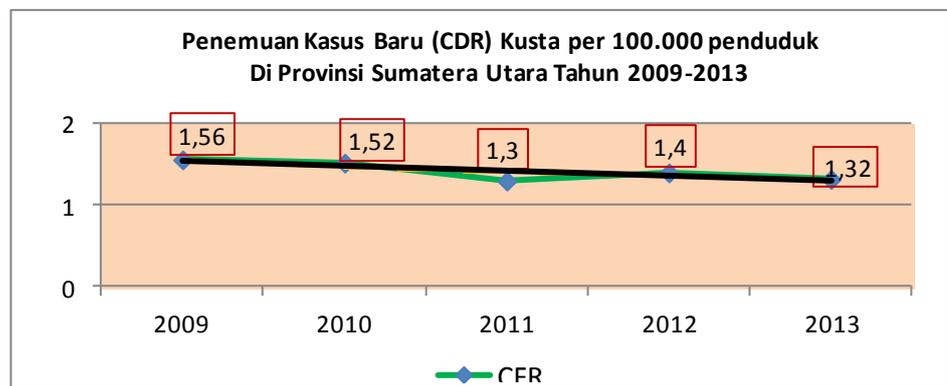
5. *Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk*

Permasalahan penyakit kusta ini bila dikaji secara mendalam merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan merupakan permasalahan kemanusiaan seutuhnya. Masalah yang dihadapi pada penderita bukan hanya

dari medis saja tetapi juga adanya masalah psikososial sebagai akibat penyakitnya.

Pada tahun 2013, jumlah penderita baru kusta yang ditemukan sebanyak 175 orang atau 1,32 per 100.000 penduduk. Dari grafik terlihat bahwa angka penderita kusta baru cenderung menurun, dan target <5 per 100.000 penduduk tetap bisa dipertahankan selama kurun waktu 5 tahun.

Grafik 16



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

6. Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia/100.000 Penduduk

Pada tahun 2013, jumlah kasus baru Frambusia yang ditemukan sebanyak 12 kasus, yaitu di Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 8 kasus, di Kabupaten Deli Serdang terdapat 3 kasus, dan di Kabupaten Samosir yaitu 1 kasus. Dengan demikian angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk tahun 2013 yaitu 0,06.

Angka ini mengalami penurunan dibandingkan angka pada tahun 2012 yaitu 0,08/100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target yaitu <0,6/100.000 penduduk maka pencapaian angka kasus baru Frambusia dapat terus ditekan untuk tetap pada angka <0,6/100.000 penduduk.

Pada tahun 2012, jumlah kasus baru Frambusia yang ditemukan sebanyak 10 kasus yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Labuhan Batu. Dengan demikian angka penemuan kasus baru Frambusia per 100.000 penduduk tahun 2012 yaitu 0,08. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 dan 2010 yaitu 0,015/100.000 penduduk.

Bila dibandingkan dengan target yaitu < 0,6/100.000 penduduk maka kasus baru Frambusia dapat ditekan untuk tetap dibawah angka < 0,6/100.000 penduduk.

7. Cakupan Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita

Lingkungan fisik rumah merupakan faktor resiko terhadap kejadian pneumonia pada balita antara lain : kepadatan hunian, jenis rumah, lokasi dapur, ventilasi rumah, dan pemakaian bahan bakar kayu. Pada tahun 2013, di Sumatera Utara jumlah kasus pneumonia yang di temukan yaitu 17.615 kasus atau 12,96% dari jumlah perkiraan kasus pneumonia pada usia balita sebanyak

131,036 kasus. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2012 yaitu 13,19% , dan sangat rendah pencapaiannya dibandingkan target akhir tahun Renstra yang ditetapkan yaitu 15,70% pada tahun 2013.

8. *Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah*

Prevalensi kecacingan pada anak sekolah diharapkan mampu diturunkan hingga menjadi < 10%. Pada tahun 2013, survey kecacingan dilaksanakan di dua yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tapanuli Tengah, hasil survey menunjukkan bahwa prevalensi kecacingan pada anak sekolah dasar adalah sebesar 30,8%, dengan perincian: Cacing Gelang yaitu 32%, Cacing Cambuk adalah 11%, Mix (Cacing Gelang dan Cacing Cambuk) sebesar 3,8% dan Cacing tambang 3%. Dari hasil survey yang dilakukan maka hasil capaian belum mencapai target bila dibandingkan dengan target yg ditetapkan tahun 2013 yaitu < 20 %.

Berdasarkan survey kecacingan pada anak SD yang dilaksanakan tahun 2012 diperoleh hasil prevalensi kecacingan pada anak sekolah khususnya SD adalah sebesar 32,3%; dengan persentase Cacing Gelang 21%, Cacing Cambuk 11% dan Cacing tambang 0%. Angka ini lebih tinggi dari pencapaian 2011 yaitu 28%, sehingga yg ditetapkan tahun 2012 yaitu 20% belum mampu dicapai.

9. **Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API)**

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 20 Kabupaten/Kota endemis malaria yang tersebar di 184 kecamatan dan 1.847 desa. Pada tahun 2013 terdapat 102.726 kasus klinis malaria, dengan slide diperiksa 82.302 kasus dan yang positif malaria sebanyak 17.265 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 136.324 kasus malaria klinis, dengan slide diperiksa sebanyak 130.073 kasus dan yang positif yaitu 13.682 kasus. Dengan demikian Angka Kasus Positif Malaria per seribu penduduk atau *Annual Parasite Incidence (API)* menunjukkan adanya penurunan yaitu 1,29‰ (2013), 1,70‰ (2012) dan 1,44‰ (2011). Dengan pencapaian 1,29‰ maka target akhir tahun Renstra yaitu 1‰ belum mampu dicapai pada tahun 2013.

Kabupaten dengan API tertinggi adalah kabupaten Mandailing Natal dengan API yaitu sebesar 10,62 ‰, Kabupaten Batu Bara 8,18 ‰, Nias Selatan 4,66‰ dan Kabupaten Labuhan Batu Utara 2,61‰. Sedangkan Kabupaten terendah adalah Kabupaten Deli Serdang yaitu 0,01 ‰.

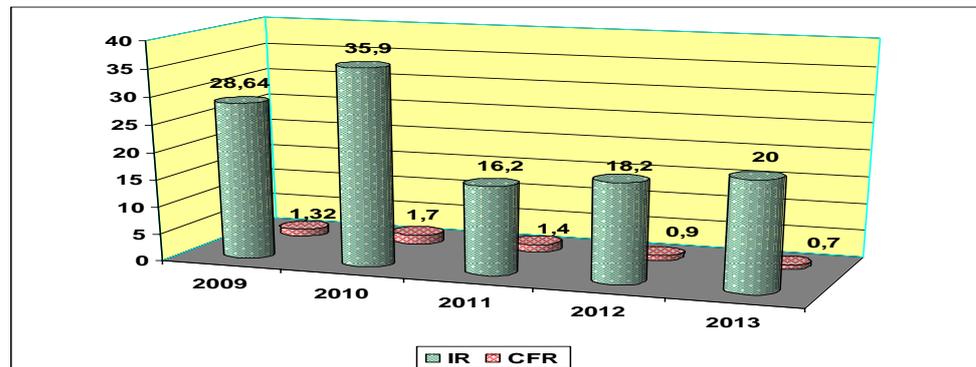
10. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000

Penduduk

Program P2 DBD di Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu angka kesakitan (*Incidence Rate/IR*) dan angka kematian (*Case Fatality Rate/CFR*). Indikator IR DBD <50 per 100.000 penduduk, sedangkan CFR <1%.

Grafik 17

Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Angka kesakitan DBD selama 5 tahun terakhir (2009-2013) terlihat fluktuatif. Angka kesakitan DBD tahun sebesar 2013 sebesar 20 per 100.000 penduduk mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 18,5 per 100.000 penduduk dan tahun 2011 sebesar 16,2 per 100.000 penduduk, namun bila dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu tahun 2013 yaitu <50 per 100.000 penduduk maka hasil target telah mampu dicapai.

Di lain pihak, angka CFR (Case Fatality Rate) DBD menunjukkan trend penurunan, dari 1,32% pada tahun 2009 turun menjadi 0,7% pada tahun 2013. Dengan pencapaian ini mampu mencapai target nasional yaitu <1%. Ini menunjukkan kecepatan dan penanganan kasus penderita DBD sudah mampu ditingkatkan.

11. Kasus Suspek Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani sesuai Standard

Kasus suspect Flu burung/Avian Influenza mulai muncul di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 yaitu dengan ditemukannya 9 (sembilan)

Orang diduga menderita penyakit Flu Burung, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan darah penderita dinyatakan negatif AI. Kemudian pada tahun 2006 ditemukan 15 orang dari Kabupaten Karo yang dinyatakan Suspect Flu Burung. Kejadian yang terjadi di Kab. Karo ini merupakan kluster terbesar di dunia dan tingkat kematian tertinggi di Indonesia (CFR 85%).

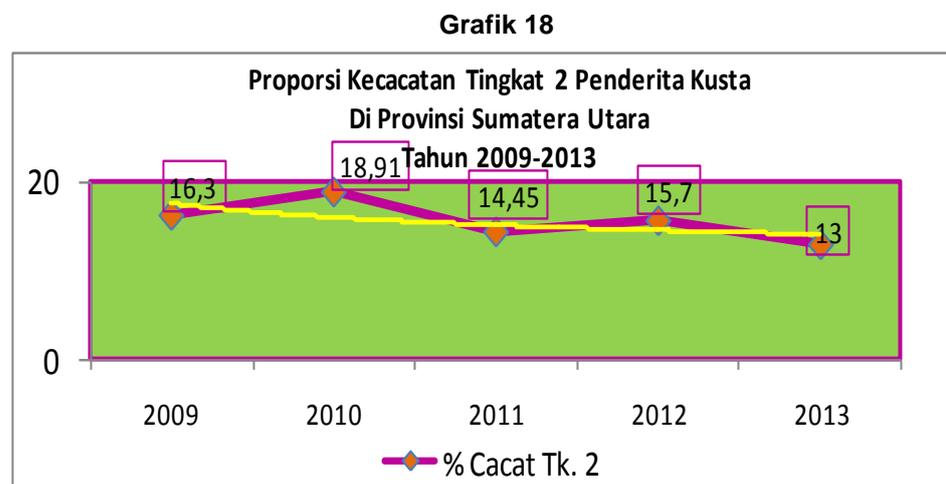
Pada tahun 2007, sebanyak 34 orang dinyatakan suspect, 1 orang diantaranya positif dan meninggal dunia. Dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan suspect Flu Burung yaitu sebanyak 51 kasus dengan jumlah terbesar di Kabupaten Asahan (16 kasus) tetapi tidak ada yang meninggal dunia.

Sejak tahun 2009 sampai 2011 tidak ditemukan kasus flu burung, namun pada tahun 2012 ditemukan 2 (dua) kasus suspect Flu burung yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi dan ke-2 kasus (1000%) yang ditangani sesuai standard.

12. Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta

Dampak sosial terhadap penyakit kusta ini sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan negara. Pada umumnya penyakit kusta menimbulkan kecacatan yang menyebabkan penderita tidak dapat mandiri sehingga menjadi beban bagi orang lain.

Proporsi kecacatan tingkat 2 menunjukkan kecenderungan menurun sejak tahun 2009 yaitu dari 16,3% turun menjadi 13% pada tahun 2013. Namun, adanya kejadian kecacatan tingkat 2 ini mengindikasikan masih adanya keterlambatan penemuan kasus dan keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, namun pencapaian 2013 tersebut belum mampu mencapai target akhir Renstra yaitu 5%.

13. *Persentase kasus zoonosis lainnya (rabies, antraks, leptospirosis) yang ditangani sesuai standard*

Pada tahun 2013, kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) dan kasus lyssa mengalami penurunan, setelah pada tahun 2010 mengalami peningkatan drastis dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 9 kasus.

Kasus lyssa pada tahun 2010 mencapai 36 kasus, turun menjadi 31 kasus pada tahun 2011, tahun 2012 (18 kasus) dan tahun 2013 (5 kasus). Post Exposure Treatment (PET) terhadap kasus GHPR berindikasi *belum memadai* karena terbatasnya ketersediaan VAR/SAR yang seharusnya wajib ada sharing Pusat (20%), Provinsi (20%), Kab/Kota (60%), namun kemandirian Kabupaten/Kota dalam penyediaan VAR meningkat dibandingkan tahun lalu.

Terbentuknya kelembagaan seperti Rabies Center di Kota Medan dan Nias Selatan, TIKOR Rabies dan KOMDA Zoonosis juga membantu dalam upaya pengendalian rabies.

Terbatasnya kegiatan operasional pengendalian rabies tahun 2013 akibat *ketiadaan biaya* untuk pembelian VAR (cakupan VAR : 2012 sebanyak 84,70% sedangkan 2013 sebanyak 78,43%) dan pertemuan/pelatihan petugas dan sosialisasi kepada masyarakat dikuatirkan dapat mengancam tercapainya visi nasional yaitu “Bebas Rabies”

14. *Persentase Pengobatan Massal Filariasis*

Surveilens secara aktif dan pasif dilakukan untuk mengetahui Kabupaten/Kota yang mempunyai permasalahan Filariasis diwilayahnya. Pada tahun 2013, dilaksanakan Survei Darah Jari di daerah Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Serdang Bedagai dimana diperoleh bahwa MF Rate = 0. Pengobatan Massal yang dilakukan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan jumlah sasaran 252.595 jiwa dan yang minum obat sebanyak 214.706 jiwa atau 85%.

15. *Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor*

Pada tahun 2013 kegiatan Spot Survey Serangga Penular Penyakit dilakukan pada jenis jentik nyamuk *Aedes Aegypti* di 7 kabupaten/kota yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Asahan, Karo, Kota Padang Sidempuan dan Sibolga. Dengan demikian target akhir tahun Renstra yaitu 50%

Kabupaten/Kota melaksanakan mapping vektor yaitu 50% tidak tercapai, capaian tahun 2013 hanya 21,21%.

16. *Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Penyakit*

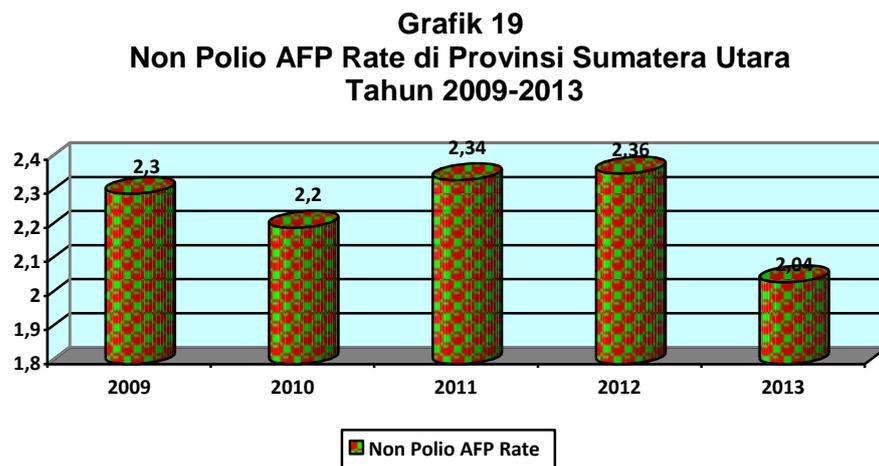
Kelengkapan dan ketepatan pelaporan penyakit ini sangat penting dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta tata laksana penyakit. Pencapaian kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit pada tahun 2013 mencapai 78,43%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 76,56% namun menurun dibandingkan tahun 2011 yaitu 78,50%. Dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu 80%, maka capaian tahun 2013 belum mampu dicapai.

17. *Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam pada Desa/Kelurahan dengan KLB*

Pada tahun 2013 jumlah kasus KLB yaitu 44 kejadian dan seluruh kasus (100%) dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam. Frekuensi KLB tahun 2013 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yaitu 57 kejadian dan tahun 2011 yaitu 36 kejadian. Semua kasus KLB (100) telah mampu dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sesuai standard pada tahun 2013. Dengan demikian target akhir tahun Renstra yaitu persentase penyelidikan epidemiologi <24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB yaitu 90% telah mampu dicapai.

18. Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada Anak Usia <15 Tahun per 100.000 Penduduk

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi dunia bebas polio, sejak tahun 1995 Indonesia telah melaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yaitu pemberian vaksin polio pada anak < 5 tahun selama tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan dari pelaksanaan imunisasi tambahan ini harus dibarengi dengan persentase penemuan penderita AFP yaitu 2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun. Perkembangan AFP Rate di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Angka AFP Sumatera Utara selama kurun waktu 2009-2013 telah mampu mencapai target nasional dan target Renstra yaitu >2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun.

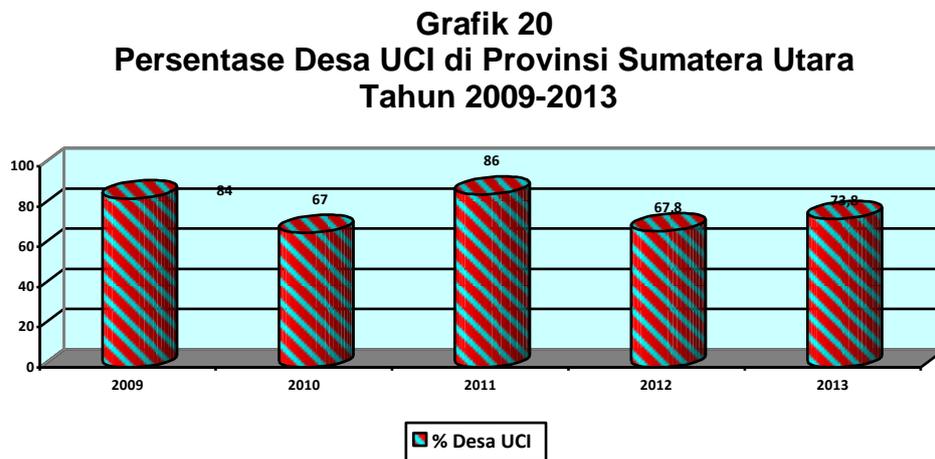
Pada tahun 2013, dari 84 kasus AFP yang ditargetkan, mampu ditemukan sebanyak 89 kasus dengan specimen adekuat yaitu 100%, sehingga AFP Rate mencapai 2,04/100.000 anak berusia < 15 tahun.

19. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 Jemaah Haji

Program Kesehatan Haji secara umum bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan calon/jemaah haji Indonesia, menekan dan mengurangi angka kematian jemaah haji serta terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia. Pada tahun 2013, dari 6.524 jemaah haji berasal dari Sumatera Utara, sebanyak 12 jemaah haji meninggal dunia, dimana 11 jemaah meninggal di tanah suci dan 1 jemaah haji meninggal di perjalanan. Dengan jumlah tersebut angka kematian jemaah haji Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 1,84/1.000 jemaah haji. Angka kematian jemaah haji Sumatera Utara menurun dibandingkan tahun 2012, yaitu sebesar 2,92/1.000 jemaah haji, tahun 2011 yaitu 2,12/1.000 jemaah haji dan tahun 2010 yaitu 2,7/1.000 jemaah haji. Dengan pencapaian ini target akhir Renstra yang ditetapkan yaitu <2/1.000 jemaah haji telah mampu dicapai.

20. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI)

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun 2009-2013, seperti terlihat pada grafik berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Pada 2009, persentase desa UCI diatas angka 80% sehingga mampu mencapai target nasional yaitu 80%. Namun, pada tahun 2010, mengalami penurunan yang sangat tajam lebih dari 15% sehingga menjadi 67%. Tahun 2011, persentase desa UCI dapat ditingkatkan mencapai hampir 20% menjadi 86%, namun kembali mengalami penurunan hampir 20% sehingga hanya mencapai 67,8% pada tahun 2012. Walaupun mengalami peningkatan sekitar 6% pada tahun 2013, namun tidak mampu mencapai target akhir Rentsra yaitu 82%.

21. Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi

Dasar Lengkap

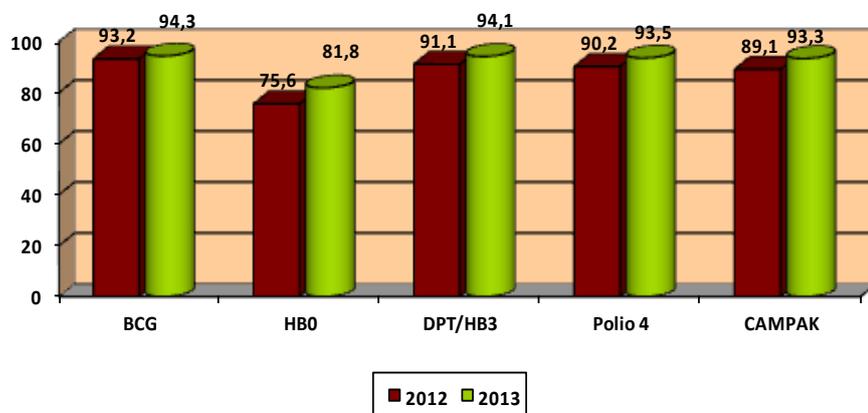
Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2013 adalah 81,11.

Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 85%, maka angka tersebut belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2012 yaitu 76,8%, tahun 2011 yaitu 88,6% dan tahun

2010 yaitu 93%. Pencapaian 5 (lima) dasar pada bayi di Sumatera Utara tahun 2012, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 21
Persentase Lima Imunisasi Dasar pada Bayi
Di Sumatera Utara Tahun 2012-2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

22. *Persentase Anak Sekolah Usia Dasar yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap*

Pencapaian persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap tahun 2013 tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 yaitu 97,3% mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun 2011 yaitu 96%; dan telah mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 90%.

23. *Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular*

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang menghadapi “*triple burden of diseases*” dimana penyakit infeksi dan menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat menonjol, ditambah dengan mulai meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular serta munculnya penyakit-penyakit baru dengan tingkat kematian tinggi, seperti Avian Flu (Flu Burung). Untuk mengantisipasi dan mengatasi peningkatan kejadian kasus-kasus penyakit tidak menular maka sangat diperlukan surveilans deteksi dini dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular. Kelengkapan dan ketepatan waktu lapor merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan surveilans deteksi dini.

Pada tahun 2013, sebanyak 30 kabupaten/kota (90,90%) di provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular. Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan adalah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan. Jumlah kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, dimana terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular yaitu Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara; dengan persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular hanya mencapai 78,8%. Namun bila dibandingkan tahun 2011, pencapaian tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan, dimana seluruh Kab/Kota (100%) telah melaksanakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular.

24. Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan

Matra

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra, Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan mata yang serba berubah secara bermakna. Kesehatan mata meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air serta kesehatan kedirgantaraan. Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan Mata mengalami peningkatan, pada tahun 2011 hanya 8 kab/kota (27,3%) yaitu Kota Pematang Siantar, Sibolga, Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Nias, Nias Selatan dan Samosir. Pada tahun 2012, seluruh Kab/Kota telah melaksanakan Surveilans Kesehatan Mata, begitu juga pada tahun 2013. Namun, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program Kesehatan Mata belum dilaksanakan secara optimal, dan kabupaten/kota yang telah melaksanakan Kesehatan Mata secara optimal sebanyak 25 kabupaten/kota (75,76%). Hal ini memberikan gambaran positif karena pelaksanaan sosialisasi dan advokasi program Kesehatan Mata telah mencapai target akhir tahun Rentsra yang ditetapkan yaitu 50% pada tahun 2013.

25. Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan Penanggulangan dan Penanganan Wabah dan Bencana

Pelaksanaan penanganan penanggulangan wabah dan bencana sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-

Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Selama tahun 2012, telah terjadi bencana sebanyak 41 kejadian, yang tersebar di 55 kecamatan dan 180 desa/kelurahan, jumlah penduduk terisiko bencana sebanyak 743.474 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 12.394 jiwa, dan jumlah meninggal sebanyak 59 jiwa.

26. *Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana*

Pada periode tahun 2013, jumlah kejadian bencana mengalami penurunan menjadi 22 kejadian, yang tersebar di 24 kecamatan dan 46 desa/kelurahan, jumlah terisiko sebanyak 425.263 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 18.796 jiwa, dan jumlah meninggal sebanyak 12 jiwa. Sampai tahun 2013, seluruh Kab/Kota yang telah menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana atau 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang ditetapkan yaitu 90%, maka hasil capaian ini sudah melampaui target.

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

1. Upaya Pengendalian Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
2. Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah Tingkat Dasar
3. Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit
4. Surveilans Kesehatan Haji

5. Akselerasi Universal Child Immunization (UCI)
6. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7. Deteksi Dini Pengendalian PTM
8. Pembinaan Surveilans Kesehatan Matra
9. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana
10. Surveilans Serangga Penular Penyakit (Vektor)
11. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Arbovirosis Lainnya
12. Pengendalian Penyakit Malaria
13. Pengendalian Penyakit Filariasis
14. Pengendalian Penyakit Tuberculosis
15. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
16. Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
17. Pertemuan Validasi Data Cakupan Program P2-ISPA
18. Operasional Pengelolaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan Sehat

6. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

Tabel 47
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Tahun 2013

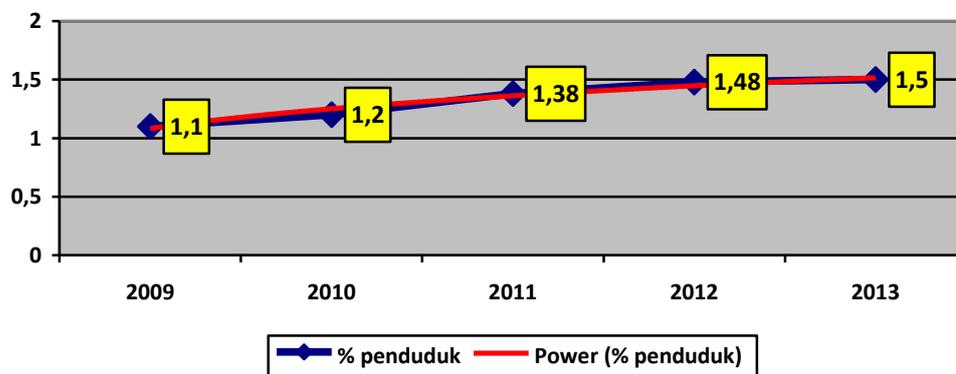
NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit	1,5%	1,5%	100
2	Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat	90%	90%	100
3	Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	20 RSUD	18 RSUD	90
4	Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	11 RSUD	5 RSUD	45,5
5	Persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)	80%	57,6	72
6	Persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan	80%	100	125
7	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	35%	36,82	105,2
8	Persentase rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas	65%	30,84	47,45
9	Tercapainya persentase RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana	40%	40,29	100,73
10	Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard	80%	70%	87,5

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
11	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut)	33 K/K	23 K/K	69,70
12	Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita kusta yang memenuhi syarat di RS Kusta	2 RS	2 RS	100

1. **Persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit**

Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan kurun waktu 2009-2013, seperti yang tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 22
Persentase Penduduk mendapat Pelayanan Rawat Jalan dan Inap di Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013



Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Tahun 2013, penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan inap (pemerintah dan swasta) adalah 197.839 orang; dengan perkiraan jumlah penduduk Sumatera Utara adalah 13.215.401 jiwa, maka diperhitungkan persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dan inap yaitu 1,5%. Dengan angka ini maka target akhir tahun Renstra telah tercapai yaitu 1,5% pada tahun 2013.

2. *Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat*

Sampai dengan akhir 2013, dari 201 rumah sakit yang ada di Sumatera Utara terdapat 181 rumah sakit yang telah melaksanakan pelayanan gawat darurat 24 jam, sehingga persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat mencapai 90%.

Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 88,9%. Khusus untuk RSUD, dari 33 RSUD yang ada di Sumatera Utara hanya 16 RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai kelasnya, pencapaian ini tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2012.

RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kelasnya, seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 48
RSUD yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO	RSUD Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat
1	RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai
2	RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
3	RSUD Pakam Kabupaten Deli Serdang
4	RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
5	RSUD Dr. F.L Tobing Kota Sibolga
6	RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu
7	RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
8	RSUD Kota Padang Sidempuan
9	RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar
10	RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo
11	RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai
12	RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
13	RSUD Gunung Sitoli Kabupaten Nias
14	RSUD Dr. Hardianus Sinaga Kabupaten Samosir
15	RSUD Kabupaten Mandailing Natal.
16	RSUD Kabupaten Sidikalang.

Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara

3. Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penyediaan sarana rumah sakit yang mampu PONEK sangat dibutuhkan, terutama pada kasus-kasus kegawatdaruratan.

Terbentuknya RSUD mampu PONEK sangat tergantung kepada tersedianya tenaga dokter spesialis khususnya spesialis kandungan dan anak; sarana penunjang medik, kompetensi serta dukungan manajemen yang dilihat dari adanya SK Tim PONEK.

Sampai tahun 2013, terdapat 18 RSUD yang telah memiliki SK Tim PONEK dan menyelenggarakan PONEK, dan jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 13 RSUD. Walaupun mengalami peningkatan, namun jumlah RSUD mampu PONEK sampai akhir tahun 2013 belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 20 RSUD. Perkembangan RSUD mampu PONEK dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 49
RSUD Mampu PONEK di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010 - 2013

TAHUN	RSUD Mampu PONEK
2010	1. TANJUNG PURA – LANGKAT
	2. DR. FL. TOBING – SIBOLGA
	3. DR. TENGGU MANSYUR - TJ. BALAI
	4. TARUTUNG – TAPANULI UTARA
	5. GUNUNG SITOLI – NIAS*
2011	7. DR. RM DJOELHAM – BINJAI
	8. DR. PIRNGADI – MEDAN
	9. DR. KUMPULAN PANE – TEBING TINGGI
	10. RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU
	11. KABANJAHE – KARO
2012	12. HADRIANUS SINAGA - SAMOSIR
	13. KOTA PADANG SIDEMPUAN
	14. SIDIKALANG
2013	15. DR. DJASAMEN SARAGIH-P. SIANTAR
TAHUN	RSUD Mampu PONEK
	16. DR. ABDUL MANAN SIMATUPANG-KISARAN
	17. GUNUNG SITOLI-NIAS
	18. PANYABUNGAN-MANDAILING NATAL

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

Pada tahun 2010, RSUD Gunung Sitoli adalah RS PONEK, namun akibat kekosongan dokter spesialis kandungan pada tahun 2011, RSUD Gunung Sitoli sempat tidak termasuk di dalam RSUD Mampu PONEK, dan pada tahun 2013 oleh karena telah tersedianya dokter spesialis kandungan, RSUD ini kembali dapat menyelenggarakan PONEK.

4. Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sesuai dengan amanat UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka RSUD diwajibkan melaksanakan pola tata keuangan BLUD pada tahun 2011.

Sampai tahun 2013, dari 11 RSUD ditargetkan menjadi BLUD hanya 5 RSUD yang telah menjadi BLUD, yaitu: RSUD Kumpulan Pane Tebing-Tinggi pada tahun 2010 dan RSUD Dr. Pirngadi Medan menjadi BLUD pada tahun 2011; pada tahun 2013 yaitu RSUD Dr. Djasamen Saragih-Pematang Siantar, RSUD Rantauprapat Labuhan Batu dan RSUD Dr. Abdul Manan Simatupang Kisaran. Dengan jumlah ini maka target akhir tahun Renstra juga belum tercapai.

5. Persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)

Rumah sakit yang mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM RS adalah rumah sakit yang telah terakreditasi. RS yang terakreditasi adalah rumah sakit yang telah memenuhi standard sarana, pelayanan, dan standard jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan.

Pada tahun 2013, jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) adalah RSUD yang telah terakreditasi dan masih valid akreditasinya sebanyak 19 RSUD dari 33 RSUD yang ada di Sumatera Utara atau 57,6%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun 2012 yaitu 17 RSUD dan tahun 2011 sebanyak 10 RSUD. Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian ini belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 80%.

Tabel 50
RSUD menyelenggarakan SPM RS di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010 - 2013

NO	RSUD Menyelenggarakan SPM RS	Kelas
1	Dr. RM Djoelham - Binjai	B
2	Dr. Pirngadi – Medan	B
3	Lubuk Pakam – Deli Serdang	B
4	Dr. Kumpulan Pane – Tebing Tinggi	B
5	Dr. F.L Tobing – Sibolga	B
6	Rantau Prapat – Labuhan Batu	B
7	Tarutung – Tapanuli Utara	B
8	Padang Sidempuan	B

9	Dr. Djasamen Saragih – P. Siantar	B
10	Dr. Tengku Mansyur – Tanjung Balai	C
11	Sultan Sulaiman – Serdang Bedagai	C
12	Gunung Sitoli – Nias	C
13	Panyabungan – Mandailing Natal	C
14	Pandan – Tapanuli Tengah	C
15	Sidikalang – Dairi	C
16	Dr. Abdul Manan Simatupang – Kisaran	C
17	Sipirok – Tapanuli Selatan	C
18	Tanjung Pura – Langkat	C
19	Haji – Medan	B

Sumber : Dinas Kesehatan Prov Sumatera Utara

6. **Persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan**

Luasnya wilayah Sumatera Utara serta belum terpenuhinya jumlah tenaga medis, khususnya tenaga spesialis di seluruh RSUD, maka untuk mengurangi cost (pembiayaan) dan beban kerja akibat rujukan pasien terutama di rumah-rumah sakit besar, seperti RSUD Dr. Pirngadi dan RSUP H. Adam Malik Medan, maka pembentukan **“Regionalisasi Sistem Rujukan”** perlu dilaksanakan di Sumatera Utara. Arah menuju Regionalisasi Sistem Rujukan telah dilaksanakan sejak tahun 2009, melalui sosialisasi ke RSUD.

Pada tahun 2013, 31 RSUD (94%) telah menandatangani kesepakatan regionalisasi rujukan rumah sakit.

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu 11 RSUD (37,9%). Dengan pencapaian ini maka target akhir tahun Renstra yaitu 80% telah tercapai.

7. *Persentase rumah sakit yang terakreditasi*

Pencapaian tahun 2013 masih sama dengan pencapaian tahun 2012, yaitu dari 201 RS yang ada di Sumatera Utara yang terakreditasi adalah sebanyak 74 RS atau 36,81%. Oleh karena jumlah RS mengalami peningkatan di tahun 2013 dari tahun 2012 yaitu 189 RS, namun karena jumlah rumah sakit terakreditasi tidak mengalami peningkatan, maka persentase RS terakreditasi mengalami penurunan dari sebelumnya 39,15%. Dengan pencapaian 36,81% maka target akhir tahun Renstra yaitu 35% telah tercapai. Perkembangan rumah sakit terakreditasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 51
Rumah Sakit Terakreditasi Sampai Tahun 2013

RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
RSU PEMERINTAH		
1. RSUD Kota Padang Sidempuan	2012	5 pelayanan
2. RSUD Sultan Sulaiman – Sergej	2012	5 pelayanan
3. RSUD Panyabungan – Natal	2012	5 pelayanan
4. RS Jiwa Daerah Prov Sumut	2012	5 pelayanan
5. RSUD Pandan Tapanuli Tengah	2012	5 pelayanan
6. RSUD Tapanuli Selatan	2012	5 pelayanan
7. RSUD Gunung Sitoli	2012	5 pelayanan
8. RSUD Dr. F.L Tobing – Sibolga	2011	12 Pelayanan
9. RSUD Rantau Prapat	2011	16 Pelayanan
10. RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam	2011	16 Pelayanan
11. RSUDDjasamen Saragih Pematang Siantar	2011	12 Pelayanan
12. RSUD Abdul Manan Kisaran	2011	5 Pelayanan
13. RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi	2010	12 Pelayanan

RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
14. RSUD Dr. Mansyur Tj. Balai	2010	5 Pelayanan
15. RSUD Sidikalang	2009	5 Pelayanan
16. RSUD Dr. Djamaloedin – Binjai	2009	5 Pelayanan
17. RSUP H. Adam Malik	2009	16 Pelayanan
18. RSUD Dr. Pirngadi Medan	2007	16 Pelayanan
19. RSUD Tarutung	2001	5 Pelayanan
RSU SWASTA		
1. RS Grand Meditra Lubuk Pakam	2012	5 pelayanan
2. RSU Sembiring Delitua	2012	5 pelayanan
3. RS Estomihi Medan	2012	5 pelayanan
4. RSU Mitra Sejati Medan	2012	5 pelayanan
5. RSU Sarah Medan	2012	5 pelayanan
6. RSU Bidadari Binjai	2012	5 pelayanan
7. RSU Sari Mutiara Medan	2012	5 pelayanan
8. RSU Deli Medan	2012	5 pelayanan
9. RSU Bunda Thamrin Medan	2012	5 pelayanan
10. RSU Sri Torgamba Labusel	2012	5 pelayanan
11. RS Columbia Asia Medan	2012	5 pelayanan
12. RS Methodist Medan	2012	5 pelayanan
13. RSU Nur'aini Labuhanbatu Selatan	2012	5 pelayanan
14. RS Permata Bunda Medan	2012	5 pelayanan
15. RS Sri Pamela Tebing Tinggi	2012	5 pelayanan
16. RSU Materna Medan	2012	5 pelayanan
17. RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam	2012	5 pelayanan
18. RSU Bhakti Medan	2012	5 pelayanan
19. RS Tanjung Selamat Langkat	2012	5 pelayanan
20. RS dr. Gerhard Lumban Tobing	2012	5 pelayanan
21. RS Indrya Husada Labura	2012	5 pelayanan
22. RS Bangkatan Binjai	2012	5 pelayanan
23. RSU Sundari Medan	2012	5 pelayanan
24. RS Laras Simalungun	2012	5 pelayanan
25. Rumkital Dr. Komang Makes Mdn	2012	5 pelayanan
26. RS Horas Insani P. Siantar	2012	5 pelayanan
27. RS Methodist Susanna Wesley	2012	5 pelayanan
28. RSU Melati Perbaungan	2012	5 pelayanan
29. RSU Trianda Serdang Bedagai	2012	5 pelayanan
30. RSU Prof. Dr. Boloni	2012	5 pelayanan
31. RSU Vina Estetica Medan	2012	5 pelayanan
32. RSU Artha Medica Binjai	2012	5 pelayanan
33. Rumkit Abdul Manik Lanud	2012	5 pelayanan
34. RSU Sinar Husni Medan	2012	5 pelayanan
35. RSU Sumatera Eye Center	2012	5 pelayanan
36. RSU Delima Medan	2012	5 pelayanan

RUMAH SAKIT	TERAKREDITASI	
	TAHUN	JENIS PELAYANAN
37. RSU Bina Kasih Medan	2012	5 pelayanan
38. RSIA Sri Ratu	2012	5 pelayanan
39. Martha Priska-Medan	2011	16 Pelayanan
40. HKBP Balige	2011	5 Pelayanan
41. Vita Insani – P. Siantar	2011	5 Pelayanan
42. Islam Malahayati	2011	5 Pelayanan
43. Harapan – Siantar	2011	5 Pelayanan
44. Rumkit Tk. II Putri Hijau	2011	5 Pelayanan
45. Rumkit Tk. IV – P. Siantar	2011	5 Pelayanan
46. Rumkit Binjai	2011	5 Pelayanan
47. RS Bhayangkara T. IV Tebing Tinggi	2011	5 Pelayanan
48. Permata madina	2010	5 Pelayanan
49. Advent – Medan	2009	5 Pelayanan
50. Bhayangkara Medan	2009	5 Pelayanan
51. Imelda – Medan	2008	5 Pelayanan
52. Elisabeth-Medan	2006	12 Pelayanan
53. PTPN II Temb. Deli	2005	5 Pelayanan
54. Herna – Medan	2002	5 Pelayanan
55. Haji Medan	2002	5 Pelayanan

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

8. Persentase rumah sakit yang melaksanakan penetapan kelas dan yang menerapkan standard sarana dan prasarana

Sampai dengan tahun 2013, dari 201 RS yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 62 RSU (30,84%) yaitu 15 RSUD, 1 RSU TNI-AL, 1 RSU TNI-AU, dan 45 RSU Swasta yang telah ditetapkan kelasnya. Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 53 RSU. Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian tahun 2013 belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 65%.

Tabel 52
Penetapan Kelas Rumah Sakit Sampai Tahun 2013

NO	RUMAH SAKIT	KELAS	TAHUN PENETAPAN KELAS
	RSU PEMERINTAH		
1	RSUD Sipirok	C	1999
2	RSUD Tarutung	B	2000
3	RSUD Rantau Prapat	B	2009
4	RSUD Parapat	D	1994
5	RSUD Pakam Deli Serdang	B	2008
6	RSUD Dolok Sanggul	C	1999
7	RSUD Dr. Hardianus Sinaga Samosir	C	2008
8	RSUD Sultan Sulaiman Sergei	C	2008
9	RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga	B	2009
10	RSUD Dr. Tengku Mansyur Tj. Balai	C	1987
11	RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantara	B	1992
12	RSUD Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi	B	2009
13	RSUD Dr. Pirngadi Medan	B Pend	2007
14	RSUD Dr. Djoelham Binjai	B	2008
15	RSUD Padang Sidempuan	B	1999
16	RSU TNI-AL Tk. III Komang Makes	D	2012
17.	RSU AU Abdul Malik Lanud Medan	D	2013
	RSU SWASTA		
18	RSU Mitra Sejati Medan	C	2009
19	RSU Martha Friska Medan	B	2009
20	RSU Sembiring Delitua	C	2009
21	RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan	B	2009
22	RSU Permata Bunda Medan	B	2010
23	RSU Badrul Aini Medan	C	2010
24	RSU Sarah Medan	D	2010
25	RSU Sari Mutiara Medan	B	2010
26	RSU Nur'aini Kota Pinang	D	2010
27	RSU Herna Tebing Tinggi	D	2010
28	RSIA Eva	C	2010
29	RSU Vita Insani	C	2011
30	RSU Advent Medan	C	2011
31	RSU Estomihi	C	2011
32	RSU Colombia Asia	B	2011
33	RSU Deli	C	2011
34	RSU Sembiring Deli Tua	B	2011
35	RSU Grand Medistra	B	2011
36	RSU Sinar Husni Deli Serdang	D	2011
37	RSU Melati Perbungan	D	2011
38	RSU Rumkit Tk. II Putri Hijau	B	2011
39	RSU Artha Medika Binjai	C	2011

NO	RUMAH SAKIT	KELAS	TAHUN PENETAPAN KELAS
40	RSU Latersia Binjai	C	2011
41.	RSU Bina Kasih Medan	B	2012
42.	RSU Bidadari Binjai	C	2012
43.	RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam	C	2012
44.	RSU Ameta Sejahtera	D	2012
45.	RSU Delima Medan	D	2012
46.	RSU Sundari Medan	C	2012
47.	RSU Methodist Medan	C	2012
48.	RSU Sufina Aziz Medan	D	2012
49.	RSU Bunda Thamrin Medan	C	2012
50.	RSU Susana Wesley Medan	C	2012
51.	RSU Sinar Husni Medan	C	2012
52.	RSK Accuplast Medan	C	2012
53.	RSK Mata Medan Baru	C	2012
54.	RSIA Stella Maris Medan	C	2012
55.	RSU Islam Malahayati Medan	C	2013
56.	RSU Horas Insani P. Siantar	C	2013
57.	RSU Bandung Medan	C	2013
58.	RSU Mitra Sehat Deli Serdang	D	2013
59	RSU Mitra Sejati Medan	B	2013
60.	RSU Patar Asih Medan	C	2013
61.	RSU Murni Teguh Memorial Hospital	B	2013
62.	RSU Stella Maris Nias Selatan	C	2013

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Masih rendahnya persentase RS yang ditetapkan kelasnya merupakan salah satu penyebab masih banyaknya RS yang belum terakreditasi.

9. **Persentase rumah sakit yang menerapkan standard sarana dan prasarana**

Rumah Sakit yang telah menerapkan standard sarana dan prasarana adalah rumah sakit yang telah terakreditasi dan akreditasinya masih berlaku (valid).

Pada tahun 2010, RS yang menerapkan standard sarana dan prasarana sebanyak 15 RS (7,14%), tahun 2011 meningkat jumlahnya menjadi 24 RS (12,7%). Tahun 2012 meningkat menjadi 74 RS (39,15%) dan tahun 2013 meningkat menjadi 81

RS (40,3%). Dengan pencapaian ini maka target akhir tahun Renstra yaitu 40% telah tercapai.

10. Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard

Sampai tahun 2013, dari 115 puskesmas yang melaksanakan pelayanan haji sesuai standard sebanyak 70 puskesmas (61%). Angka ini masih sama dengan pencapaian tahun 2012 dan 2011 dan belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2013 yaitu 80%. Penyebaran puskesmas yang melaksanakan pelayanan haji sesuai standard, dapat dilihat jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 53
Puskesmas melaksanakan Pelayanan Haji sesuai Standard Tahun 2013

NO	KAB/KOTA	PUSK PELY HAJI	SESUAI STANDARD
2	MANDAILING NATAL	4	-
3	TAPANULI SELATAN	5	-
4	TAPANULI TENGAH	2	-
7	LABUHAN BATU	8	8
8	ASAHAN	3	3
9	SIMALUNGUN	2	-
10	DAIRI	1	-
11	KARO	1	-
12	DELI SERDANG	8	-
13	LANGKAT	7	4
16	PAKPAK BHARAT	1	-
18	SERDANG BEDAGAI	4	-
19	BATUBARA	11	11
20	PADANG LAWAS	2	-
21	PADANG LAWAS UTARA	6	6
22	LABUHAN BATU SELATAN	8	8
23	LABUHAN BATU UTARA	5	5
26	SIBOLGA	2	-
27	TANJUNGBALAI	4	4
28	PEMATANG SIANTAR	3	-
29	TEBING TINGGI	3	-
30	MEDAN	16	16
31	BINJAI	2	-
32	PADANGSIDIMPUAN	5	5
33	GUNUNG SITOLI	1	-
JUMLAH		115	70

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

10. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut)

Pada tahun 2013, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa sebanyak 23 kabupaten/kota, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 20 Kab/Kota.

Distribusi Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 54
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Pilihan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2013

TAHUN	KABUPATEN/KOTA	JENIS PELAYANAN
2011	Medan	Kesehatan Jiwa
	2. Tanjung Balai	Kesehatan Jiwa
	3. Padang Sidempuan	Kesehatan Jiwa
	4. Langkat	Kesehatan Jiwa
	5. Samosir	Kesehatan Jiwa
2011	6. Serdang Bedagai	Kesehatan Jiwa
	7. Nias Selatan	Kesehatan Jiwa
	8. Dairi	Kesehatan Jiwa
	9. Toba Samosir	Kesehatan Jiwa
	10. Pematang Siantar	Kesehatan Indera
	11. Batubara	Kesehatan Indera
	12. Gunung Sitoli	Kesehatan Indera
	13. Padang Lawas	Kesehatan Jiwa
	14. Mandailing Natal	Kesehatan Jiwa
	15. Labuhan batu	Kesehatan Jiwa
2012	1. Binjai	Kesehatan Jiwa
	2. Tebing Tinggi	Kesehatan Jiwa
	3. Deli Serdang	Kesehatan Jiwa
	4. Karo	Kesehatan Jiwa
	5. Simalungun	Kesehatan Jiwa
2013	1. Sibolga	Kesehatan Gigi Mulut
	2. Humbang Hasundutan	Kesehatan Gigi Mulut
	3. Tapanuli Tengah	Kesehatan Gigi Mulut

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

- 1) Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) bagi RSUD, RSU Swasta di Kabupaten/Kota dan RSU Provinsi
- 2) Bimbingan Teknis Pelayanan Sistem gawat darurat Terpadu (SPGDT) bagi RSUD, RSU Swasta di Kabupaten/Kota dan RSU Provinsi
- 3) Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 4) Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien UPT
- 5) Pelayanan X-Ray Keliling Kabupaten/Kota
- 6) Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung
- 7) Pertemuan CMHN (Community Mental Health Nursing)
- 8) Pertemuan Deteksi Dini Kebutaan akibat Cataract, Glaucoma, Kelainan Refraksi dan Xerophthalmia
- 9) Penjaringan Kasus Pasung di Kabupaten/Kota
- 10) Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh UPT KIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/Operasi Katarak dan Pemeriksaan THT)
- 11) Screening Gangguan Penglihatan ke Kabupaten/Kota
- 12) Pertemuan Teknis Penanggulangan Gangguan Penglihatan bagi Dokter dan Perawat Puskesmas kabupaten/Kota

- 13) Sosialisasi Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 2012
- 14) Sosialisasi Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 2012 untuk Rumah Sakit Swasta
- 15) Operasional Komite Mutu Pelayanan Kesehatan (KMPK) Provinsi Sumatera Utara
- 16) Pertemuan dalam rangka Percepatan Penetapan Kelas Rumah Sakit
- 17) Pertemuan Meningkatkan Mutu Penetapan Standar Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kabupaten/Kota
- 18) Pengembalian Jasa Pelayanan Medis
- 19) Operasional Pengelolaan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

7. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

A. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2013

Tabel 55
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Sumber Daya Kesehatan
Tahun 2013

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	100%	54,4%	54,4
2	Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi	55 pelatihan	34 pelatihan	61,8
3	Persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi	100%	100%	100
4	Tercapainya jumlah kab/kota yg menyelenggarakan penilaian & penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100
5	Ratio tenaga medis per puskesmas	≥ 1	0,90	90
6	Kab/Kota yang memiliki SK Tim Saka Bhakti Husada (SBH)	33 K/K	7 K/K	21,2

1. Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi

Pada tahun 2012, Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah selesai diproses sejumlah 2.978 dari 21.672 berkas usulan yang dikirim ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Jakarta, sehingga pencapaian persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi hanya mencapai 13,74 %, sangat jauh dibawah target

yang ditetapkan yaitu 100%.

2. Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi

Pada tahun 2013 terdapat 20 pelatihan yang terakreditasi, yaitu: 11 pelatihan diselenggarakan di UPT Bapelkes, 6 pelatihan diselenggarakan oleh bidang di Dinas Kesehatan Provsu, 1 kali pelatihan masing-masing di UPT PTC Indrapura dan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Jumlah pelatihan yang terakreditasi pada tahun 2013 telah sesuai dengan target tahunan yang harus dicapai namun bila dilihat target akhir tahun Renstra dimana jumlah pelatihan yang terakreditasi selama kurun waktu 2009-2013 adalah sebanyak 55 pelatihan maka jumlah pelatihan yang telah diakreditasi sejak tahun 2009 hanya berjumlah 34 pelatihan, dengan perincian pelatihan terakreditasi tahun 2011 sebanyak 11 pelatihan, tahun 2012 yaitu 3 pelatihan dan tahun 2013 sebanyak 20 pelatihan.

pencapaian jumlah pelatihan akreditasi sampai tahun 2013 yaitu 34 pelatihan belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 55 pelatihan.

3. Persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi

Pada tahun 2013, jumlah institusi pendidikan di bawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu institusi pendidikan D3 yaitu sebanyak 148 institusi yang tersebar di seluruh kab/kota.

Pada tahun 2013, jumlah institusi pendidikan D3 yang dibina sebanyak 148 institusi (100%). Angka pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 90%, tahun 2011 yaitu 85%, tahun 2010 yaitu 79,20% dan tahun 2009 yaitu 75%.

Pencapaian tahun 2013, telah mampu mencapai target akhir tahun Renstra yaitu 100%.

4. Tercapainya jumlah kab/kota yg menyelenggarakan penilaian & penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan

Pada tahun 2013, sudah seluruh (100%) Kab/Kota di Sumatera Utara menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 20 Kab/Kota, tahun 2011 yaitu 15 Kab/Kota, dan tahun 2010 yaitu 10 kab/kota.

5. Ratio tenaga medis per puskesmas

Pada tahun 2013, dari 569 puskesmas yang ada di Sumatera Utara terdapat 517 puskesmas yang telah memiliki tenaga medis setidaknya 1 orang. Puskesmas yang belum memiliki tenaga medis sebanyak 52 puskesmas, sehingga ratio tenaga medis per puskesmas mencapai 0,91; angka ini sedikit lebih rendah dari pencapaian di tahun 2012 yaitu 0,97. Dimana dari 546 puskesmas yang ada di Sumatera Utara terdapat 18 puskesmas yang belum memiliki tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah puskesmas tidak diiringi dengan ketersediaan tenaga medis di puskesmas tersebut.

Tabel 56
Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

NO	PUSKESMAS	KAB/KOTA
1	Batang Bulu	Padang Lawas
2	Ujung Batu I	Padang Lawas
3	Sunggam	Padang Lawas Utara
4	Naga Saribu	Padang Lawas Utara
5	Nagapagadung Laut	Padang Lawas Utara
6	Batang Pane II	Padang Lawas Utara
7	Ulok Tano	Padang Lawas Utara
8	Kosik Putih	Padang Lawas Utara
9	Sipiongot	Padang Lawas Utara
10	Sibio-bio	Padang Lawas Utara
11	Simarpinggang	Tapanuli Selatan
12	Pokenjior	Padang Sidempuan
13	Pintu Langit	Padang Sidempuan
14	Ronggur Nihuta	Samosir
15	Sitio-tio	Samosir
16	Lontung	Samosir
17	Ulumahuan	Labuhan Batu Selatan
18	Sogae'adu	Nias
19	Somolo-molo	Nias
20	Hiliduho	Nias
21	Idanogawo	Nias
22	Ulugawo	Nias
23	Mau	Nias
24	Botombawo	Nias
25	Gunung Sitoli Barat	Gunung Sitoli
26	Alo'oa	Gunung Sitoli
27	Kuala Bangka	Labuhan Batu Utara
28	Namohalu Esiwa	Nias Utara
29	Lahewa Timur	Nias Utara
30	Tugala Oyo	Nias Utara
31	Polonia	Medan
32	Hilimegai	Nias Selatan
33	Huruna	Nias Selatan
34	Idanotae	Nias Selatan
35	Mazo	Nias Selatan
36	Ulu Idanotae	Nias Selatan
37	Siduaori	Nias Selatan
38	Umbunasi	Nias Selatan
39	Susua	Nias Selatan

NO	PUSKESMAS	KAB/KOTA
40	Onohasumba	Nias Selatan
41	O'ou	Nias Selatan
42	Hilisalawa Ahai	Nias Selatan
43	Ulususua	Nias Selatan
44	Somambawa	Nias Selatan
45	Onolalu	Nias Selatan
46	Ulunoyo	Nias Selatan
47	Simuk	Nias Selatan
48	Pulau-pulau Batu Barat	Nias Selatan
49	Pulau-pulau batu Utara	Nias Selatan
50	Tanah Masa	Nias Selatan
51	Labuhan Hiu	Nias Selatan
52	Aramo	Nias Selatan

Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara

Dari tabel terlihat bahwa dari 52 puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis, sebanyak 34 puskesmas ada di kepulauan Nias (65%). Ketiadaan tenaga media ini sangat mempengaruhi kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program ini adalah sebagai berikut :

- 1) TOT Tenaga Pelatihan Program Kesehatan (TPPK)
- 2) Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota
- 3) Honorarium Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional

- 4) Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
- 5) Evaluasi I Pelaksanaan Program Internship Dokter Indonesia
- 6) Validasi Basis Data SDM Kesehatan
- 7) Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan
- 8) TOT Pamong SBH Kabupaten/Kota

8. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Tabel 57
Indikator Kinerja, Target, Capaian dan Persen Capaian
Program Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
Tahun 2013

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
1	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan	100%	100%	100%
2	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan	80%	54,8%	68,5%
3	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah	30 Kab/Kota	18 Kab/Kota	60
4	Persentase Gakin (Keluarga Miskin) yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan Kelas III rumah sakit	100%	100%	100
5	Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD	10%	7%	70
6	Jumlah hukum kesehatan yang disosialisasikan	3 Peraturan / Tahun	0	0

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	CAPAIAN TAHUN 2013	% CAPAIAN
7	dihasilkan Jumlah dokumen perencanaan yang	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
8	Jumlah dokumen anggaran dan pembiayaan kesehatan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
9	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	7 Dokumen / Tahun	7 Dokumen / Tahun	100%
10	Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan	100%	100%	100%
11	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100%

1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan

Sesuai dengan jumlah kuota penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang diterbitkan oleh Kemenkes RI, maka keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatannya adalah sebanyak 4.192.297 jiwa atau sekitar 31,72% dari jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2013. Dan jumlah masyarakat miskin berdasarkan kuota Kemenkes ini sudah melebihi jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara berdasarkan data BPS tahun 2011, yaitu 1.420.000 jiwa atau 10,28%. Dengan demikian seluruh masyarakat miskin (100%) di Sumatera Utara telah memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.

2. *Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan*

Pembiayaan kesehatan yang bersumber masyarakat, baik perorangan maupun kelompok diarahkan pada pembiayaan upaya kesehatan yang terorganisir melalui pembentukan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Jumlah penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatannya pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,3% dari tahun 2012, yaitu dari 7.123.971 jiwa menjadi 7.243.891 jiwa. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya kuota Jamkesmas, peserta asuransi sosial dan komersial, peserta asuransi TNI/PLORI, dan kuota Jamkesda. Dengan demikian persentase penduduk yang telah memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meningkat yaitu 53,4% pada tahun 2011, pada tahun 2012 54,5% dan pada tahun 2013 yaitu 54,8%. Adapun jumlah peserta jaminan kesehatan dirinci menurut jenis jaminan pemeliharaan kesehatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 58
Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diperinci
Menurut Jenisnya di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012-2013

NO	JENIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	JUMLAH	
		2012	2013
1	JAMKESMAS	4.124.247	4.192.297
2	ASURANSI SOSIAL	859.939	831.687
3	ASURANSI KOMERSIAL	193.573	193.573
4	TNI/POLRI	22.758	87.885
5	JAMSOSTEK	654.091	654.091
6	JAMKESDA	1.269.363	1.284.358
JUMLAH		7.123.971	7.243.891

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian tahun 2013 belum mampu mencapai target akhir tahun Renstra Dinkes Provsu yaitu 80%.

3. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, terdapat 4 Kab/Kota yang bertambah menyelenggarakan Jamkesda, sehingga seharusnya jumlah Kab/Kota penyelenggara Jamkesda di Sumatera Utara sudah mencapai 20 Kab/Kota; namun karena dari 16 Kab/Kota penyelenggara Jamkesda pada tahun 2011 terdapat 2 Kab/Kota yang tidak melanjutkan penyelenggaraan Jamkesda pada tahun 2012, maka jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jamkesda adalah sebanyak 18 Kab/Kota sampai dengan akhir tahun 2013. Perkembangan Kab/Kota yang menyelenggarakan Jamkesda di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 59
Kabupaten/Kota Penyelenggara Jamkesda
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012

TAHUN	KAB/KOTA PENYELENGGARA JAMKESDA	KET
2010	1. MEDAN	
	2. PEMATANG SIANTAR	
	3. TEBING TINGGI	
	4. TANJUNG BALAI	
	5. TOBA SAMOSIR	
2011	6. DELI SERDANG	

	7. TAPANULI UTARA	
	8. SAMOSIR	Tidak lanjut di 2012
	9. PADANG LAWAS	
	10. PAKPAK BHARAT	
	11. LABUHAN BATU	
	12. ASAHAN	
	13. PADANG SIDEMPUAN	
	14. SERDANG BEDAGAI	
	15. MANDAILING NATAL	Tidak lanjut di 2012
	16. BINJAI	
TAHUN	17. BATUBARA	
2012	18. LABUHAN BATU SELATAN	
	19. DAIRI	
	20. NIAS SELATAN	

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

4. Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD

Pada tahun 2013, dana APBD Provinsi Sumatera Utara untuk bidang kesehatan mengalami kembali penurunan. Tahun 2012, dana APBD Provinsi (biaya langsung + tidak langsung) untuk bidang kesehatan hanya mencapai sekitar 2,42% dari total dana APBD Provinsi; mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yaitu 3,20%, tahun 2011 yaitu 3,52% dan tahun 2010 yaitu 4,54%. Persentase ini sangat jauh dari harapan Undang-Undang Kesehatan yaitu 10% dari total APBD di luar gaji.

Alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk bidang kesehatan juga tidak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Persentase alokasi pembiayaan kesehatan terhadap total APBD Kabupaten/Kota (belanja langsung + belanja tidak langsung) mencapai sekitar 7%;

namun bila diluar belanja tidak langsung maka persentase ini turun menjadi sekitar 4% dari total dana APBD Kabupaten/Kota. Ini menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan bidang kesehatan lebih dari 50% adalah untuk membayar gaji pegawai dan hanya sebahagian kecil untuk pelaksanaan kegiatan/program kesehatan.

5. *Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan(SIK)*

Dalam pembuatan Profil Kesehatan, seluruh Kabupaten/Kota telah membuat Profil Kesehatan Tahun 2012. Melalui dana APBN telah terbangun SIKNAS online (Sistem Informasi Kesehatan Nasional), yang menghubungkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kemenkes, sehingga informasi kesehatan yang dibutuhkan dapat dilihat secara langsung per kabupaten/kota.

6. *Jumlah dokumen perencanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi yang dihasilkan*

Dokumen-dokumen perencanaan dan pembiayaan yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen pada tahun 2013, yaitu: Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, Penetapan Kinerja, Neraca Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Inventaris Barang dan Jasa. Dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Rencana Kerja (Renja)/Triwulan, Laporan

Realisasi Keuangan (Bulanan), Laporan Tahunan Kegiatan/Program, dan Laporan Semester.

Kegiatan-kegiatan Tahun 2013

Program ini terdiri-dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Kesehatan pada Desa Binaan PKK
- 2) Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC) dan Rapat-Rapat Lintas Program dan Lintas Sektoral Tingkat Provinsi)
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Bekerjasama dengan LSM/NGO dalam rangka Sustainability PHP II
- 4) Operasional Pengelolaan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- 5) Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- 6) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Forum SKPD Bidang Kesehatan
- 7) Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan Kabupaten/Kota
- 8) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
- 9) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kesehatan Provsu Tahun 2014-2018
- 10) Evaluasi Midterm Program Jaminan Kesehatan bagi Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kab/Kota

- 11) Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kepesertaan Semesta (Universal Health Coverage)
- 12) Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda)
- 13) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2013
- 14) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program Kesehatan
- 15) Penyusunan dan Pembuatan Laporan dan Evaluasi Tahunan
- 16) Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kesehatan
- 17) Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan
- 18) Sosialisasi SIMDA
- 19) Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2012
- 20) Operasional Bank Data dan Web Site Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- 21) Up Dating Manajemen Data Kabupaten/Kota
- 22) Pembinaan Organisasi, Hukum, dan peraturan Perundang-Undangan

➤ **BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012, jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi sasaran pelayanan sosial ada 26 jenis berubah dari sebelumnya yang berjumlah 22 jenis. Pertambahan jenis PMKS berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini, meliputi

PMKS pemulung, korban trafiking, kelompok minoritas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan anak dengan kedisabilitas.

Yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah :

1. Penanganan warga/kelompok masyarakat yang dikategorikan PMKS.
2. Mendorong dan memperkuat PSKS yang tumbuh dari individu yang tumbuh dari individu dan komunitas masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penanganan PMKS meliputi :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Pada tahun 2012 Penanganan tersebut diberikan kepada 2027 orang Sistim Panti dan 3807 orang dengan sistim Non Panti, sedangkan pada Tahun 2013 diberikan kepada 2027 orang sistim Panti dan 7689 dengan orang sistim non panti.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus dikembangkan, dimana melalui APBD Tahun 2013 kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah diberikan bantuan sosial sebesar Rp. 1.570.725.000,- untuk 36 KUBE di 9 kabupaten/kota.

PMKS yang telah difasilitasi untuk memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 meliputi :

- 1) Sistem Panti 2012 sebanyak 2027 orang.
- 2) Sistem Panti 2013 sebanyak 2027 orang.
- 3) Sistem Non Panti 2012 sebanyak 3807 orang.
- 4) Sistem Non Panti 2013 sebanyak 7689 orang.

Capaian kinerja di sektor ini, pada prinsipnya adalah diperoleh atas dukungan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2013. Adapun Program/kegiatan dimaksud, yaitu :

A. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kegiatannya :

- 1) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Daerah Pesisir/Nelayan
- 2) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Daerah Pedesaan
- 3) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Perkotaan
- 4) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan kerja bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
- 5) Pembinaan Potensi dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 6) Pembinaan dan Pemberian
- 7) Bantuan bagi Keluarga Rentan
- 8) Pembinaan dan Pembentukan KUBE dilokasi Binaan Terpadu PKK
- 9) Pembinaan LKM dan KUBE Fakir Miskin
- 10) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

B. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial,

Kegiatannya :

1. Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana
2. Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana
3. Distribusi Permakanan (lauk-pauk) Evakuasi Korban Bencana
4. Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana
5. Rapat Koordinasi TAGANA se-Sumatera Utara
6. Pemetaan Daerah Rawan Bencana
7. Pembinaan Keserasian Sosial Daerah
8. Pembinaan Pelaksanaan Asuransi kesejahteraan Sosial
(Askessos)
9. Bimbingan Pemantapan Pendamping dan Operator PKH
10. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Korban Tindak kekerasan
11. Pembinaan Pengusaha Orsos dan Masyarakat tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang
12. Sosialisasi Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang
13. Sosialisasi Program Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
14. Apel Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tahun 2013.

C. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terdiri-dari :

- 1) Pembinaan usaha ekonomi produktif (UEP) Anak Jalanan
- 2) Pembinaan dan pemberian bantuan Stimulan UEP Orang Tua Anak Jalanan
- 3) Pertemuan Pemantapan dan Pemberian Bantuan bagi organisasi lanjut usia
- 4) Pelaksanaan Razia Tuna Sosial Anjal dan Cacat
- 5) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi WTS
- 6) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Gelandangan dan Pengemis
- 7) Bimbingan Pencegahan HIV dan AIDS
- 8) Pembinaan dan Penanganan Panti Asuhan Jompo
- 9) Pelatihan dan Pemantapan UEP Penyandang Cacat

➤ BIDANG PERTANIAN

Sasaran makro pembangunan pertanian Sumatera Utara selama tahun 2013 mencakup Sasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara, Neraca Perdagangan Sumatera Utara dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, sasaran dan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan Sumatera Utara dari tahun 2012 sampai dengan ASEM (Angka Sementara) 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 60
Sasaran Komoditas Tanaman Pangan Sumatera Utara Tahun 2013

No	Komoditas	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi	829.976	797.916	48,57	3.875.561
2.	Jagung	291.533	268.451	55,65	1.494.050
3.	Kedelai	12.823	13.117	10,32	13.533
4.	Kc Tanah	18.329	17.962	12,00	22.398
5.	Kc Hijau	6.524	6.485	10,98	7.120
6.	Ubi Kayu	49.781	46.359	305,74	1.417.388
7.	Ubi Jalar	16.297	16.421	130,55	214.380

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Tabel 61
Nilai Tukar Petani Pertanian Sumatera Utara Tahun 2012 dan 2013

Uraian	2012	2013
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,71	99,48
- Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP)	100,29	99,29
- Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	108,70	102,16

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Tabel 62
Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor
Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura
dan Biofarmakadi Sumatera Utara Tahun 2013

No	Komoditi	Tahun 2013	
		Volume (Kg)	Nilai (US \$)
1	PALAWIJA	7.419.088	5.208.884
	a. Jagung	329.720	242.217
	b. Ubi Kayu	394.196	344.005
	c. Ubi Jalar	6.619.208	4.579.634
	d. Kacang Tanah	-	-
	e. Kacang Kedele	75.964	43.028
2	SAYUR-MAYUR	44.860.750	11.792.287
	a. Kentang	4.447.137	2.405.892
	b. Tomat	336.657	433.286
	c. Bawang Merah	48.829	50.440
	d. Bawang Daun	-	-
	e. Kol/Kubis/Kol Bunga	38.597.876	8.827.382
	f. Wortel	283	234
	g. Selada	48.973	61.526
	h. Mentimun	36.130	11.688
	i. Asparagus	-	-
	j. Bayam	450	1.219
	k. Bawang Bombay	-	-
	l. Sayuran segar lain	1.344.415	620
3	BUAH-BUAHAN	1.967.171	1.153.525
	a. Alpukat	105.676	68.203
	b. Guavas	-	-
	c. Jeruk	-	-
	d. Jeruk Lemon	684.869	315.885
	e. Mangga	90	29
	f. Manggis	443.874	270.352
	g. Pisang	48.790	17.410

	h. Anggur	-	-
	i. Strawberry	-	-
	j. Buah Segar Tropikal	683.872	481.646
4	OBAT-OBATAN	9.287.032	9.046.595
	a. Jahe	6.819.101	4.266.589
	b. Kunyit	1.366.092	884.263
	c. Kapulaga	303.125	1.395.088
	d. Asam Jawa	423.270	792.132
	e. Merica / Lada Hitam	48.300	311.051
	f. Bunga Pala	6.217	90.894
	g. Buah Pala	272.627	995.527
	h. Lada Hitan	48.300	311.051
	i. Kayu Manis	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Beras merupakan komoditas strategis karena menjadi makanan pokok penduduk di Sumatera Utara sehingga pertumbuhan produksi beras harus meningkat setiap tahunnya, dan merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam rangka swasembada beras 10 juta ton pada 2014 sehingga perlu Upaya-upaya untuk peningkatan produksi pangan. Adapun pencapaian Produksi Tanaman Pangan berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 63
Realisasi Sasaran Tanam Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2013

NO	Uraian	Sasaran 2013	ASEM 2013	% Capaian Sasaran
1	2	3	4	5
1	Padi			
	- Luas Tanam (Ha)	829.976	739.040	89,04
	- Luas Panen (Ha)	797.916	742.968	93,11
	- Produktivitas (Kw/Ha)	48,57	50,17	103,29
	- Produksi (Ton)	3.875.561	3.727.250	96,17
2	Jagung			
	- Luas Tanam (Ha)	291.533	218.319	74,89
	- Luas Panen (Ha)	268.451	211.750	78,88
	- Produktivitas (Kw/Ha)	55,65	55,87	100,38
	- Produksi (Ton)	1.494.050	1.183.012	79,18
3	Kedelai			
	- Luas Tanam (Ha)	12.823	4.175	32,56
	- Luas Panen (Ha)	13.117	3.126	23,83
	- Produktivitas (Kw/Ha)	10,32	10,33	100,12
	- Produksi (Ton)	13.533	3.229	23,86
6	Kacang Tanah			
	- Luas Tanam (Ha)	18.329	9.204	50,22
	- Luas Panen (Ha)	17.962	9.377	52,20
	- Produktivitas (Kw/Ha)	12,00	12,10	100,91
	- Produksi (Ton)	22.398	11.351	50,68
7	Kacang Hijau			
	- Luas Tanam (Ha)	6.524	2.394	36,70
	- Luas Panen (Ha)	6.485	2.130	32,84
	- Produktivitas (Kw/Ha)	10,98	11,01	100,26
	- Produksi (Ton)	7.120	2.345	32,93
8	Ubi Kayu			
	- Luas Tanam (Ha)	49.781	54.257	108,99
	- Luas Panen (Ha)	46.359	47.141	101,69
	- Produktivitas (Kw/Ha)	305,74	322,06	105,34
	- Produksi (Ton)	1.417.388	1.518.221	107,11
9	Ubi Jalar			
	- Luas Tanam (Ha)	16.297	10.042	61,62
	- Luas Panen (Ha)	16.421	9.101	55,42
	- Produktivitas (Kw/Ha)	130,55	128,19	98,19
	- Produksi (Ton)	214.380	116.670	54,42

Sumber : Dinas Pertanian Provsu



Perbandingan produksi komoditas tanaman pangan tahun 2012 dan ASEM 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 64
Perbandingan ATAP 2012 dan ASEM 2013

NO	Uraian	2012	ASEM 2013	%-tase
1	Padi			
-	Luas Panen (Ha)	765.099	742.968	(2,89)
-	Produktivitas (Kw/Ha)	48,56	50,17	3,32
-	Produksi (Ton)	3.715.514	3.727.250	0,32
2	Jagung			
-	Luas Panen (Ha)	243.098	211.750	(12,90)
-	Produktivitas (Kw/Ha)	55,41	55,87	0,83
-	Produksi (Ton)	1.347.124	1.183.012	(12,18)
3	Kedelai			
-	Luas Panen (Ha)	5.475	3.126	(42,90)
-	Produktivitas (Kw/Ha)	9,90	10,33	4,34
-	Produksi (Ton)	5.419	3.229	(40,41)

NO	Uraian	2012	ASEM 2013	%-tase
4	Kacang Tanah			
	- Luas Panen (Ha)	10.154	9.377	(7,65)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	11,89	12,10	1,81
	- Produksi (Ton)	12.074	11.351	(5,99)
5	Kacang Hijau			
	- Luas Panen (Ha)	3.498	2.130	(39,11)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	10,91	11,01	0,89
	- Produksi (Ton)	3.817	2.345	(38,57)
6	Ubi Kayu			
	- Luas Panen (Ha)	38.749	47.141	21,66
	- Produktivitas (Kw/Ha)	302,34	322,06	6,52
	- Produksi (Ton)	1.171.519	1.518.221	29,59
7	Ubi Jalar			
	- Luas Panen (Ha)	14.595	9.101	(37,64)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	127,84	128,19	0,28
	- Produksi (Ton)	186.582	116.670	(37,47)

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tanaman pangan khususnya padi mengalami kenaikan sebesar 3.727.250 ton atau 0,32% bila dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2012. Pencapaian produksi tanaman pangan diatas selain didukung dengan sumber dana APBN 2013 juga mendapat dukungan dana APBD 2013.

Dalam upaya peningkatan produktivitas pemerintah memberikan bantuan benih beserta Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu bertujuan untuk memberikan contoh kepada Kelompok Tani tentang Pengelolaan Tanaman Terpadu yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas tanaman padi dan palawija.

Tabel 65
Realisasi Bantuan Benih SLPTT Padi, Jagung, Kedelai,
Pengembangan Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2013
di Sumatera Utara sumber dana APBN

No	Komoditi	URAIAN	2013 (Ha) Januari-Desember		
			SK CP/CL	Real Tanam	%
1	Padi Sawah	Kawasan Pertumbuhan Padi	3.200	3.200	100,00
		Kawasan Pengembangan Padi (Spesifik Lokasi)	8.625	4.706	54,56
		Kawasan Pemantapan Padi	160.275	102.258	63,80
2	Padi Hibrida	Kawasan Pengembangan Padi (Spesifik Lokasi)	6.000	1.077	17,95
3	Padi Lahan Kering	Kawasan Pemantapan Padi	3.100	1.050	33,87
4	Jagung	Kawasan Pengembangan Jagung	2.625	1.000	38,10
5	Kedelai	Kawasan Pengembangan (Ha)	2.700	2.378	88,07
6	Ubi Kayu	Pengembangan Ubi Kayu (Ha)	1.500	1.500	100,00
7	Ubi Jalar	Pengembangan Ubi Jalar (Ha)	75	70	93,33

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

✓ Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura dilakukan melalui Kegiatan Utama

Pengembangan Kawasan Tanaman Buah, Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka, Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura.

Tabel 65 di bawah ini menggambarkan sasaran luas panen, provitas dan produksi komoditas tanaman hortikultura Sumatera Utara dan pertumbuhannya selama 2013 :

Tabel 66
Sasaran Komoditas Hortikultura
Di Sumatera Utara Tahun 2013

Uraian	Sasaran
1. Sayur-Sayuran	
Tanam	68.498
Panen (Ha)	81.221
Produktivitas (Kw/Ha)	141,35
Produksi (Ton)	1.148.050
2. Buah-buahan	
Panen (Ha)	36.257
Produktivitas (Kw/Ha)	490,08
Produksi (Ton)	1.776.875
3. Tanaman Obat	
Produksi (Kg)	15.979.854
4. Tanaman Hias	
Produksi :	
Tanaman Hias bunga potong (tangkai)	16.796.171
Tanaman Hias satuan produksi pohon	145.233

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Adapun pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura berdasarkan Angka Sangat Sementara Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 67
Realisasi Komoditas Hortikultura
MasaTanam Tahun 2013

Uraian	2013		%tase capaian
	Sasaran	Realisasi*	
1. Sayur-Sayuran			
Tanam	68.498	64.965	94,84
Panen (Ha)	81.221	72.436	89,18
Produktivitas (Kw/Ha)	141,35	135,62	95,95
Produksi (Ton)	1.148.050	982.394	85,57
	Sasaran	Realisasi*	
2. Buah-buahan			
Panen (Ha)	36.257	32.226	88,88
Produktivitas (Kw/Ha)	490,08	455,89	93,02
Produksi (Ton)	1.776.875	1.469.156	82,68
3. Tanaman Obat			
Produksi (Kg)	15.979.854	5.075.830	31,76
4. Tanaman Hias			
Produksi :			
Tanaman Hias bunga potong (tangkai)	16.796.171	5.808.169	34,58
Tanaman Hias satuan produksi pohon	145.233	168.734	116,18

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Perbandingan produksi komoditas tanaman hortikultura tahun 2012 dan angka sangat sementara 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 68
Perbandingan ATAP 2012 dan Angka sangat sementara 2013

Uraian	2012	2013*	%-tase pertumbuhan
1. Sayur-Sayuran			
Panen (Ha)	77.174	72.436	(6,14)
Produktivitas (Kw/Ha)	142,89	135,62	(5,08)
Produksi (Ton)	1.102.716	982.394	(10,91)
2. Buah-buahan			
Panen (Ha)	35.546	32.226	(9,34)
Produktivitas (Kw/Ha)	487,64	455,89	(6,51)
Produksi (Ton)	1.733.367	1.469.156	(15,24)
3. Tanaman Obat			
Produksi (Kg)	15.666.524	5.075.830	(67,60)
4. Tanaman Hias			
Produksi :			
Tanaman Hias bunga potong (tangkai)	16.466.834	5.808.169	(64,73)
Tanaman Hias satuan produksi pohon	142.358	168.734	18,53

Keterangan : * = Angka sangat sementara BPS Provsu

Pencapaian produksi tanaman hortikultura diatas selain didukung dengan sumber dana APBN 2013 juga mendapat dukungan dana APBD 2013 yang pencapaian targetnya dapat dilihat sebagai berikut :

✓ **Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian**

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan melalui Kegiatan Utama Perluasan Areal Lahan Pertanian dan Bantuan Subsidi Pupuk.

Potensi pengembangan lahan sawah di Sumatera Utara cukup luas, sehingga Sumatera Utara dengan bersumber dana baik dari APBN maupun APBD tahun 2013 melakukan kegiatan seperti :dukungan perluasan Areal Sawah seluas 400 ha, jalan usaha tani sepanjang 4 km, kegiatan optimasi lahan tanaman pangan seluas 14.540 ha dan untuk rehabilitasi jaringan irigasi seluas 34.713 ha yang telah dilakukan pada 20 kabupaten/kota. Sedangkan untuk pengembangan teknologi pertanian seperti kegiatan System Of Rice Intensification (SRI) pada tahun 2013 ini seluas 9.650 ha, kegiatan SRI ini mengaplikasikan teknologi pengelolaan air serta pemanfaatan teknologi organik. Selanjutnya untuk pengembangan organik telah dikembangkan rumah kompos sebanyak 6 unit serta alat pencacah pupuk organik (APPO) sebanyak 6 unit, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pupuk organik dengan memanfaatkan sisa pertanaman ataupun kotoran ternak yang ada.

Tabel 69
Dukungan Pencapaian Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun 2013

Uraian	2013
Perluasan Areal Sawah (Ha)	400
Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian (Km)	4
Optimasi Lahan Tanaman Pangan (Ha)	14.540
System Of Rice Intensification (SRI) (Ha/Paket)	9.650
Jaringan Irigasi (Ha)	34.713

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Ketersediaan pupuk dan pestisida harus dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga). Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya peningkatan produksi tanaman pangan (5%) selama 3 tahun terakhir. Kontribusi pupuk sekitar 15-30 persen pada biaya usaha tani padi; dan 20% persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian, khususnya beras.

Pada tahun 2013 realisasi penyerapan pupuk bersubsidi sebesar 101,64% atau mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 83,17%

Tabel 70
Realisasi penyerapan Pupuk bersubsidi Sumatera Utara
Tahun 2012- 2013

No	Jenis Pupuk	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Alokasi Setahun (ton)	Realisasi Jan-Des (ton)	%	Alokasi Setahun (ton)	Realisasi Jan-Des (ton)	%
1	UREA	207.600	164.113	79,05	162.450	160.908,85	99,05
2	SP-36	55.000	50.202	91,28	42.000	43.933,75	104,60
3	ZA	51.572	51.353	99,58	53.000	51.809,73	97,75
4	NPK	156.000	126.764	81,26	111.000	115.177,35	103,76
5	ORGANIK	34.000	26.865	79,02	18.800	21.782,00	115,86
JUMLAH (ton)		504.172	419.298	83,17	387.250	393.612	101,64

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Dalam upaya pencapaian pembangunan di bidang Pertanian di Provinsi Sumatera dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian diatas juga didukung dengan adanya pencapaian sasaran prasarana dan sarana pertanian melalui APBD 2013 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 71
Pengukuran Pencapaian Sasaran Prasarana dan
Sarana Pertanian APBD 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi JIDES (Jaringan Irigasi Desa)	24 Paket	24 Paket	100,00
	Rehabilitasi JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani)	21 Paket	21 Paket	100,00
	Pengembangan Jalan Pertanian	7 Paket	7 Paket	100,00
	Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan	6 Paket	6	100,00
	Pengembangan TAM (Tata Air Mikro)	2 Paket	2 Paket	100,00
	Alat dan Mesin Pertanian	8 unit	0	0
	Tersalurkannya Pupuk Organik dan An-organik serta pestisida	2 Paket	0	0

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Program/ Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan pada TA. 2013

Secara keseluruhan keberhasilan kinerja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari pencapaian sasaran maupun kegiatan yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut :

A. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

- 1) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Batubara
- 2) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Asahan
- 3) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Simalungun

- 4) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Padang Lawas Utara
- 5) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Toba Samosir
- 6) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung
- 7) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung di Kab. Dairi
- 8) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung di Kab. Karo
- 9) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung di Kab. Langkat
- 10) Fasilitasi Pengembangan Budidaya Kedelai Kepada Petani di Kab.Serdang Bedagai
- 11) Fasilitasi Pengembangan Budidaya Kedelai Kepada Petani di Kab.Deli Serdang
- 12) Fasilitasi Pengembangan Ubi Kayu di Kab. Asahan
- 13) Fasilitasi Pengembangan Ubi Kayu di Kab. Serdang Bedagai
- 14) Fasilitasi Pengembangan Ubi Kayu di Kab. Deli Serdang
- 15) Fasilitasi Pengembangan Budidaya Kacang Tanah di Kab. Padang Lawas
- 16) Pengadaan Benih Padi dan Palawija Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Sumatera Utara
- 17) Dukungan Peralatan Pertanian bagi Penangkar padi di

Kabupaten Deli Serdang

- 18) Dukungan Peralatan Pertanian bagi Penangkar padi di Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 19) Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan
- 20) Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan
- 21) Peningkatan kemampuan petani dan petugas teknologi perbenihan tanaman pangan di Jawa Tengah
- 22) Pelatihan teknologi benih jagung hibrida di balai besar
- 23) Penerapan Sekolah Lapang Pengendalian hama Terpadu (SLPHT) pada Tanaman Pangan
- 24) Pengadaan Peralatan dan Sarana Proteksi TPH di 4 Wilayah Brigade Proteksi
- 25) Peningkatan SDM Petugas dan Petani dalam Pengembangan & Pemanfaatan Pupuk Organik
- 26) Penyusunan Grand Opening Study Pengembangan Produksi Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Utara (Study Alih Fungsi Lahan dalam Lahirnya Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan di Prov. Sumatera Utara)
- 27) Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan
- 28) Penataan Lahan/Optimalisasi Lahan Pertanian
- 29) Perbanyak dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT.BBI Murni Tanjung Morawa
- 30) Peningkatan Penangkar Padi di UPT.BBI Murni Tanjung Morawa

B. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

- 1) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Jagung di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Kab. Simalungun
- 2) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Jagung Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kab. Karo
- 3) Dukungan peralatan penangkar benih di kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (KADTBB)
- 4) Peningkatan Pemasaran Dalam Negeri
- 5) Pengembangan Komoditas Eksport Jagung Manis di Kabupaten Simalungun
- 6) Pengembangan Komoditas Bawang Merah di Kab Samosir
- 7) Fasilitasi Bibit Mangga ke Kab Serdang Bedagai
- 8) Instalasi Drift Irigasi Untuk Mendukung Peningkatan Produksi Sayuran
- 9) Pengembangan Instalasi Drift Irigasi Kepada Petani di Kab Karo
- 10) Sekolah Lapang Penerapan GAP/SOP Sayuran Organik
- 11) Registrasi Lahan Usaha Hortikultura
- 12) Pertemuan, Workshop dan Sosialisasi Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah

- 13) Pembinaan dan Pendampingan Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura Untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan Dataran Rendah
- 14) Fasilitasi Benih/Bibit Komoditi Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara Utara
- 15) Peningkatan Pemasaran Internasional
- 16) Pembinaan Gapoktan Ekspor Hortikultura di Kawasan Sentra Produksi
- 17) Pertemuan Investasi Hortikultura
- 18) Fasilitasi Kontak Bisnis
- 19) Pemberdayaan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3)
- 20) Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
- 21) Pembinaan dan Pendampingan Registrasi Packing House
- 22) Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen Buah
- 23) Koordinasi dalam Rangka Persiapan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan
- 24) Sertifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Kabi
- 25) Uji Kesehatan Mutu Benih Tanaman Pangan
- 26) Pertemuan SNI 17025-2008 dan Audit Internal Tanaman Pangan
- 27) Sinkronisasi Pengembangan Metode Laboratorium Tanaman Pangan
- 28) Pertemuan SDM Laboratorium Tanaman Pangan

- 29) Pembinaan Peningkatan Operasional Unit Pelaksana Teknis BPTPH
- 30) Penerapan Sekolah Lapang iklim
- 31) Peningkatan Sarana Pengendalian dan pengawasan Pupuk dan Pesticida di Prov. Sumut
- 32) Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pangan Pengadaan Sarana Kerja petugas POPT-PHP
- 33) Surveillance Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Pangan di wilayah Lab. PHP
- 34) Penilaian Kultivar Revitalisasi Pohon Induk
- 35) Pemurnian Varietas
- 36) Koordinasi dan Identifikasi Penilaian Varietas Tanaman Hortikultura
- 37) Koordinasi dalam Rangka Persiapan Pengawasan Mutu Benih
- 38) Sertifikasi dan Pelabelan Buah-buahan
- 39) Pengecekan Mutu Benih
- 40) Uji Kesehatan Mutu Benih Hortikultura
- 41) Pertemuan SNI 17025-2008 dan Audit Internal Tanaman Hortikultura
- 42) Pertemuan SDM Laboratorium Tanaman Hortikultura
- 43) Sinkronisasi Pengembangan Metode Laboratorium Tanaman Hortikultura
- 44) Koordinasi Pengawas Benih Tanaman BPSB IV
- 45) Penerapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) pada tanaman Hortikultura

- 46) Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura
- 47) Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 4 Wilayah kerja
- 48) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
- 49) Pengelolaan pengembangan Pos Agens Hayati (PPAH) Untuk mendukung Pertanian Organik di Prov. Sumatera Utara
- 50) Prakiraaan hasil akibat OPT Pangan Dan Hortikultura
- 51) Peningkatan Jalan Usaha Tani di Kebun Siguci (Lanjutan)
- 52) Pembangunan Jalan Usaha Tani Kebun BBI Gedung Johor
- 53) Koordinasi Ketersediaan Benih Florikultura
- 54) Pengadaan Obat-obatan
- 55) Pengadaan Bahan Kimia Tanaman Florikultura
- 56) Operasional UPT BI. Hortikultura Gedung johor
- 57) Operasional Persiapan UPT. BI. Tanaman Hias Asam Kumbang
- 58) Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/Bibit Hortikultura di UPT.BBI. Gedung Johor
- 59) Pembuatan Jalan Lingkungan Kantor Persiapan UPT. BI. Tanaman Hias Asam Kumbang
- 60) Pembinaan dan Pelatihan Petani Penangkar Tanaman Hias di Persiapan Pengembangan UPT. BI. Tanaman Hias Asam Kumbang
- 61) Perbanyak Bibit Jeruk di UPT BBI Arse Sipirok

- 62) Peningkatan SDM Calon Petani/Kelompok Tani penangkar Benih Buah di UPT BBI Arse-Sipirok
- 63) Peningkatan SDM Petugas BBI Dan Petani Calon Penangkar Ke Pusat Teknologi Buah
- 64) Pemeliharaan BPMT Jeruk Dan Buah Naga
- 65) Perawatan Jeruk Keprok Dan Pohon Induk/koleksi Buah-buahan
- 66) Perbanyak Benih Cabai
- 67) Perbanyak Benih Buncis
- 68) Perbanyak Benih Kentang
- 69) Peningkatan SDM Calon Petani/Kelompok Tani penangkar Benih Sayuran UPT BBI Arse Sipirok
- 70) Perbanyak Benih Kentang G0-G1 (Penyediaan Benih Sumber, Produksi Benih Sebar, pemeliharaan Benih Sumber/PIT/Koleksi Plasma Nuthfah)
- 71) Perbanyak Benih Kentang G1-G2 (Penyediaan Benih Sumber,Produksi Benih Sebar, Pemeliharaan Benih Sumber/PIT/Koleksi Plasma Nuthfah)
- 72) Perbanyak Benih Kentang G2-G3 (Penyediaan Benih Sumber, Produksi Benih Sebar, Pemeliharaan Benih Sumber/PIT/Koleksi Plasma Nuthfah)
- 73) Perbanyak Benih/Bibit Jeruk (Penyediaan Benih Sumber, Produksi Benih Sebar, Pemeliharaan Benih Sumber/PIT/Koleksi Plasma Nuthfah)

- 74) Pembinaan Penangkar Dalam Rangka Peningkatan Kemitraan BBI dengan Penangkar kentang di Provinsi Sumatera Utara
- 75) Penataan Lingkungan BBI
- 76) Pengadaan Lift Gudang benih
- 77) Penyusunan Rencana Design dan Pengawasan Screen A, Aeroponic, Screen Jeruk dan Tanaman Hias
- 78) Perbanyak Benih Planlet Kentang G0 (Penyediaan Benih Sumber, Produksi Benih Sebar, Pemeliharaan Benih Sumber/PIT/Koleksi Plasma Nuthfah)
- 79) Perbanyak Benih Padi Sawah (FS-SS) 5 Ha di UPT. BBI Gabe Hutaraja
- 80) Perbanyak Benih Jagung (BS-FS) 2 Ha di UPT. BBI Gabe Hutaraja
- 81) Perbanyak Benih Jagung (FS-SS) 10 Ha di UPT. BBI Gabe Hutaraja
- 82) Perbanyak Benih Kacang Tanah (FS-SS) 2 Ha di UPT. BBI Gabe Hutaraja
- 83) Pengembangan dan Perbanyak Benih Kentang (G3-G4) di UPT. BBI Gabe Hutaraja
- 84) Perbanyak Benih Cabe 1 Ha (dalam bentuk polong) di UPT. BBI Gabe Hutaraja

Selama kurun waktu periode Tahun 2003 s/d. Tahun 2012 laju pertumbuhan produksi padi cukup baik dengan laju pertumbuhan produksi

sebesar 0,98% dan produktivitas 1,83%. Dari data tersebut bahwa peningkatan produksi berasal dari peningkatan produktivitas.

Ditinjau dari ketersediaan sumber daya lahan dan air, kemajuan teknologi, serta dukungan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, maka produksi padi di Sumatera Utara masih dapat ditingkatkan baik melalui kegiatan pencetakan areal sawah baru, meningkatkan luas panen dan meningkatkan produktivitas lahan. Apabila ketiga komponen tersebut kita laksanakan insya Allah dapat meningkatkan ketahanan pangan di Sumatera Utara. Beras merupakan komoditas strategis karena menjadi makanan pokok penduduk di Sumatera Utara sehingga pertumbuhan produksi beras harus meningkat setiap tahunnya, dan merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam rangka swasembada beras 10 juta ton pada 2014 sehingga perlu Upaya-upaya untuk peningkatan produksi pangan.

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara menggambarkan perbandingan antara indeks penerimaan dan indeks pengeluaran petani. NTP Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 99,48 atau turun 2,19%, hal ini disebabkan menurunnya NTP tanaman pangan dan hortikultura. Penurunan ini sangat terkait dengan penurunan produksi dan harga serta inflasi. Produksi pangan khususnya beras dan jagung mengalami penurunan produksi sedangkan untuk komoditas hortikultura sangat terkait dengan produksi sayuran. Produksi sayuran terbesar yaitu di Tanah Karo namun disebabkan Erupsi Gunung Sinabung tanaman sayuran banyak

yang tidak dapat dipanen sehingga mempengaruhi produksi dan tentunya mempengaruhi NTP hortikultura untuk Sumatera Utara, selain itu inflasi juga menyebabkan pengeluaran yang lebih besar jika dibanding tahun sebelumnya sehingga menekan NTP secara keseluruhan.

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) tahun 2013 bahwa produksi padi sebesar 3.727.250 ton atau naik sebesar 0,32% bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012, jagung turun sebesar 12,18%, hal ini disebabkan pada beberapa kabupaten/kota beralih ke komoditas ubi kayu sedangkan produksi kedele 2013 turun 40,41% disebabkan usaha tani kedele dianggap kurang menguntungkan karena rendahnya produktivitas dan pemeliharaan yang intensif dan adanya kedele import sehingga menekan harga kedele dalam negeri.

Pencapaian produksi tanaman hortikultura pada tahun 2013 berdasarkan angka sementara (ASEM) 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu untuk komoditi sayur-sayuran turun sebesar 10,91%, buah-buahan sebesar 15,24%, tanaman obat sebesar 67,60%, dan tanaman hias (bunga potong) sebesar 64,73%. Penurunan produksi terutama sayur-sayuran dan tanaman hias bunga potong disebabkan bencana alam erupsi Gunung Sinabung Tanah Karo dimana sentra untuk sayur-sayuran dan tanaman hias bunga potong merupakan daerah dataran tinggi yang terdapat di Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun yang sebahagian daerahnya berbatasan dengan Kabupaten Karo.

Capaian Kinerja pembangunan di bidang Pertanian, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2013 dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis maupun pencapaian kegiatan yang dilakukan.

Tabel 72

Tingkat Pencapaian Sasaran Peningkatan Pertanian Tahun 2013

Sasaran	Interpretasi	Nilai Absolut
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Memuaskan	> 85 - 100
Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Memuaskan	> 85 - 100
Meningkatnya Kemitraan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Memuaskan	> 85 - 100
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Baik dan perlu sedikit perbaikan	> 65 - 75
Dinas Pertanian Provsu	Memuaskan	> 85 - 100

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa di Bidang Pertanian, pada Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera dalam **pengukuran pencapaian kinerja** untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Utara pada Tahun 2013 dengan sumber dana APBD TA.2013 pada umumnya **tercapai atau termasuk dalam kategori memuaskan dengan nilai rata-rata 87,87.**

➤ **BIDANG PERKEBUNAN**

Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian. Peran strategis perkebunan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah

lingkungan. Dampak dari pembangunan perkebunan di Sumatera Utara secara ekonomi makro dapat dilihat melalui kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara dan Nilai Tukar Petani.

■ **Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sumatera Utara**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin besar PDRB suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Nilai PDRB perkebunan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami pertumbuhan. Produksi dan harga yang diterima oleh petani pekebun, merupakan salah satu faktor untuk menghitung serta mengetahui besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perkebunan pada tahun yang bersangkutan.

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Sumatera Utara Tahun 2012 berdasarkan ADHB sebesar Rp. 33.185.611.56 juta atau 9.45%. Sedangkan Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Sumatera Utara Tahun 2012 berdasarkan ADHBK sebesar 10.235.553.50 juta menjadi 13.186.597.56 atau 9.81%. Peningkatan produksi perkebunan yang tinggi sangat mempengaruhi PDRB Sumatera Utara baik dari perkebunan rakyat, swasta maupun

nasionan terutama untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa.

Tabel 73
Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara
Sektor Pertanian Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012

No	Sektor	ADHB Tahun 2012		ADHB Tahun 2012	
		(juta rupiah)	(%)	(juta rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanaman Bahan Makanan	25.741.799.04	7.33	9.598.780.23	7.14
2.	Tanaman Perkebunan	33.185.611.56	9.45	13.186.597.56	9.81
3.	Peternakan dan Hasil Lainnya	6.918.690.40	1.97	3.121.209.69	2.32
4.	Kehutanan	3.196.351.29	0.91	1.503.864.70	1.12
5.	Perikanan	7.795.657.85	2.22	3.368.217.68	2.50
7.	Pertanian	76.838.110.14	21.88	30.778.669.87	22.89
8.	PDRB Sumut	351.118.155.73	100.00	134.463.949.31	100.00

Sumber : Dinas Perkebunan Provs. Sumut

✓ Nilai Tukar Petani Rakyat

Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) Sumatera Utara pada bulan Desember 2013 yaitu 99.92 (< NTPR Nasional = 100,88). Indeks harga yang diterima petani (It) yaitu sebesar 110,86 sedangkan Indeks yang dibayar petani sebesar 110,95. NTP 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 74
 Nilai Tukar Petani Perkebunan Desember 2013

Kelompok dan Subkelompok	Desember 2013
(1)	(2)
Tanaman Perkebunan Rakyat	
Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	99,92
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	110,86
- Tanaman Perkebunan Rakyat	110,86
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	110,95
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,42
- Indeks BPPBM	108,39

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sumut

✓ **Luas Areal dan Produksi Perkebunan Tahun 2012**

Luas Areal dan Produksi Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 75. Rekapitulasi Luas dan Produksi Perkebunan Sumatera Utara Menurut Jenis Usaha Tahun 2012

No	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat		P T P N		P B S N		P B S A		Total Luas (Ha)	Total Produksi (Ton)	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Karet	390,951.68	310,266.17	42,403.05	26,843.35	97,897.03	125,866.00	50,425.35	57,877.00	581,677.11	520,852.52	
2	Kelapa Sawit	TBS	411,843.76	5,511,644.29	255,764.34	2,531,276.00	309,955.39	4,911,914.42	141,169.77	2,483,784.76	1,118,733.26	15,438,619.47
		MS		1,212,561.74		556,880.72		1,080,621.17		546,432.65	-	3,396,496.28
		IS		165,349.33		101,251.04		196,476.58		99,351.39	-	562,428.34
3	Kopi Arabika	60,652.60	48,063.49	-	-	-	-	-	-	60,652.60	48,063.49	
	Robusta	20,758.95	8,430.03	-	-	773.47	662.98	-	-	21,532.42	9,093.01	
4	Kelapa	110,114.31	90,359.79	-	-	1,716.14	1,933.02	1,121.97	1,201.12	112,952.42	93,493.93	
5	Kakao	66,220.18	39,800.47	7,759.80	8,810.70	3,062.09	4,198.97	2,686.46	2,872.29	79,728.54	55,682.43	
6	Cengkeh	3,092.32	387.96	-	-	-	-	-	-	3,092.32	387.96	
7	Kemenyan	22,844.81	4,733.49	-	-	-	-	-	-	22,844.81	4,733.49	
8	Kulit Manis	5,632.48	3,720.32	-	-	-	-	-	-	5,632.48	3,720.32	
9	Nilam	851.01	598.05	-	-	-	-	-	-	851.01	598.05	
10	Kemiri	10,857.84	12,242.81	-	-	-	-	-	-	10,857.84	12,242.81	

No	jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat		P T P N		P B S N		P B S A		Total Luas (Ha)	Total Produksi (Ton)
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Tembakau	1,752.60	1,620.48	480.00	304.80	-	-	-	-	2,232.60	1,925.28
12	Tebu	1,252.80	4,675.91	8,681.66	35,941.05	-	-	-	-	9,934.46	40,616.96
13	Pala	135.10	27.68	-	-	-	-	-	-	135.10	27.68
14	Lada	156.46	92.10	-	-	-	-	-	-	156.46	92.10
15	Kapuk	455.70	110.61	-	-	-	-	-	-	455.70	110.61
16	Gambir	2,040.85	1,898.14	-	-	-	-	-	-	2,040.85	1,898.14
17	The	-	-	3,047.73	4,285.00	179.27	171.08	-	-	3,227.00	4,456.08
18	Aren	5,127.85	3,227.80	-	-	-	-	-	-	5,127.85	3,227.80
19	Pinang	5,492.81	3,301.18	-	-	-	-	-	-	5,492.81	3,301.18
20	Vanili	206.76	58.36	-	-	-	-	-	-	206.76	58.36
21	Jarak	19.50	5.04	-	-	-	-	-	-	19.50	5.04
22	Kapulaga	22.00	18.84	-	-	-	-	-	-	22.00	18.84
23	Jambu Mete	17.05	1.50	-	-	-	-	-	-	17.05	1.50
24	Sereh Wangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :		1,120,499.42	1,911,551.29	318,136.58	734,316.66	413,583.39	1,409,929.80	195,403.55	707,734.45	2,047,622.94	4,763,532.20

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sumut

Sebagai salah satu indikator hasil (outcome) dari pembangunan perkebunan adalah pertambahan produksi dan luas lahan perkebunan.

➤ Luas Areal Perkebunan di Sumatera Utara Tahun 2011-2012

Luas perkebunan di Sumatera Utara tahun 2012 sesuai dengan Angka Tetap Statistik Perkebunan Sumatera Utara tercatat seluas 2,047,622.94 Ha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu seluas 1.999.574,74 Ha, maka



maka terjadi penambahan luas areal sebesar 48.048.20 Ha atau sebesar 2,40% dari tahun 2011. Peningkatan luas areal tanaman perkebunan di Sumatera Utara berdasarkan jenis pengusahaannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 76
Luas Areal Perkebunan Tahun 2011-2012

JENIS USAHA	TAHUN (Ha)			%
	2011	2012	SELISIH	
P. RAKYAT	1,099,443.45	1,120,499.42	21,055.97	1.92
PTPN	424,186.29	318,136.58	(106,049.71)	-25.00
PBSN	316,003.92	413,583.39	97,579.47	30.88
PBSA	159,941.08	195,403.55	35,462.47	22.17
TOTAL	1,999,574.74	2,047,622.94	48,048.20	2.40

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sumut

➤ **Produksi Perkebunan di Sumatera Utara Tahun 2011-2012**

Total produksi perkebunan di Sumatera Utara sampai tahun 2012 sebesar 4,763,532.20 ton. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat 4,642,517.92 ton atau meningkat sebesar 121,014.28 ton (2.61%) dari tahun 2011. Peningkatan produksi perkebunan di Sumatera utara berdasarkan jenis pengusahaannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 77
Produksi Perkebunan Tahun 2011-2012

JENIS USAHA	TAHUN (Ton)			%
	2011	2012	SELISIH	
P. RAKYAT	1,864,755.36	1,911,551.29	46,795.93	2.51
PTPN	1,412,079.55	734,316.66	(677,762.89)	-48.00
PBSN	897,398.29	1,409,929.80	512,531.51	57.11
PBSA	468,284.72	707,734.45	239,449.73	51.13
TOTAL	4,642,517.92	4,763,532.20	121,014.28	2.61

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

- **Penggunaan benih unggul tanaman dan sarana produksi bermutu**

Realisasi pencapaian sasaran strategis Tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja dan satuan pengukurannya adalah sebagai berikut :

- (1) Jumlah bantuan bibit yang diberikan kepada petani teralisasi sebesar 84.70 % dengan jumlah batuan bibit yang diberikan sebanyak 95.200 batang yang terdiri dari 51.200 batang bibit kopi, 44.000 batang bibit kakao dan 2.600 batang bibit aren. Pemberian bantuan bibit tersebut diberikan melalui pelaksanaan fasilitasi/pengadaan bibit dikabupaten Tapanuli Utara, Dairi dan Karo dan pemberian bantuan bahan perkebunan pada kegiatan pembinaan desa binaan PKK maupun pada event event lainnya seperti Hari Ketahanan Pangan, Hari Pangan Sedunia dan event

lainnya. Adanya rasionalisasi anggaran tahun 2013 pada satker Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sehingga mengakibatkan kegiatan bantuan bibit karet dalam rangka pengembangan dan peremajaan tanaman di kabupaten Padang Lawas Utara dan Labuhanbatu Selatan tidak dapat terlaksana.

(2) Persentase ketersediaan sarana produksi mencapai 100 %.

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu pemilihan BPT kopi pada 4 (empat) kebun sumber benih, pemberian bantuan pupuk sebanyak 192.000 kg pupuk dan 108 liter herbisida yang dilaksanakan di kabupaten Karo, Dairi dan Simalungun. Pembibitan karet sebanyak 100.000 batang dan demplot pembesaran bibit kelapa sawit sebanyak 7.500 batang.

- **Peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang berwawasan lingkungan.**

Realisasi pencapaian sasaran strategis Tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja dan satuan pengukurannya adalah sebagai berikut :

(1) Jumlah kegiatan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu dan berwawasan lingkungan terealisasi sebanyak 22 kegiatan yang terdiri dari :

- Fasilitasi bantuan pupuk dan sarana produksi dalam mendukung kegiatan intensifikasi tanaman kelapa (Batubara),

karet (Batubara), kakao (Simalungun) sebanyak 3 kegiatan (250 ha) dengan jumlah bantuan : 35.000 kg pupuk majemuk, 350 liter pupuk cair hayati dan 800 liter pestisida.

- Pemeliharaan Kebun Induk pada lingkup Dinas Perkebunan sebanyak 11 kegiatan. Pemeliharaan kebun induk ini bertujuan untuk meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Utara.
- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan intensifikasi tanaman khususnya di wilayah agropolitan dan agromarinepolitan (Karo, Samosir, Toba Samosir, Asahan dan Deli Serdang). Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 250 orang dengan luasan areal yang diintensifikasikan seluas 250 ha. Pada pelaksanaan kegiatan ini juga diberikan bantuan antara lain : 2.100 liter pupuk hayati cair, 25.000 kg pupuk majemuk dan 1.000 liter pestisida.
- Pengembangan tanaman kopi di kabupaten Humbang Hasundutan seluas 30 Ha melalui bantuan bibit sebanyak 48.000 batang, 4.470 kg pupuk dan 120 liter pestisida.
- Peremajaan tanaman karet di kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas 22 Ha melalui bantuan bibit sebanyak 11.000 batang, pupuk 1.100 kg, pestisida 44 liter, trichoderma 1.100 kg dan upah tenaga kerja 1.620 HOK.

(2) Pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM Petani, yaitu mencapai 94.55%. Jumlah petani yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM

sebayak 780 orang. Kegiatan pelatihan meliputi SLPHT, bimbingan intensifikasi tanaman, peningkatan penggunaan IPTEK dan pelatihan kelembagaan petani melalui sistem kebersamaan ekonomi kelompok. Kegiatan pelatihan agribisnis gambir dengan target 75 orang petani tidak dapat terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran pada PAPBD 2013. Selain kegiatan pelatihan dilaksanakan pula kegiatan pengembangan/peremajaan dan intensifikasi tanaman yang didahului oleh sosialisai kegiatan. Jumlah pengembangan/ peremajaan tanaman yang dilaksanakan antara lain peremajaan karet seluas 60 ha di kabupaten Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah dan Nias Selatan. Intensifikasi tanaman kakao di Humbang Hasundutan 25 ha. Pengembangan tanaman kopi 40 ha di kabupaten Tapanuli Selatan.

(3) Dukungan prasarana perkebunan mencapai 100%. Realisasi

dukungan prasaran perkebunan antara lain :

- Pengembangan jalan produksi sepanjang 9.588 m
- Pengadaan alat hand sprayer 382 unit
- Fasilitasi informasi harga dan pemberdayaan Tim Rumus TBS selama 1 tahun
- Pembinaan dan inventarisasi penngkar 150 orang
- Sosialisai pedoman penilaian usaha 94 orang.
- Identifikasi dan koordinasi gangguan usaha perkebunan di 13 kabupaten.

- Penyusunan dokumen statistik, laporan, rencana kegiatan dan data lainnya 6 dokumen.
 - Dukungan manajemen lainnya yaitu pemantauan pupuk, monitoring dan evaluasi kegiatan, sinkronisasi perencanaan dan bimbingan aplikasi e-statistik.
- **Pemanfaatan, penerapan Iptek, sarana dan prasarana dalam pengolahan hasil perkebunan**

Realisasi pencapaian sasaran strategis Tahun 2013 berdasarkan indikator kinerja dan satuan pengukurannya adalah sebagai berikut :

- (1) Jumlah unit pengolahan hasil (UPH) perkebunan yang dibangun dan disalurkan sebanyak 4 paket yang terdiri dari 18 unit alat pengolahan kopi kulit merah, 5 unit alat pengolahan kelapa, 500 set alat panen karet dan 150 set alat panen kelapa sawit.
- (2) Jumlah petani yang telah mengikuti pendidikan teknis bidang pengolahan hasil perkebunan sebanyak 72 orang melalui pelatihan mutu bokar karet dan pelatihan peningkatan mutu hasil.
- (3) Persentase tingkat kerjasama yang dibina dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan hasil perkebunan terealisasi 57% melalui pelaksanaan pameran dan event promosi antara lain, Boston Expo, jogja Expo, Palembang Expo, Pekan Raya Sumatera Utara, Pekan Raya Jakarta. Dari target 14 event yang

akan diikuti hanya terlaksana 8 event. Hal ini dikarenakan adanya rasionaisasi anggaran sehingga tidak semua event yang direncanakan dapat diikuti.

✓ **BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Luas baku irigasi dan rawa di Provinsi Sumatera Utara seluas 1.378.809 Ha yang meliputi lahan irigasi seluas 348.509 Ha dan lahan rawa seluas 1.030.300 Ha. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola daerah irigasi dan rawa yang sudah terbangun seluas 140.683 Ha dengan jaringan irigasi seluas 76.344 Ha dan jaringan rawa seluas 64.339 Ha.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 41 ayat (2), yang mengatur tentang kewenangan dalam pengelolaan irigasi, dimana pembagian strata penanganan kewenangan daerah irigasi tersebut pada Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : Pemerintah Pusat (> 3000 Ha) seluas 70.530 Ha, Pemerintah Provinsi dan lintas kabupaten/kota (1000-3000 Ha) seluas 88.773 Ha dan Pemerintah Kabupaten/Kota (< 1000 Ha) seluas 261.061 Ha, total 421.734 Ha.

Tabel 78
Target Perbaikan/Penanganan Jaringan Irigasi
Tahun 2009 s.d 2013

URAIAN	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
JARINGAN PEMBAWA					
a. Saluran Induk					
- Normalisasi Saluran (m)	5.370	8.500	8.500	8.500	8.500
- Pasangan/Tbk. Pasangan (m)	3.850	5.700	5.700	5.700	5.700
b. Saluran Sekunder					
- Normalisasi Saluran (m)	4.250	11.250	11.250	11.250	11.250
- Pasangan/Tbk. Pasangan (m)	2.620	3.800	3.800	3.800	3.800
c. Bangunan Utama (Bendung, Free Intake) (Bh)	0	2	3	4	4
d. Bangunan Pembawa/Pelindung (Bh)	32	60	60	60	60
JARINGAN PEMBUANG					
a. Saluran Pembuang (m)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
b. Bangunan Pembuang (Bh)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat luas baku lahan rawa seluas 1.012.005 ha dan letaknya tersebar di pantai timur dan pantai barat. Dari luas tersebut yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 Ha (32,18 %) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan atas kawasan untuk dapat dijadikan menjadi areal pertanian.

Lahan rawa yang potensial untuk pertanian 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45 %). Dari luas rawa yang potensial tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pembagian kewenangannya adalah : kewenangan Pemerintah Pusat seluas 100.286

Ha, kewenangan provinsi seluas 64,339 Ha, dan kabupaten/kota seluas 24.801 Ha.

Tabel 79
Data kondisi Daerah Rawa Kewenangan Provinsi

Uraian		Yang Ada				Yang Belum Ada
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Jaringan Pembawa/ Pembuang	(m)	485.594	291.350	97.124	97.120	145.670
Tanggul Banjir	(m)	86.685	46.085	24.300	16.300	62.850
Bangunan-Bangunan Rawa	(m)	274	180	65	29	24
Jumlah Daerah Rawa	(BH)	36				
Luas Total Areal Rawa	(Ha)	64.339				

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 80
Target Perbaikan/Penanganan Jaringan Rawa
Tahun 2009 s.d 2013

Uraian		Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Perbaikan Jaringan Pembawa/ Pembuang	(m)	38.100	40.000	40.000	40.000	40.000
Perbaikan Tanggul Banjir	(m)	2.090	3.500	3.500	3.500	3.500
Bangunan-Bangunan Rawa	(m)	2	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 81
Target Perbaikan/Penanganan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air
Tahun 2009 s.d 2013

Uraian		Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Pengamanan tebing sungai/Pantai	(m)	9.683	10.500	10.500	10.500	10.500
Normalisasi alur sungai akibat penyempitan	(m)	5.607	9.500	9.500	9.500	9.500
Perbaikan dan Pembuatan Tanggul Banjir	(m)	14.020	15.250	15.250	15.250	15.250
Bangunan sungai lainnya	(BH)	0	2	1	1	0

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun program/ kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

A. Program Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur, Program

ini memuat kegiatan :

- 1) Perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan O&P Jaringan Irigasi dan Rawa.
- 2) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/kota pada UPT PSDA Belawan - Padang (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan) luas daerah irigasi 15.719 Ha.
- 3) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/kota pada UPT PSDA Bah Bolon (Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar) luas daerah irigasi 12.165 Ha.
- 4) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/kota pada UPT PSDA Asahan - Danau Toba (Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir) luas daerah irigasi 17.778 Ha.
- 5) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Kualuh - Barumon (Kabupaten Labuhanbatu) luas daerah irigasi 600 Ha.
- 6) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Sibundong - Batang Toru

(Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan) luas daerah irigasi 10.223 Ha.

- 7) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Nias (Kabupaten Nias, Nias Barat/Nias Selatan) luas daerah irigasi 883 Ha.
- 8) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Lae Renun-Lau Biang (Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo) luas daerah irigasi 2.250 Ha.
- 9) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Batang Gadis - Batang Natal (Kabupaten Mandailing Natal) luas daerah irigasi 4.770 Ha.
- 10) O & P jaringan irigasi (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas) luas daerah irigasi 8.930 Ha.
- 11) O & P jaringan rawa (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPTPSDA Wampu - Besitang (Kabupaten Langkat, Kota Binjai) luas daerah rawa 28.063 Ha.
- 12) O & P jaringan rawa (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Belawan - Padang

(Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Medan) luas daerah rawa 7.000 Ha.

- 13) O & P jaringan rawa (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Kualuh - Barumon (Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan) luas daerah rawa 13.542 Ha.
- 14) O & P jaringan rawa (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Sibundong - Batang Toru (Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara) luas daerah rawa 1.560 Ha.
- 15) O & P jaringan rawa (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas) luas daerah rawa 2.667 Ha.
- 16) O & P jaringan rawa (1.000 Ha - 3.000 Ha) dan lintas kabupaten/ kota pada UPT PSDA Batang Gadis - Batang Natal (Kabupaten Mandailing Natal) luas daerah rawa 2.400 Ha.
- 17) Kordinasi pembina P3A untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- 18) Konsultasi O & P pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota.

- 19) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Medan Krio (Pkt-1).
- 20) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Namo Rambe (Pkt-1).
- 21) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Bah Tonang.
- 22) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Pekan Dolok.
- 23) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Langau.
- 24) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Panombean/Panei Tongah/Bah Kata (1.723 Ha) (Pkt-1).
- 25) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Panombean/Panei Tongah/Bah Kata (1.723 Ha) (Pkt-2).
- 26) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Bah Tongguran I (1.186 Ha) (Pkt-1).
- 27) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Javacolonisasi/Purbogondo (1.030 Ha) (Pkt-2).
- 28) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Raja Hombang/Tongamangaraja (2.045 Ha) (Pkt-1).

- 29) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Raja Hombang/Tongamangaraja (2.045 Ha) (Pkt-2).
- 30) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Bah Horas/Hulu Tengah (1.050 Ha) (Pkt-1).
- 31) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Bah Kora II/ Negeri Bosar (1.901 Ha) (Pkt-1).
- 32) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Tanjung Muda (Pkt-1).
- 33) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Tanjung Muda (Pkt-2).
- 34) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Cinta Maju/Damai (Pkt-1).
- 35) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Purwodadi (pkt-1).
- 36) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Sei Balai (Pkt-1).
- 37) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Serbangan (pkt-1).
- 38) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Panca Arga.
- 39) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Sijambi.

- 40) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Hinalang (Pkt-1).
- 41) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Simangatasi II.
- 42) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Aek Mandosi.
- 43) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Mombangboru (890 Ha) (Pkt-1).
- 44) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Pandurungan/Sitandiangan (2.949 Ha).
- 45) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Badiri Lopian (1.283 Ha).
- 46) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Sarulla (1.000 Ha).
- 47) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Sibundong (1202 Ha) (Pkt-1).
- 48) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Hutapaung (1000 Ha) (pkt-1).
- 49) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Gido Sebua 1.258 Ha (Pkt-1).
- 50) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Buluduri (1.008 Ha) (Pkt-1).

- 51) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Buluduri (1.008 Ha) (Pkt-2).
- 52) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Buluduri (1.008 Ha) (Pkt-3).
- 53) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Lae Ordi 1.019 Ha (Pkt-1).
- 54) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Parit Lompaten (1.242 Ha) (Pkt-1).
- 55) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Parit Lompaten (1.242 Ha) (Pkt-2).
- 56) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Parit Lompaten (1.242 Ha) (Pkt-3).
- 57) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Lae Ordi 1.019 Ha (Pkt-2).
- 58) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Tapus.
- 59) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Terusan.
- 60) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Pakantan.
- 61) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Roburan Mega.

- 62) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Banjar Paku.
- 63) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Ujung Gurap (Pkt-1).
- 64) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Tabu Sira.
- 65) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Siborna.
- 66) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Balakka Sitongkon (Pkt-1).
- 67) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Sibulung Bira.
- 68) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Pulau Kampai (Pkt-1).
- 69) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Secanggang (Pkt-1).
- 70) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Secanggang (Pkt-2).
- 71) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Pulau Kampai (Pkt-2).
- 72) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Secanggang (Pkt-3).

- 73) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Tanjung Putus.
- 74) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Hinai.
- 75) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Pematang Cengal.
- 76) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Sei Jawi-jawi (Pkt-1).
- 77) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Selat Beting (Pkt-1).
- 78) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Panai (Pkt-1).
- 79) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Kayu Besar (Pkt-1).
- 80) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Batang Lobung.
- 81) Kegiatan Program WISMP-II/Loan 4711-IND/10705701-komponen 2 peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif-PPSIP (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air).
- 82) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Bah Tongguran I (1.186 Ha) (Pkt-2).
- 83) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Bah Tongguran I (1.186 Ha) (Pkt-3).

- 84) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Raja Hombang/Tongamangaraja (2.045 Ha) (Pkt-3).
- 85) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Raja Maligas 1.000 Ha (Pkt-1).
- 86) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Rambung Merah/Simarimbun (1.104 Ha) (Pkt-1).
- 87) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Rambung Merah/Simarimbun (1.104 Ha) (Pkt-2).
- 88) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Rambung Merah/Simarimbun (1.104 Ha) (Pkt-3).
- 89) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Padang Gerugur kiri/kanan (Pkt-1).
- 90) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Padang Gerugur kiri/kanan (Pkt-2).
- 91) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Padang Gerugur kiri/kanan (Pkt-3).
- 92) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Secanggang (Pkt-5).
- 93) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Secanggang (Pkt-6).
- 94) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Secanggang (Pkt-7).

95) Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa pada D.R. Secanggang (Pkt-8).

B. Program Pembangunan dan Pengelolaan Air Baku dan Sumber

Air Lainnya, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku pada Embung Sihusapi.
- 2) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku pada Embung Sibaulangit.
- 3) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku pada Embung Dalan Nagodang.
- 4) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku pada Embung Siarung-arung.
- 5) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku pada Embung/Waduk Lantosan.
- 6) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku pada Embung/Waduk Saba Julu Nagasaribu.
- 7) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku pada Embung/Waduk Sisakkap.

C. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Air Lainnya, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Kegiatan wadah koordinasi/Dewan SDA Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kegiatan Peringatan Hari Air Sedunia Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Pengelolaan hidrologi/hidrometri dan data/informasi sumber daya air.
- 4) Pengawasan dan penelitian pemberian rekomendasi teknis perijinan atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan sumber air permukaan umum (APU).
- 5) Keg. Program WISMP-II / Loan 4711-IND/10705701 - Komponen 1, Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Komponen 4, Manajemen Proyek dan Dukungan Implementasi (KPIU - Dinas Sumber Daya Air Provsu).

✓ **BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN**

Salah satu faktor yang diharapkan dapat membantu dalam percepatan peningkatan produksi pertanian adalah peran aktif penyuluh. Hal tersebut tercermin dari tugas pokok penyuluh yaitu membantu petani dengan menyediakan informasi, baik melalui bimbingan kelompok maupun pribadi ataupun melalui media massa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja petani. Dengan kata lain, penyuluh akan membantu petani dalam menggunakan sumber daya yang ada pada mereka sendiri dan mengerahkan bantuan lainnya yang dapat meningkatkan tingkat produktivitas pertanian, organisasi serta pemasaran produk mereka.

Pentingnya peran penyuluh dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, maka selain diperlukan ketersediaan tenaga

penyuluh juga aspek kualitas penyuluh itu sendiri. Salah satu indikator untuk mencermati ketersediaan tenaga penyuluh adalah berdasarkan sebaran tiap kecamatan dan jenis penyuluhan.

Tabel 82
Jumlah Kecamatan dan Balai Penyuluh Kecamatan
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah		
		Kecamatan	Desa	BPK
1.	Nias	9	119	9
2.	Mandailing Natal	23	395	17
3.	Tapanuli Selatan	14	248	15
4.	Tapanuli Tengah	20	177	8
5.	Tapanuli Utara	15	243	15
6.	Toba Samosir	16	216	16
7.	Labuhanbatu	9	98	9
8.	Asahan	25	204	19
9.	Simalungun	31	367	31
10.	Dairi	15	169	4
11.	Karo	17	262	17
12.	Deli Serdang	22	394	23
13.	Langkat	23	277	24
14.	Nias Selatan	18	356	4
15.	Humbang Hasundutan	10	144	0
16.	Pakpak Bharat	8	52	8
17.	Samosir	9	117	12
18.	Serdang Bedagai	17	243	5
19.	Batu Bara	7	100	8
20.	Padang Lawas Utara	9	388	9
21.	Padang Lawas	11	304	12
22.	Labuhanbatu Selatan	5	54	5
23.	Labuhanbatu Utara	8	90	8
24.	Nias Utara	11	113	5
25.	Nias Barat	8	110	8
26.	Sibolga	4	17	0
27.	Tanjungbalai	6	31	6
28.	Pematangsiantar	8	53	4
29.	Tebing Tinggi	5	35	1
30.	Medan	21	151	2
31.	Binjai	5	37	5
32.	Padangsidempuan	6	73	6
33.	Gunungsitoli	6	101	6
JUMLAH		421	5.738	321

Program / kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

15. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lapangan, Program ini memuat kegiatan :

- 1) Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemantapan sistem penyuluhan P2K (kerjasama dengan KTNA).
- 2) Advokasi penyuluhan kepada pelaku utama/pelaku usaha serta penyuluhan kabupaten/kota.
- 3) Fasilitasi kegiatan Komisi Penyuluhan P2K.
- 4) Pembinaan kerjasama dan kemitraan dengan balai-balai penelitian/balai produksi benih/bibit (pertemuan dengan SKPD).
- 5) Kerjasama pengembangan kewirausahaan.
- 6) Bimbingan teknis penyuluh pendamping P2KP.
- 7) POSKO penyelenggaraan penyuluhan.
- 8) Pemantauan latihan dan kunjungan kerja penyuluh terhadap kelompok/pelaku utama.
- 9) Peningkatan sarana media penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 10) Penyelenggaraan penyuluhan di Desa Binaan PKK Provinsi.
- 11) Penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2014.

- 12) Pemilihan penyuluh PNS teladan, penyuluh swadaya teladan, petani teladan, gapoktan teladan dan THL TB PP berprestasi.
- 13) Penguatan kapasitas kelembagaan gapoktan.
- 14) Fasilitasi forum kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- 15) Menyelenggarakan penilaian kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan pada tingkat pemula lanjutan, madya dan utama.
- 16) Pemilihan balai penyuluhan kecamatan terbaik.
- 17) Pemantapan dan identifikasi kelembagaan poktan dan gapoktan.
- 18) Studi banding pengurus poktan dan gapoktan ke Jawa Barat.
- 19) Apresiasi administrasi kepegawaian penyuluh ke kabupaten/kota.
- 20) Pendampingan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di lapangan.
- 21) Penyebarluasan informasi penyuluhan P2K melalui media massa.
- 22) Pengembangan perpustakaan dan buku-buku perpustakaan Bakoorluh P2K.
- 23) Penyusunan RENJA 2014, RKA dan DPA.

- 24) Audit kendaraan roda 4 dan roda 2 ke kabupaten/kota.
- 25) Honor instruktur senam, Rohaniawan Islam dan Kristen.
- 26) Operasional pengurus dan penyimpan barang.
- 27) Pelaksanaan jambore penyuluhan provinsi.
- 28) Mengikuti penyelenggaraan jambore penyuluhan kehutanan tingkat nasional.
- 29) Peningkatan peran penyuluhan dalam mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN).
- 30) Pameran dan pembinaan, koordinasi.
- 31) Sosialisasi jabatan fungsional dan angka kredit penyuluh.
- 32) Revitalisasi penyuluhan di wilayah I.
- 33) Pertemuan perencanaan dan evaluasi program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- 34) Pembuatan film dokumenter penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 35) Penyediaan ATK, bahan komputer serta bahan administrasi keuangan.
- 36) Pelaporan/penggandaan administrasi keuangan.
- 37) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah administrasi monev dan keuangan.
- 38) Pelatihan pengelolaan dan bimbingan teknis keuangan.

- 39) Pertemuan sinkronisasi petugas keuangan bagi kabupaten/kota.
- 40) Pembinaan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 41) Supervisi dan pembinaan penyuluh kabupaten/kota oleh penyuluh provinsi.
- 42) Pertemuan mingguan di bakoorluh p2k dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh provinsi.
- 43) Pelatihan SLPTT bagi penyuluh pertanian dalam mendukung Program P2BN di Provinsi Sumatera Utara.
- 44) Pembuatan RENSTRA 2013-2018.
- 45) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 46) Pelaksanaan PEDTA tahun 2013.

Permasalahan :

- 1) Minimnya sarana dan prasarana penyuluhan seperti kantor Balai Penyuluhan Kecamatan, Pos Penyuluhan Desa.
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana penyuluh di lapangan seperti jaket, senter, topi, baju penyuluh, alat ukur (PUTS, PUTK), bagan warna daun dan sepeda motor.
- 3) Belum memadainya jumlah tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (kekurangan tenaga penyuluh 4.965 orang).

- 4) Jumlah penyuluh selalu mengalami penurunan dikarenakan pensiun, beralih fungsi, meninggal, sementara perekrutan sangat terbatas.
- 5) Kualitas dan motivasi penyuluh belum sesuai dengan harapan dan tuntutan zaman.
- 6) Belum semua penyuluh menguasai informasi dan teknologi.
- 7) Belum semua kabupaten/kota membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006.
- 8) Terjadinya alih fungsi lahan ke non pertanian.
- 9) Belum semua kabupaten/kota mempunyai komisi penyuluhan.
- 10) Sebagian besar kabupaten/kota belum sepenuhnya memberikan dukungan pembiayaan penyuluhan.
- 11) Kepemilikan lahan sangat sempit.
- 12) sebagian besar lahan usaha tani belum memiliki saluran pengairan dan banyak saluran irigasi yang kurang berfungsi.
- 13) Sarana dan prasarana penyuluhan masih sangat kurang.
- 14) Aspek teknologi, pasar, permodalan kurang dikuasai.
- 15) Generasi muda tani tidak tertarik jadi petani.

Solusi :

- 1) Tahun 2012 melalui APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merealisasikan pembangunan 144 unit saung penyuluhan di 33 kabupaten/kota.
- 2) Melalui Bakorluh P2K Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan perekrutan tenaga harian lepas penyuluh pertanian (THL TB PP) Provinsi Sumatera Utara (141 orang).
- 3) Memfasilitasi pengadaan kendaraan operasional bagi penyuluh di lapangan.
- 4) Memfasilitasi pengadaan peralatan dan perlengkapan penyuluh di lapangan seperti jaket, topi dan sepatu kerja.
- 5) Telah dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 untuk menghimbau Bupati/Walikota dan DPRD untuk segera membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006.
- 6) Mendorong pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan dan pos penyuluh di tingkat desa/kelurahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

- 7) Memfasilitasi kelembagaan penyuluhan yang sudah terbentuk baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan.
- 8) Membentuk dan meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- 9) Memfasilitasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang sudah terbentuk. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan identifikasi potensi wilayah, programa penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- 10) Peningkatan kompetisi dan profesionalisme penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- 11) Mendorong penempatan satu orang penyuluh pertanian untuk satu desa potensial, tiga orang penyuluh perikanan untuk satu kecamatan potensial perikanan dan tiga orang penyuluh kehutanan untuk satu kecamatan potensial kehutanan melalui penambahan jumlah penyuluh (CPNS, tenaga bantu, swadaya dan swasta).
- 12) Mendorong pemerintah daerah, pemangku kepentingan, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat dalam

pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- 13) Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.
- 14) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi terkait, balai pelatihan dan pengembangan teknologi, lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta baik dalam maupun luar negeri.

✓ **PENINGKATAN SWASEMBADA PANGAN**

Secara umum, situasi ketahanan pangan Sumatera Utara tahun 2012-2013 cenderung semakin membaik dan *kondusif*. Kondisi ketahanan pangan yang semakin baik ditunjukkan oleh beberapa indikator/pencapaian kinerja urusan ketahanan pangan yang dicapai sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami peningkatan dari 2.158.621 ton tahun 2012 menjadi 2.299.162 ton (ARAM II) tahun 2013, angka tersebut melebihi kebutuhan beras penduduk sebesar 1.867.441 ton, sehingga Sumatera Utara mengalami surplus beras sebesar 431.721 ton. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada perdagangan/pengiriman beras keluar daerah, maka Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Dalam rangka pengamanan pangan wilayah, maka

dikondisikan stock pangan yang tersedia minimal memenuhi 3 (tiga) bulan kebutuhan pangan penduduk. Bila dibandingkan jumlah surplus yang yang tersedia dengan kebutuhan untuk tiga bulan sebesar 452.131 ton maka sangat diperlukan kebutuhan cadangan pangan. Pengembangan cadangan pangan pemerintah yang telah dilaksanakan tahun 2012 – 2013 seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 83
Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara
Tahun 2011 – 2012

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Total
1	Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)	31 unit	36 unit	67 unit
2	Cadangan Pangan Pemerintah	98,5	66,0 ton beras	66,0 ton beras

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) akhir tahun 2013 tinggal 66,0 ton, karena sebahagian telah digunakan untuk bantuan pada masyarakat pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung Kabanjahe.

- 2) Beberapa produksi komoditas penting mengalami pertumbuhan positif, produksi beras mengalami kenaikan dari 2.158.621 ton pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.299.162 tahun 2013 (ARAM II), begitu juga produksi jagung, kacang tanah. Dilihat dari ketersediaan bahan pangan, ketersediaan komoditi pangan yang surplus selama tahun 2012 – 2013 adalah beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah, sedangkan untuk kedelai dan kacang hijau produksi menurun.

3) Dari hasil perimbangan swasembada beras tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara diperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) 123,12% yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 23,12 % per kapita. Ketersediaan beras sebesar 141,30 kg/kapita/tahun (hanya berasal dari produksi lokal), bila dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 136,85 kg/kapita/tahun, hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada perdagangan/pengiriman keluar daerah maka Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Disisi lain Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% pertahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal dimaksudkan untuk semakin memperkuat cadangan pangan selain memperbaiki pola pangan harapan (PPH). Konsumsi beras penduduk Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 130,61 kg/kapita/tahun. (Data Perkembangan Swasembada pangan beras di Sumatera Utara Tahun 2012 s.d Tahun 2013 tertera pada tabel berikut).

Tabel 84
Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras
di Sumatera Utara Tahun 2012 – 2013

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013 (ARAM II)
Jumlah Penduduk (jiwa)	13.215.401	13.215.401
Kebutuhan Beras (ton)	1.808.527	1.867.441
Produksi Beras (ton)	2.158.621 ^{*)}	2.299.162

Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	350.094	431.721
% SSB	119,36	123,12

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

Keterangan : *) angka berdasarkan rilis BPS (SUDA 2013)

- 4) Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai masih adanya terdapat kejadian kerawanan pangan di beberapa daerah yang bersifat kronis dan transien yang terjadi secara mendadak. Kejadian kerawanan pangan kronis disebabkan oleh ketidak mampuan masyarakat menangani permasalahan kekurangan pangan yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. Kondisi geografis yang bervariasi dan pola sebaran penduduk yang tidak terdukung potensi produksi pangan dapat menjadi faktor kerawanan pangan.
- 5) Produksi gabah kering giling di Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 3.664.588 ton setara dengan 2.299.162 ton beras.
- 6) Selain keberhasilan dalam peningkatan produksi pangan pokok beras, Sumatera Utara juga berhasil dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Pada saat harga pangan pokok strategis di pasar tidak stabil dan berfluktuasi akibat menurunnya produksi pangan strategis dunia, harga pangan di pasar dalam negeri juga berpengaruh, namun demikian harga pangan khususnya beras walaupun terjadi gejolak harga masih dapat dikendalikan sehingga toleransi kenaikan

harga beras di pasaran masih di bawah ambang batas 20 % kenaikan harga rata - rata.

- 7) Berdasarkan hasil survey ekonomi nasional (Susenas), konsumsi energi penduduk Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 1997,2 kkal/kap/hari naik 0,16% dari tahun 2011 (1.994 kkal/kap/hari) dan konsumsi protein tahun 2012 sebesar 62,8 gr/kap/hari naik 9,03 % dari tahun 2011 (57,6 gr/kap/hari). Skor PPH mengalami peningkatan dari tahun 2012 (82,4) menjadi 83,6 di tahun 2013.

Dalam rangka memberhasilkan capaian Peningkatan Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Utara, sudah barang tentu didukung oleh Program/ Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013. Adapun Program/ kegiatan dimaksud, yaitu :

A. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Evaluasi dan analisis strategis program aksi gema pangan 2010 – 2013.
- 2) Fasilitasi koordinasi dewan ketahanan pangan.
- 3) Pertemuan Pos Simpul Koordinasi (POSKO) dalam rangka monitoring ketahanan pangan Sumatera Utara.
- 4) Monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan tahun 2013.
- 5) Pemberdayaan kelompok lumbung pangan melalui pemberian bantuan penguatan cadangan pangan Kabupaten Batu Bara.

- 6) Pemberdayaan kelompok lumbung pangan melalui pemberian bantuan penguatan cadangan pangan Kabupaten Toba Samosir.
- 7) Pemberdayaan kelompok lumbung pangan melalui pemberian bantuan penguatan cadangan pangan Kabupaten Simalungun.
- 8) Pemberdayaan kelompok lumbung pangan melalui pemberian bantuan penguatan cadangan pangan Kabupaten Karo.
- 9) Pemberdayaan kelompok lumbung pangan melalui pemberian bantuan penguatan cadangan pangan Kota Padangsidimpuan.
- 10) Pemberdayaan kelompok melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat Kabupaten Toba Samosir.
- 11) Pemberdayaan kelompok melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
- 12) Pemberdayaan kelompok melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 13) Pemberdayaan kelompok melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 14) Pemantauan ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan 2013 di Provinsi Sumatera Utara.
- 15) Stabilisasi harga bahan pangan jagung melalui pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Deli Serdang.
- 16) Stabilisasi harga bahan pangan jagung melalui pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Langkat.

- 17) Stabilisasi harga bahan pangan jagung melalui pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 18) Stabilisasi harga bahan pangan jagung melalui pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Simalungun.
- 19) Stabilisasi harga bahan pangan jagung melalui pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Dairi.
- 20) Evaluasi program ketahanan pangan tahun 2012 dan sinkronisasi program kerja dan anggaran ketahanan pangan tahun 2013 provinsi/kabupaten/kota.
- 21) Penyusunan rencana kerja ketahanan pangan tahun 2014.
- 22) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat di Kabupaten Nias Utara.
- 23) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat di Kabupaten Nias Barat.
- 24) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat di Kabupaten Langkat.
- 25) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat di Kota Pematangsiantar.
- 26) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- 27) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat di Kota Tanjungbalai.
- 28) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat di Kabupaten Asahan.
- 29) Diversifikasi pangan melalui penggalan potensi pangan lokal berbasis sumberdaya lokal.
- 30) Pengembangan produk olahan pangan berbasis sumber daya pangan local.
- 31) Penanganan dan pengawasan peredaran mutu buah dan sayuran segar serta uji laboratorium residu pestisida.
- 32) Fasilitasi koordinasi rencana pembangunan ketahanan pangan tahun 2014 provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 33) Penyebarluasan informasi ketahanan pangan melalui media cetak, elektronik, SMS gateway, website, dan radio.
- 34) Koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- 35) Pengembangan kemitraan agribisnis pangan di kawasan palawija/hortikultura berbasis komunitas petani/kelompok petani dan swasta di 4 kabupaten/kota.
- 36) Pengembangan industri pengolahan pangan lokal dan tepung-tepungan pada kelompok home industri dan kelompok wanita.
- 37) Pendampingan industri pangan berbahan mocaf dalam rangka substitusi bahan pangan terigu.

- 38) Pembinaan bagi Desa replikasi dalam mendukung program desa mandiri pangan.
- 39) Peningkatan pengembangan usaha agribisnis untuk mendukung kemampuan akses pangan.
- 40) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di daerah agropolitan dan agromarinepolitan Kabupaten Toba Samosir.
- 41) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di daerah agropolitan dan agromarinepolitan Kabupaten Dairi.
- 42) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di daerah agropolitan dan agromarinepolitan Kabupaten Karo.
- 43) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di daerah agropolitan dan agromarinepolitan Kabupaten Samosir.
- 44) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di daerah agropolitan dan agromarinepolitan Kabupaten Simalungun.
- 45) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di daerah agropolitan dan agromarinepolitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

- 46) Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di daerah agropolitan dan agromarinepolitan Kabupaten Asahan.
- 47) Perumusan standar Batas Minimum Residu (BMR) pestisida.
- 48) Penyusunan statistik ketahanan pangan.
- 49) Apresiasi peningkatan akses pangan masyarakat miskin di pedesaan/perkotaan.
- 50) Pameran ketahanan pangan dan lomba penyusunan menu 3B dalam rangka Hari Pangan Sedunia tingkat Nasional.
- 51) Survey pola pangan harapan tahun 2013 di Sumatera Utara.
- 52) Apresiasi dan sosialisasi Undang - Undang Pangan No. 18 Tahun 2012.
- 53) Pemantauan harga distribusi beras di Sumatera Utara.
- 54) Apresiasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) bagi tim teknis dan tenaga pendamping.
- 55) Penyusunan neraca bahan makanan tahun 2013.
- 56) Pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan/LM3.
- 57) Pembinaan daerah rawan pangan transien dan kronis.
- 58) Fasilitasi koordinasi dan penggerakan gema pangan dan swasembada pangan.

Permasalahan :

- 1) Perimbangan surplus beras sebesar 431.721 ton (tahun 2013) dibandingkan tingkat konsumsi penduduk Sumatera Utara sebesar 145.850 ton perbulan, hanya dapat memenuhi kemampuan stok cadangan beras \pm tiga bulan, sehingga hal ini masih rentan terhadap kerawanan pangan terlebih apabila terjadi gagal panen, bencana alam banjir/kekeringan dll.
- 2) Sungguhpun skor PPH naik dari tahun 2012 menjadi 83,6 pada tahun 2013 dengan konsumsi energi dan protein yang juga terjadi kenaikan skor namun masih didominasi oleh padi – padian, yang masih minim dari sumber umbi – umbian, kacang – kacangan, sayur dan buah – buahan maupun ikan – ikanan. Hal ini belum sesuai dengan kondisi ideal skor PPH yang mendukung kualitas sumberdaya manusia.
- 3) Masih ditemukannya penduduk yang mengalami kerentanan/ kerawanan pangan yang tersebar di daerah Sumatera Utara, baik yang dipicu oleh penyebab kemiskinan, bencana alam maupun akses pangan yang rendah.

Solusi :

- 1) Untuk memperkuat cadangan pangan beras diperlukan upaya :
 - a. Tetap memacu peningkatan produksi dan produktivitas beras. Produksi bahan pangan karbohidrat sumber non beras penting ditingkatkan dan dimasyarakatkan untuk dikonsumsi.

- b. Ancaman produksi beras lokal karena penyebab alih fungsi lahan diatasi dengan Perda.
 - c. Masih perlu dukungan beras raskin untukantisipasi gejolak harga beras di pasaran.
 - d. Di tingkat petani padi penting dikembangkan pengelolaan lumbung pangan yang berfungsi untuk cadangan pangan juga penyangga stabilitas harga.
- 2) Untuk memperbaiki pola pangan masyarakat diperlukan upaya:
- a. Memasyarakatkan gerakan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dan pengembangan agribisnis pangan.
 - b. Memasyarakatkan gerakan pemanfaatan pekarangan melalui KRPL/P2KP di lingkungan rumah tangga, kelompok wanita dan anak – anak sekolah dengan disinergikan sosialisasi B2SA.
- 3) Untuk menangani kerentanan/kerawanan pangan diperlukan upaya :
- a. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi berbagai sektor untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga diharapkan kemampuan konsumsi pangan berkualitas meningkat.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan pola usaha tani, pemasaran, pengolahan pangan di tingkat lokal penduduk rawan pangan serta infrastruktur pendukungnya.
 - c. Memperkuat cadangan pangan di tingkat lokal penduduk rawan pangan dalam bentuk pembinaan lumbung pangan, penguatan modal

usaha kelompok, dan memantapkan pengelolaan sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi.

- d. Mengintegrasikan penanganan daerah rentan/rawan pangan dengan menerapkan hasil pemetaan FSVA (peta kerentanan dan kerawanan pangan) melibatkan seluruh sektor/stake holder.

✓ **BIDANG PETERNAKAN**

Capaian Pertumbuhan populasi ternak dilakukan dengan mengacu pada data populasi ternak sebagai berikut.

Tabel 85. Data Populasi Ternak (Ekor)

No.	Jenis Ternak	2012 (Ekor)	2013* (Ekor)	% Peningkatan
1	2	3	4	5
1.	Sapi Potong	609.951	625.817	2,60
2.	Sapi Perah	1.057	1.075	1,70
3.	Kerbau	131.483	139.701	6,25
4.	Kambing	781.774	805.065	2,98
5.	Domba	374.286	409.375	9,37
6.	Babi	866.207	947.414	9,38
7.	Ayam Buras	12.073.428	12.447.014	3,09
8.	Ayam Petelur	12.055.592	12.455.592	3,32
9.	Ayam Pedaging	42.813.178	44.790.497	4,62
10.	Itik	2.790.326	2.848.329	2,08

* Angka sementara

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu

Hasil pengukuran kinerja peningkatan populasi ternak menunjukkan peningkatan di seluruh komoditi ternak. Peningkatan populasi ternak sapi potong sebesar 2,60 %, sapi perah 1,70 %, kerbau 6,25 %, kambing 2,98 %, domba 9,37 %, babi 9,38 %, ayam buras 3,09 %, ayam ras petelur 3,32 %, ayam pedaging 4,62 % dan itik 2,08 %. Pengukuran kinerja peningkatan

produksi daging, telur dan susu dilakukan dengan mengacu pada data berikut.

Tabel 86. Data Produksi Daging, Susu dan Telur (Ton)

No.	Jenis Komoditi	2012	2013*	% Peningkatan
1	2	3	4	5
1.	Daging	135.911,00	139.414,66	2,58
2.	Telur	133.464,26	137.686,98	3,16
3.	Susu	761,04	774,03	1,71

*Angka sementara

Dari Tabel 85, Capaian kinerja menunjukkan peningkatan produksi daging sebesar 11,41 %, telur 3,16 % dan susu 1,71 %. Sementara itu Capaian kinerja peningkatan potensi konsumsi hewani melalui peningkatan konsumsi daging, telur dan susu sebagai berikut.

Tabel 87
Data Konsumsi Daging, Telur dan Susu (Kg/Kapita/Tahun)

No.	Jenis Komoditi	2012	2013*	% Peningkatan
1	2	3	4	5
1.	Daging	10,28	11,34	10,31
2.	Telur	10,10	10,31	2,09
3.	Susu	0,0576	0,0580	0,65

*Angka sementara

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu

Dari Tabel 86 diatas, Capaian kinerja menunjukkan peningkatan potensi konsumsi hewani daging sebesar 10,31 %, telur 2,08 % dan susu 0,65 %.

➤ **BIDANG/ SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Secara keseluruhan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun budidaya perikanan telah mengalami perkembangan, baik dilaut maupun di perairan umum daratan. Hasil penangkapan ikan pada tahun 2012 sebesar 563.132,10 ton dan pada tahun 2013 sebesar 565.215,69 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 sebesar 143.447 ton dan pada tahun 2013 sebesar 175.721 ton. Untuk mengetahui produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 88
Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012 dan tahun 2013

No	Rincian	Potensi	Produksi 2012	Produksi 2013
1	Panangkapan	1.352.990	563.132,10	565.215,69
2	Budidaya tambak	20.000	32.988,2	34.906
3	Budidaya air laut	100.000	3.080,6	4.248,1
4	Budidaya air tawar	180.647,5	107.378,2	136.566,8
TOTAL			706.579,11	740.936,69

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

Ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2012. Pada tahun 2012 ekspor hasil perikanan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 52.719.262,95 kg dengan nilai U\$ 225.480.596,69 dan pada tahun 2013 mengalami

peningkatan menjadi 56.185.918,07 kg dengan nilai U\$ 250.900.694,10. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2012 sebesar 34,66kg/kapita/tahun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 38,95 kg/kapita/tahun. Penyerapan tenaga kerja sektor perikanan pada tahun 2012 sebanyak 259.284 orang dan pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 275.355 orang, untuk realisasi PAD Tahun 2012 sebesar Rp. 1.634.510.300,- dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.773.531.600,-.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 89
Pencapaian Kinerja di Sektor Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dan tahun 2013

No	Rincian	Capaian 2012	Capaian 2013
1	Produksi Perikanan Tangkap	563.132,11 Ton	565.215,69 Ton
2	Produksi Perikanan Budidaya	143.477 Ton	175.721 Ton
3	Ekspor Hasil Perikanan	52.719.262,95 Kg	56.185.918,07 Kg
4	Tingkat Konsumsi Ikan	34,66 kg/kapita/tahun	38,95 kg/kapita/tahun
5	Penyerapan Tenaga Kerja	259.284 orang	275.355 orang
6	Realisasi PAD	Rp. 1.634.510.300,-	Rp. 1.773.531.600,-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

Dalam pencapaian kinerja di sektor perikanan/ kelautan, sudah tentu didukung oleh pelaksanaan program/ kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2013, yaitu :

A. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Rapat evaluasi monitoring semester I dan II.
- 2) Sinkronisasi dan pengumpulan kegiatan UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu.
- 3) Sosialisasi program-program kelautan dan perikanan.
- 4) Laporan tahunan DKP Provsu.
- 5) Rapat koordinasi perencanaan dengan kabupaten/kota.
- 6) Pengelolaan informasi dan data Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 7) Pengadaan rumah ikan di Kabupaten Nias Utara.
- 8) Lomba mancing di laut tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 9) Forum komunikasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- 10) Pengawasan dan pengendalian legalisasi usaha pengolahan hasil perikanan.
- 11) Evaluasi dan penilaian POKMASWAS.
- 12) Pembinaan POKMASWAS.
- 13) Perawatan dan docking kapal di Danau Toba.

- 14) Operasi gabungan pengawasan di Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat.
- 15) Operasi rutin dan pengawasan sumberdaya ikan.
- 16) Perawatan dan docking kapal patroli perikanan.
- 17) Forum koordinasi penegakan hukum bidang perikanan di Sumatera Utara.
- 18) Operasi gabungan penertiban pelanggaran peraturan perikanan di Sumatera Utara.
- 19) Operasi pengawasan rutin kapal patroli di Danau Toba dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan.
- 20) Pengawasan dan pengendalian kerusakan sumberdaya ikan di perairan umum.
- 21) Pengadaan jaring millenium di lokasi agromarinepolitan (Labuhanbatu).
- 22) Pengadaan jaring millenium di lokasi agromarinepolitan (Belawan).
- 23) Pengadaan jaring millenium di lokasi agromarinepolitan (Labuhanbatu Utara).
- 24) Pengadaan jaring millenium di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Serdang Bedagai).
- 25) Pengadaan jaring millenium di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Batubara).

- 26) Pengadaan jaring kepiting di lokasi agromarinepolitan (Batubara) (DAK).
- 27) Pengadaan jaring kepiting di lokasi agromarinepolitan (Langkat).
- 28) Pembuatan terumbu karang buatan dalam rangka rehabilitasi di Kabupaten Batubara.
- 29) Pengadaan kapal 30 GT dan alat penangkapan ikan (DAK).
- 30) Pengadaan rumpon di lokasi agromarinepolitan (Mandailing Natal).
- 31) Optimalisasi Subbag Perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja.
- 32) Pengadaan rumpon di lokasi agromarinepolitan (Labuhanbatu).
- 33) Pengadaan rumpon di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Tapanuli Selatan).
- 34) Pengadaan rumpon di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Tapanuli Tengah).
- 35) Penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu.
- 36) Pengadaan jaring kepiting di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Asahan).
- 37) Pengadaan jaring kepiting di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Labuhanbatu).

- 38) Pengadaan mesin dan perlengkapannya di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Asahan).
- 39) Pengadaan mesin dan perlengkapannya di lokasi agromarinepolitan (Kabupaten Mandailing Natal).
- 40) Pengadaan jaring aso-aso pada lokasi agromarinepolitan di Kabupaten Nias.
- 41) Pengadaan jaring aso-aso pada lokasi agromarinepolitan di Kabupaten Nias Selatan.
- 42) Studi pembangunan pemberdayaan masyarakat pesisir.
- 43) Pengadaan cool box dan keranjang ikan di Kabupaten Deli Serdang.
- 44) Pengadaan cool box dan keranjang ikan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 45) Rencana penyusunan buku ekologi ekosistem pantai timur Sumatera Utara.
- 46) Pengadaan leaflet alat tangkap BPPI Belawan untuk bahan pelatihan kepada masyarakat.
- 47) Modifikasi alat bantu penangkapan ikan WINCH untuk alat tangkap mini purse seine.
- 48) Desiminasi teknologi alat tangkap ikan jaring milenium bagi nelayan di kabupaten/kota Sumatera Utara.
- 49) Sosialisasi pembuatan dan penyusunan program kerja lingkup DKP Provsu.

- 50) Pembangunan steger kapal pengawasan di Danau Toba.
- 51) Pengadaan kapal dan perlengkapannya untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bina Bahari di Kabupaten Batubara.
- 52) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk KUB di Kecamatan Batahan.
- 53) Pengadaan 2 unit kapal purshine beserta perlengkapannya.
- 54) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan MUJUR JAYA Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
- 55) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan SINAR SAMUDERA Kec Lima Puluh.
- 56) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk Kelompok Nelayan FAJAR BAHAGIA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.
- 57) Pengadaan kapal ikan untuk kelompok nelayan (KUB) Sinar laut di Pantai Labu.
- 58) Pengadaan kapal ikan untuk kelompok nelayan ANUGERAH Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
- 59) Pengadaan alat tangkap jaring untuk Kelompok Nelayan Bahari (KENARI) Stabat.
- 60) Pengadaan alat tangkap ikan dan coolbox untuk Kelompok Nelayan SEJATI Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
- 61) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk KUB di Kecamatan Muara batang gadis.

- 62) Pengadaan alat tangkap aso-aso untuk KUB di Kecamatan Batahan.
- 63) Pengadaan alat tangkap aso-aso untuk KUB di Desa Panggautan.
- 64) Pengadaan alat tangkap aso-aso untuk KUB di Desa Pulau tamang.
- 65) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan (KUB) di Percut.
- 66) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan Kuala Indah Kota Tanjungbalai.
- 67) Pengadaan jaring millenium di Kabupaten Asahan
- 68) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan Berdikari Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
- 69) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan Jaring Kepiting Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
- 70) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan Samudra Mandiri Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
- 71) Pengadaan jaring millenium di Kabupaten Deli Serdang.
- 72) Pengadaan kapal ikan untuk Kelompok Nelayan Cubahak Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- 73) Pengadaan alat tangkap ikan dan cool box untuk Kelompok Nelayan Nelayan Panah Hijau Kecamatan Medan Marelan.

- 74) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk Kelompok Nelayan Tuamang Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 75) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk Kelompok Nelayan Camar Laut Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 76) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk Kelompok Nelayan Tunas Baru Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 77) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk Kelompok Nelayan Remaja Deli Desa Karang Deli Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
- 78) Pengadaan alat tangkap gillnet untuk Kelompok Nelayan Sentosa Jaya Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 79) Pengadaan alat tangkap jaring kembang pada Kelompok Nelayan Mitra Deli di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
- 80) Pengadaan mesin kapal pada Kelompok Nelayan Mitra Deli di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
- 81) Pengadaan cool box pada Kelompok Nelayan Mitra Deli di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.

- 82) Pengadaan pancing cumi pada Kelompok Nelayan Mitra Deli di Desa Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
- 83) Pembinaan lubuk larangan.
- 84) Pengadaan kapal kayu dan alat tangkap untuk KUB Harapan Laut kota Tanjungbalai.
- 85) Pengadaan kapal kayu dan alat tangkap untuk KUB Pulau Mas kota Tanjungbalai.
- 86) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk KUB Putra Bahari kota Tanjungbalai.
- 87) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk KUB Cahaya Nelayan kota Tanjungbalai.
- 88) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk KUB Buah Bunda Kota Tanjungbalai.
- 89) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk KUB Mutiara Pesisir Kota Tanjungbalai.
- 90) Pengadaan kapal tradisional untuk KUB Nelayan Jaya kota Tanjungbalai.
- 91) Rehab Kantor KARES Simpang Sicanang Belawan.
- 92) Pengadaan kapal tradisional untuk KUB Buah Laut kota Tanjungbalai.
- 93) Pengadaan kapal tradisional untuk KUB Hasil Laut kota Tanjungbalai.

- 94) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap untuk KUB Maju Bersama di Kabupaten Batubara.
- 95) Pengadaan kapal tradisional untuk KUB Sumber rezeki Kota Tanjungbalai.
- 96) Pengadaan kapal dan alat tangkap untuk Kelompok Nelayan DOA RESTU di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 97) Pengadaan kapal tradisional dan alat tangkap nelayan untuk KUB Jaya Prima Kota Tanjungbalai.
- 98) Pengadaan rumah ikan di pantai timur Sumatera Utara.
- 99) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Sinar Samudera Kecamatan Lima Puluh.
- 100) Pengadaan rumah ikan di pantai barat Sumatera Utara.
- 101) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan (KUB) Sinar laut di Pantai Labu.
- 102) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Anugerah Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
- 103) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan (KUB) di Percut.
- 104) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Kuala Indah Kota Tanjungbalai.
- 105) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Berdikari Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

- 106) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Jaring Kepiting Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
- 107) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Samudra Mandiri Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.
- 108) Pengadaan alat tangkap ikan untuk Kelompok Nelayan Cubahak Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- 109) Operasional pengawasan apartemen ikan di 4 (empat) kabupaten/ kota.
- 110) Rehab gedung kantor DKP lantai atas.

B. Program Pengembangan Agropolitan dan Pulau-pulau Terluar.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Gerakan Bersih Pantai (Langkat, Serdang Bedagai, Deli Serdang dan Batubara).
- 2) Pembuatan terumbu karang buatan dalam rangka rehabilitasi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir di Kabupaten Mandailing Natal.
- 4) Pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir di Kabupaten Padang Lawas.
- 5) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui bantuan benih ikan di Kabupaten Mandailing Natal.

- 6) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui bantuan benih ikan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 7) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui bantuan benih ikan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 8) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya melalui asuransi.
- 9) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui bantuan benih ikan di Kabupaten Padang Lawas.
- 10) Operasional Kapal MCS Coremap II.
- 11) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang rehabilitasi kawasan pesisir di pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara (lokalisasi agromarinepolitan Tapanuli Tengah dan Serdang Bedagai).
- 12) Operasional PPP P.Tello.
- 13) Biaya pemeliharaan Kapal Patroli MCS.
- 14) Pengadaan mangrove di wilayah pesisir (Kabupaten Labuhanbatu Utara).
- 15) Pengadaan mangrove di wilayah pesisir (Kabupaten Asahan).
- 16) Monev karang (*Reef Check*) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 17) Pengembangan *Silvofishery* di Kabupaten Deli serdang.
- 18) Sosialisasi tentang mitigasi bencana di Nias Barat.
- 19) Sosialisasi tentang mitigasi bencana di Nias Utara.
- 20) Doking Kapal Patroli MCS di Pulau Tello.

- 21) Transplantasi terumbu karang.
- 22) Pembuatan terumbu karang buatan di Kabupaten Asahan.
- 23) Pembuatan terumbu karang buatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 24) Pembuatan terumbu karang buatan di Kota Sibolga.
- 25) Pembuatan terumbu karang buatan di Kabupaten Deli Serdang.
- 26) Pembuatan terumbu karang buatan di Kabupaten Batubara.
- 27) Pembuatan terumbu karang buatan di Kabupaten Labuhanbatu.
- 28) Pengadaan terumbu karang buatan di Kabupaten Nias Barat.
- 29) Pengadaan terumbu karang buatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 30) Pengadaan terumbu karang buatan di Kabupaten Nias Selatan.
- 31) Pelatihan penyelaman dalam rangka pelestarian terumbu karang (Medan dan Tapanuli Tengah).
- 32) Biaya perawatan peralatan selam.
- 33) Pembuatan terumbu karang buatan dalam rangka rehabilitasi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 34) Penyusunan master plan industri kelautan dan perikanan untuk menunjang Program Minapolitan di Sumatera Utara.
- 35) Monitoring logam berat pada daerah penangkapan ikan.

- 36) Perencanaan minapolitan tahan bencana di Kabupaten Nias Utara.
- 37) Perencanaan minapolitan tahan bencana Kabupaten Serdang Bedagai.
- 38) Apresiasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan se kabupaten/kota tingkat Provsu.

C. Program Pengembangan Agrobisnis. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Promosi usaha dengan mengikuti pameran di dalam dan luar negeri.
- 2) Cek fisik kapal.
- 3) Rehab TPI Medang Deras di Kabupaten Batubara.
- 4) Lomba pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- 5) Pelatihan penangkapan ikan bagi nelayan di UPTD BPPI Belawan.
- 6) Pelatihan permesinan/perbengkelan bagi Nelayan di UPTD BPPI Belawan.
- 7) Operasional kapal latih UPTD BPPI Belawan.
- 8) Pengadaan suku cadang kapal latih UPTD BPPI Belawan.
- 9) Docking kapal latih UPTD BPPI Belawan.
- 10) Pengadaan alat tangkap ikan untuk alat peraga pelatihan di UPTD BPPI Belawan.

- 11) Pengadaan alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan binaan UPTD BPPI Belawan di luar lokasi agromarinepolitan.
- 12) Rehab TPI Kuala Indah Sei suka di Kabupaten Batubara.
- 13) Renovasi pagar UPTD BPPI Belawan.
- 14) Pengadaan peralatan perbengkelan bagi Kelompok Nelayan Binaan UPTD BPPI Belawan.
- 15) Rehab TPI Perupuk Lima puluh di Kabupaten Batubara.
- 16) Pembuatan terumbu karang buatan dalam rangka rehabilitasi di Kabupaten Asahan.
- 17) Temu teknis penangkapan ikan di BPPI Semarang.
- 18) Sistem informasi teknologi penangkapan ikan di Sumatera Utara.
- 19) Pembuatan/pengadaan maket alat tangkap di UPTD BPPI Belawan.
- 20) Pelatihan ANKAPIN dan ATKAPIN di Sumatera Utara.
- 21) Biaya operasional PPI Tanjungbalai.
- 22) Operasional sertifikasi *Approval Supplier*.
- 23) Operasional petugas pembina mutu dalam rangka asistensi penerapan GMP/SSOP.
- 24) Monitoring sanitasi kekerangan.
- 25) Monitoring dan pengendalian mutu ikan untuk konsumsi ikan dalam negeri dan ikan import untuk masyarakat.

- 26) Bimbingan teknis usaha perikanan di desa binaan PKK Provinsi Sumatera Utara.
- 27) Pelatihan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analytical Critical Control Point* (HACCP) bagi Petugas QC pada Unit Pengolahan Hasil Perikanan.
- 28) Operasional Balai LPPMHP Medan.
- 29) Pemeliharaan fasilitas Balai LPPMHP Medan.
- 30) Penambahan kelengkapan bangunan balai LPPMHP Medan.
- 31) Pengembangan Balai LPPMHP sebagai lembaga inspeksi (Program IPPI).
- 32) Peningkatan kompetensi Balai LPPMHP Medan.
- 33) Operasional Kantor UPTD BPPI Belawan.
- 34) Rehab ruangan Kantor Dinas UPTD BPPI Belawan.
- 35) Operasional genset Balai LPPMHP.
- 36) Pola pengembangan produk perikanan bernilai tambah di Sumatera Utara.
- 37) Pengecatan pagar di Sialang Buah.
- 38) Peningkatan kompetensi perencanaan DKP Provsu.

D. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan di sentra budidaya tambak, air tawar jaring apung dan balai benih ikan dalam rangka mendukung minapolitan.

- 2) Pengembangan dan optimalisasi laboratorium pengolahan kesehatan ikan.
- 3) Fasilitas pembudidaya air tawar berupa pengadaan benih nila di Kabupaten Dairi.
- 4) Fasilitas pembudidaya air tawar berupa pengadaan benih lele di Kabupaten Dairi.
- 5) Monitoring dan evaluasi peredaran dan penggunaan obat ikan (OIKB) dalam rangka menjamin keamanan produk perikanan budidaya.
- 6) Pembinaan pengelolaan stok *enhancement* (*stocking, restocking dan reservat*) di kawasan danau toba.
- 7) Operasional laboratorium kesehatan ikan dalam rangka peningkatan pelayanan laboratorium kepada pembudidaya ikan.
- 8) Monitoring residu antibiotik pada ikan/udang dan unit usaha budidaya dan kelompok usaha budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB.
- 9) Fasilitas pembudidaya air tawar berupa pengadaan benih ikan mas di Kabupaten Dairi.
- 10) Lomba masak serba ikan dalam rangka penganeekaragaman pangan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.
- 11) Forum dan Seminar Indoaqua tahun 2012 untuk peningkatan produksi perikanan budidaya.

- 12) Temu koordinasi statistik perikanan budidaya dalam rangka percepatan penyajian data statistik perikanan budidaya Sumatera Utara.
- 13) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengadaan sarana produksi budidaya untuk peningkatan produksi perikanan budidaya di wilayah barat Sumatera Utara.
- 14) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengadaan sarana produksi budidaya untuk peningkatan produksi perikanan budidaya di wilayah timur Sumatera Utara.
- 15) Pengadaan induk ikan mas dan ikan nila di Kabupaten Tapanuli Selatan
- 16) Fasilitas pembudidaya air tawar berupa pengadaan benih patin di Kabupaten Dairi.
- 17) Fasilitas pembudidaya air tawar berupa pengadaan obat-obatan dan pakan ternak di Kabupaten Dairi.
- 18) Optimalisasi prasarana budidaya ikan/udang (BBIP Teluk Meku).
- 19) Optimalisasi prasarana budidaya ikan (BBIP Fino).
- 20) Monitoring ketersediaan benih ikan di Sumatera Utara mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
- 21) Pengadaan benih dan calon induk ikan kepada masyarakat.
- 22) Pengadaan calon induk unggul ikan nila untuk BBI Lokal/UPR di wilayah timur Sumatera Utara.

- 23) Penebaran/pelepasan ikan berbasis budidaya di perairan sekitar Danau Toba.
- 24) Percontohan budidaya kerapu.
- 25) Pelatihan pembudidaya dan UPR di UPTD BBI Kerasaan.
- 26) Rehab tambak dempond Belawan.
- 27) Rehab rumah genset dempond Belawan.
- 28) Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan).
- 29) Pengadaan satu unit tangki air di puspik ambarita.
- 30) Operasional BBIS Kerasaan.
- 31) Operasional Sialang Buah.
- 32) Operasional dempond Babalan Langkat.
- 33) Operasional dempond Belawan.
- 34) Operasional BBI Sibiat kabupaten simalungun.
- 35) Operasional Puspik Ambarita.
- 36) Dana pendukung Coremap.
- 37) Pengadaan KJA ramah lingkungan mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
- 38) Perbaikan jalan dempon Sialang Buah.
- 39) Rehabilitasi gudang peralatan dempon sialang buah.
- 40) Rehab reservoart dempon Belawan.
- 41) Rehab workshop UPPI Belawan.
- 42) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- 43) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Sibolga.
- 44) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Mandailing Natal.
- 45) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Barat.
- 46) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Utara.
- 47) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Selatan.
- 48) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Gunungsitoli.
- 49) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nias.
- 50) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Labuhanbatu.
- 51) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Batubara.
- 52) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Tanjungbalai.
- 53) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Asahan.
- 54) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 55) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Deli Serdang.
- 56) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 57) Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Langkat.

➤ **BIDANG/ SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 21,43%, meningkat dari tahun 2012 yang hanya sebesar 20,59%. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

pada tahun 2013 sebesar 19,41%, meningkat dari tahun 2012 yang hanya sebesar 18,61%.

Secara keseluruhan sepanjang tahun 2013, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang Sumatera Utara naik sebesar 4,85%, menurun dari tahun 2012 yang sebesar 5,99%. Sedangkan pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil Sumatera Utara naik sebesar 3,38%, meningkat cukup tajam dari tahun 2012 yang hanya sebesar 0,70%.

Industri pengolahan non migas di Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang meningkat, dengan hadirnya Kawasan Industri Sei Mangke, yang bergerak di bidang pengelolaan produk turunan kelapa sawit, dan diharapkan menjadi pionir Industri Nasional. Dengan adanya klaster industri ini, diprediksi akan tumbuh industri-industri pendukung lainnya, naik skala menengah maupun industri kecil. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan perhatian terhadap peningkatan teknologi dan skill SDM di Sumatera Utara, agar komoditi unggulan Sumatera Utara dapat berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun di pasar ekspor.

Perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nilai ekspor	: USD 9.597.907.000
Volume	: 9.275.859 ton
Nilai impor	: USD 5.108.737.000

Volume : 6.922.414 ton

Surplus nilai neraca : USD 4.489.170.000.

Capaian kinerja Tahun 2013.

✓ **Produk IKM**

Tabel 90.
Tingkat Pencapaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Industri Kecil Menengah yang produknya siap dipasarkan dalam dan luar negeri	1 KUB 12 IKM	1 KUB 12 IKM	100

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Target Kinerja yang diperjanjikan pada awal Tahun Anggaran 2013 adalah 100 %, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis ini telah terlaksana dengan baik atau dengan kategori **MEMUASKAN**.

Tingkat Pencapaian sasaran strategis ini, didukung dengan pelaksanaan Program/ kegiatan yang telah direncanakan semula dan kemudian ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang dilaksanakan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yaitu :



1. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, yang terdiri-dari 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan mutu kualitas tenun/ulos dan pengadaan peralatan, yang mana diharapkan

dengan pelaksanaan program/ kegiatan ini untuk dapat lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang, dimana pada Tahun 2013 kelompok sasaran kegiatan adalah untuk 1 (satu) Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dan dengan pelaksanaan Program/ Kegiatan ini diharapkan mutu/kualitas tenun/ulos akan dapat memiliki daya saing yang dibarengi dengan peningkatan peralatan pengrajin tenun/ulos.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yang terdiri-dari 1 (satu) kegiatan yaitu : Promosi dan Pemasaran produk dalam negeri melalui event pameran dalam negeri, yaitu untuk 7 produk IKM, 14 Komoditi. Pameran dilaksanakan sebanyak 8 kali pameran. Dan dengan pelaksanaan program/kegiatan ini diharapkan produk-produk dalam negeri akan dapat terpromosikan, sehingga diharapkan kedepan promosi dan pemasaran produk-produk dalam negeri akan semakin dapat ditingkatkan yang pada gilirannya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengrajin pada sektor IKM di Provinsi Sumatera Utara. Selain daripada itu, kedepan akan diupayakan untuk melakukan program/kegiatan yang lebih mendukung terhadap upaya-

upaya dalam rangka promosi produk-produk dalam negeri dari sektor IKM dimaksud dengan kualitas yang memiliki daya saing.

- 3. Program Persaingan Usaha**, yang mencakup kegiatan : (1). Keikutsertaan dan pengadaan barang-barang untuk Pameran TTG Tingkat Provinsi dan Nasional, dimana untuk kegiatan ini diikuti sertakan 15 (lima belas) unit mesin dan peralatan dari Kabuapten/Kota untuk diperlombakan pada tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Kegiatan ini dimaksudkan agar barang-barang dan produk dari sektor IKM diikuti sertakan pada pameran Teknologi Tepat Guna yang merupakan karya dari teknologi di Provinsi Sumatera Utara pada Event untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Sehingga diharapkan produk-produk dari sektor IKM yang menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara akan dapat lebih dikenal. Program/kegiatan ini diupayakan akan dilaksanakan secara kontiniu dan berkelanjutan, dimana pada Tahun 2013 sektor IKM yang menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara masih 1 KUB dan 12 pelaku IKM sebagai salah satu terobosan untuk promosi dan pemasaran produk-produk dari sektor IKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara. (2). Partisipasi Gender INDAG melalui kegiatan pameran di Jakarta, dimana program/kegiatan ini tidak dilaksanakan.

✓ **Komoditi ekspor dari sektor IKM**

Tabel 91.
Tingkat Pencapaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Komoditi Ekspor dari Sektor IKM	10 Komoditi	10 Komoditi	100

Dari Tabel 91 diatas, dapat dijelaskan bahwa Target Kinerja yang diperjanjikan pada awal Tahun Anggaran 2013, telah tercapai. Hal ini ditunjukkan dari perbandingan angka target kinerja dan realisasi kinerja, sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh berada pada angka sebesar 100 %. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis ini telah terlaksana dengan baik atau dengan sebutan **MEMUASKAN**.

Tingkat Pencapaian sasaran strategis ini, didukung dengan pelaksanaan Program/ kegiatan yang telah direncanakan dan kemudian dilaksanakan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yaitu :

Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor- Impor, terdiri-dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
(1). Pelaksanaan informasi dan Promosi Ekspor UKM oleh P3ED Medan, (2). Pengembangan dan Promosi Ekspor Hasil, Industri Sumatera Utara di Pulau Penang.



(3). Partisipasi Pameran dan Misi Dagang ke Negara Asia, Afrika dan Eropa. Program/kegiatan ini telah memberikan kontribusi berkenaan dengan promosi produk-produk lokal di dalam dan di luar negeri, khususnya untuk regional Asia, Afrika dan Eropa.

✓ **Penggunaan Label SNI**

Tabel 92.
Tingkat Pencapaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase penggunaan produk dalam negeri yang sudah SNI Meningkat	23 %	23 %	100

Dari Tabel diatas, menunjukkan bahwa Target Kinerja yang diperjanjikan pada awal Tahun Anggaran 2013, telah terlaksana dengan baik atau 100 %, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis ini telah terlaksana dengan baik atau Capain Kinerja pada Indikator ini pada kategori **MEMUASKAN**.

Tingkat Pencapaian sasaran stategis ini, didukung dengan pelaksanaan Program/ kegiatan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yaitu :

Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, terdiri-dari 10 (tiga) kegiatan yaitu :



- 1) Pengendalian dan Pengawasan garam Beryodium
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Bahan Tambahan Pangan pada Industri Makanan.
- 3) Pembinaan wajib SNI komoditi ILME.
- 4) Sidang Tera/tera ulang UTTP UPTD Metrologi Medan
- 5) Pengawasan Jembatan Timbang dan pompa ukur SPBU serta tangki ukur mobil UPTD Metrologi Medan
- 6) Pengawasan alat UTTP di Pasar-Pasar Tradisionil di Kab/Kota di wilayah kerja UPTD Metrologi Medan
- 7) Sidang Tera/tera ulang dan Pengawasan alat UTTP UPTD Metrologi Rantau Parapat
- 8) Pengawasan Alat UTTP UPTD Metrologi Rantau Parapat
- 9) Sidang Tera/tera ulang dan Pengawasan alat UTTP UPTD Metrologi P. Siantar
- 10) Sidang Tera/tera ulang dan Pengawasan alat UTTP UPTD Metrologi Sibolga.

Hasil kinerja yang diperoleh adalah berkenaan dengan pengawasan yang kontiniu terhadap distribusi garam beryodium, alat-alat UTTP, alat tera pada pompa di SPBU dan alat-alat UTTP pada pasar-pasar

tradisional. Sehingga dengan demikian, penyimpangan timbangan dan alat-alat pengukur timbangan dapat diturunkan dan dikurangi secara lebih baik. Oleh sebab itu Program/kegiatan ini merupakan program/kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti setiap tahun, guna terciptanya iklim perdagangan yang sehat, khususnya berkenaan dengan alat/tera timbangan, sehingga konsumen tidak dirugikan. Selain daripada itu, pengawasan dan monitoring tetap akan dilakukan secara kontiniu dan berkelanjutan.

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dan kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal komoditi andalan Sumatera Utara.
- Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 bahan pokok serta barang beredar, masih minimnya pengawasan pendistribusian kebutuhan pupuk di kabupaten/kota dan masih banyak produk-produk komoditi unggulan Sumatera Utara yang belum dikenal di Indonesia.
- Adanya barang-barang impor ilegal, serta masih rendahnya skill dan pengetahuan SDM UKM di bidang ekspor impor.

Solusi :

- Perlu adanya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri dan perlu adanya promosi tentang andalan Sumatera Utara secara kontiniu dan berkelanjutan.
- Dilaksanakan pengawasan pendistribusian barang dan harga 9 bahan pokok secara kontiniu, komoditas unggulan Sumatera Utara perlu dikenalkan melalui event pameran tingkat Nasional.
- Peningkatan efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dan peningkatan skill dan kemampuan SDM UKM di bidang ekspor impor.

➤ **BIDANG/ SEKTOR PARIWISATA**

Hal-hal yang dicapai selama tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya nota kesepakatan kerjasama promosi pariwisata (Mou Bali-Danau Toba) yang bertujuan untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara.
- 2) Terwujudnya nota pernyataan kesepakatan dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan geopark kaldera toba yang ditandatangani oleh 7 Bupati se Kawasan Danau Toba.
- 3) Terlaksananya promosi pariwisata dalam negeri (Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Batam, Padang, Lampung, Lombok, Makasar, Surabaya, Magelang dan Banda Aceh).
- 4) Terlaksananya promosi pariwisata luar negeri (China, Singapura, Malaysia, Thailand dan Taiwan).

- 5) Meningkatnya jumlah SDM pariwisata melalui pelatihan pramuwisata (500 orang), manajemen usaha spa (150 orang), dan sadar wisata (1680 orang).
- 6) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara antara 7,2% - 18%.

Tabel 93
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara
Tahun 2011 s.d 2013

No	Bulan	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Januari	15.757	18.139	17.277
2	Februari	17.034	17.580	19.135
3	Maret	17.138	22.123	21.738
4	April	17.192	19.386	17.503
5	Mei	19.133	21.137	23.711
6	Juni	18.888	19.128	23.490
7	Juli	19.911	18.273	18.188
8	Agustus	16.289	18.511	18.960
9	September	16.522	19.092	20.949
10	Oktober	17.289	18.720	20.158
11	November	22.846	24.481	27.316
12	Desember	25.127	25.263	30.880
Jumlah		223.126	241.833	259.305

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dari tahun ke tahun, pada posisi bulan Desember sebanyak 241.833 wisatawan mancanegara, sedangkan pada tahun 2013 posisi bulan Desember sebanyak 259.305 wisatawan mancanegara atau mengalami peningkatan sebesar 7,2 %.

Dalam pencapaian kinerja di sektor pariwisata, sudah tentu didukung oleh pelaksanaan program/ kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2013, yaitu :

A. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengadaan bahan-bahan promosi kepariwisataan di Sumatera Utara berupa : leaflet Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, promotion Kit, Guide Book, Poster, CD Pariwisata, Banner dan Peta.
- 2) Fam trip media cetak/elektronik dan tour operator travel writer dari dalam dan luar negeri.
- 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui publikasi dan promosi pariwisata Sumatera Utara pada Airport TV di Jakarta.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan event pariwisata dalam negeri baik lokal maupun antar daerah (Gebyar Wisata Nusantara, PRSU, PRJ, Penang Fair).
- 5) Pertunjukan seni pada acara Kemilau Budaya Sumatera Utara.
- 6) Partisipasi pada Festival Borobudur.
- 7) Sewa tempat pemasangan iklan Pariwisata (Billbord) di Jakarta.
- 8) Pendukung wisata golf.

- 9) Partisipasi pada pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional.
- 10) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu (Renstra Pariwisata).
- 11) Pemasangan iklan promosi pariwisata melalui media yellow page.
- 12) Sewa tempat pemasangan iklan pariwisata (Billbord) di Bali.
- 13) Promosi pada bazar UMKM di gedung serba guna.
- 14) Pertunjukan seni budaya dalam rangka Hari Jadi Pemprovsu.

B. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Sumatera Utara.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Sosialisasi sadar pada objek wisata Sumatera Utara.
- 2) Pendukung rally wisata touring sepeda motor.

C. Program Pengembangan Kemitraan. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Partisipasi pada pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Lokal.
- 2) Penyusunan laporan LAKIP, TAPKIN, Renstra, LKPJ.
- 3) Rapat koordinasi Tim POKJA *Destination management Organization* (DMO) Provsu.
- 4) Rapat koordinasi Dinas Pariwisata se Sumatera Utara.
- 5) Pendukung study banding HPI Sumatera Utara ke Bali dalam rangka menuju MOU Toba-Bali.
- 6) *North Sumatera Culture* pada acara penandatanganan MOU kerjasama Toba-Bali.

- 7) Evaluasi monitoring kegiatan pariwisata luar provinsi.
- 8) Evaluasi monitoring event-event kegiatan dalam provinsi *Lake Toba Festival 2013* Kabupaten Samosir.
- 9) Pertemuan kepala museum se Indonesia di luar provinsi.
- 10) Partisipasi HUT RI ke 68 di Gubernuran.
- 11) Penerbitan majalah bulanan *Tourist Magazine 2013* 8 (enam) bulan.
- 12) Pendukung road show teater siklus *North Sumatera*.
- 13) Pertunjukan seni budaya dalam penyambutan tamu wisata dan pemerintah daerah.
- 14) Fasilitasi workshop pengembangan SDM dalam ekonomi kreatif pada komunitas SOI Film dan Documentary dalam rangka mendukung kepariwisataan Sumatera Utara.
- 15) Fasilitasi penelitian dan penulisan buku situs budaya dan objek wisata di Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
- 16) Penyusunan final dossier geopark kaldera toba.

Permasalahan :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata yang profesional.
- 2) Belum optimalnya penelitian dan pengembangan kebudayaan.

- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan pariwisata.
- 4) Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata.
- 5) Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata di pasar global.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi sebagai sarana promosi.
- 7) Investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata belum optimal.
- 8) Kurangnya apresiasi masyarakat terutama generasi muda terhadap budaya Indonesia/budaya lokal.
- 9) Isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam berpengaruh langsung terhadap kunjungan wisata.
- 10) Kesenjangan pembangunan kawasan pariwisata.
- 11) Pengalihan status lokasi dan bangunan Taman Budaya Sumatera Utara.

Solusi :

- 1) Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan seni dan budaya.
- 2) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan kepercayaan, kearifan lokal.
- 3) Meningkatkan pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan serta permuseuman.
- 4) Meningkatkan promosi wisata melalui pemasaran yang kreatif dan efektif.

- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan promosi.
- 6) Memperbanyak pelaksanaan pagelaran kesenian.
- 7) Pengembangan objek daya tarik wisata yang berbasis lingkungan.
- 8) Meningkatkan sadar wisata pada masyarakat.
- 9) Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan infrastruktur menuju destinasi wisata.
- 10) Peningkatan citra pariwisata Sumatera Utara.
- 11) Penerapan sertifikasi dan standarisasi kompetensi SDM pariwisata dan kebudayaan.
- 12) Penguatan usaha pariwisata.
- 13) Meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat berbasis media desain dan iptek.
- 14) Meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat berbasis seni budaya.
- 15) Pengembangan Geopark Toba.

➤ **SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Provinsi Sumatera Utara memiliki kawasan hutan seluas 3.684.685,08 hektar (51,73% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara) dimana berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, kawasan hutan tersebut terdiri dari : (a) hutan konservasi seluas 470.663,74 hektar, hutan lindung seluas

1.306.761,42 hektar, hutan produksi terbatas seluas 859.609,93 hektar, hutan produksi 1.015.074,98 hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 41.162,47 hektar. Data luas kawasan hutan tersebut merupakan hasil digitasi Peta Kawasan Hutan sebagaimana ditunjuk pada SK Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 yang telah disesuaikan dengan Peta Dasar tematik Kehutanan (PDTK). Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat pada tahun 2012 lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara tercatat seluas 295.283,72 hektar yang terdiri dari lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 244.707,21 hektar dan di luar kawasan hutan (APL) seluas 50.576,51 hektar. Adapun penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon.

Dalam rangka memulihkan kondisi lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah telah melaksanakan program-program rehabilitasi hutan dan lahan yakni upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan tahun 2013 terdiri dari kegiatan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan. Rehabilitasi dalam kawasan hutan meliputi kegiatan reboisasi, pengembangan

hutan kemasyarakatan serta kegiatan rehabilitasi hutan pantai dan mangrove. Sedangkan rehabilitasi diluar kawasan hutan terdiri dari kegiatan penghijauan, pembangunan hutan bakau, dan pengembangan hutan rakyat. Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2012 di Provinsi Sumatera Utara adalah 24.186,26 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 4.423,00 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 19.763,26 hektar. Sedangkan pada tahun 2013, total luas lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara adalah 25.365,78 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 23.862,36 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 1.563,42 hektar. Realisasi pelaksanaan reboisasi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 adalah seluas 4.098,00 ha dan pada tahun 2013 seluas 5.318,86 hektar. Rencana penanaman HTI Tahun 2012 pada IUPHHK-HTI di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 25.794,90 Ha dan realisasi penanaman HTI Tahun 2012 seluas 16.392,60 Ha. Rencana penanaman HTI Tahun 2013 seluas 50.477,40 Ha dan realisasi penanamannya seluas 3.371,62 Ha. Pencapaian realisasi HTI tidak berdasarkan tahun kalender.

Pelaksanaan penghijauan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 terealisasi seluas 8.177,94 hektar pada 11 (sebelas) kabupaten/kota meliputi Deli Serdang, Langkat, Karo, Simalungun, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara,

Labuhanbatu, Kota Gunungsitoli, Toba Samosir dan Asahan, terdiri dari penanaman hutan rakyat sebanyak 3.804,00 ha dan pembuatan kebun bibit desa seluas 4.373,94 ha. Selain itu juga dilaksanakan pembuatan dam pengendali sebanyak 16 unit, pembuatan gully plug sebanyak 29 unit dan pembuatan sumur resapan sebanyak 47 unit. Sedangkan pada tahun 2013, pelaksanaan penghijauan di Provinsi Sumatera Utara terealisasi seluas 547,25 hektar pada 6 (enam) kabupaten meliputi Deli Serdang, Langkat, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan Nias, terdiri dari penanaman hutan rakyat sebanyak 160,00 ha, serta pembuatan dam pengendali sebanyak 2 unit, pembuatan dam penahan sebanyak 4 unit dan pembuatan sumur resapan sebanyak 20 unit.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 realisasi Gerakan penanaman pohon tingkat Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: (a). tahun 2010 terealisasi sebanyak 40.262.039 batang (134,21% dari target 30.000.000 batang); (b). tahun 2011 terealisasi sebanyak 75.031.602 batang (187,58% dari target 40.000.000 batang); (c). tahun 2012 terealisasi sebanyak 77.442.612 batang (154,89% dari target 50.000.000 batang); dan (d). tahun 2013 terealisasi sebanyak 14.907.469 batang (29,81% dari target 50.000.000 batang); bibit yang disediakan adalah jenis tanaman hutan dan MPTS.

Pada tahun 2013, total produksi kayu bulat di provinsi sumatera

utara sebanyak 526.842,72 m³, yang terdiri dari 109.634,25 m³ kayu bulat; sebanyak 379.642,15 m³ kayu bulat sedang dan sebanyak 37.566,32 m³ kayu bulat kecil. Jenis kayu bulat yang diproduksi adalah meranti, pinus, rimba campuran, dll. Sedangkan untuk jenis kayu olahan yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2013 terdiri dari jenis plywood, sawn wood (kayu gergajian), moulding, pulp, S4S, meubel, veneer dan produk lainnya (yang merupakan turunan kayu lapis atau jenis produk lidi) dengan total volume produksi sebesar 440.048,00 m³ dan 73.408.384 keping. Antara tahun 2012 dengan tahun 2013 terjadi penurunan produksi kayu bulat yang cukup signifikan di Provinsi Sumatera Utara dimana hal ini disebabkan tingginya curah hujan sehingga kegiatan pemanenan kayu di lapangan tidak maksimal. Faktor lain penyebab penurunan produksi kayu bulat tersebut juga disebabkan adanya perubahan kebijakan/regulasi terhadap ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dimana masa berlaku ijin hanya 12 bulan pada tahun kalender sehingga banyak ijin pemanfaatan kayu (IPK) yang tutup (tidak beroperasi lagi) karena harus berakhir pada bulan Desember 2013.

Upaya penanganan terhadap illegal logging pada tahun 2012 dan tahun 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya-upaya sebagai berikut : (a). Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET) dan intelijen tindak pidana kehutanan

meliputi kerusakan, perambahan kawasan dan illegal logging. Dengan hasil yang dicapai di dapat data dan keterangan terhadap pelaku perusakan dan perambahan kawasan hutan dan illegal logging di kabupaten Langkat, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Utara; (b). Melakukan patroli pada kawasan hutan yang rawan perusakan, perambahan kawasan hutan dan illegal logging dengan hasil yang di capai, berkurangnya potensi kerusakan dan perambahan kawasan hutan di kabupaten Langkat, kabupaten Simalungun, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Karo, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan kabupaten Tapanuli Utara; (c). Melakukan Operasi Penindakan terhadap perambahan kawasan hutan dan illegal logging. yang terjadi di kabupaten Langkat, kabupaten Labuhanbatu, kabupaten Simalungun, dan kabupaten Deliserdang. Dengan hasil yang di capai berkurangnya perambahan kawasan hutan dan illegal logging di kawasan hutan lindung panei kabupaten Labuhanbatu, kawasan hutan tambak bawang kabupaten Simalungun, kawasan hutan di kabupaten Langkat; dan (d). Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat kawasan hutan didaerah rawan konflik di kabupaten Langkat, kabupaten Simalungun, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Karo, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan kabupaten Tapanuli Utara tentang fungsi kawasan hutan, pola pengelolaan kawasan hutan

berbasis masyarakat, dengan hasil yang di capai meningkatnya pengetahuan masyarakat sekitar kawasan hutan rawan konflik di kabupaten Langkat, kabupaten Simalungun, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Karo, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan kabupaten Tapanuli Utara tentang fungsi kawasan hutan, pola pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat; Serta (e). Pemasangan plank larangan merambah kawasan hutan, dengan hasil yang di capai masyarakat di sekitar kawasan di kabupaten Langkat, kabupaten Simalungun, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Karo, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan kabupaten Tapanuli Utara mengetahui sanksi-sanksi hukum apabila melakukan perusakan, perambahan kawasan hutan.

Dalam pencapaian kinerja tersebut diatas, didukung oleh pelaksanaan program/ kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2013, yaitu :

A. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Optimalisasi iuran kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH).
- 2) Rekonsiliasi iuran kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

- 3) Pemantauan dokumen pengangkutan hasil hutan antar provinsi.
- 4) Perencanaan kegiatan penertiban pengusaha hutan.
- 5) Pemantauan dan pengendalian peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota.
- 6) Pengendalian dan pengawasan penggunaan bahan baku kayu dan bukan kayu pada industri primer hasil hutan pada BPPHH.
- 7) Pembinaan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penatausahaan Iuran Kehutanan (PUIK) kepada pemegang IUPHHK alam/tanaman, industri primer hasil hutan dan ijin sah lainnya.
- 8) Pemeriksaan realisasi pemenuhan bahan baku industri RPBI dan persediaan (*stock*) bahan baku kayu.
- 9) Pemantauan penggunaan, pengendalian dan pembinaan distribusi dokumen SKSHH.
- 10) Koordinasi dan perencanaan kegiatan pada UPTD BPPHH.
- 11) Monitoring peredaran kayu rakyat pada BPPHH.
- 12) Sosialisasi penatausahaan kayu rakyat.
- 13) Inventarisasi industri pengolahan hasil hutan kayu/non kayu penampungan hasil hutan dan sentra penjualan hasil hutan PPHH.
- 14) Uji petik peredaran hasil hutan dan pos peredaran hasil hutan.
- 15) Uji petik *cross check* dokumen LHC/LHP/LMK dan SKSKB/FA.

B. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Program

ini memuat kegiatan :

- 1) Perencanaan kegiatan pengelolaan kawasan lindung.
- 2) Evaluasi areal pinjam pakai kawasan hutan.
- 3) Penanganan permasalahan kawasan hutan.
- 4) Pengendalian batas IUPHHK – HT.
- 5) Koordinasi perencanaan kegiatan pada BPPK.
- 6) Inventarisasi potensi hasil hutan non kayu.
- 7) Pemeliharaan batas kawasan hutan.
- 8) Pengumpulan dokumen tata batas.
- 9) Survey risalah hutan lindung.
- 10) Fasilitasi penyusunan Ranperda Pengelolaan Tahura BB.

C. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Perencanaan dan koordinasi pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Koordinasi pembangunan kehutanan regional dan lintas sektoral.
- 3) Pengumpulan data dan penyusunan statistik kehutanan tahun 2012.
- 4) Pembinaan dan pengendalian rencana karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan atau hutan tanaman.

- 5) Sosialisasi / penyebarluasan informasi di bidang hutan dan kehutanan.
- 6) Data dan informasi hasil hutan non kayu di Sumatera Utara

D. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- 2) Operasi penindakan kejahatan kehutanan dan penanganan pasca operasi penindakan kejahatan kehutanan di wilayah Sumatera Utara.
- 3) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan kehutanan.
- 5) Pembinaan dan monitoring pengelolaan AMDAL ijin lainnya (IPK, Jasa Lingkungan, dll).
- 6) Perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan pengelolaan TAHURA Bukit Barisan.
- 7) Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan Tahura BB.

E. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Program ini memuat

kegiatan :

- 1) Pembinaan pohon induk dan penangkar.

- 2) Pelaksanaan pameran-pameran tentang hutan dan kehutanan.
- 3) Pengadaan bibit simbolis.
- 4) Kemah kerja rehabilitasi lahan nasional.
- 5) Temu rimbawan nasional.
- 6) Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon.
- 7) Pengadaan bibit dan distribusi bibit maskot jenis pohon kabupaten/ kota dan provinsi.
- 8) Pengadaan bibit mangrove kepada masyarakat.
- 9) Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan.

F. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Monitoring dan evaluasi peralatan HA/IPKHTI

Sementara itu di bidang Pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan fungsi strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan.

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2009-2013, namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Menurunnya kualitas lingkungan sangat relevan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan ekonomi lainnya. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai target ekonomi dan kurang memperhatikan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, adanya sikap yang mementingkan diri sendiri, berpikir untuk keperluan jangka pendek, merupakan perilaku yang mengakibatkan semakin parahnya kondisi lingkungan. Selain itu sistem manajemen lingkungan dan teknologi lingkungan yang belum berkembang dengan baik serta pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih terus berlanjut.

Terkait dengan urusan wajib lingkungan hidup, dapat disampaikan bahwa indikator penataan lingkungan adalah jumlah keputusan yang mempertimbangkan kepentingan konservasi dan pengendalian dampak lingkungan serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah diambil diprioritaskan pada :

- 1) Pencemaran udara dari target capaian 2012 sebanyak 3 kabupaten/kota yakni : Medan, Deli Serdang dan Tebing Tinggi kemudian pada tahun 2013 juga memantau mutu udara ambient sebanyak 3 kabupaten/kota yakni Medan, Deli Serdang dan Tebing Tinggi.
- 2) Kabupaten yang tergolong baik sesuai dengan kriteria adipura sebanyak 7 kabupaten/kota dari 16 kabupaten/kota yang ikut dinilai kebersihannya, diantaranya adalah : Medan, Tanjungbalai, Langkat, Sibolga, Deli Serdang, Pematangsiantar dan Labuhanbatu.
- 3) Kabupaten yang menyediakan tempat pembuangan sampah untuk dipergunakan masyarakat sebanyak 7 kabupaten/kota yang terdiri dari Labuhanbatu sebanyak 162 unit, Nias selatan 356 unit, Padang Lawas Utara 194 unit, Samosir 1 unit, Binjai tong sampah permanen 17 unit dan 500 unit tong sampah liter dan Medan 1 paket.
- 4) Dari penegakan hukum lingkungan pengaduan yang diterima, dari 15 kasus 3 diantaranya dilanjutkan kasusnya dengan rincian 1

kasus diambil alih daerah dan ditindaklanjuti serta 2 kasus dihentikan sementara kegiatannya (diberikan sanksi administrasi) sedangkan kasus yang ditangani kabupaten/kota sebanyak 55 kasus.

- 5) Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan salah satu upaya program unggulan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang diberikan kepada daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian kepada penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Saat ini perusahaan yang mengikuti program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) berjumlah 85 perusahaan.
- 6) Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup. Pada tahun 2013 penerima penghargaan Kalpataru menjadi 4 orang, Kalpataru sendiri memiliki 4 kategori penghargaan yakni :
 - a. Perintis lingkungan diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh organisasi formal yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
 - b. Pengabdian lingkungan diberikan kepada petugas lapangan (penyuluh lapangan penghijauan) atau pegawai negeri termasuk

PNS yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan yang jauh melampaui tugas pokok fungsinya dan berlangsung cukup lama.

- c. Penyelamatan lingkungan diberikan kepada masyarakat informal, LSM, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dll yang berhasil melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - d. Pembina lingkungan diberikan kepada pejabat, pengusaha, peneliti atau tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berhasil memprakarsai pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberi pengaruh untuk membangkitkan kesadaran lingkungan atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan.
- 7) Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah dapat terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan. Saat ini jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata sebanyak 40 sekolah dari berbagai kabupaten/kota.
- 8) MIH (Menuju Indonesia Hijau) yang mempunyai program menurunkan laju deforestasi dan lahan kritis. Saat ini disumatera utara jumlah kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari

Kementerian lingkungan hidup sebanyak 5 kabupaten/kota, yaitu :
Kabupaten Asahan, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan
Labuhanbatu Utara.

9) SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan :

A. Program Perlindungan dan Konversi Sumberdaya Alam. Program

ini memuat kegiatan :

- 1) Monitoring dan evaluasi kerusakan sumber air kawasan ekosistem sungai ular di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Monitoring dan evaluasi kerusakan DAS wilayah DAS di wilayah Asahan.
- 3) Monitoring dan evaluasi penanggulangan dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana di Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Pemantauan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman di wilayah kabupaten/kota.
- 5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA ekosistem kawasan karang gading Kabupaten Deli Serdang.
- 6) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian DAS Barumon.

- 7) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Monitoring dan identifikasi terhadap aktivitas pesisir pantai sebagai penyebab kerusakan lingkungan.
- 9) Penyusunan rencana dan pelaksanaan penanggulangan berbasis masyarakat.
- 10) Kajian pemetaan kerentanan keanekaragaman hayati di Sumatera Utara.
- 11) Koordinasi konservasi keanekaragaman hayati kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Permasalahan :

- 1) Belum adanya data-data sumber air di wilayah ekosistem yang mengalami kerusakan.
- 2) Minimnya data penggunaan lahan yang berkaitan dengan wilayah DAS.
- 3) Hanya ada satu kabupaten yang melaksanakan yaitu Serdang Bedagai.
- 4) Wilayah kebakaran hutan yang susah dijangkau.
- 5) Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara ±7,5 Ha yang menjadi kendala pengumpulan bahan dan data.
- 6) Lemahnya sistem data base tentang kondisi keaneka ragaman hayati khususnya di daerah Deli Serdang.

Solusi :

- 1) Melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan data berkaitan penggunaan lahan DAS.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap daerah yang mungkin terjadi pembukaan/alih fungsi lahan.
- 3) Kegiatan pemantauan kerusakan lingkungan akibat biomasa dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota berkaitan dengan pencapaian SPM.
- 4) Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan aparaturnya disekitar lokasi.
- 5) Peningkatan kapasitas daerah melalui bintek dan pelatihan
- 6) Perlunya sosialisasi kesadaran pelestarian keanekaragaman hayati terhadap masyarakat secara continue.

B. Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Koordinasi dan tindak lanjut penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Operasional Tim Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJP2SLH).
- 3) Operasional Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan.
- 4) Penyelidikan dan penyidikan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- 5) Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- 6) Operasional UPT. Pengelolaan Air Sungai Belawan dan Deli.
- 7) Pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai belawan dalam meningkatkan pengelolaan air sungai belawan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Operasional laboratorium lingkungan BLH Sumatera Utara.
- 9) Pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai deli dalam meningkatkan pengelolaan air sungai deli kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 10) Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba.
- 11) Pembangunan Kantor UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
- 12) Operasional Forum Antisipasi Perubahan Iklim Sumatera Utara.
- 13) Operasional Sekretariat Nrg4SD.
- 14) Rakornis pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota tahun 2013.
- 15) Operasional UPT. Pusat Kajian Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut.
- 16) Bimtek aplikasi pengisian tabel data lingkungan hidup provsu dan kabupaten/kota.

Permasalahan :

- 1) Adanya laporan yang tidak disertai data yang lengkap, kurangnya peralatan dilapangan seperti mobil, GPS.
- 2) Resiko keamanan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang adanya pos pengaduan penyelesaian sengketa.
- 4) Kurangnya kepedulian masyarakat di bantaran sungai.

Solusi :

- 1) Memberikan data yang valid untuk mempermudah penyelidikan dan penyidikan.
- 2) Lebih dilengkapinya alat pelindung diri.
- 3) Sosialisasi tentang adanya pos pengaduan sengketa.
- 4) Pemahaman dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus.

C. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura.
- 2) Pengawasan dan pemantauan air limbah domestik.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah pasar.
- 4) Monitoring dan evaluasi izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah (TPS) B3.

- 5) Monitoring sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dari industri dan rumah sakit.
- 6) Evaluasi status mutu kualitas sungai deli dan belawan.
- 7) Evaluasi status mutu air sungai asahan.
- 8) Evaluasi status mutu air sungai wampu.
- 9) Evaluasi status mutu air sungai percut.
- 10) Evaluasi emisi gas buang kendaraan bermotor.
- 11) Pemantauan hujan asam di Provinsi Sumatera Utara.
- 12) Bimbingan teknis standart pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL dan DPPL.
- 13) Kajian penetapan daya dukung dan daya tampung sungai padang.
- 14) Pembinaan laboratorium lingkungan.
- 15) Operasional komisi penilai AMDAL Sumatera Utara.
- 16) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL dan DPPL.
- 17) Pembinaan dan pengembangan kegiatan komisi penilai AMDAL kabupaten/kota.

Permasalahan :

Faktor lokasi yang begitu jauh di daerah terpencil.

Solusi :

Ditingatkannya SDM di daerah-daerah terpencil tentang adipura.

D. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata.
- 2) Pemberdayaan dan penghargaan Kalpataru dan LSM lingkungan.
- 3) Lomba pendidikan kemah hijau tahun 2013.
- 4) Lomba pengetahuan lingkungan hidup tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Penilaian desa Danau Toba.
- 6) Pameran lingkungan hidup tahun 2013 Tingkat Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.
- 7) Penerbitan buletin rona.
- 8) Penyusunan laporan status lingkungan hidup Sumatera Utara tahun 2013.
- 9) Profil keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Utara.
- 10) Penguatan jaringan informasi lingkungan hidup melalui pengembangan SISFOKOM BLH Sumatera Utara.
- 11) Publikasi lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik.
- 12) Seminar nasional lingkungan hidup.

Permasalahan :

- 1) Keterlambatan data dari SKPD.

- 2) Lemahnya sistem data base tentang kondisi keanekaragaman hayati khususnya di Deli Serdang.

Solusi :

- 1) Penekanan dari pimpinan SKPD untuk memprioritaskan pemberian data SLHD secara akurat.
- 2) Perlunya sosialisasi pelestarian keanekaragaman hayati terhadap masyarakat.

E. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dan Bagi Hasil Cukai

Tembakau (DBHC-CT). Program ini memuat kegiatan :

- 1) Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat di sekitar perkebunan atau industri tembakau Sumatera Utara.
- 2) Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi perkebunan dan industri hasil tembakau serta industri pendukungnya.
- 3) Penyusunan profil potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan perkebunan industri hasil tembakau dan industri pendukung tahun 2013.
- 4) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan industri tembakau dan industri pendukungnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian Indikator : *Persentase kehidupan beragama yang diwujudkan melalui peningkatan keimanan dan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.*

Tabel 94.
Tingkat Capaian Kinerja

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	Peningkatan kehidupan beragama dalam harmoni keberagaman umat beragama			
	<i>Persentase kehidupan beragama yang diwujudkan melalui peningkatan keimanan dan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.</i>	100 %	67 %.	67

Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa capaian kinerja pada indikator ini masih sebesar 67 % atau pada kategori BAIK.

Permasalahan :

- Adanya kebijakan internal terkait dengan efisiensi anggaran (rasionalisasi), sehingga berpengaruh kepada tingkat capaian kinerja pada indikator ini.

Solusi :

- Akan diupayakan semaksimal mungkin untuk sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran, sehingga diharapkan di tahun-tahun yang akan datang rencana kinerja yang disusun dan ditetapkan pada awal tahun anggaran pada Dokumen Penetapan Kinerja untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun dapat tercapai dengan baik.

Dalam rangka pencapaian kinerja dimaksud, didukung oleh program/kegiatan, yaitu :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :

- 1) Peringatan Isra'Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1432 H.
- 2) Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1432 H/2013.
- 3) Perayaan Hari Raya Nyepi
- 4) Perayaan Hari Raya Waisak
- 5) Perayaan Hari Natal PNS Kantor Gubsu
- 6) Perayaan Hari Paskah PNS Ktr Gubsu



Sasaran Strategis-2 :

Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghendaki transparansi, akuntabel dan bebas KKN dalam rangka mempercepat tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kesungguhan pemerintah mulai dari level tingkat pemerintahan terendah hingga tingkat Pemerintah Pusat akan memulihkan kembali

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka menumbuhkembangkan semangat dan tekad yang kuat dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan kabupaten/ kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat Kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga masyarakat.
- 2) Memfasilitasi penguatan pemerintah kabupaten/kota dengan lembaga – lembaga masyarakat.
- 3) Memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tiugas pembantuan.
- 4) Menciptakan kondisi yang kondusif untuk penerapan kebijakan pemerintah di daerah.

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis ke dua ini, akan diuraikan di bawah ini. Adapun unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja adalah berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, pembinaan kepegawaian (pola karir sesuai dengan jenjang jabatan) dan penegakan hukum yang akan diuraikan di bawah ini.

Tabel 95. Capaian Sasaran Strategis 2

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Penerapan nilai etika aparatur dan etos kerja Aparatur yg Mampu Mendorong Terciptanya Tata Pemerintahan yg Bersih dan Berwibawa, yang dipengaruhi oleh indikator berikut :			
	a. Meningkatkan dukungan personil Biro Pemerintahan Umum dibidang pelayanan Umum	100 %	100 %	100
	b. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih	100 %	100 %	100
	c. Meningkatkan sistem Keamanan dan perlindungan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta ketertiban umum yang kondusif	100 %	100 %	100
	d. Meningkatkan pengembangan kawasan khusus dan fasilitas sengketa pertanahan	100 %	100 %	100
	e. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar daerah	100 %	100 %	100
	f. Meningkatnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 %	100 %	100
	g. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah	100 %	100 %	100
	h. Persentase Penyusunan dan Penyelesaian LPPD dan LKPJ Provinsi Sumatera Utara yang tepat waktu	100 %	100 %	100
	i. Persentase peningkatan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	6 %	6 %	100
	j. Jumlah Pelaksanaan Pilkada yang terkoordinasi	1 Kali	1 Kali	100
	k. Persentase tingkat penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara	80 %	80 %	100
	l. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja			
	- Persentase SKPD yang menerapkan SAKIP secara baik dan efektif sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100
	- Jumlah Jenis Pelaporan dibidang Akuntabilitas Kinerja	5 Jenis	5 Jenis	100
	- Persentase kualitas SDM Aparatur dibidang Akuntabilitas Kinerja	100 %	100 %	100

Pencapaian kinerja dari sasaran strategis-2, sebagaimana pada Tabel 94 diatas, pada prinsipnya tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2013, yaitu :

➤ **PEMERINTAHAN UMUM**

A. Program Kepemerintahan Yang Baik. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penetapan batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.
- 2) Fasilitasi penataan batas kabupaten/kota di Sumatera Utara.
- 3) Pembakuan nama rupa bumi di Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Penetapan batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau.
- 5) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 6) Inventarisasi data DP4 ke kabupaten/kota untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014.
- 7) Pemantapan keseragaman aparat kecamatan di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah.
- 8) Kunjungan kerja/study banding penyelenggaraan pemerintahan ke Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat oleh Camat Terbaik, Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dan Aparatur Provinsi Sumatera Utara.

- 9) Pemantapan kader pelaksanaan keamanan dan ketertiban dengan pembekalan teknis pelaksanaan tugas Matriks Hansip Kantor Gubsu.
- 10) Pemeliharaan dan pengawasan pelaksanaan ketertiban di lingkungan Sekretariat Daerah Provsu.
- 11) Koordinasi di bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan aparat pemerintah dalam penanganan pencegahan.
- 12) Pengkayaan materi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintah ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok) dan Kabupaten Lombok Tengah tentang pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- 13) Pembinaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi diluar Provinsi Sumatera Utara.
- 14) Pembinaan wilayah dan monitoring tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota.
- 15) Rapat koordinasi peningkatan peran, tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.
- 16) Pemberdayaan aparatur di kabupaten/kota dalam penanganan /penanggulangan kebakaran.
- 17) Pembinaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

- 18) Pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik.
- 19) Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kabupaten/kota.
- 20) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi umum di kabupaten/kota.
- 21) Sosialisasi 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).

Permasalahan :

- 1) Peta batas belum ada.
- 2) Terdapat 3 (tiga) Pulau terluar.
- 3) Batas desa kurang jelas.
- 4) Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 5) Perlu terinventarisasinya data DP4 kabupaten/kota.
- 6) Pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat belum maksimal.
- 7) SDM Aparatur belum maksimal.
- 8) Jangkauan pengawasan Kantor Gubsu tersebar luas.
- 9) Bencana tidak dapat diprediksi, koordinasi lintas kabupaten/ kota belum optimal.
- 10) Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum belum optimal.

- 11) Koordinasi secara berjenjang masih perlu ditingkatkan.
- 12) Pemahaman tugas dan fungsi kepala daerah belum optimal.
- 13) Pemahaman kepala desa/kelurahan tentang tugas dan fungsi belum secara merata.
- 14) Koordinasi antar pemerintahan umum dengan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kebijakan masih belum terpadu.
- 15) Pelayanan terkesan masih berbeli-belit.
- 16) Menghilangkan KKN belum bisa di hapus secara cepat.
- 17) Lembaga kemasyarakatan belum dijadikan sebagai mitra kerja.
- 18) Belum secara merata aparaturn pemerintahan daerah memahami perubahan UUD 45.

Solusi :

- 1) Perlu ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi.
- 2) Perlu penanganan yang serius untuk percepatan pembangunan.
- 3) Dilanjutkan koordinasi dan konsultasi secara bersama ke Ditjen PUM Depdagri.
- 4) Perlu peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 5) Dilakukan penginventarisasi data DP4 kabupaten/kota.
- 6) Perlu dilanjutkan pembinaan/sosialisasi.
- 7) Perlu peningkatan SDM.

- 8) Koordinasi dibidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan.
- 9) Secara rutin dan berkesinambungan perlu komunikasi secara lintas kabupaten/kota.
- 10) Perlu pembinaan Laporan dan Evaluasi secara Lintas kabupaten/kota.
- 11) Perlu ditingkatkan pemahaman tugas dan fungsi aparat pemerintahan daerah.
- 12) Perlu menambah pemahaman tugas kepala daerah.
- 13) Perlu pembinaan secara terus menerus.
- 14) Perlu pembinaan kesiapsiagaan secara rutin dan berkelanjutan.
- 15) Mendorong aparatur pemerintahan daerah secara terus menerus.
- 16) Menegakkan hukum sesuai ketentuan.
- 17) Koordinasi pemerintahan daerah dengan lembaga kemasyarakatan perlu ditingkatkan.
- 18) Perlu dilanjutkan sosialisasi perubahan UUD 45.

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Rapat koordinasi penguatan fungsi Gubernur dalam rangka mencegah terjadinya konflik.
- 2) Penilaian dan pembinaan kecamatan terbaik se Sumatera Utara.

- 3) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota).

Permasalahan :

- 1) Pelayanan masih belum optimal.
- 2) Penilaian oleh kabupaten/kota belum secara merata.
- 3) Pemahaman keterpaduan program masih perlu peningkatan.

Solusi :

- 1) Mendorong aparatur pemerintah kabupaten/kota memberi pelayanan secara serentak.
- 2) Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian secara serentak.
- 3) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perlu lebih dimantapkan.

Urusan Wajib Pertanahan

Sengketa/konflik pertanahan merupakan suatu hal yang kompleks karena menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya bahkan pertanahan dan keamanan dan tanah juga merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama baik bagi pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota masyarakat sehari-hari.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa jenis tuntutan/konflik pertanahan yaitu :

1. Sengketa antara sesama anggota masyarakat.
2. Sengketa antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah.
3. Sengketa antara sesama anggota masyarakat dengan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN.

Sengketa/konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, yang sudah diinventarisasi dari ketiga kelompok tersebut terdapat 712 kasus. Dari ketiga kelompok sengketa tersebut yang sangat dominan terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah sengketa masyarakat dengan perusahaan perkebunan negara dan swasta menyangkut hak guna usaha, dimana penanganan penyelesaiannya sampai saat ini belum terpecahkan.

Mengenai sengketa/konflik areal eks. HGU PTPN II seluas 5.873,06 ha yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai sampai saat ini belum dapat diselesaikan, terkait dengan adanya klausul dalam SK BPN Nomor 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 yaitu point 3 “menyerahkan pengaturan, pengusahaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang dikuasai oleh negara tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari menteri yang berwenang”.

Penanganan atas areal eks. HGU PTPN II tersebut, PemprovSU telah menindaklanjuti dengan menyurati Menteri Negara BUMN RI untuk memohon ijin pelepasan asset dengan surat :

1. No. 593/0763 tanggal 30-01-2003.

2. No. 593/2582 tanggal 16-04-2003.
3. No. 593/6163 tanggal 25-06-2003.
4. No. 593/6969 tanggal 29-10-2004.
5. No. 593/11900 tanggal 24-11-2010.
6. No. 593/986 tanggal 11-02-2013 .

Surat Gubernur Sumatera Utara ke BPN RI untuk merevisi SK

dimaksud :

1. No. 593/1977 tanggal 16 april 2007
2. No. 593/1122 tanggal 22 januari 2008
3. No. 593/13958 tanggal 14 desember 2011

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, jelas bidang pertanahan termasuk didalamnya maka penanganan penyelesaian konflik pertanahan merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota sedangkan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, mencakup kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota, provinsi dalam penanganan masalah konflik pertanahan hanya memfasilitasi kedua belah pihak untuk musyawarah namun bila hal ini tidak terlaksana maka disarankan penyelesaian melalui jalur hukum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam penanganan masalah sengketa tanah melakukan koordinasi/fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil BPN Provsu.

Kewenangan provinsi dalam penanganan sengketa/konflik adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelesaian sengketa/konflik pertanahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa bidang pertanahan termasuk didalamnya penanganan penyelesaian konflik pertanahan merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota meliputi :

1. Menerima, mengkaji sengketa tanah.
2. Meneliti terhadap objek dan subjek sengketa.
3. Koordinasi dan fasilitasi musyawarah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan :

A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Memfasilitasi penanganan sengketa/konflik pertanahan di kabupaten/ kota se Sumatera Utara.

- 2) Memfasilitasi dan mengkoordinasi kawasan-kawasan yang memiliki SDA/buatan di kabupaten/kota dalam upaya kualitas pelayanan umum.
- 3) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
- 4) Pengkayaan materi dan konsultasi pertanahan ke Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat.

Permasalahan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jelas bidang pertanahan termasuk didalamnya maka penanganan penyelesaian konflik pertanahan merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum dapat menginventarisasi kawasan sumber daya alam dan buatan.
- Masih kurangnya pemahaman akan permasalahan pertanahan.

Solusi :

- Dalam penanganan masalah sengketa tanah melakukan koodinasi/ fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.
- Dengan menyurati dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar dapat menginventarisasi kawasan SDA/buatan yang ada di wilayahnya.
- Perlu peningkatan pemahaman materi akan permasalahan pertanahan.

➤ **OTONOMI DAERAH**

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tahun 2013 berkenaan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya buku LKPJ Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2012 sebanyak 120 buku.
2. Tersedianya 120 buku Executive Summary.
3. Tersedianya 120 buku Pidato LKPJ Gubernur Sumatera Utara TA. 2012.
4. Tersedianya 200 buku LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008-2013.
5. Tersedianya 200 buku Rekomendasi LKPJ Gubernur Sumatera Utara.

6. Tersedianya 50 buku LPPD Provsu Tahun 2012 dan buku LPPD Akhir Masa Jabatan Provsu 2008-2013.
7. Telah dilaksanakan evaluasi perkembangan daerah otonom baru dan penyampaian laporan data base kepada Menteri Dalam Negeri RI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 pada 7 kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli.
8. Terbitnya 36 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian maupun penggantian antar waktu anggota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
9. Terlaksananya kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara kabupaten/kota dengan provinsi, maupun antar provinsi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yaitu 1 kerjasama antara 8 kabupaten/kota dengan Pemprovsu dan 1 kerjasama antara Pemprovsu dengan Pemprov Jawa Timur.
10. Terasilitasinya kunjungan kerja Lembaga Negara, Departemen/Non Departemen dan Pemerintah Provinsi se Indonesia ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Terprosesnya penelitian persyaratan teknis dan administrasi atas usul pembentukan daerah otonom yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pemekaran kepada Menteri Dalam

Negeri yaitu Kabupaten Simalungun Hataran dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing.

12. Tersusunnya identifikasi proses persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap rencana pembentukan provinsi, yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara dan Provinsi Kepulauan Nias.
13. Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pengelolaan PAD kabupaten/kota se Sumatera Utara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PBB kabupaten/kota se Sumatera Utara sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 kepada 30 orang aparat pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
14. Terlaksananya penyelenggaraan dan pengembangan data informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Penguatan kerjasama ekonomi sub regional IMT-GT di 3 Negara.
16. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BPHTB sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kepada 33 kabupaten/kota.

Capaian tersebut diatas adalah didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2013, yaitu :

A. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012.
- 2) Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran 2012.

- 3) Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013.
- 4) Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013.
- 5) Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Sumatera Utara.

Permasalahan :

- Sulitnya mendapatkan data yang akurat, valid dan akuntabel dari masing-masing SKPD.
- Sering bergantinya pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam pengisian dan penyusunan data LKPJ dari masing-masing SKPD.
- Memori Serah Terima Jabatan Gubernur tidak dapat dilaksanakan karena Kepala Daerah terpilih merupakan Incumbent.

Solusi :

- Mengingatkan Pimpinan SKPD agar melakukan cross check data yang disampaikan.
- Pembinaan secara terus menerus kepada petugas pengolah data.

B. Program Pembinaan Otonomi Daerah. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Evaluasi Pengembangan dan Penyusunan Data Base Daerah Otonom Baru (EPPDBDOB).

- 2) Fasilitasi dan koordinasi kunjungan kerja Lembaga Negara, Departemen/Non Departemen dan Pemerintah Provinsi se Indonesia.
- 3) Penelitian teknis usul pemekaran.
- 4) Sosialisasi Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di DOB.
- 5) Sosialisasi Desertada.
- 6) Pembinaan dan evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi Sumatera Utara terhadap PAD kabupaten/kota se Sumatera Utara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PBB kabupaten/kota se Sumatera Utara sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
- 7) Jaringan kerja pembinaan Pendapatan Asli Daerah ke Provinsi Sulawesi Utara.
- 8) Monitoring dan evaluasi Keputusan Gubsu No.976/1293/K/2009 tentang Penetapan Perkiraan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau kepada kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 9) Rapat koordinasi antara PemprovSU dengan kabupaten/kota, Kanwil DJP Sumut II, KPP Pratama tentang Penerimaan PBB dan BPHTB kabupaten/kota.
- 10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPHTB Kabupaten/Kota Sebagai Tindak Lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 11) Koordinasi dan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

- 12) Fasilitas Rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
- 13) Fasilitas Peningkatan kapasitas DPRD kabupaten/kota.
- 14) Koordinasi, sosialisasi dan pemantauan Pilkada.
- 15) Fasilitas percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 16) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- 17) Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVII Tahun 2013.
- 18) Penyusunan dan pengembangan data Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) TA.2012.
- 19) Komparasi penyusunan LPPD berdasarkan PP No.6 Tahun 2008.
- 20) Fasilitas kerjasama antar daerah kabupaten/kota/provinsi.
- 21) Fasilitas kerjasama pengembangan Kawasan Danau Toba.
- 22) Penyelenggaraan pertemuan *Senior Official's Meeting III APEC* di Provsu.
- 23) Mendukung program Visit IMT-GT 2013 di Provsu.
- 24) Fasilitas konsultasi kerjasama luar negeri dan pihak ketiga.
- 25) Fasilitas penerapan kajian akademis aspirasi draft kerjasama.
- 26) Kerjasama dengan asosiasi.
- 27) Operasionalisasi Sekretariat TKKSD Provinsi Sumatera Utara.
- 28) Rapat koordinasi penyelenggaraan kerjasama di Provinsi Sumatera Utara.
- 29) Peningkatan kerjasama *Sister Province* melalui pertukaran SDM.

Permasalahan :

1. Penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Induk ke DOB belum maksimal dilaksanakan.
2. Penyusunan RTRW pada DOB belum terealisasi karena harus disinkronkan dengan RTRW Provinsi.
3. Penyelesaian Tapal Batas antara Kabupaten Induk dan DOB belum maksimal.
4. Kurang maksimalnya koordinasi jadwal Kunjungan Kerja Lembaga Negara, Departemen/Non Departemen danb Pemerintah Provinsi se Indonesia khususnya pada saat kedatangan dan agenda Kunjungan Kerja.
5. Pembahasan tentang rencana pembentukan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat dengan DPR RI masih dalam proses.
6. Belum terpenuhinya kelengkapan persyaratan administrasi rencana pembentukan Provinsi.
7. Belum terkoordinasinya secara maksimal koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Induk, Pemerintah DOB dan Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan menyongsong usia DOB 5 (lima) tahun.
8. Adanya perubahan APBD.
9. Terbatasnya SDM di Kabupaten/Kota dalam pengelolaan PAD dan PBB, karena sering terjadinya mutasi terhadap SDM yang sudah dibina.

10. Terbatasnya SDM Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU yang memiliki disiplin ilmu terkait pengelolaan pendapatan daerah.
11. Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2013, karena kegiatan ini telah ditampung di Bappeda ProvSU TA. 2013.
12. Beberapa kabupaten/kota masih minim SDM untuk pengelolaan PBB-P2 khususnya *Operator Consule* dan tenaga *Appraisal*.
13. Besarnya Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak BPHTB untuk selain perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan perolehan hak melalui program pemerintah ditetapkan paling rendah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 87 ayat (4) dan Peraturan menteri Keuangan RI Nomor 14/PMK.03/2009 menjadi kendala karena nilai tanah/ bangunan di sebagian kabupaten/kota masih tergolong rendah.
14. Terkandalanya pelaksanaan proses PAW disebabkan karena masih belum adanya putusan yang inkrah dari PTUN berdasarkan gugatan yang diajukan oleh anggota dewan yang diberhentikan.
15. Penetapan jadwal kegiatan/rapat/program APPSI sering terlambat sehingga sulit terakomodasi/difasilitasi dalam APBD.
16. Event/kegiatan/rapat yang dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh APPSI sering bersamaa waktunya dengan event/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi Sumatera Utara.

17. Pelaksanaan kegiatan bersamaan waktunya dengan kegiatan yang harus diikuti oleh Anggota dan Sekretariat DPRD di daerah masing-masing sebagai peserta.
18. Keterbatasan jumlah anggaran menyebabkan terbatasnya jumlah masyarakat/aparat pemerintah yang mendapat sosialisasi.
19. Dari 7 (tujuh) pemilukada Bupati yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2013, 2 (dua) daerah tertunda penyelesaiannya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
20. Belum adanya keseragaman dalam penyampaian laporan dari masing-masing bidang SPM kabupaten/kota.
21. Masih kurangnya staf yang mengelola kegiatan SPM kabupaten/kota.
22. Belum seluruhnya SPM dilaksanakan berdasarkan tupoksi di SKPD masing-masing kabupaten/kota.
23. Sering terjadinya mutasi pada SKPD yang membidangi SPM kabupaten/kota.
24. SPM bidang kesenian dari SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu masih perlu pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Adanya keterlambatan penyampaian SK kegiatan.
26. Penyerapan dana kurang optimal dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan.
27. Kegiatan tidak terlaksana dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan.

28. Kerjasama yang disepakati sesuai Kespakatan Bersama belum terlaksanan secara optimal.
29. Kurangnya koordinasi antar badan yang menangani pengelolaan kawasan danau toba.
30. Jumlah delegasi yang datang melebihi jumlah yang diinformasikan oleh panitia pusat.
31. Tidak semua delegasi yang berwisata melaporkan kepada pemerintah daerah, sehingga tidak dapat dikawal oleh tenaga pengamanan.
32. Undangan pelaksanaan kegiatan IMT-GT yang dilaksanakan di Luar Negeri terlalu mendaesak sehingga tidak cukup waktu untuk ditindaklanjuti.
33. Tawaran kerjasama oleh pihak luar negeri (BURGAS) belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu persetujuan kedua belah pihak (pemerintah pusat dan pihak luar negeri).
34. Belum selesainya petunjuk pelaksanaan penyusunan draft MoU dari Pemerintah Pusat.
35. Belum semua asosiasi menjalin kerjasama dengan Pemprov.
36. Belum semua pemerintah kabupaten/kota mempunyai struktur TKKSD.
37. Rapat koordinasi tidak dilaksanakan karena dinilai belum urgent untuk diselenggarakan.

38. Pengiriman SDM untuk mengikuti pelatihan di luar negeri (Songkhla-Thailand) tidak dilaksanakan karena kegiatan dimaksud batal dilaksanakan oleh Konjen RI di Songkhla.

Solusi :

- Melakukan rapat-rapat koordinasi agar kendala yang dihadapi bisa diatasi.

✓ **IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA**

Bahwa sebagaimana hasil peringat perolehan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Negara PAN dan RB Republik Indonesia terhadap Implementasi AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dimana dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 masih berada pada Kategori Nilai "CC", yaitu sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini.

Tabel 96. Hasil Evaluasi AKIP

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Pemprovsu Tahun		
			2011	2012	2013
1.	Perencanaan Kinerja	35	15,17	16,08	18,35
2.	Pengukuran Kinerja	20	8,63	8,71	8,09
3.	Pelaporan Kinerja	15	7,75	7,96	8,43
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,73	5,83	5,98
5.	Capaian Kinerja	20	12,83	12,87	12,26
	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat AKIP	100	50,11	51,45	53,11

Sumber : Hasil Evaluasi AKIP Pemprovsu oleh Kementerian Negara PAN dan RB

Menyikapi fenomena ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terkait dengan Implementasi SAKIP dari tahun ke tahun, meskipun belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan, melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013 adalah :

A. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.
- 3) Penyusunan LAKIP Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2013.
- 4) Bimtek penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Pemprov.
- 5) Pembinaan pelaksanaan sistem AKIP dilingkungan Pemprov dan kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 6) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemprov dan kabupaten/kota.
- 7) Pembinaan dan asistensi penyusunan LAKIP SKPD Pemprov.
- 8) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 9) Rapat Pembinaan SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Provinsi Sumatera Utara sesuai Pergub No. 33 Tahun 2011.
- 10) Penyusunan LAKIP Sekdaprovsu Tahun 2012.
- 11) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Rencana Strategis 2014-2018.
- 12) Penyusunan Rencana Strategis Setdaprovsu Tahun 2014-2018.

Permasalahan :

- Belum ada kesamaan persepsi antara unsur-unsur SKPD yang membidangi perencanaan, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rumusan Indikator Kinerja di RKA dan DPA-SKPD. Sehingga dengan permasalahan ini mengakibatkan target kinerja yang ada di masing-masing kegiatan tidak terukur dan belum sepenuhnya menganut prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SekdaprovSU Tahun 2014-2018, tidak dilaksanakan.

Solusi :

- Perumusan Indikator Kinerja agar lebih diperhatikan, sehingga Sistem AKIP benar-benar dapat diimplementasikan dengan benar, dan program/ kerja yang dilaksanakan benar-benar dapat terukur sebagai wujud pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.
- Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki, sehingga kedepan agar lebih ditingkatkan perencanaan, sinkronisasi dan penjadwalan waktu yang lebih baik.

➤ **TINGKAT PELAYANAN UMUM DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK**

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Biro Organisasi SetdaprovSU telah melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Bimtek peningkatan dan pemahaman kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Sebagai tindaklanjut dari kegiatan Bimtek, maka diminta kepada seluruh SKPD dilingkungan PemprovSU dan pemerintah kabupaten/kota agar segera menyusun *road map* reformasi birokrasi.

Sesuai Permenpan dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, PemprovSU cq. Biro Organisasi SetdaprovSU juga rutin melakukan/menyelenggarakan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan dan menganugerahkan Penghargaan Citra Pelayanan Publik bagi unit pelayanan yang terbaik kinerjanya. Pada tahun 2013, telah diajukan ke Kantor Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi beberapa Kabupaten/Kota sebagai Calon Unggulan peraih Penghargaan

Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) dari Presiden RI yaitu :

- a. Kabupaten Pakpak Bharat Nilai 3.679;
- b. Kota Medan Nilai 3.459;

Dan saat ini masih dalam proses penilaian di Kantor Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Jakarta.

➤ **TINGKAT PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF**

Secara singkat capaian kinerja berkenaan dengan Penataan Kelembagaan selama kurun waktu Tahun 2013 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan evaluasi peraturan daerah kabupaten/kota terhadap SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara masih berjalan sebagaimana yang diharapkan dan masih ditemukan benturan-benturan serta permasalahan, khususnya pada Ranperda kabupaten/kota yang dievaluasi dalam bentuk SKPD, yaitu nomenklatur SKPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai hasil fasilitas dan evaluasi dan merupakan hasil capaian kinerja yang telah dilakukan terdapat :
 - a. Sebanyak 8 (delapan) kabupaten dan 1 (Satu) kota yang telah dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Sebanyak 5 (lima) kabupaten dan 1 (Satu) kota yang telah mengajukan perubahan, penyempurnaan dan penyerasian penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, namun belum dapat dilaksanakan karena masih kurang lengkapnya berkas yang disampaikan ke Biro Organisasi SetdaprovSU dan masih terdapat kesalahan/ bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penanganan terhadap UPT Dinas Kesehatan ProvSU, yaitu Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang/Belidahan dan Lau Simomo/Hutasalem yang tidak tepat fungsi, sasaran dan tujuan, karena penderita/pasien yang sudah sembuh dari Penyakit Kusta beserta keluarga Pasien menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penyiapan anggaran dalam APBD ProvSU setiap tahunnya (tidak berbasis kinerja). Upaya-upaya Biro Organisasi SetdaprovSU dalam mewujudkan pelayanan kesehatan telah melaksanakan Sosialisasi Persiapan Peningkatan Status UPT Rumah Sakit Kusta Sicanang menjadi SKPD yang berdiri sendiri (Rumah Sakit Khusus Daerah) yang diikuti kabupaten/kota se Sumatera Utara, dengan capaian kinerja :
 - a. Telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/374/KPTS/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang

Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Masalah Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang/Belidahan dan Rumah Sakit Kusta Lau Simomo/Hutasalem Provinsi Sumatera Utara, dimana Tim Koordinasi mengajukan saran dan pendapat terhadap percepatan penyelesaian masalah tersebut.

- a. Telah diterbitkan/diundangkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan menyerahkan UPT Dinas Rumah Sakit Kusta Belidahan kepada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembinaan bagi eks Penyakit Kusta.
- b. Telah diterbitkan/diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan menggabungkan UPT Rumah Sakit Kusta Sicanang/Lau Simomo/ Hutasalem menjadi 1 UPT dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang dipusatkan didaerah Lau Simomo, Tanah Karo yang bertugas melakukan pelayanan pengobatan pasien penderita kusta.

3. Pembekalan terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan terhadap pengelola kelembagaan organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota dalam rangka persiapan dan menyikapi regulasi perubahan perundang-undangan dibidang Reformasi Birokrasi, maka Biro Organisasi SetdaprovSU telah melaksanakan Sosialisasi Pembekalan atas Revisi Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti 52 SKPD Provsu dan 33 kabupaten/kota.

➤ **PENEMPATAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN SESUAI DENGAN JENJANG DAN JENIS JABATAN**

Pengembangan kemampuan professional aparatur sebagaimana halnya dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada umumnya, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, moral, memperluas wawasan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan bidang tugas, kesetiaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional.

Keberhasilan pengembangan kemampuan profesional tersebut akan sangat tergantung pada *raw input-nya*. Seorang pejabat harus mempersiapkan diri sejak dini dan mampu melakukan pengembangan yang

terarah dan terpadu yang dapat memberikan ruang bagi pejabat untuk mengembangkan kompetensinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tersediannya aparat Pemerintah yang profesional dan berkualitas, karena subyek yang berkompetisi adalah manusia dan obyek yang dikompetisikan adalah buah karya cipta manusia itu sendiri. Upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu pencapaian target visi/misi Gubernur Sumatera Utara yaitu agar rakyat tidak bodoh.

Gambaran umum pencapaian kinerja urusan otonomi daerah, dibidang Kepegawaian, antara lain :

1) Penyelesaian proses pensiun PNS

- Tahun 2012 : 527 PNS
- Tahun 2013 : 585 PNS

2) Penyelesaian permasalahan kepegawaian (pelanggaran disiplin)

- Tahun 2012 : 6
- Tahun 2013 : 4

3) Jumlah mutasi kepegawaian dalam pangkat

- Tahun 2012 : 7.192 PNS
- Tahun 2013 : 5.658 PNS

5) Jumlah mutasi kepegawaian dalam jabatan

- Tahun 2012 : 834 Jabatan
- Tahun 2013 : 1.225 Jabatan

Sumber : BKD Provinsi Sumut

Tugas belajar pendidikan pasca sarjana (*Dual Master Degree Program*) bagi PNS Pemprovsum dan kabupaten/kota, adalah salah satu program unggulan Gubernur Sumatera Utara dalam rangka peningkatan kualitas SDM PNS di Provinsi Sumatera Utara. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprovsum telah mengadakan kerjasama dengan UGM dan *International University of Japan*. Program ini telah berjalan selama 1 (satu) tahun dimana PNS Tugas Belajar sebanyak 15 (lima belas) orang, 2 (dua) orang PNS Pemprovsum dan 13 (tiga belas) orang PNS kabupaten/kota telah menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun di UGM Yogyakarta dan selanjutnya mereka akan diberangkatkan pada Januari 2014 ke *International University of Japan*, Jepang untuk melanjutkan pendidikan.

Pada penerimaan CPNS tahun ini Pemprovsum mendapatkan alokasi formasi dari MENPAN & RB RI sebanyak 329 orang. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan November 2013 secara transparan, objektif dan bebas KKN yang diikuti peserta sebanyak 10.610 orang yang terdiri dari pelamar umum, pelatih olahraga dari atlet berprestasi dan dari Tenaga Honorer K2. Dari pelaksanaan CPNS tersebut peserta yang lulus sebanyak 274 orang.

Dalam rangka menciptakan aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing dan memiliki SDM yang handal, Pemprovsum telah melaksanakan seleksi Praja IPDN bagi putra/putri kabupaten/kota se Sumatera Utara, pada pelaksanaan seleksi tahun ini, jumlah peserta yang

mengikuti sebanyak 1.023 orang, dan setelah dilaksanakan test peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 95 org.

Selama tahun 2013 usul kenaikan pangkat yang masuk ke BKD Provsu adalah sebanyak 5.668 usul. Dari berkas yang masuk tersebut semuanya telah diproses dan telah diterbitkan SK nya tepat waktu yaitu sebanyak 5.658 SK, sementara sisanya masih dalam proses, karena untuk SK IV/c ke atas prosesnya harus sampai ke instansi pusat. Juga telah diproses usul pensiun dari SKPD sebanyak 585 berkas, dan seluruh berkas tersebut telah diterbitkan SK pensiunnya tepat waktu.

Tabel 97
Jumlah Alumni yang Dihasilkan Badan Diklat Provsu Tahun 2012 dan 2013

No	Jenis Diklat	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I.	DIKLAT TEKNIS						
	1. Diklat Teknis Administrasi Kependudukan	30	28	93,33	-	-	-
	2. Diklat Teknis Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dana Kontribusi)	120	90	75,00	40	40	100
	3. Diklat Teknis Sekretaris Desa (Dana Kontribusi)	300	117	39	120	120	100
	4. Diklat Teknis Kepariwisata	30	30	100	30	30	100
	5. Diklat Evakuasi Dalam Penanggulangan Bencana.	60	60	100	30	30	100
	5. Diklat Teknis Manajemen Asset	-	-	-	60	53	88,33
	Jumlah	540	325	60,18	280	273	97,50
II.	DIKLAT FUNGSIONAL	-	-	-	30	30	100
	1. Diklat Fungsional Kepala/Calon Kepala SMA	-	-	-	30	30	100
	2. Diklat Fungsional Kepala/Calon Kepala SMP	-	-	-	30	30	100
	3. Diklat Fungsional Kepala/Calon Kepala SD	30	30	100	-	-	-
	4. Diklat Fungsional Pengawas Sekolah	-	-	-	30	30	100
	5. Diklat Fungsional Penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM)	-	-	-	30	30	100
	6. Diklat Penyusunan Standard Pelayanan Minimal	30	30	100	-	-	-
	7. Diklat Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Guru	30	30	100	-	-	-
	8. Diklat Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup	30	30	100	30	30	100
	9. Diklat Fungsional Dasar Umum Penyuluh Pertanian	30	30	100	30	30	100
	Jumlah	150	150	100	180	180	100
III	DIKLAT PRA JABATAN						
	1. Diklat Pra Jabatan CPNS Gol III (APBD Murni)	70	65	92,85	-	-	-
	2. Diklat Prajabatan CPNS Gol III (Kontribusi)	1322	792	59,90	240	118	49,16
	3. Diklat Prajabatan Gol. I dan II (Kontribusi)	1050	490	46,66	400	399	99,75
	Jumlah	2442	1347	55,15	640	517	80,78

No	Jenis Diklat	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IV	DIKLAT KEPEMIMPINAN						
	1. Diklat Pim Tk.. IV (APBD-SU) Murni	30	26	86,66	35	28	88,00
	2. Diklat Pim Tk. III (APBD-SU) Murni	30	29	96,66	35	27	77,14
	3. Diklat Pim Tingkat IV Dana Kontribusi	160	136	85,00	160	83	51,87
	4. Diklat Pim Tingkat III Dana Kontribusi	175	175	100	200	189	94,50
	Jumlah	395	366	92,65	430	327	76,04

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara

Capaian Kinerja Tahun 2013 ini, didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013, yaitu :

A. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas. Program ini memuat kegiatan

- 1) Pemulangan pegawai yang pensiun (pemberian bingkisan dan plakat ucapan terima kasih Gubsu) kepada PNS yang memasuki pensiun dilingkungan Pemprovsum.
- 2) Monitoring perpindahan tugas PNS di lingkungan Pemprovsum dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 3) Pembuatan listing PNS yang mencapai batas usia pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Memfasilitasi penyelesaian pensiun PNS gol/ruang IV/c ke atas ke BKN dan Sekretaris Negara.
- 5) Peningkatan administrasi PNS yang akan memasuki pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

B. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini memuat

kegiatan :

- 1) Bintek tentang tata cara penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut disiplin PNS dilingkungan Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 2) Memfasilitasi PNS mengikuti Diklat di Depdagri dan Departemen lainnya.
- 3) Memfasilitasi penyampaian peraturan-peraturan jabatan struktural atau fungsional ke pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 4) Peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM PNS tentang undang-undang pokok kepegawaian bagi Pejabat/PNS pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 5) Pelaksanaan Baperjakat Provsu berdasarkan Pergubsu No.16 tahun 2009 tanggal 5 Mei 2009 dan SK Gubsu No.800/107/2008 tanggal 1-8-2008.
- 6) Pelaksanaan penerimaan calon PNS di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 7) Memfasilitasi PNS ke BKN Pusat dan Sekretaris Negara dalam rangka penyelesaian usul kenaikan pangkat Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara periode April dan Oktober untuk Gol.IV/c keatas.
- 8) Operasional SIMPEG/Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

- 9) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (Pelaksanaan Penilai Tim Penganugerahan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun bagi PNS dilingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara).
- 10) Bantuan Diklat Pim Tk.II, Tk.III dan Tk.IV.
- 11) Studi banding tentang tata cara pelaksanaan baperjakat dan implementasi Permendagri No.5 Tahun 2005 ke Provinsi Riau (Pekanbaru).
- 12) Penyelesaian listing kenaikan pangkat PNS Periode 1 April dan Oktober.
- 13) Seleksi penyesuaian kenaikan pangkat PNS.
- 14) Evaluasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota se Sumatera Utara.
- 15) Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS dilingkungan Unit Kerja Pemprov.
- 16) Pembuatan buku jabatan fungsional dilingkungan unit kerja Pemprov.
- 17) Pembuatan biodata PNS yang akan mutasi kenaikan pangkat pada periode April dan Oktober 2013 dilingkungan Pemprov.
- 18) Seleksi ujian dinas Tk. I dan Tk. II se Sumatera Utara.
- 19) Penelitian dan pengusulan tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- 20) Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS secara terpadu oleh Tim Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk periode April dan Oktober di Brastagi.
- 21) Bantuan PNS Tugas Belajar.
- 22) Pembinaan dalam pengangkatan Jabatan Sekda Provinsi, kabupaten/kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 23) Mempasilitasi PNS dari Kantor Regional VI BKN Medan dalam rangka penyelesaian usul kenaikan pangkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara periode April dan Oktober.
- 24) Pembuatan buku jabatan struktural dilingkungan unit kerja Pemprovsu.
- 25) Peremajaan data PNS dilingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 26) Monitoring evaluasi dan pelaporan (monitoring tentang penanganan dan penyelesaian kasus-kasus disiplin PNS dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara).
- 27) Evaluasi dan monitoring data PNS dilingkungan unit kerja Pemprovsu.

- 28) Biaya pembinaan Praja IPDN dan menghadiri pelantikan Praja IPDN.
- 29) Rapat Tim Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dilingkungan Pemprov.
- 30) Rapat Tim Pembantu Penilai Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilingkungan Pemprov.
- 31) Biaya Tim Kerja Rekapitulasi Daftar Hadir PNS di lingkungan Pemprov.
- 32) Pembinaan mental Kuliah Agama Islam dan Kristen dilingkungan Pemprov.
- 33) Lanjutan *cross check* (Penelitian) terhadap legalitas Ijazah Pejabat/PNS Gol.III/a keatas yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Muda dan Sarjana.
- 34) Pelaksanaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dilingkungan Pemprov sesuai SK Gubsu No.800.05/1489/K/Tahun 2009 tgl.6-5-2009.
- 35) Biaya Pembinaan dan Evaluasi Tugas Belajar.
- 36) Penyelenggaraan Seleksi Praja IPDN.
- 37) Seleksi dan pemberian penghargaan PNS/staf teladan di lingkungan unit kerja Pemprov.
- 38) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
- 39) Penyelenggaraan Outbound bagi Pejabat di lingkungan Pemprov.

- 40) Rekonsiliasi data PNS di lingkungan Pemprovsu dengan BKN Regional VI dan BKN Pusat.
- 41) Lanjutan pengambilan foto dan sidik jari dalam penerapan KPE (Kartu Pegawai Elektronik) di lingkungan Pemprovsu serta konsultasi dan koordinasi mengenai penerapan KPE ke BKN Pusat.
- 42) Konsultasi ke Instansi Pusat dalam rangka Penyusunan Program Kerja BKD Provsu.
- 43) Pembuatan biodata pejabat struktural di lingkungan Pemprovsu.
- 44) Pembekalan keterampilan terhadap PNS di lingkungan Pemprovsu yang memasuki batas usia pensiun.
- 45) Mengirimkan peserta mengikuti rakor, bintek, sosialisasi atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jabatan/diklat lainnya yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat.
- 46) Biaya pembinaan dan evaluasi izin belajar.
- 47) Pendidikan Pasca Sarjana bagi PNS Provsu dan kabupaten/kota.
- 48) Pengadaan software dalam rangka pengembangan aplikasi SIMPEG dan Pelatihan SIMPEG berbasis web.
- 49) Pelatihan Emotional Spiritual Quotion (ESQ) bagi PNS di lingkungan Pemprovsu.
- 50) *Training Capacity Building and Team Work* bagi Pejabat bagi Pejabat Eselon II Pemprovsu.

C. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Analisis kebutuhan diklat.
- 2) Peningkatan jejaring kerja kediklatan.
- 3) Peningkatan kualitas Widyaiswara/tenaga pengajar.
- 4) Penyusunan program diklat tahun 2014.
- 5) Peningkatan kualitas pejabat struktural/staf melalui diklat/seminar.
- 6) Kegiatan orasi ilmiah Widyaiswara.
- 7) Media informasi diklat.
- 8) Dukungan pembinaan pola kemitraan diklat Provsu.
- 9) ISO 9001 : 2008.
- 10) Pembuatan bank data alumni diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional tahun 2008 dan tahun 2009.
- 11) Pelaksanaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemprovsu.
- 12) Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 13) Promosi dan publikasi kediklatan.
- 14) Pembuatan profil Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara berbasis visual.
- 15) Pengembangan pelayanan dan informasi Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk website berbasis data.

- 16) Survey tentang pemanfaatan alumni Diklat Pim Tk III dan IV Tahun 2010 – 2011.
- 17) Diklat teknis pariwisata tingkat dasar.
- 18) Diklat teknis manajemen asset.
- 19) Diklat teknis bendahara satuan kerja perangkat daerah (dana kontribusi).
- 20) Diklat teknis sekretaris desa (dana kontribusi).
- 21) Diklat evakuasi dalam penanggulangan bencana.
- 22) Diklat fungsional Kepala/Calon Kepala SMA.
- 23) Diklat fungsional Kepala/Calon Kepala SMP.
- 24) Diklat fungsional Pengawas Sekolah.
- 25) Diklat fungsional penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM).
- 26) Diklat fungsional pengawasan lingkungan hidup.
- 27) Diklat fungsional dasar umum penyuluh pertanian.
- 28) Diklat prajabatan CPNS Gol III (Kontribusi).
- 29) Diklat prajabatan Gol. I dan II (Kontribusi).
- 30) Diklat Pim Tk.. IV (APBD-SU) Murni.
- 31) Diklat Pim Tk. III (APBD-SU) Murni.
- 32) Diklat Pim Tingkat IV Dana Kontribusi.
- 33) Diklat Pim Tingkat III Dana Kontribusi.

➤ **BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM**

Kondisi perubahan dan perkembangan sistim ketatanegaraan dan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya *Good Governance* dan terwujudnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang diimplementasikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Arah kebijakan pembangunan bidang hukum oleh Biro Hukum Setdaprovsu telah diupayakan untuk mendorong terselenggaranya Pemerintahan Daerah dalam pencapaian supremasi hukum sehingga perumusan dan perancangan produk hukum daerah serta penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Capaian kinerja yang diperoleh antara lain adalah :

1. Menghasilkan produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang terkoordinasi, terarah, sistematis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dan Panitia RANHAM kabupaten/kota akan pentingnya penegakan HAM.
3. Untuk kepastian hukum dalam penanganan perkara di Lingkungan Pemprovsu dan bagi masyarakat
4. Penegakan Perda dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

A. Program Perencanaan Hukum. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Evaluasi Ranperda dan/atau klarifikasi Perda Kabupaten/Kota.
- 2) Penyusunan rancangan peraturan daerah Provsu.
- 3) Fasilitasi penelahaan draft kesepakatan/kesepahaman kerjasama luar negeri.

B. Program Pembinaan Peraturan Daerah, Program ini memuat kegiatan:

- 1) Revisi terhadap peraturan daerah Provsu.
- 2) Monitoring tindak lanjut evaluasi ranperda dan/atau klarifikasi perda kabupaten/kota.
- 3) Inventarisasi peraturan daerah kabupaten/kota.
- 4) Pembinaan dan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota.
- 5) Penerbitan lembaran daerah dan berita daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

D. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Lokakarya dan pelatihan RANHAM daerah kabupaten/kota.
- 2) Monitoring pelaksanaan kegiatan panitia pelaksanaan RANHAM kabupaten/kota.
- 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

- 4) Operasional pusat pelayanan Pemprov.
- 5) Bimbingan teknis petugas penyuluh hukum.
- 6) Rapat koordinasi Panitia RANHAM Provsu dan kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 7) Seminar tentang patologi birokrasi pemerintah dalam perspektif hukum.

D. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penanganan perkara dan tata usaha negara bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pertemuan koordinasi teknis kuasa hukum pemerintah daerah untuk penanganan perkara di peradilan.
- 3) Kerjasama penanganan perkara sengketa hukum antara Pemprov dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- 4) Kerjasama penanganan perkara antara Pemprov dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- 5) Bintek paralegal KDRT.

E. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan/pemberdayaan PPNS di lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 2) Kelompok kerja hukum legal drafting.

Permasalahan :

- Kurangnya sarana dan prasarana hukum yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
- Kurangnya inisiatif dan partisipasi para SKPD dalam perancangan draf Ranperda.
- Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan tugas antara lain perguruan tinggi, Komda HAM Provinsi, kabupaten/kota serta aparat hukum terkait.
- Kurangnya sosialisasi terhadap produk hukum daerah dan serta metode teknis penyuluhan hukum yang kurang berkembang.

Solusi :

- Peningkatan sarana dan prasarana hukum untuk pelaksanaan perencanaan dalam melakukan pengkajian ulang produk hukum daerah.
- Peningkatan koordinasi atas pelanggaran HAM dikalangan aparaturnya penegak hukum, lembaga sosial dan Perguruan Tinggi.
- Proses perancangan, perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melibatkan kajian akademis dari kalangan perguruan tinggi, lembaga sosial dan asosiasi sehingga proses penerbitan perda dapat diterima masyarakat.
- Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu koordinasi yang

berkelanjutan dengan instansi penegak hukum sebagai Korwas dan Pembina PPNS di daerah sehingga dapat meningkatkan peranan PPNS yang lebih profesional.

- Diperlukan peningkatan dan pengembangan metode teknis penyuluhan hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
- Peningkatan sosialisasi produk hukum daerah sebagai upaya pelayanan informasi kepada masyarakat dan aparatur.



Sasaran Strategis-3 :
Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi

Tabel 98. Capaian Sasaran Strategis 3

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Peningkatan sistem transportasi dan penataan angkutan massal kota			
	a. <i>Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan</i>	100 %	100 %	100
	b. <i>Persentase Peningkatan keselamatan perhubungan</i>	100 %	100 %	100

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
2.	Pengelolaan tata ruang perkotaan dan pedesaan serta permukiman			
	<i>a. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun</i>	147 Ha	147 Ha	100
	<i>b. Persentase perencanaan dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>	100 %	100 %	100
3.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan			
	<i>a. Persentase peningkatan fisik jalan provinsi</i>	4,42 %	4,42 %	100
	<i>b. Persentase peningkatan lebar jalan Provinsi menjadi 6 m</i>	21,05 %	21,05 %	100
	<i>c. Persentase penurunan rasio tingkat kerusakan jalan Provinsi</i>	9,91 %	9,81 %	98,99%
	<i>d. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Jaringan Jalan Provinsi sehingga tercapai pelayanan lalu lintas yang nyaman</i>	100 %	100 %	100
4.	Penataan iklim usaha yang sehat dalam rangka perlindungan terhadap kelompok usaha kecil			100
	<i>a. Persentase tingkat produktivitas koperasi dan UMKM per tahun</i>	10 %		
	<i>b. Jumlah koperasi yang berorientasi ekspor</i>	5 koperasi		
	<i>c. Jumlah UKM yang berorientasi ekspor</i>	5 koperasi		
	<i>d. Jumlah wirausaha baru yang terbentuk</i>	100 orang		
5.	Pembinaan UKM dan pembentukan wirausaha baru			
	<i>a. Persentase produktivitas UKM</i>	10 %		
	<i>b. Jumlah koperasi yang berorientasi ekspor dalam rangka meningkatkan daya saing</i>	66 unit		
	<i>c. Jumlah wirausaha baru yang terbentuk</i>	5 usaha		

➤ **BIDANG PERHUBUNGAN (TRANSPORTASI)**

Berdasarkan data perkembangan jumlah sarana angkutan darat untuk wilayah pelayanan antar kota dalam provinsi (AKDP), yang izinnya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, tercatat menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data tahun 2008 s.d 2009 trend pertumbuhan jumlah sarana angkutan rata-rata pertahunnya sebesar 15,6%. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 20,53%.

Tabel 99
Trend Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Darat
(Antar Kota Dalam Provinsi) di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Dalam Trayek				Non Trayek		Jumlah	% Pertumb.
	MPU	Bus	AJDP	Bus Bandara	Taksi Bandara	cara Sewa		
2008	434	427	-	-	-	-	861	
2009	722	595	-	-	-	-	1317	52,96
2010	665	535	-	-	-	-	1200	-8,88
2011	689	659	26	-	-	-	1374	14,50
2012	652	641	66	-	-	-	1359	-1,09
2013	660	535	108	13	273	49	1638	20,53

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Untuk realisasi jumlah penumpang pada tahun 2013 yang menggunakan angkutan umum jenis pelayanan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) tercatat sebanyak 10.248.000 orang, dengan rincian yang menggunakan kendaraan jenis MPU sebanyak 6.652.800 orang dan jenis bus sebanyak 3.595.200 orang. Jumlah pergerakan penumpang terbesar masih didominasi di wilayah Mebidang.

A. Program Angkutan bidang darat, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tender/lelang angkutan berdasarkan kualitas (*Quality Licensing*) angkutan pemadu moda Bandara Kuala Namu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Angkutan Pemadu Moda Berdasarkan Kualitas (*Quality licencing*).
- 2) Penyelenggaraan posko pemantauan angkutan Lebaran 2013, Natal tahun 2013 serta tahun baru 2014.
- 3) Penyelenggaraan perlombaan Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.
- 4) Penyelenggaraan seleksi awak kendaraan umum teladan tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2013.
- 5) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ TA.2013.
- 6) Penyelenggaraan sosialisasi tertib berlalu lintas terhadap pelajar di wilayah Kota Medan tahun 2013.
- 7) Penyelenggaraan pembinaan terhadap perusahaan bengkel karoseri kendaraan bermotor tahun 2013.

B. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Rapat koordinasi teknis di bidang perhubungan (perhubungan darat, laut dan udara).

C. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemeliharaan dan perawatan pesawat timbangan di Sumatera Utara.
- 2) Rehabilitasi ruang tunggu Pelabuhan Sundari Belawan.

D. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Program ini memuat

kegiatan :

- 1) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
- 2) Penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- 3) Penyelenggaraan PRSU.
- 4) Sosialisasi pelaksanaan PERDA Pengendalian Pencemaraan Udara.
- 5) Bimbingan teknik keselamatan pelayaran perairan daratan.
- 6) Bantuan operational Ferry Roro di Kawasan Danau Toba.
- 7) Pelaksanaan seleksi Wahana Tata Nugraha (WTN) tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Pelaksanaan seleksi AKUT dan Pelajar Pelopor tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 9) Pembinaan bengkel karoseri pembuatan rumah-rumah kendaraan bermotor.
- 10) DED pembangunan dermaga sungai.
- 11) Perbersihan alur pelayaran sungai.

- 12) Penyelenggaraan *Invesment, Trade and Tourisn Of North Sumatera (ITT Of North Sumatera)* dan Pekan Inovasi Sumatera Utara 2013.

Permasalahan :

- Dari 33 kabupaten/kota hanya 6 kabupaten/kota yang mengikuti WTN 2013, sehingga dana terserap optimal.

Solusi :

- Mendorong kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi WTN tahun berikutnya.

E. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan/rehabilitasi ruang jaga pos pelabuhan laut regional teluk nibung.
- 2) Pembuatan talud dan penimbunan jalan ke Pelabuhan Batang Serai.
- 3) Pengadaan alat keselamatan penumpang.

F. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, dan Kabupaten Dairi.
- 2) Pengadaan dan pemasangan delineator di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal.

- 3) Pengadaan dan pemasangan APILL/*Warning Ligth* di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 4) Pengadaan paku jalan di Kabupaten Langkat, Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal.
- 5) Pengadaan dan pemasangan marka di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kabupaten Samosir.
- 6) Pembangunan lampu penerangan jalan umum pada daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 7) Penangan lokasi rawan kecelakaan di DRK di Sumatera Utara.

G. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan.

Tercapainya pemeliharaan Sarana/ Prasarana Perhubungan serta meningkat baik kuantitas maupun kualitas



Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terpeliharanya Sarana/Prasarana Perhubungan serta meningkat baik kuantitas maupun kualitas adalah Persentase Peningkatan pelayanan

Perhubungan dan Persentase Peningkatan Keselamatan Perhubungan sebesar 100%.

➤ **BIDANG/ SEKTOR TATA RUANG**

Sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum bahwa pembangunan rumah tangga bersanitasi merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan kegiatan pengaturan dan pembinaan pada tahun 2013. Pemerintah Provinsi telah melakukan pendataan dan identifikasi kawasan rawan sanitasi. Hasil ini akan ditindaklanjuti dengan membangun pilot project untuk sanitasi yang sehat dan diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menindaklanjuti selanjutnya.

Pembangunan jaringan drainase yang dilakukan oleh Distarukim adalah saluran drainase yang terkait dengan lintas kabupaten/kota berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan hasil reses anggota DPRD. Pada tahun 2012 saluran drainase yang dibangun sepanjang 106.048 meter sedangkan tahun 2013 saluran drainase yang dibangun sepanjang 23.420 Meter.

Dalam pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permen PU Nomor 14/PRT/2010, Pemerintah Provinsi sampai saat ini belum melaksanakan sebagian dari SPM tersebut mengingat untuk bidang pekerjaan umum yang di atur adalah pembangunan fisik sesuai dengan

otonomi daerah sedangkan pemerintah provinsi hanya melakukan perbaikan pada tahun 2012 dan 2013 melalui sumber dana APBN. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan pembangunan sarana air limbah di Kota Medan melalui proyek MMSHP dengan rencana pembangunan saluran Primer dan Sekunder yang akan melayani 26.000 rumah tangga, sedangkan pemerintah provinsi hanya melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Pada proses pendampingan ini Pemerintah Provinsi melalui Distarukim mengalokasikan untuk pembebasan lahan pembangunan stasiun pompa dan studi AMDAL mendukung proyek tersebut.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2013 yang lalu adalah :

A. Program Terkait Peningkatan Infrastruktur Pedesaan. Terdiri-dari kegiatan :

- 1) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman padat penduduk di kawasan Mebidangro Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Pembangunan saluran drainase kawasan lintas batas Deli Serdang - Stabat Kabupaten Langkat.

- 4) Pembangunan saluran drainase di kawasan lintas Deli - Serdang Bedagai Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagei.
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di kota Sidikalang Kabupaten Dairi.
- 6) Pembangunan saluran drainase di kawasan lintas Kisaran - Aek Kanopan Kabupaten Asahan.
- 7) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman padat penduduk di Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.
- 8) Pembangunan saluran drainase kawasan lintas Labuhanbatu Utara - Labuhanbatu di Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 9) Pembangunan saluran drainase kawasan lintas di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- 10) Pembangunan saluran drainase kawasan lintas Labuhanbatu - Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 11) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 12) Pembangunan saluran drainase di kawasan lintas D. Sanggul - Siborong-borong Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 13) Pembangunan jalan poros kawasan agropolitan Kabupaten Toba Samosir.

- 14) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
- 15) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih / air minum di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 16) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 17) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Janji Lobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.
- 18) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Kecamatan Gido Kabupaten Nias.
- 19) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- 20) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara.
- 21) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Desa Siwalawa Kabupaten Nias Selatan.

- 22) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Desa Hilizalootano Kabupaten Nias Selatan.
- 23) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk di Desa Hilianaa Kabupaten Nias Selatan.
- 24) Perbaikan/penggantian trestel di Pulau Berhala Kabupaten Sedang Bedagai.
- 25) Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air minum kawasan perdesaan di Kenegerian Tamba Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir.
- 26) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan kawasan kota Pangururan Kabupaten Samosir.
- 27) Pembangunan jalan agropolitan desa Harian Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
- 28) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan kawasan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.
- 29) Pembangunan jalan agropolitan Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.
- 30) Pembangunan saluran drainase di kawasan Mebidangro Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

- 31) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman Mebidangro di kawasan Jln. Limau Mungkur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- 32) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Kawasan Mebidangro Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 33) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan Mebidangro di Komplek Veteran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 34) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan Mebidangro di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 35) Pembangunan saluran drainase di kawasan lintas Lubuk Pakam - Medan Kabupaten Deli Serdang.
- 36) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di kawasan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- 37) Peningkatan prasarana dan sarana permukiman kawasan Mebidangro di Pasar 7 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 38) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan Mebidangro Desa Paluh Subur dan Paluh Makna Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

- 39) Pembangunan saluran drainase di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 40) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman Mebidangro Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 41) Pembangunan saluran drainase kawasan lintas Pematangsiantar - Kabanjahe Kabupaten Simalungun.
- 42) Peningkatan Prasarana dan Sarana Permukiman kawasan Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.
- 43) Peningkatan prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman Desa Kutambaru Kecamatan Munthe Kabupaten Karo.
- 44) Pembangunan drainase di Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat.
- 45) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman padat penduduk Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 46) Lanjutan pembangunan air bersih di IKK Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.
- 47) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di kawasan Simp. Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

- 48) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman Desa Tadangka/Muara Tagor Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal.
- 49) Pembangunan saluran drainase di Ibukota Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 50) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih/air minum di Sipagimbar Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 51) Pembangunan saluran drainase di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 52) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Desa Panyabungan Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
- 53) Pembangunan saluran drainase di Desa Menanti Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
- 54) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan Jl. Perjuangan Pasar IV desa Kelambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- 55) Peningkatan prasarana dan sarana permukiman kawasan Kecamatan Payung Kabupaten Karo.
- 56) Pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Kecamatan Lagu Boti Kabupaten Toba Samosir.

57) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan Mebidangro di Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

58) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

59) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

B. Program Pembangunan Perkotaan. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembangunan saluran drainase jalan Pancing Sp. Jalan Bilal Kota Medan.
- 2) Studi AMDAL mendukung kegiatan MSMHP Kota Medan.
- 3) Pendampingan proyek MSMHP Kota Medan.
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman Kecamatan Tj. Pinggir Kota Pematangsiantar.
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan padat penduduk Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
- 6) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
- 7) Pembangunan saluran drainase kawasan terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

- 8) Pembangunan saluran drainase kawasan tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
- 9) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan perumnas Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- 10) Pembangunan sopo godang Mandailing Natal.
- 11) Pemeliharaan rutin gedung serba guna Provinsi Sumatera Utara.
- 12) Rehabilitasi hanggar pesawat Pangkalan TNI AU Polonia Medan.
- 13) Pembangunan saluran drainase primer Mebidangro di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.
- 14) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan kawasan permukiman Mebidang.
- 15) Peningkatan prasarana dan sarana permukiman kawasan kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- 16) Peningkatan prasarana dan sarana permukiman kawasan padat penduduk di Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- 17) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Kawasan Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
- 18) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Kawasan Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

- 19) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di Kawasan Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
- 20) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman Mebidangro di kawasan Jl. HM. Said Gg. Pelajar Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
- 21) Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase di Jln. Letda Sujono Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- 22) Peningkatan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perumahan Rajawali Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- 23) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di kawasan Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
- 24) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di kawasan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
- 25) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman di kawasan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
- 26) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman padat penduduk di kawasan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.
- 27) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kawasan permukiman di Kecamatan Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan.
- 28) Pembangunan gedung KNPI Provinsi Sumatera Utara.

29) Pembangunan Islamic Center di Provinsi Sumatera Utara.

30) Pembangunan gedung pendidikan kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Urusan Wajib Penataan Ruang

Kebutuhan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah di tetapkan sebesar 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% untuk Ruang Terbuka Hijau Privat dari seluruh wilayah perkotaan. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau ini belum dapat dilaksanakan karena sampai 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Belum di Perdakan sehingga belum ada payung hukum untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Pengadaan informasi peta analog merupakan kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota. Adapun dalam penyelenggaraan peta, Dinas Tarukim telah mengadakan sistem informasi penataan ruang yang di dalamnya menyediakan peta kabupaten/kota yang dapat di akses oleh masyarakat melalui website <http://www.penataanruang-sumut.net/>

Pengaturan izin pemanfaatan ruang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota karena Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah, oleh karena itu karakteristik data dan informasi dari masyarakat yang mendapatkan izin pemanfaatan ruang berada di Kabupaten/Kota

Pencapaian standard pelayanan minimal bidang penataan ruang yang telah dilaksanakan pada saat ini adalah dari bidang pengendalian

penataan ruang adalah telah adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang pada Distarukimsu sebanyak 4 (empat) orang dan Bappeda Provsu sebanyak 2 (dua) orang, dan Dinas Tarukimsu telah siap untuk menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penataan ruang, apabila PPNS bidang penataan ruang di kabupaten/kota tidak dapat menangani pengaduan yang ada.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provsu telah memfasilitasi 10 (sepuluh) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bappeda Provsu.

Pada tahun 2011 telah difasilitasi 2 (dua) buah Ranperda, yaitu Kota Medan dan Kota Binjai, pada tahun 2012 telah difasilitasi 2 (dua) buah Ranperda, yaitu Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Simalungun dan pada tahun 2013 telah difasilitasi 6 (enam) buah Ranperda, yaitu Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Langkat menjadi Peraturan Daerah yang disahkan oleh Bappeda Provsu.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

A. Program Penataan Ruang. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pembinaan pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Sosialisasi tugas pokok dan fungsi PPNS bidang penataan ruang.
- 4) Penyusunan studi dan analisis struktur pusat pertumbuhan dan fungsi kewilayahan di Sumatera Utara.
- 5) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan Padangsidempuan.
- 6) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan Kabupaten Padang Lawas.
- 7) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 8) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 9) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara.
- 10) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 11) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan Tanjungbalai.
- 12) Bantek penyusunan RDTR dan zoning regulation kawasan perkotaan Sei Berombang Kecamatan Parai Hilir Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
- 13) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

➤ **BIDANG/ SEKTOR PEKERJAAN UMUM (SARANA DAN PRASARANA JALAN)**

Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan di sektor pekerjaan umum khususnya pada sarana dan prasarana jalan selama tahun 2013 adalah :

1. Arus lalu lintas menjadi lancar.
2. Meningkatnya panjang fisik jalan Provinsi

Kondisi jalan Provinsi Tahun 2013 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 100
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2013

No.	TAHUN	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
1	2013	1.325,23	796,50	412,08	514,68

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

✓ **Meningkatnya panjang fisik jalan Provinsi**



Pencapaian kinerja untuk panjang fisik jalan provinsi, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan panjang fisik jalan Provinsi dalam kondisi baik	4,42%	4,42%	100 %

Untuk menunjang keberhasilan pada Indikator ini, Dinas Bina Marga mempunyai 15 UPTD untuk melaksanakannya. Target yang ingin dicapai 4,42 % (161,60 Km) dari panjang jalan 3.048, 50 Km dan diakhir Tahun Anggaran 2012 Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mampu untuk menyelesaikan sasaran strategis tersebut dengan capaian kinerja 100 %. Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah program pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan.

✓ **Menurunnya rasio tingkat kerusakan jalan Provinsi**



Pencapaian kinerja untuk menurunkan rasio kerusakan jalan provinsi, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan rasio tingkat kerusakan jalan Provinsi	9,91 %	9,81 %	98,99%

Untuk menunjang keberhasilan sasaran strategis menurunnya rasio tingkat jalan provinsi dengan indikator kinerja persentase penurunan rasio tingkat kerusakan jalan provinsi, Dinas Bina Marga melaksanakan program pemeliharaan jalan dan jembatan dengan berjumlah 65 kegiatan. Dari panjang jalan provinsi yang lama sepanjang 3.048,50 bahwa 90 % dari panjang tersebut terlindungi oleh pendanaan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian bahwa program pemeliharaan jalan dan jembatan sudah termasuk didalamnya pembersihan bahu jalan dan pembersihan parit serta penutupan lobang. Dari hasil survey kondisi jalan provinsi Sumatera Utara dan dibandingkan dengan persentase peningkatan jalan provinsi Sumatera Utara dengan penurunan tingkat kerusakan jalan 5,41 %. Berarti Dinas Bina Marga mempunyai capaian kinerja 98,99 % dari target persentase penurunan rasio tingkat kerusakan jalan provinsi 9,91 %. Tidak tercapainya capaian kinerja 100 %, dimana dapat kita lihat hanya mencapai 98,99 % dikarenakan adanya satu kegiatan yang putus kontrak pada kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Pangururan Ambarita di Kab. Samosir sepanjang 3 Km, disebabkan realisasi fisik pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak sampai batas akhir waktu kontrak.

✓ **Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan Jalan Provinsi**



Pencapaian kinerja untuk menurunkan rasio kerusakan jalan provinsi, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Jaringan Jalan Provinsi sehingga tercapai pelayanan lalu lintas yang nyaman	100 %	100%	100 %

Untuk menunjang keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan provinsi dengan didukung indikator kinerja persentase peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan provinsi sehingga tercapai pelayanan lalu lintas yang nyaman, didukung dengan program pembinaan jalan dan jembatan.

Capaian kinerja tersebut diatas, didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2013, yaitu :

A. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Peningkatan struktur jalan bts. Binjai - kuala di Kabupaten Langkat sepanjang 2 km.
- 2) Peningkatan struktur jalan namu ukur - bts. Karo di Kabupaten Langkat sepanjang 5 km.

- 3) Peningkatan kapasitas jalan Gatot Subroto di Kota Binjai sepanjang 1 km.
- 4) Peningkatan struktur jalan setia budi (sp. jalan flamboyan - sp. jalan jamin ginting) di Kota Medan sepanjang 1 km.
- 5) Peningkatan struktur jalan marelان (sp. jalan pertemuan-bts. Medan) di Kota Medan.
- 6) Peningkatan struktur jalan tanah abang - bts Serdang Bedagai di Kabupaten Deli Serdang.
- 7) Peningkatan struktur jalan lubuk pakam-tanah abang di Kabupaten Deli Serdang.
- 8) Peningkatan kapasitas jalan deli tua-tiga juhar di Kabupaten Deli Serdang.
- 9) Peningkatan kapasitas jalan tanah abang-sei buaya di Kabupaten Deli Serdang.
- 10) Pembebasan tanah untuk akses non tol kualanamu.
- 11) Pembangunan jembatan lau percihan di Kabupaten Deli Serdang.
- 12) Pembangunan jembatan lau lutih di Kabupaten Deli Serdang.
- 13) Peningkatan struktur jalan bts. Deli Serdang - Dolok Masihul - bts. Kota Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai.

- 14) Peningkatan Struktur Jalan Sei Rampah - Tj. Beringin di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 15) Peningkatan Struktur Jalan Tebing Tinggi (Bts. Serdang Bedagai) - Sipispis di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 16) Penggantian jembatan sei sarinah pada ruas jalan bts. Serdang Bedagai - Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 17) Peningkatan jalan pematang raya tiga runggu di Kabupaten Simalungun.
- 18) Peningkatan kapasitas jalan Pematangsiantar - Pematang Raya di Kabupaten Simalungun (DAK).
- 19) Peningkatan kapasitas jalan Perdagangan bts. Batu Bara di Kabupaten Simalungun (DAK).
- 20) Peningkatan struktur jalan kuta rakyat bts. Langkat di Kabupaten Karo.
- 21) Perbaikan trase jalan jurusan Kuta Rakyat bts. Langkat di Kabupaten Karo.
- 22) Peningkatan struktur jalan sumbul pegagan - tiga baru - sumbul jehe di Kabupaten Dairi sepanjang 2 km.
- 23) Peningkatan struktur jalan salak - ulu merah - bts. Humbang Hasundutan di Kabupaten Pakpak Bharat sepanjang 1 km.

- 24) Peningkatan struktur jalan sp. jambu (Pakpak Bharat) - Hutajungak - Sigalingging di Kabupaten Pakpak Bharat sepanjang 1 km.
- 25) Peningkatan struktur jalan P. Rakyat - Bandar Pulau di Kabupaten Asahan sepanjang 3 km.
- 26) Peningkatan struktur jalan Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Kota Tanjungbalai di Kabupaten Asahan sepanjang 1.3 km.
- 27) Peningkatan struktur jalan Jamin Ginting di Kota Tanjungbalai sepanjang 2 km.
- 28) Peningkatan kapasitas jalan Lima Puluh - Bts. Simalungun di Kabupaten Batubara (DAK) sepanjang 4 km.
- 29) Peningkatan struktur jalan sp. Ajamu - Labuhan Bilik di Kabupaten Labuhanbatu sepanjang 1, 70 km.
- 30) Peningkatan struktur jalan Sigambal - bts. Tapanuli Selatan di Kabupaten Labuhanbatu sepanjang 2 km.
- 31) Pembayaran kegiatan peningkatan jalan provinsi jurs. Jembatan Merah - Muara Soma - Sp. Gambir di Kabupaten Mandailing Natal (MYC. 2007 - 2009).
- 32) Peningkatan kapasitas jalan sp. Kota Pinang - bts. Padang Lawas Utara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepanjang 2 km.

- 33) Pembangunan jembatan Aek Maranti di Kabupaten Labuhanbatu.
- 34) Pembangunan jembatan Aek Garotak II di Kabupaten Labuhanbatu.
- 35) Peningkatan struktur jalan PAL XI - Aek Godang di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 1 km.
- 36) Peningkatan struktur jalan Sipirok - Sp. Tandoson - bts. Tapanuli Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 2 km.
- 37) Peningkatan struktur jalan Sipenggeng - Marancar - Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 2 km.
- 38) Peningkatan struktur jalan Jenderal Besar A.H. Nasution (Jln. By Pass Ring Road Lintas Timur) di Kota Padangsidempuan sepanjang 1.50 km.
- 39) Pembangunan jembatan Aek Siporing di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 40) Peningkatan struktur jalan Hutaimbaru - Bts. Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Padang Lawas Utara sepanjang 4 km.
- 41) Peningkatan struktur jalan Gunung Tua - Hutaimbaru di Kabupaten Padang Lawas Utara sepanjang 2 km.
- 42) Peningkatan struktur jalan Aek Godang - Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara sepanjang 3,40 km.

- 43) Peningkatan struktur jalan Aek Godang - Km. 150 di Kabupaten Padang Lawas Utara sepanjang 4 km.
- 44) Peningkatan struktur jalan Gunung Tua - Km. 168 (Binaga) di Kabupaten Padang Lawas Utara sepanjang 3 km.
- 45) Peningkatan struktur jalan Hutaimbaru - Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara 1.50 km.
- 46) Pembangunan box culvert pada jembatan Aek Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 47) Peningkatan struktur jalan km. 168 (Binanga) - Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas 2.40 km.
- 48) Peningkatan struktur jalan Sibuhuan - Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas sepanjang 2 km.
- 49) Peningkatan struktur jalan Ujung Batu - Bts. Riau di Kabupaten Padang Lawas sepanjang 2 km.
- 50) Peningkatan struktur jalan Aliage - Muara Tige - Bts. Riau di Kabupaten Padang Lawas sepanjang 1 km.
- 51) Pembangunan box culvert pada jembatan Aek Padang di Kabupaten Padang Lawas.
- 52) Pembangunan jembatan Aek Tambuse di Kabupaten Padang Lawas.
- 53) Pembangunan jembatan Aek Sigarpa di Kabupaten Padang Lawas

- 54) Peningkatan struktur jalan Jembatan Merah - Muara Soma di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang 3 km.
- 55) Peningkatan struktur jalan Sp. Pulo Padang - Batahan di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang 4.50 km.
- 56) Peningkatan struktur jalan Muara Pungkut - Sp. Banyak di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang 1 km.
- 57) Pembangunan jembatan Aek Tombang Sangap di Kabupaten Mandailing Natal.
- 58) Pembangunan jembatan Aek Simpang Tuo di Kabupaten Mandailing Natal.
- 59) Pembangunan jembatan Aek Jarung di Kabupaten Mandailing Natal.
- 60) Pembangunan box culvert di Aek Marian di Kabupaten Mandailing Natal.
- 61) Peningkatan struktur jalan Barus - Bts. Humbang Hasundutan di Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang 3.50 km.
- 62) Peningkatan struktur jalan Sorkam Kiri - Sigambo - Gambo - Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang 5 km.
- 63) Pembukaan jalan Borbor - Rianiate - Garoga di Kabupaten Toba Samosir sepanjang 3.50 km.

- 64) Peningkatan struktur jalan Sipahutar - Aek Humbang di Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang 1 km.
- 65) Peningkatan struktur jalan Aek Humbang - Bts. Tapanuli Selatan di Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang 2 km.
- 66) Peningkatan struktur jalan Sp. Sitanggor - Bts Toba Samosir di Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang 1 km.
- 67) Peningkatan struktur jalan Tomok - Onan Runggu - di Kabupaten Samosir sepanjang 1.5 km.
- 68) Peningkatan struktur jalan Onan Runggu - Nainggolan di Kabupaten Samosir sepanjang 2 km.
- 69) Peningkatan struktur jalan Tele - Pangururan di Kabupaten Samosir sepanjang 2 km.
- 70) Pembangunan box culvert pada ruas Jalan Pangururan - Ambarita di Kabupaten Samosir.
- 71) Pembangunan box culvert 2 unit pada ruas jalan Onan Runggu - Nainggolan di Kabupaten Samosir.
- 72) Peningkatan struktur jalan Dolok Sanggul - Pakkat di Kabupaten Humbang Hasundutan sepanjang 1.706 km.
- 73) Peningkatan struktur jalan Pakkat - Bts. Tapanuli Tengah di Kabupaten Humbang Hasundutan sepanjang 1.8 km.
- 74) Pembangunan box culvert 2 Unit Pada Ruas Jalan - Tara Bintang di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- 75) Pembangunan jembatan Lae Batu Gajah -1 di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 76) Peningkatan struktur jalan Lolowau - Siwalawa II di Kabupaten Nias Selatan sepanjang 1 km.
- 77) Pembangunan jembatan Idano Saruru di Kabupaten Nias Barat (Tahap I).
- 78) Pembangunan box culvert pada ruas jalan Lolowau - Sirombu di Kabupaten Nias Selatan.
- 79) Peningkatan struktur jalan Tuhemberua - LOTU di Kabupaten Nias Utara sepanjang 3 km.
- 80) Pembukaan jalan Afulu - Bts. Nias Barat di Kabupaten Nias Utara sepanjang 5 km.
- 81) Pembangunan jembatan Idano Simanari di Kabupaten Nias Utara.
- 82) Pembangunan jembatan Idano Laosi - Laosi II di Kabupaten Nias Utara.
- 83) Pembangunan jembatan Idano Sotugala di Kabupaten Nias Utara.
- 84) Pembangunan jembatan Idano Soyo 2 Pada Ruas Jalan Lahewa - Afulu di Kabupaten Nias Utara.
- 85) Pembangunan jembatan Idano Eno'o di Kabupaten Nias Utara.

- 86) Pembangunan jembatan Idano Siwalawa Pada Ruas Jalan Tuhembusi - Mandrehe di Kabupaten Nias Barat.
- 87) Pembangunan jembatan Idano Gori - Gori di Kabupaten Nias Barat.
- 88) Pembangunan jembatan Idano Bodugala di Kabupaten Nias Barat.
- 89) Pembangunan jembatan Aek Ulumamis di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 90) Peningkatan struktur jalan Silimbat - Parsoburan di Kabupaten Toba Samosir sepanjang 2 km.
- 91) Peningkatan struktur jalan Sp. IV Hutabarat - Sipahutar di Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang 2. 50 km.

B. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program ini memuat

kegiatan :

- 1) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Langkat.
- 2) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Langkat.
- 3) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Binjai.
- 4) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Medan.
- 5) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Deli Serdang.

- 6) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Deli Serdang.
- 7) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 8) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 9) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Tebing Tinggi.
- 10) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Simalungun.
- 11) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Simalungun.
- 12) Pemeliharaan rutin jembatan di Kabupaten Dairi dan di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 13) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Karo.
- 14) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Karo.
- 15) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Dairi.
- 16) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 17) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Asahan.
- 18) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Asahan.
- 19) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Tanjungbalai.
- 20) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Batu Bara.

- 21) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Batu Bara.
- 22) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.
- 23) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 24) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 25) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 26) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 27) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Padang Lawas dan Padang lawas Utara.
- 28) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 29) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 30) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah.

- 31) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 32) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Toba Samosir.
- 33) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Toba Samosir.
- 34) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 35) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 36) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Samosir.
- 37) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Samosir.
- 38) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 39) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 40) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli.
- 41) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara.
- 42) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat.

- 43) Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat.
- 44) Pemeliharaan berkala jalan provinsi jl. Sudirman di Kota Binjai.
- 45) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan Sei Buaya - bts. Simalungun di Kabupaten Deli Serdang.
- 46) Pemeliharaan berkala jalan Perbaungan – Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 47) Pemeliharaan berkala jalan Pematangsiantar – Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun.
- 48) Pemeliharaan berkala jalan Tanah Jawa – Bts. Asahan di Kabupaten Simalungun.
- 49) Pemeliharaan berkala jalan Kabanjahe – Kuta Rakyat di Kabupaten Karo.
- 50) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan Kabanjahe - Kuta Rakyat Sta. 76+300 di Kabupaten Karo.
- 51) Pemeliharaan berkala jalan sp. Sukarame-Salak di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 52) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan sp. Sukarame-Salak-Ulu Merah- Bts. Humbang Hasundutan di Kabupaten Pakpak Bharat.
- 53) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan bts Simalungun-Kisaran di Kabupaten Asahan.

- 54) Pemeliharaan berkala jalan Aek Nabara-Negeri Lama di Kabupaten Labuhanbatu.
- 55) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan Km.150 Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas.
- 56) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan provinsi jurusan Jembatan Merah – Muarasoma – SP. Gambir di Kabupaten Mandailing Natal.
- 57) Pemeliharaan berkala jalan Siborong-Borong-Sipahutar di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 58) Pemeliharaan berkala jalan Pangururan Ambarita di Kabupaten Samosir.
- 59) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan Miga-Lolowau di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat.
- 60) Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Padang Lawas.
- 61) Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan Kabanjahe-Kuta Rakyat Sta. 89+950 di Kabupaten Karo.
- 62) Rehabilitasi jembatan air limbah pada ruas jalan Pematangsiantar-Perdagangan di Kabupaten Simalungun.
- 63) Pembangunan tembok penahan pada ruas jalan Sorkam Kiri-Sigambo-Gambo-Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah.

64) Pembangunan tembok pengaman dan bronjong pada ruas jalan Silimbat-Parsoburan di Kabupaten Samosir.

65) Pemeliharaan berkala di Kota Salak di Kabupaten Pakpak Bharat.

Permasalahan :

- Paket pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Pangururan – Ambarita di Kabupaten Samosir sampai dengan akhir kontrak tidak tercapai pelaksanaan pekerjaannya 100 %.

Solusi :

- Putus kontrak, jaminan pelaksanaan dicairkan dan penyedia jasa dikenakan *black list* (daftar hitam).

C. Program Pembinaan Jalan dan Jembatan. Program ini memuat

kegiatan :

- 1) Pembinaan teknis jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota.
- 2) Survey teknis jembatan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 4) Perencanaan teknis jalan.
- 5) Perencanaan teknis jembatan.
- 6) Pengawasan jalan provinsi.
- 7) Pengawasan pembangunan dan penggantian jembatan provinsi.
- 8) Monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan pembatan provinsi.

- 9) Monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi.
- 10) Monitoring dan evaluasi peralatan.
- 11) Pemantauan dan pengendalian kualitas agregat, hotmix dan beton.
- 12) Pengawasan dan pemanfaatan jalan.
- 13) Penerapan teknologi jalan dan jembatan.
- 14) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan laboratorium.
- 15) Penyusunan program kegiatan Dinas Bina Marga Provsu tahun 2014.
- 16) Pameran dan promosi infrastruktur.
- 17) Sistem manajemen mutu.
- 18) Pengadaan kendaraan untuk pemeliharaan rutin dan alat berat.
- 19) Amdal ruas jalan Afulu-Sirombu di Kabupaten Nias utara dan Kabupaten Nias Barat.
- 20) Amdal ruas jalan alternatif medan - Brastagi di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo.
- 21) Pembuatan renstra dan grand Dinas bina Marga.
- 22) Outbond pegawai Dinas Bina Marga Provsu.
- 23) Pembuatan LAKIP 2013 Dinas Bina Marga Provsu.
- 24) Pembuatan aplikasi perhitungan teknis untuk laboratorium.
- 25) Pengadaan alat-alat ukur dan peralatan laboratorium.
- 26) Survey teknis jalan Provinsi Sumatera Utara.

- 27) Pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- 28) Pengadaan alat-alat ukur dan peralatan laboratorium.
- 29) Pemeliharaan peralatan pemeliharaan rutin dan alat berat.
- 30) Penyusunan dan pelatihan SOP Dinas Bina Marga Provsu.

➤ BIDANG KOPERASI DAN UKM

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara periode tahun 2012 – 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,89% dengan peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 3,89 %. Jumlah anggota koperasi menunjukkan kenaikan sebesar 5,28%. Koperasi yang melaksanakan RAT juga meningkat sebesar 2,40% seiring dengan pertumbuhan koperasi. Jumlah serapan tenaga kerja di bidang koperasi (manajer dan karyawan) periode Tahun 2012 – 2013 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,49 % manajer dan 9,00 % karyawan.

Tabel 101
Perkembangan Keragaan Koperasi di Sumatera Utara

No	Uraian	Keadaan	
		2012	2013
1	Jumlah Koperasi	11.206	11.754
	Aktif (Unit)	6.706	6.967
	Tidak Aktif (Unit)	4.500	4.787
2	Anggota (Orang)	1.992.127	2.097.344
3	RAT (Unit)	4035	4.132
4	Manajer (Orang)	1.425	1.489
5	Karyawan (Orang)	10.521	11.468
6	Modal Sendiri (Rp. 000)	1.580.848.089	2.082.192.106
7	Modal Luar (Rp. 000)	1.271.592.156	1.818.155.840
8	Volume Usaha (Rp. 000)	3.741.318.994	4.233.117.841
9	SHU (Rp. 000)	303.907.632	373.120.625

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu

Modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar juga mengalami peningkatan, dimana modal sendiri meningkat sebesar 31,71 % dan modal luar meningkat sebesar 42,98 %. Besarnya peningkatan modal luar ini merupakan indikator bahwa perbankan semakin percaya kepada koperasi. Peningkatan modal luar ini sebahagian juga berasal dari stimulan dana bergulir yang difasilitasi oleh pemerintah. Stimulan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi. Sementara itu transaksi usaha koperasi pada periode 2012 – 2013 menunjukkan peningkatan nilai volume usaha sebesar 13,15 % dan sisa hasil usaha (SHU) menunjukkan peningkatan sebesar 22,77 %.

Tabel 102
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Utara

No	Sektor	Jumlah (unit)	
		2012	2013
1	Jumlah UKM	2.877.765	3.065.731
2	Serapan Tenaga Kerja	4.676.143	4.950.955

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu

Jumlah UKM di Sumatera Utara periode 2012 – 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 6,53%. Penyerapan tenaga kerja di sektor UKM ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,88%. Besarnya jumlah usaha kecil dan menengah ini merupakan pertanda positif jika dilihat bahwa keberadaannya merupakan persemaian usaha baru dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat di berbagai lapisan. Banyak UMKM yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya. Pertumbuhan jumlah

kegiatan usaha skala mikro dan kecil ini juga difasilitasi oleh koperasi yang terus berkembang.

Berkenaan dengan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara mengenai urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dapat dijelaskan bahwa keberadaan koperasi yang belum merata utamanya disebabkan oleh infrastruktur, namun demikian Dinas Koperasi dan UKM terus melakukan kegiatan gerakan masyarakat sadar koperasi dengan melibatkan dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota agar mengakomodir masyarakat yang berada di pedalaman daerahnya sehingga dapat mendirikan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Kemudian dalam pelaksanaan tugas memberdayakan koperasi dan usaha kecil dan menengah telah diambil langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan strategi pengembangan, bantuan fasilitas serta pengembangan program-program yang datang dari masyarakat koperasi dan usaha kecil dan menengah atau dengan kata lain menampung aspirasi masyarakat yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM. Disamping itu pelaksanaan pembinaan koperasi dan UKM di Sumatera Utara juga melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di berbagai sektor, kelompok dan lokasi. Dengan demikian program pembangunan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang merupakan rangkaian pembangunan berkelanjutan dari tahun sebelumnya dapat

mengatasi masalah kesenjangan ekonomi, sehingga mampu memperluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Utara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan :

A. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Sosialisasi penumbuhan jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda.
- 2) Sosialisasi strategi peningkatan usaha anggota koperasi perikanan dan peternakan.
- 3) Bimbingan teknis optimalisasi penanganan usaha pertanian dan perkebunan oleh koperasi.
- 4) Pameran dan pasar UMKM Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Pelaksanaan pasar murah dan pasar rakyat menjelang hari besar keagamaan.
- 6) Promosi produk KUKM melalui pasar dalam dan luar negeri.
- 7) Intensifikasi dan diversifikasi produk kerajinan dalam rangka program pengembangan dan pemberdayaan UKM.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.

Permasalahan :

- Rendahnya daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi yang ditunjukkan oleh kesulitan meningkatkan produksi (produktivitas) dan bersaing di pasar.
- Rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.
- Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi.
- Kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu, desain produk dan kebutuhan konsumen.

Solusi :

- Melakukan penyuluhan, pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM dalam mengelola usaha untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.
- Melakukan pelatihan keterampilan serta menanamkan jiwa kewirausahaan.
- Mengarahkan pemberdayaan KUMKM kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi.
- Penyediaan sistem insentif atau fasilitasi dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

B. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Sosialisasi strategi PUG (Pengarus Utama Gender) dalam meningkatkan ekonomi yang responsif gender.
- 2) Fasilitasi pengembangan koperasi dan UKM melalui bimtek dan diseminasi guna mendapatkan bantuan permodalan dan saranan produk UMKM.
- 3) Sosialisasi sertifikasi kompetensi UKM ekspor dan retail.
- 4) Pendataan dan pemanfaatan kios kapasitas 30 ton dan GLK 150 ton serta 1000 Ton.
- 5) Pengadaan handtraktor.
- 6) Pengadaan mesin jahit elektronik.
- 7) Pengadaan mesin pengolah gambir.
- 8) Pengadaan becak gerobak.
- 9) Pengadaan sarana usaha bagi koperasi pedagang pasar.
- 10) Identifikasi produk unggulan kabupaten/kota.
- 11) Bimtek pengolahan pupuk kompos bagi koperasi disektor pertanian dan perkebunan.
- 12) Sosialisasi pengembangan pola ekonomi syariah kepada pengurus koperasi dan anggotanya.
- 13) Evaluasi dan sinkronisasi program/kegiatan dinas yang membidangi koperasi dan UKM se Sumatera Utara.

- 14) Dukungan pelaksanaan musrenbang forum SKPD bidang ekonomi kerakyatan.
- 15) Pengadaan sarana bagi UKM pertukangan/pengrajin kayu "UD. KM Tigan Jaya" di Kabupaten Deli Serdang.
- 16) Pengadaan mesin dan sarana pembuatan tahu dan tempe bagi KSU Jadi Makmur Kabupaten Deli Serdang.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.

Permasalahan :

- Kurangnya kemampuan KUKM untuk memperoleh permodalan.
- Keterbatasan kemampuan UMKM dalam hal mengakses informasi pasar, jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis.
- Kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga pendukung koperasi dan UMKM.
- Belum optimalnya pelibatan *stakeholders* dalam pemberdayaan KUMKM.

Solusi :

- Peningkatan akses usaha KUKM kepada sumber daya produktif serta mendirikan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD).
- Memfasilitasi akses informasi bagi para UMKM dengan membangun gedung promosi.
- Mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif.
- Pengembangan dan penguatan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM serta para *stakeholders*.

C. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Sosialisasi menjadikan koperasi sebagai koperasi skala besar.
- 2) Peningkatan Kelembagaan Kelompok Usaha Produktif Menjadi Koperasi.
- 3) Identifikasi dan evaluasi koperasi binaan provinsi.
- 4) Sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 5) Monev peningkatan kualitas kelembagaan koperasi provinsi dan kabupaten/kota.
- 6) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Siswa/SMK.
- 7) Sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop).
- 8) Peningkatan peran koperasi di desa binaan TP. PKK Provinsi.

- 9) Dukungan terhadap Hari Koperasi ke 66 Provinsi Sumatera Utara.
- 10) Penilaian predikat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan.
- 11) Monitoring dan evaluasi bantuan perkuatan modal dana bergulir.
- 12) Gerakan masyarakat sadar koperasi bagi masyarakat di daerah penghasil tembakau.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.

Permasalahan :

- Kurangnya pemahaman masyarakat maupun anggota terhadap prinsip dan asas berkoperasi.
- Belum optimalnya fungsi koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- Belum optimalnya peran pembina, penyuluh dan lembaga gerakan koperasi.

Solusi :

- Melakukan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.

- Penyediaan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.
- Memberdayakan pembina, penyuluh dan lembaga gerakan koperasi melalui bimbingan atau pelatihan.

D. Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM Yang Kondusif. Program

ini memuat kegiatan :

- 1) Rapat koordinasi laporan penanggung jawab dan operator serta updating database UKM.
- 2) Pengembangan KUKM pada kawasan dataran tinggi bukit barisan melalui bimtek dan sarana prasarana.
- 3) Pengembangan KUKM pada daerah agromarinepolitan.
- 4) Pembinaan dan pemberdayaan koperasi pada daerah penghasil tembakau.
- 5) Pembinaan dan pemberdayaan UKM pada daerah penghasil tembakau.
- 6) Pelatihan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012.
- 7) Pelatihan SAK ETAP.
- 8) Pelatihan sertifikasi standard kompetensi bagi koperasi jasa keuangan.
- 9) Pelatihan kesehatan koperasi jasa keuangan.
- 10) Pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus koperasi.
- 11) Pelatihan usaha kecil mikro bagi UKM.

- 12) Pelatihan pengembangan koperasi syariah bagi gerakan koperasi.
- 13) Pelatihan manajemen koperasi bagi guru SLTP/SLTA.
- 14) Pelatihan calon wirausaha UKM di daerah.
- 15) Pelatihan HAKI bagi UKM.
- 16) Evaluasi pemanfaatan dana bergulir dan saranan bagi KSP dan KJKS.
- 17) Sosialisasi pendirian perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD).
- 18) Pelatihan koperasi simpan pinjam bagi pengelola KSP.
- 19) Pembuatan aplikasi database peserta pelatihan.
- 20) Bimtek sistem manajemen aplikasi akuntansi koperasi bagi Koperasi Pegawai Negeri (KPN).
- 21) Bimtek sistem manajemen aplikasi akuntan koperasi bagi koperasi simpan pinjam.
- 22) Bimbingan teknis pengelolaan usaha koperasi yang berwawasan lingkungan di daerah penghasil tembakau.
- 23) Bimbingan teknis pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan di daerah penghasil tembakau.
- 24) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang perkoperasian dan UKM bagi pelaku koperasi dan UKM daerah penghasil tembakau.

- 25) Evaluasi bantuan dana bergulir TA 2004-2006 di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
- 26) Observasi penumbuhan kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi produsen.
- 27) Workshop bordir dan bantuan sarana mesin jahit bordir elektrik bagi KUMKM.
- 28) Bimbingan teknis desain industri produk UMKM.
- 29) Sosialisasi peraturan daerah PT. Jamkrida Sumatera Utara.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Terciptanya iklim usaha KUKM yang kondusif.

Permasalahan :

- Belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat dari adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi.
- Kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- Masih adanya *gap* antara kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumber daya.

Solusi :

- Mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif untuk menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi dan UMKM.
- Peningkatan peran-peran lembaga swasta dan masyarakat dan menyediakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- Peningkatan akses usaha kepada sumber daya.

E. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Penumbuhan UKM ekspor.
- 2) Bimtek sertifikasi hak atas tanah.
- 3) Diseminasi akses pasar dalam negeri dan ekspor bekerjasama dengan P3ED (Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ekspor Daerah).
- 4) Pendampingan kegiatan Gerai Permanen SmesCo KUKM di Jakarta.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Permasalahan :

- Belum berkembangnya karakteristik wirausaha pada UMKM.
- Tidak siapnya UMK menghadapi tantangan masuknya produk-produk luar negeri.
- Kurangnya respon masyarakat terhadap produk UMK.

Solusi :

- Melakukan pelatihan kewirausahaan serta membangun kerjasama dalam pengembangan UMKM.
- Melakukan peningkatan mutu produk UMK.
- Memfasilitasi pemasaran produk-produk UMK melalui pameran, kemitraan, subcontracting dan lain-lain dalam rangka perluasan pemasaran.



Sasaran Strategis-4 :

Meningkatnya Meningkatnya partisipasi dan keperdulian masyarakat dalam pembangunan

Tabel 103. Capaian Sasaran Strategis 4

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan			
	<i>a. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa</i>	33 Kab/Kota		100
	<i>b. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan aset desa serta Kelurahan</i>	33 Kab/Kota		100
	<i>c. Cakupan Penerapan PNPM</i>	33 Kab/Kota		
	<i>d. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/Usaha Ekonomi Desa Simpan</i>	33 Kab/Kota		
	<i>e. Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran hasil Produksi Masyarakat Desa.</i>	33 Kab/Kota		
	<i>f. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Budaya Nusantara melalui pelestarian adat dan</i>	33 Kab/Kota		
	<i>g. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan</i>	33 Kab/Kota		
2.	Tingkat Pelayanan kepada wajib pajak			
	<i>1. Persentase kualitas pelayanan terhadap wajib pajak</i>	100 %		
	<i>2. Persentase pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak</i>	100 %		
	<i>3. Persentase kualitas kelembagaan yang telah dibentuk untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan PAD</i>	100 %		
	<i>4. Persentase tingkat pencapaian PAD per tahun</i>	100 %		

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
3.	Frekwensi pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	3	<i>Kali</i>	
4.	Frekwensi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka memperkuat NKRI	2	<i>Kali</i>	

➤ **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN**

Rekapitulasi data wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai berikut : Jumlah Desa = 5.281, Kelurahan = 664, Kecamatan = 436, Kabupaten/Kota = 33 (data bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 18 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013). Lembaga PKK = 5.436, LPM = 5.436, Posyandu = 5.794 dan Karang Taruna = 5.436.

Keberhasilan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2013, yaitu :

3. Pemberdayaan kecamatan tertinggal dengan kegiatan sosial, ekonomi, pertanian dan prasarana jalan.
4. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa agar maju dan mandiri.
5. Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa. Meningkatnya Ekonomi Lokal Masyarakat.
6. Meningkatnya pembangunan desa tertinggal.

Program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 :

A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Desa.
- 2) Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore Kader Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Penyertaan Provinsi Sumatera dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2013.
- 4) Rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat se Sumatera Utara dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi PMD.
- 5) Pembinaan dan penguatan peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 6) Pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur PMD kabupaten/kota tentang Penyusunan Peraturan Daerah terkait Desa dan Kelurahan.
- 7) Rapat koordinasi SKPD bidang pemberdayaan masyarakat (Klaster II).
- 8) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat melalui Orientasi Temu karya TP. PKK Desa Binaan PKK kabupaten/kota se Sumatera Utara menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke 41 tahun 2013.
- 9) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) se Sumatera Utara.
- 10) Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan.

- 11) Penilaian desa/kelurahan terbaik kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 12) Bimbingan teknis pemantapan tugas, pokok dan fungsi Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 13) Fasilitasi dan pembinaan Kepala Desa dan Lurah se Sumatera Utara.
- 14) Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 15) Pelatihan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) bagi Kasi PMD Kecamatan dan Sekretaris Desa.
- 16) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se Sumatera Utara.
- 17) Kegiatan pembangunan terpadu pada Desa Binaan Mandiri Terpadu (BANGDESMADU).

Permasalahan :

1. Dana yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan desa masih kurang memadai dan SDM pemerintah desa masih terbatas.
2. Belum semua kabupaten/kota membantuk Posyantek di tingkat kecamatan.
3. Kurangnya koordinasi antar SKPD Provsu dalam mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional.

4. Belum sinkronnya program dan kegiatan Bapemmas dan Pemdes Provsu dengan kabupaten/kota.
17. Kesiapan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan kegiatan HKG PKK tingkat kabupaten/kota kurang optimal.
18. Pemberian bantuan alat-alat TTG belum memadai.
19. Belum semua desa/kelurahan di Sumatera Utara mempunyai data profil desa/kelurahan (1.060 desa/kelurahan dari 6.105 desa/kelurahan).
20. Kurangnya dukungan beberapa kabupaten/kota dalam mengikuti perlombaan desa/kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
21. Kurangnya pemahaman Sekdes PNS dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
22. Kurangnya alat-alat gotong royong yang diberikan kepada masyarakat.
23. Kurangnya SDM aparatur bagi dan pengurus dalam pengelolaan LPMD.
24. Pemberian bantuan dari SKPD ke Desa Binaan kurang maksimal dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

Solusi :

- 1) Telah dilakukan pelatihan bagi Aparat Pemerintahan Desa sebanyak 50 Orang setiap Tahun.

- 2) Surat Kepala Bapemmas dan Pemdes Provsu tentang Permintaan Data Posyantek.
- 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, menyangkut jenis alat TTG yang akan diikutsertakan dalam tingkat Nasional.
- 4) Melakukan pertemuan sebelum Musrenbnag Provinsi dilaksanakan.
- 5) Membuat periode kepengurusan misalnya 5 tahun.
- 6) Pemberian alat-alat TTG bukan didasarkan pada harganya tapi dicari yang murah dan bermanfaat bagi masyarakat.
- 7) Pelaksanaan pendataan dan pelatihan POKJA dan Operator penyusunan profil desa/kelurahan sebanyak 200 orang/tahun.
- 8) Meningkatkan jumlah hadiah perlombaan desa/kelurahan untuk memotivasi desa/kelurahan berprestasi.
- 9) Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Sekdes PNS sebanyak 500 orang setiap tahunnya.
- 10) Pemberian alat-alat gotong royong sesuai kebutuhan masyarakat desa.
- 11) Pembentukan LPMD dan pelatihan pengurus LPMD 50 orang/tahun.
- 12) Koordinasi antar SKPD pemberi bantuan.

B. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pemberian dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (ADD).
- 2) Temu karya dan wisata karya Kepala Desa dan Lurah juara tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan :

- Juara desa/kelurahan terbaik tingkat nasional dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan masih sangat berbeda dengan desa/kelurahan terbaik tingkat Provsu dan kabupaten/kota.

Solusi :

- Melaksanakan studi banding ke desa/kelurahan terbaik tingkat nasional.

C. Program Pengembangan Ekonomi Lokal. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa melalui Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP)
- 2) Pelatihan perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif bagi kelompok UP2K PKK di desa percontohan 10 program pokok PKK.

- 3) Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif bagi kader PKK sepanjang jalan protokol menuju desa wisata.

Permasalahan :

- Belum berjalannya UED-SP sebagai usaha ekonomi desa dalam peningkatan pendapatan Masyarakat.
- Kurangnya pemahan kader PKK terhadap pengelolaan UP2K PKK Desa di desa percontohan 10 program pokok PKK.

Solusi :

- Pelatihan pengelolaan UED-SP dan pemberian bantuan stimulant.
- Pelatihan pengelola UP2K PKK dan pemberian bantuan stimulant.

D. Program Pengembangan Desa Tertinggal. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Bimtek Pasar Desa bagi Pengelola Pasar Desa.
- 2) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa melalui aplikasi Perencanaan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD)
- 3) Penilaian desa/kelurahan PT.P2WKSS terbaik kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 4) Pembinaan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD).

Permasalahan :

- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam penyusunan RPJMDes.
- Kurangnya peranan SKPD sebagai Dewan Pembina terhadap lokasi PT. P2WKSS.
- Kurangnya dukungan dana APBD untuk memberikan bantuan alat-alat gotong-royong dilokasi TNI-MMD.

Solusi :

- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait tentang pemberian bantuan.
- Pemberian bantuan alat-alat gotong royong disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang tersedia.

E. Program PNPM Pola PPK Melalui Kerjasama Antar Desa. Program ini

memuat kegiatan :

- 1) Rapat koordinasi dan pembinaan program pemberdayaan masyarakat perdesaan (PNPM-MPd).
- 2) Pelatihan UPK program pemberdayaan masyarakat (Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
- 3) Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Expo tingkat Nasional Tahun 2013.

- 4) Bimbingan teknis bagi Penanggungjawab Operasional Kecamatan (Pjo Kecamatan).
- 5) Peningkatan peran dan fungsi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LKMD/Lembaga Adat sesuai dengan Permendagri No.5 Tahun 2007 tentang Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat lainnya).
- 6) Bimbingan teknis bagi pengurus Pokjantal Posyandu.

Permasalahan :

- Penjadwalan rapat tidak sesuai dengan tahapan perencanaan.
- Kurangnya pemahan pengelola UPK terhadap proses dan alur PNPM-MPd.
- Kurangnya pemahan Penanggungjawab Operasional Kecamatan (Pjo Kecamatan) dalam pelaksanaan PNPM-Mpd, hal ini disebabkan seringnya mutasi PNS di Kecamatan.

Solusi :

- Koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam penjadwalan dan kegiatan.
- Pelatihan Pengelola UPK PNPM-MPd, sebanyak 100 orang pertahun.
- Pelatihan Pjo Kecamatan sebanyak 100 orang peserta pertahunnya.

➤ **BIDANG PELAYANAN PAJAK**

Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Tabel 104
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 - 2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	7.889.040.516.493,00	7.966.275.085.489,62	100,98
2013	9.125.861.056.699,00	7.625.027.273.017,79	83,69

Sumber : Dinas Pendapatan Provsu

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2013 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan daerah dari dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

A. Program Peningkatan Pendapatan Daerah. Program ini memuat kegiatan-kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan dan pengembangan kebijakan informasi dan komunikasi.
- 2) Rapat evaluasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain - lain.
- 3) Pengembangan sistem jaringan UPT.
- 4) Rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provsu.
- 5) Penyusunan dan penggandaan serta implementasi NJKB.
- 6) Pelaksanaan Samsat Keliling Provsu.
- 7) Peningkatan kapasitas kinerja Samsat se Sumatera Utara.
- 8) Rapat evaluasi PAD Provsu.
- 9) Penyuluhan pajak daerah di kabupaten/kota.
- 10) Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 11) Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza)
- 12) Rapat kerja terpadu Samsat Provsu.
- 13) Pelaksanaan Samsat Corner Sun Plaza.
- 14) Publikasi dan dokumentasi perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 15) Konsultasi dan konfirmasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta pendapatan lainnya.
- 16) Temu Pers di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

- 17) Sosialisasi peresmian Samsat Corner dan Samsat Gerai.
- 18) Penyusunan Perda Pajak Rokok.
- 19) Intensifikasi Penerimaan PKB/BBN-KB.
- 20) Intensifikasi Pajak Air Permukaan.
- 21) Pengoperasian Gerai Samsat.
- 22) Intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 23) Update Potensi Pajak Air Permukaan.
- 24) Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah Provsu.
- 25) Pemeriksaan intern atas pengelolaan administrasi keuangan, barang kuasi/berharga asset/inventaris kantor dan kinerja pelayanan pada UPT.
- 26) Penyusunan dan pembahasan draft Standar Pelayanan Publik.
- 27) Bimbingan Tekhnis Pengadministrasian dan Penatausahaan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Meningkatnya pendapatan daerah.

➤ **BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Salah satu Indikator keberhasilan Pembangunan Daerah adalah Partisipasi Sub Struktur Politik dalam pembangunan. Sub struktur politik dimaksud adalah hal ini peran serta LSM, Ormas maupun OKP dalam pembangunan. Pada tahun 2013 untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP terdapat 3 (tiga) kegiatan yakni :

1. Sambung rasa Gubernur Sumatera Utara dengan organisasi kemasyarakatan dalam membangun Sumatera Utara yang kondusif.
2. Kerjasama Pemprovsum dengan orkesmas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2009.
3. Verifikasi monitoring dan evaluasi penerima hibah APBD.

Adanya penambahan kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2013 ini menunjukkan perhatian Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara atas keberadaan sub struktur politik dimaksud, sehingga kerjasama pemerintah dengan masyarakat dapat lebih baik lagi. Khusus kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi penerima hibah anggarannya ditampung pada P.APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

Pada tahun 2012 ada terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Pembinaan dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sementara pada Tahun 2013 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ada 5 kegiatan yakni :

1. Pembinaan dan peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Media kerukunan umat beragama.
3. Rapat koordinasi daerah forum kerukunan umat beragama.
4. Rapat kerja forum kerukunan umat beragama.
5. Dialog peran gender lintas agama dalam mengantisipasi narkoba

Pada tahun 2012 untuk pembinaan wawasan kebangsaan ada terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Tingkat Sumatera Utara sementara pada tahun 2013 untuk pembinaan wawasan kebangsaan ada terdapat 8 (delapan) kegiatan yakni :

1. Pemantapan idiologi dan 4 pilar bangsa di jajaran Birokrat Pemprov.
2. Forum pemantapan wasbang tingkat Sumatera Utara.
3. Penguatan nilai-nilai 4 pilar bagi aparat Kesbangpol Provinsi, kabupaten/kota.
4. Rapat kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK Provsu).
5. Pembinaan dan peningkatan pembauran kebangsaan melalui pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan.
6. Rapat koordinasi daerah forum pembauran kebangsaan provinsi, kabupaten/kota se Sumatera Utara.
7. Media pembauran kebangsaan.
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan :

A. Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi & Informasi dan Hubungan Antar Lembaga. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Orientasi pengelolaan administrasi keuangan bagi partai politik se Sumatera Utara.
- 2) Tim verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 3) Sosialisasi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan sosialisasi undang – undang pemilu di Sumatera Utara.
- 4) Sosialisasi pemilih cerdas dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pilgubsu 2013.
- 5) Penguatan kelompok kerja penyusunan indeks demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Sambung rasa Gubernur Sumatera Utara dengan organisasi kemasyarakatan dalam membangun Sumatera Utara yang kondusif.
- 7) Kerja sama Pemprovsum dengan orkesmas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai Permendagri No. 44 Tahun 2009.
- 8) Verifikasi, monitoring dan evaluasi penerima hibah APBD.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Terlaksananya penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi dan hubungan antar lembaga.

B. Program Penguatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Program ini memuat kegiatan :

- 1) Pembinaan dan peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- 2) Media kerukunan umat beragama.
- 3) Rapat koordinasi daerah Forum Kerukunan Umat Beragama.
- 4) Rapat kerja Forum Kerukunan Umat Beragama.
- 5) Dialog peran gender lintas agama dalam mengantisipasi narkoba.
- 6) Pemantapan idiologi dan 4 pilar bangsa di jajaran Birokrat Pemprov.
- 7) Forum pemantapan wasbang tingkat Sumatera Utara.
- 8) Penguatan nilai – nilai 4 pilar bagi aparat Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota.
- 9) Rapat kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK Provsu).
- 10) Pembinaan dan peningkatan pembauran kebangsaan melalui pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan.
- 11) Rapat koordinasi daerah Forum Pembauran Kebangsaan provinsi, kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- 12) Media pembauran kebangsaan.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Terlaksananya penguatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional.

C. ASPEK KEUANGAN

C.1. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan

pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2013. APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 - 2013 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dan hasil indentifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi tahun 2013 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2013 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2013.

Dalam tahun anggaran 2013 penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

C.2. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom tingkat provinsi, pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Secara teknis operasional, pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur penatausahaan pendapatan daerah yang juga berpayung hukum kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan negara dan daerah.

Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang keuangan daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana otonomi khusus/dana insentif daerah, dana penyesuaian pendidikan, serta pendapatan lainnya.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2013 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan

mengoptimalkan pendapatan daerah dari dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak.

C.3. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya terus menerus melalui program kegiatan prioritas dan program rutin, antara lain :

- a. Pendataan ulang dan razia terpadu terhadap potensi pajak daerah (kendaraan bermotor – termasuk alat-alat berat/besar dan pajak air permukaan).
- b. Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pendefenitifan UPT/Samat pada setiap kabupaten/kota serta pengoperasian gerai SAMSAT.
- c. Pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB).
- d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

C.4. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 (tiga) sumber penerimaan yakni :

- 1) PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah, sebagai berikut :

Dari target Rp.5.525.657.845.610,- berhasil direalisasi sebesar Rp. 4.276.140.070.943,37,- (77,39 %), dengan perincian :

a. Pajak Daerah, dari total target Rp. 4.519.706.265.923,- direalisasi Rp. 3.685.437.787.973,- (81,54%). Penerimaan ini bersumber dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dari target Rp. 1.340.999.154.058,- direalisasi Rp. 1.322.318.068.189,- (98,61%).

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dari target Rp.2.133.207.111.865,- direalisasi Rp. 1.642.093.635.022,- (76,98%).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dari target Rp.962.500.000.000,- direalisasi Rp. 682.716.876.960,- (70,92%).

d) Pajak Air Permukaan, dari target Rp. 83.000.000.000,- direalisasi Rp.38.309.207.802,- (46,16%).

b. Retribusi Daerah, dari target Rp. 56.771.451.121,- direalisasi Rp.33.385.576.375,50 (58,81%), penerimaan ini bersumber dari :

a) Retribusi Jasa Umum, dari target Rp. 16.769.522.309,- direalisasi Rp.1.909.046.044,- (11,38%).

b) Retribusi Jasa Usaha, dari target Rp. 12.291.748.436,- direalisasi Rp.6.619.050.331.50,- (53,85%).

- c) Retribusi Perizinan Tertentu dari target Rp. 27.710.180.376,-
direalisasi Rp.24.857.480.000,- (89,71%)
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/Laba BUMD,
dari target Rp.305.173.490.912,- direalisasi Rp. 229.195.003.023,- -
(75,10%), penerimaan ini diperoleh dari :
- a) Perusahaan Daerah dari target Rp. 31.452.318.346,-
direalisasi Rp.16.759.197.293,- (53,28%).
- b) Lembaga Keuangan Milik Daerah dari target Rp.
273.721.172.566,- direalisasi Rp.212.435.805.730,- (77,61%).
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dari target Rp.
643.906.637.654,- direalisasi Rp. 328.121.703.571,87 (50,96%),
penerimaan ini bersumber dari :
- a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, dari
target Rp.166.503.600,- direalisasi sebesar Rp. 56.891.928,-
(34,17%).
- b) Jasa Giro Kas Daerah, dari target Rp. 35.560.200.000,-
direalisasi sebesar Rp.25.701.951.043,11,- (72,28%).
- c) Pendapatan Bunga, dari target Rp. 9.015.000.000,- direalisasi
nihil.
- d) Pendapatan Denda, dari target Rp. 173.919.915.260,-
direalisasi sebesar Rp.2.032.764.703,60 (1,17%).
- e) Pendapatan Denda Pajak, dari target Rp. 207.900.960.000,-
direalisasi sebesar Rp.51.623.536.904,- (24,83%);

- f) Pendapatan Dari Pengembalian, dari target Rp. 201.668.898.794,- direalisasi sebesar Rp. 229.172.371.255,16,- (113,64%).
- g) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari target Rp. 3.380.460.000,- direalisasi sebesar Rp. 11.640.417.638,- (344,34%).
- h) Pendapatan Dari Penyelenggaraan Diklat, dari target Rp. 12.294.700.000,- direalisasi sebesar Rp. 7.893.770.100,- (64,20%).
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan penjelasan sebagai berikut :
- Dana Perimbangan (DP), dari target Rp. 1.776.803.296.242,- direalisasi sebesar Rp.1.710.524.658.070,- (96,27%), penerimaan ini diperoleh dari:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak, dari target Rp. 469.695.931.522,- direalisasi Rp.424.159.496.842,- (90,31%)
- b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dari target Rp.10,564,030,720,- direalisasi Rp. 8.096.309.228,- (76,64%)
- c. Dana Alokasi Umum (DAU), dari target Rp. 1.223.445.404.000,- direalisasi Rp.1.223.445.404.000,- (100%).
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK), dari target Rp. 73.097.930.000,- direalisasi Rp.54.823.448.000,- (75%).

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dari target Rp. 1.808.772.323.800,- berhasil direalisasi sebesar Rp. 1.602.711.496.040,- (88,61%), dengan perincian :
- a. Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja, dari target Rp. 3.083.696.000,- direalisasi Rp.4.145.990.000,- (134,45%).
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3), dari target Rp. 75.000.000.000,- direalisasi Rp. 4.986.325.986,- (6,65%).
 - c. Dana Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah, dari target Rp. 19.360.721.000,- direalisasi Rp. 19.360.721.000,- (100%)
 - d. Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah, dari target Rp. 1.599.572.160.000,- direalisasi Rp. 1.521.886.613.500,- (95,14%)
 - e. *Annual Fee* PT Inalum, dari target Rp.111.755.746.000,- - direalisasi Rp.35.782.685.426,- (32,02%).
 - f. Dana Pendapatan Lainnya/Pengembalian Dana BOS dari Sekolah Penerima, dari target Nihil, realisasi Rp. 16.549.160.128,-.

4) Contra Pos

Dari target nihil terealisasi sebesar Rp. 3.374.604.348,80.

Pada tahun anggaran 2013, penerimaan dari sumber-sumber tersebut terus menerus mengalami peningkatan secara bervariasi. Meskipun peningkatannya kurang signifikan, namun secara kumulatif cukup positif menutupi belanja pemerintahan yang setiap

tahunnya terus meningkat. Walaupun relatif minim, konstelasi ini membuktikan bahwa sesungguhnya terjadi pertumbuhan di sektor perekonomian daerah yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembelanjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 7.625.027.273.017,79 (83,69%) dari target Rp. 9.125.861.056.699,-.

Rencana penerimaan (target) dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam bentuk sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.105
Target & Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2013

NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	14.727.591.047,00	276.443.615,62	
I	PAJAK DAERAH	4.519.806.265.923,00	3.685.437.787.973,00	81,54%
A	Pajak Kendaraan Bermotor	1.340.999.154.058,00	1.322.318.068.189,00	98,61%
B	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.133.207.111.865,00	1.642.093.635.022,00	76,98%
C	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	962.600.000.000,00	682.716.876.960,00	70,92%
D	Pajak Air Permukaan	83.000.000.000,00	38.309.207.802,00	46,16%
II	RETRIBUSI DAERAH	56.771.451.121,00	33.385.576.375,50	58,81%
A	Retribusi Jasa Umum	16.769.522.309,00	1.909.046.044,00	11,38%
B	Retribusi Jasa Usaha	12.291.748.436,00	6.619.050.331,50	53,85%
C	Retribusi Izin Tertentu	27.710.180.376,00	24.857.480.000,00	89,71%
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	305.173.490.912,00	229.195.003.023,00	75,10%
A	Perusahaan Daerah	31.452.318.346,00	16.759.197.293,00	53,28%
B	Lembaga Keuangan Milik Daerah	273.721.172.566,00	212.435.805.730,00	77,61%
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	643.906.637.654,00	328.121.703.571,87	50,96%
A	Hasil Penjualan Aset Daerah	166.503.600,00	56.891.928,00	34,17%
B	Jasa Giro Kas Daerah	35.560.200.000,00	25.701.951.043,11	72,28%
C	Pendapatan Bunga	9.015.000.000,00	-	0,00%
D	Pendapatan Denda	173.919.915.260,00	2.032.764.703,60	1,17%
E	Pendapatan Denda Pajak	207.900.960.000,00	51.623.536.904,00	24,83%
F	Pendapatan Dari Pengembalian	201.668.898.794,00	229.172.371.255,16	113,64%
G	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	3.380.460.000,00	11.640.417.638,00	344,34%
H	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Diklat	12.294.700.000,00	7.893.770.100,00	64,20%
	JUMLAH PAD	5.525.657.845.610,00	4.276.140.070.943,37	77,39%
V	DANA PERIMBANGAN	1.776.803.296.242,00	1.710.524.658.070,00	96,27%
A	Bagi Hasil Pajak	469.695.931.522,00	424.159.496.842,00	90,31%
B	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10.564.030.720,00	8.096.309.228,00	76,64%
C	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.223.445.404.000,00	1.223.445.404.000,00	100%
D	Dana Alokasi Khusus (DAK)	73.097.930.000,00	54.823.448.000,00	75,00%
VI	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.808.772.323.000,00	1.602.711.496.040,00	88,61%
A	Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja	3.083.696.000,00	4.145.990.000,00	134,45%
B	Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3)	75.000.000.000,00	4.986.325.986,00	6,65%
C	Dana Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah	19.360.721.000,00	19.360.721.000,00	100%
D	Dana Alokasi BOS	1.599.572.160.000,00	1.521.886.613.500,00	95,14%
E	Annual Fee PT Inalum	111.755.746.000,00	35.782.685.426,00	32,02%
F	Dana Pendapatan Lainnya/Pengembalian Dana BOS dari Sekolah Penerima	-	16.549.160.128,00	-
VII	CONTRA POST	-	35.374.604.348,80	-
	JUMLAH SELURUHNYA	9.125.861.056.699,00	7.625.027.273.017,79	83,69%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provsu

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan prinsip yang dimiliki oleh seluruh daerah otonom pada umumnya adalah terbatasnya dana dan kewenangan yang dimiliki. Khusus Provinsi Sumatera Utara, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sekaligus sebagai hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

a. Eksternal

Kategori eksternal ini adalah permasalahan/hambatan yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- 1) Terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Luasnya wilayah provinsi Sumatera Utara, topografi yang berbukitan dan areal daratan yang kurang lebih 50 persen dimanfaatkan untuk areal perkebunan (sawit, karet, kopi, dan sebagainya) menyulitkan kinerja para fiskus (petugas pajak).

- 3) Luasnya wilayah daratan yang pemanfaatannya untuk sektor perkebunan pada hakekatnya merupakan *potensial loss* bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena kontribusinya dari sektor ini tidak masuk dalam Kas Umum Daerah dikarenakan

tidak adanya kewenangan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaannya. Di lain pihak, keberadaan perkebunan ini pada satu sisi, akan menyulitkan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengembangan wilayah pembangunan sebagai konsekuensi dari perubahan sosial masyarakat (*social change society*).

- 4) Banyak penjual kendaraan bermotor sebagai wajib pajak yang tidak melaporkan transaksi jual beli kepada kantor SAMSAT setempat, sehingga sulit untuk menjaring BBN-KB II.
- 5) Adanya kebijakan dari pemerintah terkait uang muka pembelian kendaraan bermotor dengan skema kredit yaitu sebesar 30% yang mengakibatkan menurunnya tingkat pembelian kendaraan baru sehingga menyebabkan turunnya pendapatan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama (BBN-KB I).
- 6) Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang relatif masih rendah, sehingga masih memerlukan upaya-upaya khusus.
- 7) Mengenai pengelolaan PBB-KB masih sulitnya memperoleh data pendistribusian BBM pada SPBU di Kabupaten/kota, selain itu pihak Pertamina dalam menyampaikan data laporannya setiap bulan tidak merinci penggunaan BBM baik oleh umum maupun

industri, disamping itu laporan tersebut tidak disampaikan dengan data *Delivery Order* (DO).

8) Krisis global yang berpengaruh terhadap dunia usaha.

b. Internal

Kategori internal ini adalah permasalahan/hambatan yang berasal dari dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- 1) Kebijakan pemberian keringanan PKB/BBN-KB bagi Angkutan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah mengakibatkan menurunnya penerimaan PKB/BBN-KB. Terhadap hal ini maka upaya yang ditempuh, adalah memperketat pengalihan Nomor Polisi Plat Hitam menjadi Plat Kuning.
- 2) Jumlah berkas kendaraan bermotor yang diproses cenderung terpusat hanya di Samsat Medan Utara, sehingga telah melebihi kapasitas, terhadap hal ini, maka upaya yang ditempuh adalah pengalihan pemrosesan berkas kendaraan bermotor, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini di Medan Utara, dialihkan ke Samsat Medan Selatan, serta

mengoperasikan samsat gerai antara lain samsat gerai Tembung dan samsat gerai Delitua.

- 3) Kontribusi yang mendominasi struktur pajak daerah adalah pada sektor penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Pajak air permukaan dimana hasilnya juga dialokasikan sebagai penerimaan bagi hasil pajak kabupaten/kota.
- 4) Terhadap pajak air permukaan, masih ada beberapa wajib pajak perorangan/badan usaha yang belum melaksanakan kewajibannya tepat waktu sesuai SKPD yang diterbitkan, disamping itu terdapat perusahaan yang kurang memahami sebagai wajib pajak, terhadap hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menerus melakukan intensifikasi serta pengkajian dan penggalian potensi pajak air permukaan dan pajak lainnya.
- 5) Beberapa kantor Samsat/UPT di daerah kabupaten/kota kondisinya masih memprihatinkan dan belum layak sebagai tempat pelayanan publik, terhadap hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara bertahap akan membangun gedung kantor samsat/UPT sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan.

C.5. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua belanja dianggarkan secara bruto dan jumlahnya merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja

bersangkutan dan dilaksanakan melalui kas daerah. Belanja daerah dirinci menurut bidang pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Kelompok pembiayaan dirinci menurut jenis objek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Belanja daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung, meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

Didalam struktur APBD terdapat sisi pembiayaan yang fungsi pokoknya adalah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (surplus dan defisit anggaran). Di dalam pos pembiayaan terdapat pos pembiayaan penerimaan dan pos pengeluaran sehingga memungkinkan daerah investasi untuk menggunakan surplus anggaran.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, struktur APBD telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan. Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2013 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.9.025.417.688.998,- dimana sebesar Rp. 6.544.609.809.220,- atau 72,51 % untuk keperluan belanja tidak langsung dan sisanya 27,49 % atau Rp. 2.480.807.879.778,- untuk keperluan belanja langsung. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.544.609.809.220,- dialokasikan untuk keperluan :

- Belanja Pegawai Rp. 1.111.333.479.114,-

- Belanja Hibah Rp. 2.156.566.044.981,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 76.051.424.500,-
- Belanja Bagi Hasil Rp. 522.700.000.000,-
- Belanja Bantuan Keuangan Rp. 2.670.458.860.625,-
- Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,-

Belanja langsung sebesar Rp 2.480.807.879.778,- ditujukan untuk keperluan :

- Belanja Pegawai Rp. 170.090.620.230,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.461.320.060.664,-
- Belanja Modal Rp. 849.397.198.884,-

Sedangkan realisasi belanja diatas akan dilampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013, dimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila dilihat dari urusan pemerintahan dan organisasi maka belanja sebesar Rp. 9.025.417.688.998,- terbagi pada urusan wajib Rp. 8.596.166.222.275,- dan urusan pilihan Rp. 429.251.466.723,-.

Tabel 106
Alokasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2013

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	Dinas Pendidikan	47.506.168.505,-	190.786.322.916,-	238.292.491.421,-
2	Dinas Kesehatan	92.654.191.914,-	178.132.287.731,-	270.786.479.645,-
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	24.248.252.444,-	12.785.713.944,-	37.033.966.338,-
4	Rumah Sakit Haji	-	26.770.000.000,-	26.770.000.000,-
5	Dinas Bina Marga	59.716.895.248,-	731.541.871.000,-	791.258.766.248,-
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	72.277.283.969,-	101.407.098.456,-	173.684.382.425,-
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	41.617.780.676,-	154.857.682.000,-	196.475.462.676,-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.675.673.495,-	16.572.491.000,-	28.248.164.495,-
9	Dinas Perhubungan	66.571.693.255,-	14.277.589.800,-	80.849.283.055,-
10	Badan Lingkungan Hidup	12.013.275.555,-	16.642.568.273,-	28.655.843.828,-
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	43.188.487.138,-	66.329.345.000,-	109.517.832.138,-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.334.065.504,-	15.192.248.300,-	41.526.313.804,-
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.150.855.215,-	16.244.437.800,-	26.395.293.015,-
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	5.734.944.511,-	12.222.174.300,-	17.957.118.811,-
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.654.795.816,-	20.479.565.750,-	39.134.361.566,-
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8.983.511.470,-	10.748.790.300,-	19.732.301.770,-
17	Bakesbangpol dan Linmas	7.790.855.728,-	20.594.112.400,-	28.384.968.128,-
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	4.657.938.976,-	8.333.103.165,-	12.991.042.141,-
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.940.818.268,-	13.862.458.975,-	18.803.277.243,-
20	DPRD	38.671.307.950,-	-	38.671.307.950,-
21	KDH & WKDH	7.747.271.419,-	-	7.747.271.419,-
22	Sekretariat Daerah	5.517.961.149.127,-	175.896.314.317,-	5.693.857.463.444,-
23	Sekretariat DPRD	10.950.569.656,-	100.429.484.625,-	111.380.054.281,-
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.026.069.631,-	11.710.599.550,-	17.736.669.181,-
25	Inspektorat Provinsi	13.589.248.614,-	23.229.089.600,-	36.818.338.214,-
26	Kantor Perwakilan Jakarta	5.284.882.142,-	9.279.530.230,-	14.564.412.372,-
27	Dinas Pendapatan	116.323.566.859,-	148.782.940.000,-	265.106.506.859,-
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	13.225.948.291,-	21.810.294.033,-	35.036.242.324,-
29	Badan Kepegawaian Daerah	8.447.113.612,-	19.721.055.795,-	28.168.169.407,-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA		JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
30	Sekretariat KORPRI	2.165.048.226,-	7.041.340.000,-	9.206.388.226,-
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	5.649.051.140,-	14.172.161.800,-	19.821.212.940,-
32	Badan Ketahanan Pangan	9.924.688.188,-	11.969.405.679,-	21.894.093.867,-
33	Badan Koord. Penyuluhan	7.446.794.792,-	14.388.227.000,-	21.835.021.729,-
34	Bapemas dan Pemdes	7.592.914.411,-	14.232.711.000,-	21.825.625.411,-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.148.257.014,-	22.258.077.117	36.406.334.131,-
36	KPID Sumatera Utara	2.145.522.260,-	4.334.205.300,-	6.479.727.560,-
37	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	10.602.882.038,-	12.511.152.125,-	23.114.034.163,-
38	Dinas Pertanian	58.997.317.741,-	92.668.282.570,-	151.665.600.311,-
39	Dinas Perkebunan	17.029.918.730,-	28.767.088.793,-	45.797.007.523,-
40	Dinas Peternakan	10.218.764.609,-	23.559.350.878,-	33.778.115.487,-
41	Dinas Kehutanan	40.345.197.639,-	11.053.854.096,-	51.399.051.735,-
42	Dinas Pertambangan dan Energi	11.151.503.254,-	5.501.125.650,-	16.652.628.904,-
43	Dinas Perikanan Dan Kelautan	15.995.506.207,-	70.714.984.910,-	86.710.491.117
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.251.828.046,-	8.996.743.600,-	43.248.571.646,-
	Jumlah	6.544.609.809.220,-	2.480.807.879.779,-	9.025.417,688.998,-

Besaran berupa persentase jumlah realisasi belanja urusan wajib maupun urusan pilihan belum dapat dijelaskan dari uraian ini karena masih dalam proses perhitungan dan data untuk ini dapat diperoleh nantinya setelah hasil perhitungan disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Biro Keuangan dan selanjutnya diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan hasilnya akan disampaikan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan hasil audit tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013 yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD

Provinsi Sumatera Utara guna pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme ketentuan yang mengatur untuk itu.

Permasalahan :

- Terjadi perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga memerlukan waktu bagi SKPD untuk menerapkan dalam mekanisme pengelolaan keuangan.
- Masalah lainnya yang tetap muncul dalam penyusunan APBD adalah banyaknya usul yang diajukan sementara kemampuan dana yang tersedia terbatas.

Solusi :

- Upaya agar pengesahan Peraturan Daerah APBD dilakukan tepat waktu.
- Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi seluruh pengelola keuangan SKPD agar dapat meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi kegiatan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.
- Melakukan penentuan skala prioritas yang ketat dalam pengalokasian anggaran belanja mengingat sulitnya bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi berbagai usulan.

C.6. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, serta dimaksudkan untuk membiayai selisih kurang bila belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah atau memanfaatkan surplus pendapatan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber penerimaan pembiayaan daerah adalah :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Pinjaman Dalam Negeri.
5. Penerimaan Kembali Pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.
4. Pemberian Pinjaman.

Tahun anggaran 2013 posisi pembiayaan yang digunakan dalam APBD sebesar Rp. 85.715.776.654,- dengan rincian penerimaan yang berasal dari SiLPA sebesar Rp.14.727.591.047,- dan pengeluaran

pembiayaan sebesar Rp. 100.443.367.701,- yang dimanfaatkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,- serta pembayaran pokok utang Pemerintah Rp. 443.367.701,-.

Permasalahan :

- Permasalahan paling mendasar dalam perumusan belanja daerah tahun 2013 adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
- Adanya perubahan rencana yang menyangkut volume pekerjaan, standar harga dan lokasi sehingga harus ditempuh melalui perubahan APBD.

Solusi :

- SKPD pengelola PAD diharapkan lebih pro aktif dalam pengelolaan pendapatan yang dibebankan kepada SKPD yang bersangkutan.
- Dalam rangka peningkatan kinerja keuangan seharusnya tetap mengacu kepada pencapaian nilai manfaat dan efisiensi.
- Belanja daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara optimal dalam rangka memperkuat implementasi otonomi daerah.